



REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2010 - 2014



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KATA PENGANTAR

Rencana strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KESDM.

Informasi tentang keluaran/output maupun sumberdaya yang tercantum dalam dokumen rencana ini bersifat indikatif, yang akan berubah mengikuti perkembangan keadaan.

Visi KESDM di dalam Renstra ini merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh KESDM pada tahun 2014 melalui misi, dimana masing masing misi dilengkapi dengan tujuan dan sasaran strategis sebagai ukuran kinerja.

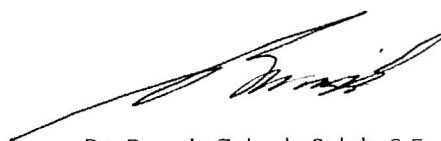
Dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, KESDM menyusun kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rencana pendanaan.

Selain bertanggung jawab di lingkup kewenangannya sendiri, KESDM juga melaksanakan prioritas, fokus prioritas dan kegiatan prioritas nasional sesuai dengan platform Presiden yang diamanahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 - 2014.

Diharapkan Renstra KESDM tahun 2010-2014 dapat menjadi acuan dalam perencanaan di seluruh unit lingkungan KESDM dan menjadi masukan bagi seluruh pemangku kepentingan sektor ESDM

Jakarta, 28 Januari 2010

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Dr. Darwin Zahedy Saleh, S.E., M.B.A.

DAFTAR ISI

Mu° 'h-V8° Vu° k°	...
) ° 7u° k°@@	...
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 KONDISI UMUM	1
I.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN	20
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN.....	34
II.1 VISI.....	34
II.2 MISI.....	34
II.3 TUJUAN STRATEGIS	35
II.4 SASARAN STRATEGIS	51
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	58
III. 1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL	58
A. BIDANG SARANA DAN PRASARANA.....	58
B. BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP.....	61
III.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN ESDM.....	69
A. KEBIJAKAN	69
B. STRATEGI	89
C. STRATEGI INVESTASI DAN PENDANAAN	100
D. PROGRAM KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.....	103
LAMPIRAN	
MATRIKS TARGET KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Hasil Pembangunan Ketenagalistrikan melalui Kegiatan Listrik Perdesaan
Tabel 1.2	Hasil kegiatan Pemboran Air di daerah sulit air
Tabel 1.3	Pengembangan Desa Mandiri Energi
Tabel 1.4	Perkembangan Pembangunan Ketenagalistrikan sampai Tahun 2009
Tabel 1.5	Perkembangan Kapasitas Terpasang Pembangkit Energi Alternatif
Tabel 1.6	Status Sumber Daya dan Cadangan Energi Panas Bumi (Desember 2009)
Tabel 1.7	Perkembangan Produksi BBN Tahun 2005 - 2009
Tabel 1.8	Produksi Mineral tahun 2004 – 2008 dan Rencana tahun 2009
Tabel 1.9	Penyerapan Tenaga Kerja Langsung Sektor ESDM
Tabel 1.10	Jumlah peserta diklat sektor ESDM berdasarkan asal peserta
Tabel 1.11	Jumlah peserta diklat sektor ESDM berdasarkan bidang diklat
Tabel 1.12	Cadangan dan Produksi Energi Indonesia (Status 2008)
Tabel 1.13	Cadangan dan Produksi Mineral Indonesia (Status 2008)
Tabel 3.1	Pentahapan Kewajiban Minimal Pemanfaatan Biodiesel
Tabel 3.2	Pentahapan Kewajiban Minimal Pemanfaatan Bioetanol
Tabel 3.3	Pentahapan Kewajiban Minimal Pemanfaatan Minyak Nabati Murni
Tabel 3.4	Rencana Investasi Sektor ESDM Tahun 2010 – 2014
Tabel 3.5	Rencana Sumber Pendanaan Pengembangan Sektor ESDM Tahun 2010 – 2014
Tabel 3.6	Kebutuhan Anggaran yang Bersumber dari APBN 2010-2014

DAFTAR GAMBAR

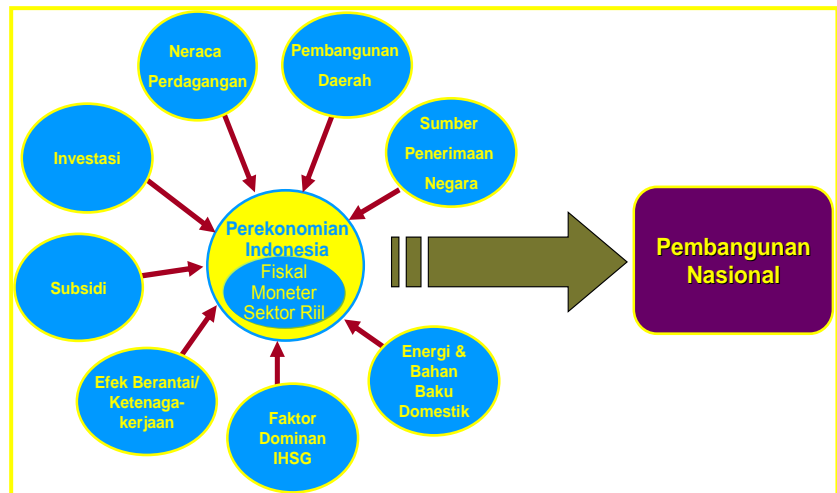
Gambar 1.1	Diagram Peran dan Kinerja Sektor ESDM
Gambar 1.2	Kontribusi Sektor ESDM dalam Penerimaan Nasional
Gambar 1.3	Kontribusi Sektor ESDM dalam Pembangunan Daerah
Gambar 1.4	Rencana Pembangunan Listrik Perdesaan per Provinsi tahun 2009
Gambar 1.5	Peningkatan Investasi Sektor ESDM Tahun 2004-2009
Gambar 1.6	Grafik Perkembangan Subsidi Energi
Gambar 1.7	Diagram Kebijakan dan Volume Subsidi BBM
Gambar 1.8	Perbandingan Harga Jual Listrik dengan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Listrik
Gambar 1.9	Neraca Minyak Mentah – BBM Tahun 2008
Gambar 1.10	Rencana Lokasi Pembangunan Infrastruktur Pencairan dan Gasifikasi Batubara
Gambar 1.11	Wilayah Pengembangan Panas Bumi sampai Tahun 2009
Gambar 1.12	Produksi dan Pemanfaatan Gas Bumi Tahun 2008
Gambar 1.13	Alokasi Gas Bumi untuk Domestik dan Ekspor
Gambar 1.14	Peran Sektor ESDM sebagai penggerak utama pembangunan
Gambar 1.15	Cadangan Gas Bumi dan CBM Indonesia (Status 2008)
Gambar 1.16	Cadangan Minyak Bumi Indonesia (Status 2008)
Gambar 1.17	Sasaran Bauran Energi Primer Nasional tahun 2025
Gambar 1.18	Intensitas energi dan konsumsi energi di dunia perkapita
Gambar 3.1	Diagram Kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral
Gambar 3.2	Cekungan Migas di Indonesia
Gambar 3.3	Cekungan Batubara dan CBM Indonesia
Gambar 3.4	Prediksi produksi Minyak Bumi Indonesia
Gambar 3.5	Program Diversifikasi Energi
Gambar 3.6	Jalur Cepat Pengembangan Bahan Bakar Nabati

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 KONDISI UMUM

Sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam mendukung perekonomian nasional, baik melalui sisi fiskal,



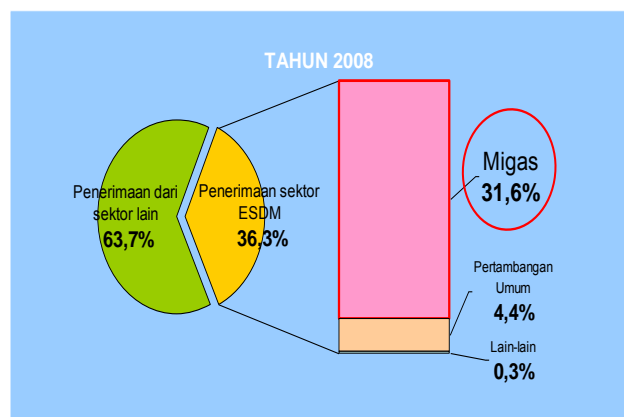
moneter maupun sektor riil.

Gambar 1.1. Diagram Peran dan Kinerja Sektor ESDM

Sekurang-kurangnya terdapat 8 peran penting sektor ESDM, antara lain sebagai sumber penerimaan negara, penggerak pembangunan daerah, neraca perdagangan, investasi, subsidi, penyediaan energi dan bahan baku domestik, kinerja perusahaan di sektor ESDM yang berpengaruh pada Indeks Harga Saham Gabungan (ISHG) dan kegiatan sektor ESDM yang menimbulkan efek berantai serta menciptakan lapangan kerja.

Sumber penerimaan negara

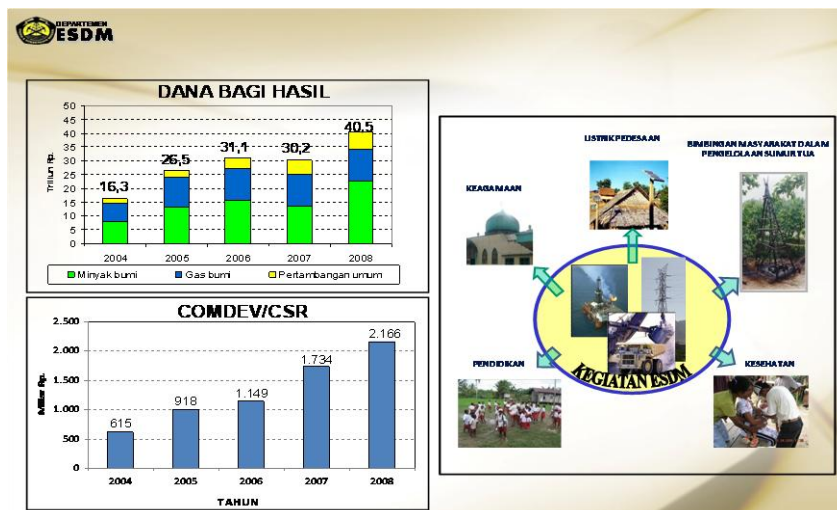
Sebagai sumber penerimaan negara, sektor ESDM tiap tahunnya memberikan kontribusi setidaknya 30% terhadap penerimaan nasional. Pada tahun 2008 tercatat sekitar Rp. 349,5 triliun atau 36,3% kontribusi sektor ESDM terhadap penerimaan



Gambar 1.2. Kontribusi Sektor ESDM dalam Penerimaan Nasional

nasional yang terdiri dari penerimaan migas Rp. 304,4 triliun (31,6%), pertambangan umum Rp. 42,7 triliun (4,4%) dan lain-lain Rp. 2,4 triliun (0,3%).

Penggerak Pembangunan Daerah



Gambar 1.3. Kontribusi Sektor ESDM dalam Pembangunan Daerah

Disamping sebagai kontributor penting terhadap penerimaan nasional, sektor ESDM juga turut mendukung pembangunan daerah, antara lain melalui dana bagi hasil (DBH), kegiatan *community development* (comdev)

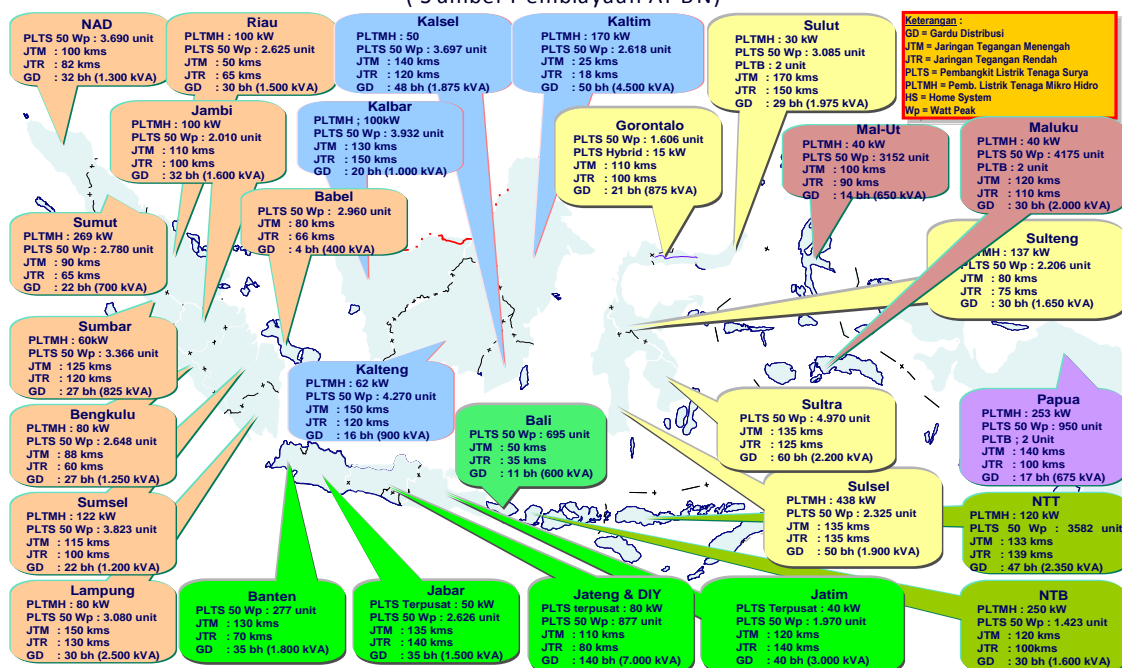
dan *corporate social responsibility* (CSR), listrik perdesaan, program Desa Mandiri Energi (DME) dan penyediaan air bersih (pemboran air tanah).

No	Jenis Pembangkit	Satuan	2005	2006	2007	2008
1	PLTMH	kW	314	714	269	1.909
2	PLTS	kWp	1.690	1.550	2.029	1.864
3	PLTS Terpusat	kWp	-	-	102	240
4	PLTB	kW	80	160	735	202
5	Gardu Distribusi	Unit/kVA	828/23.025	1.093/ 141.515	938/ 46.607	921/ 44.895
6	Jaringan Tegangan Menengah	kms	1.150	1.279	1.279	1.306
7	Jaringan Tegangan Rendah	kms	1.470	1.640	1.475	1.323

Tabel 1.1. Hasil Pembangunan Ketenagalistrikan melalui Kegiatan Listrik Perdesaan

Melalui program penyediaan listrik perdesaan telah dibangun pembangkit listrik dari energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) serta jaringan tegangan menengah dan jaringan tegangan rendah.

RENCANA PROGRAM LISTRIK PERDESAAN 2009 (Sumber Pembiayaan APBN)



Gambar 1.4. Rencana Pembangunan Listrik Perdesaan per Provinsi tahun 2009

Program penyediaan air bersih melalui pemboran air tanah juga merupakan program strategis sektor ESDM yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Program tersebut dilakukan tiap tahunnya melalui pendanaan APBN. Sejak tahun 1995 hingga sekarang setidaknya telah diperuntukkan bagi lebih dari satu juta jiwa.

No	Tahun Anggaran	Jumlah Lokasi	Jumlah Peruntukan
1	1995/1996	6	11.500
2	1996/1997	6	12.900
3	1997/1998	6	10.728
4	1998/1999	14	8.028
5	1999/2000	5	6.333
6	2000	3	3.776
7	2001	3	1.528
8	2002	2	7.000
9	2003	21	49.000
10	2004	30	79.900
11	2005	26	79.039
12	2006	60	78.943
13	2007	72	171.920
14	2008	154	367.718
15	2009	64	152.818
Total		472	1.041.131

Tabel 1.2. Hasil kegiatan Pemboran Air di daerah sulit air

Desa Mandiri Energi (DME) merupakan program nasional sebagai terobosan dalam mendukung diversifikasi energi dan penyediaan energi daerah. Program DME dimaksudkan untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi energi setempat. Program DME terdiri dari DME

Program	2007	2008	2009
Berbasis BBN (Unit)	127	138	486
Berbasis Energi Setempat Non BBN (Unit)	103	286	288
TOTAL	230	424	774

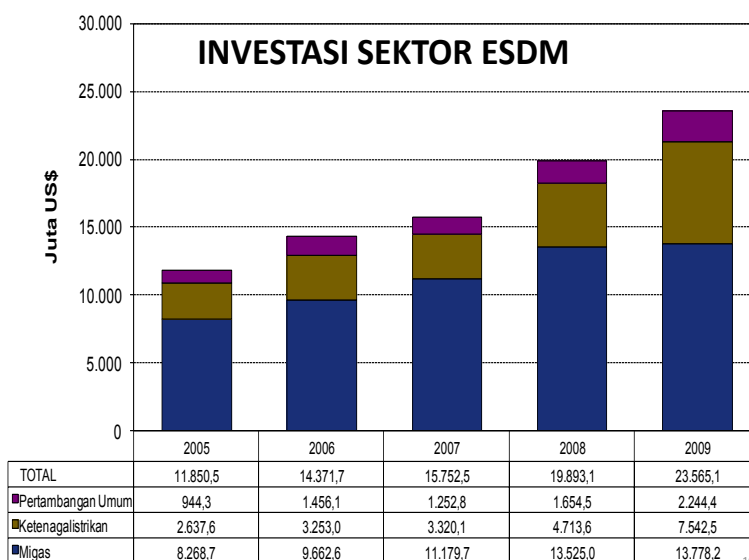
Tabel 1.3. Pengembangan Desa Mandiri Energi

berbasis Bahan Bakar Nabati (BBN) dan DME berbasis non-BBN. DME berbasis BBN antara lain berbasis jarak pagar, kelapa sawit, singkong shorgum, tebu, dan nyamplung. Sedangkan DME berbasis non-BBN antara lain berbasis mikrohidro, tenaga angin, tenaga surya dan biomassa. Sampai dengan tahun 2009 direncanakan terdapat 2000 DME, meliputi 1000 DME berbasis BBN dan 1000 DME berbasis non-BBN.

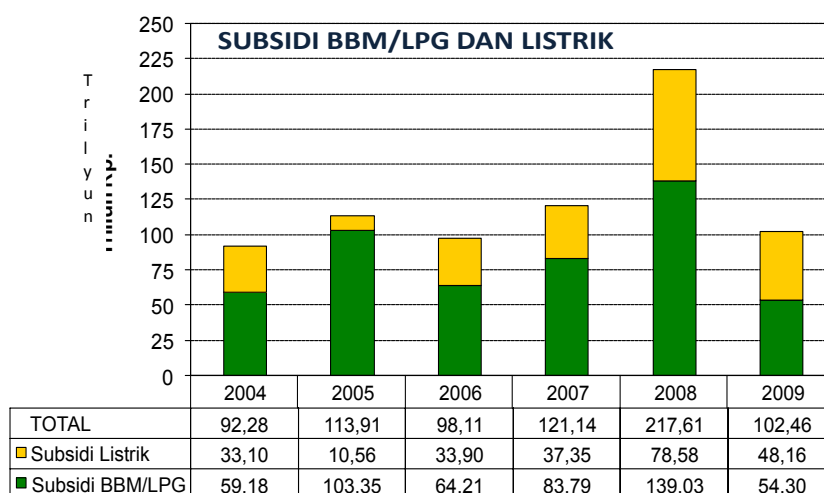
Investasi Sektor KESDM

Investasi sektor ESDM sejak tahun 2005 hingga 2008 terus meningkat sekitar 67% dari US\$ 11,9 miliar menjadi US\$ 19,9 miliar. Sumbangan terbesar investasi sektor ESDM, berasal dari investasi migas dengan porsi sekitar 70% tiap tahunnya.

Sedangkan untuk rencana tahun 2009, diperkirakan setidaknya US\$ 23 miliar investasi nasional berasal dari sektor ini. Dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2009 peningkatan investasi sektor ESDM lebih signifikan terjadi pada bidang ketenagalistrikan



Gambar 1.5. Peningkatan Investasi Sektor ESDM Tahun 2004-2009



Gambar 1.6. Grafik perkembangan subsidi energi

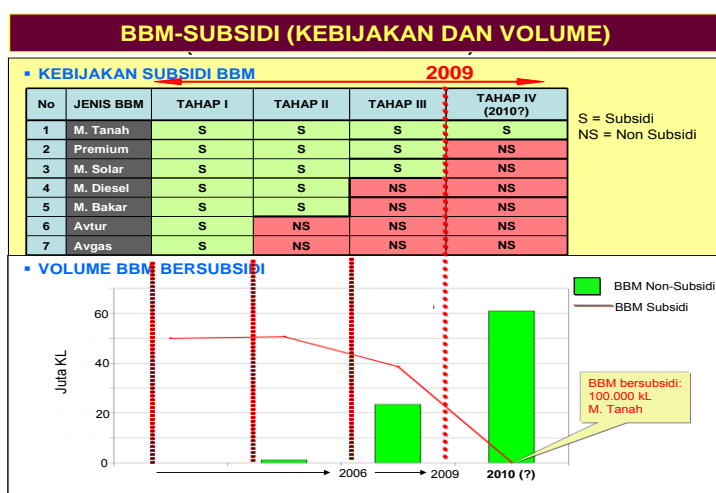
dan pertambangan umum, meskipun nilainya masih lebih rendah dari investasi migas.

Subsidi Energi

Subsidi energi yang terdiri dari subsidi untuk BBM/LPG dan listrik masih diterapkan dalam rangka mendukung daya beli masyarakat dan aktivitas perekonomian. Besarnya subsidi BBM/LPG bervariasi tiap tahunnya, tergantung dari konsumsi dan harga minyak. Adapun subsidi untuk LPG dimulai saat diterapkannya program konversi minyak tanah ke LPG tahun 2007. Pada tahun 2008 subsidi BBM/LPG mencapai Rp. 140 triliun, sedangkan subsidi listrik mencapai lebih dari Rp. 84 triliun. Besaran subsidi BBM dan listrik tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang

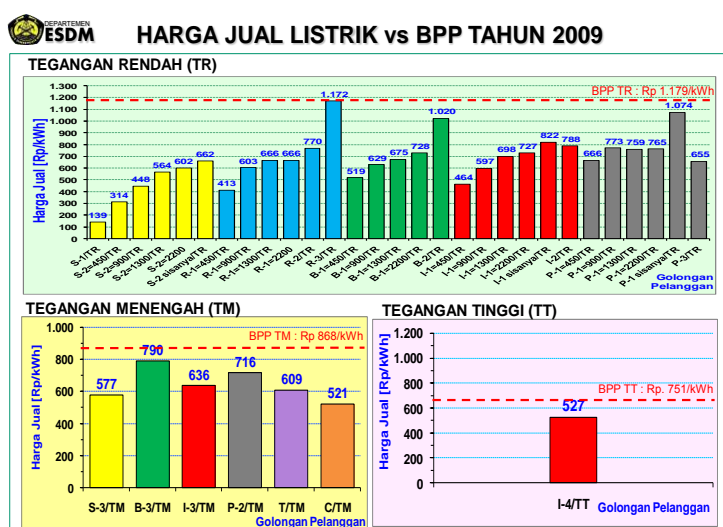
disebabkan antara lain oleh peningkatan drastis harga minyak dunia yang berpengaruh kepada besaran selisih harga BBM yang disubsidi.

Kebijakan subsidi BBM dilaksanakan secara bertahap, dimana saat ini jumlah dan jenis BBM yang



Gambar 1.7. Diagram Kebijakan dan Volume Subsidi BBM

disubsidi semakin sedikit yaitu minyak tanah, bensin, premium, dan solar.



Gambar 1.8. Perbandingan Harga Jual Listrik dengan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Listrik

Volume minyak tanah bersubsidi mulai dikurangi tiap tahunnya seiring dengan diterapkannya program konversi minyak tanah ke LPG. Khusus pengalihan minyak tanah ke LPG pada tahun 2008 telah terealisasi pengalihan minyak tanah sebesar 2, 069 juta KL. Diharapkan pada tahun 2009 sebesar 1,5 juta KL

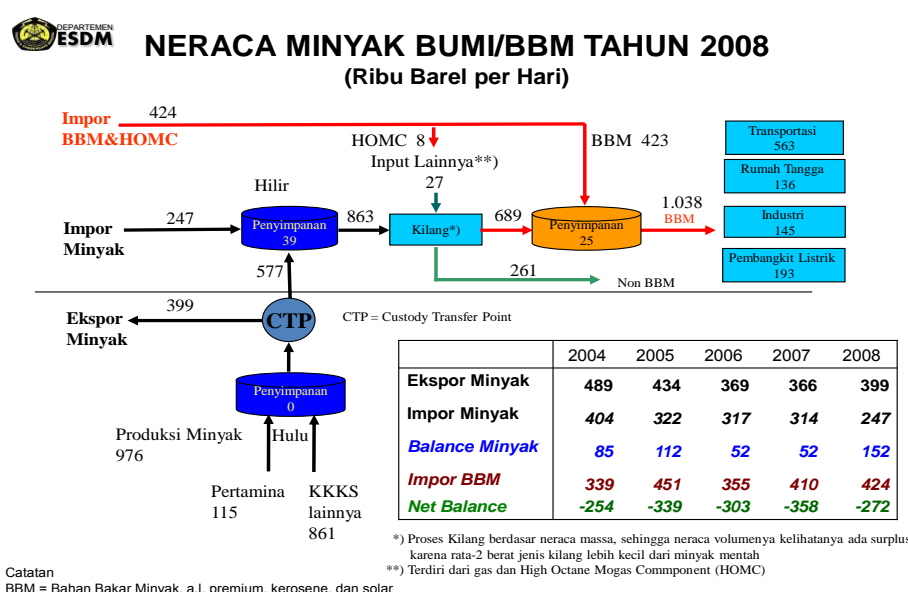
dan pada tahun 2010 sebesar 7,9 juta KL.

Selain itu, pengawasan peruntukan minyak tanah terus membaik dengan adanya kartu kendali minyak tanah. Adapun dalam rangka jaminan pasokan BBM, untuk wilayah yang telah dilakukan konversi minyak tanah ke LPG, minyak tanah tetap dijual dengan harga keekonomian.

Di sub sektor ketenagalistrikan, dilaksanakan pengelompokan pelanggan dimana untuk pelanggan kelompok Sosial (S-1 sampai dengan S-3), Rumah Tangga (R-1 dan R-2), Bisnis (B-1 sampai dengan B-3), Industri (I-1 sampai dengan I-4), Pemerintah (P-1 dan P-2), berlaku harga jual di bawah harga Biaya Pokok Produksi (BPP), artinya hampir seluruh pelanggan listrik masih mendapatkan subsidi.

Penyediaan energi dan bahan baku domestik

Dalam menjamin penyediaan energi domestik, telah dilakukan optimasi produksi energi fosil yaitu minyak bumi, gas bumi dan batubara. Produksi minyak bumi, sebagai energi tidak terbarukan, cenderung menurun tiap tahunnya. Mulai tahun 2007, produksi minyak berada di bawah level 1 juta barel per hari. Namun, dengan adanya temuan cadangan baru seperti Blok Cepu, dalam jangka pendek akan terjadi kenaikan pada produksi minyak Indonesia, meskipun akan menurun kembali karena *natural decline rate* yang cukup tinggi sekitar 12% per tahun.



Gambar 1.9. Neraca Minyak Mentah – BBM Tahun 2008

Sekitar 60% produksi minyak Indonesia dipasok untuk kebutuhan dalam negeri dan sisanya sebesar 40% untuk ekspor.

Sebesar 976 ribu bpd dari kebutuhan pasokan dipenuhi dari produksi dalam negeri, sementara jumlah konsumsi dalam negeri sebesar 1.038 ribu bpd, sehingga impor BBM tetap diperlukan untuk memenuhi total kebutuhan dalam negeri. Konsumsi dari minyak bumi terbesar berada pada sektor transportasi 56%, diikuti oleh pembangkit listrik sebesar 18%, industri 13,5% dan rumah tangga 12,5%.

Permintaan energi listrik meningkat tiap tahunnya dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 9% per tahun. Untuk memenuhi tingginya permintaan tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya antara lain pembangunan pembangkit listrik melalui program 10.000 MW tahap I, program 10.000 MW tahap II dan IPP (*Independent Power Producer*).

URAIAN	SATUAN	2005	2006	2007	2008	2009
1. Rasio Elektrifikasi	%	62,09	63,00	64,34	65,00	64,90
2. Jumlah Desa Berlistrik	desa	55.213	65.323	65.776	66.039	66,52
3. Jumlah KK Berlistrik	ribu	32.175	33.118	35.630	35.630	36.714,00
4. Kapasitas Terpasang	MW	26.091	28.422	29.562	30.480	33.430
a. PLN	MW	22.346	24.675	24.925	24.925	28.234
b. IPP *)	MW	3.222	3.222	3.984	4.044	4.276
c. PPU **)	MW	523	526	493	912	920
5. Produksi Listrik						
a. Produksi PLN	GWh	100.218	103.907	110.696	117.032	122.578,10
b. Produksi IPP	GWh	25.567	27.888	29.716	30.904	34.378,97
c. Produksi PPU	GWh	1.585	923	2.628	1.500	-
c. Total Produksi	GWh	127.370	132.718	143.040	149.436	156.957,07

Keterangan :
 *) IPP : *Independent Power Producer*
 **) PPU: *Private Power Utility*

Tabel 1.4. Perkembangan Pembangunan Ketenagalistrikan sampai Tahun 2009

Rasio elektrifikasi tahun 2008 sebesar 65% dan pada tahun 2009 menjadi sebesar 64,9%. Penurunan rasio elektrifikasi disebabkan oleh tingkat pertumbuhan rumah tangga jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan jaringan listrik rumah tangga. Rasio tersebut sudah memperhitungkan rencana operasi pembangkit-pembangkit baru dari program percepatan 10.000 MW tahap I yaitu PLTU Banten (Labuan), dan PLTU Rembang. Kapasitas pembangkit listrik nasional pada akhir tahun 2008 sekitar 30 ribu MW dan direncanakan akan meningkat menjadi 33 ribu MW pada akhir tahun 2009. Selain

pembangunan pembangkit listrik, pemenuhan pasokan energi listrik domestik juga dilakukan dengan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi domestik, Pemerintah juga memprioritaskan program diversifikasi energi, khususnya pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan energi alternatif non-BBM lainnya, antara lain pencairan dan gasifikasi batubara.

Pencairan dan gasifikasi batubara menjadi salah satu alternatif energi yang menjanjikan,



Gambar 1.10. Rencana Lokasi Pembangunan Infrastruktur Pencairan dan Gasifikasi Batubara

mengingat besarnya potensi cadangan batubara. Saat ini, *prefeasibility study on coal liquefaction* telah dilakukan di tiga lokasi, yaitu Mulia, Berau, dan Banko. Daerah lain yang potensial adalah Musi Banyuasin. Saat ini, telah dibangun *pilot project*

gasifikasi batubara di daerah Cikampek, Jawa Barat dan Berau, Kalimantan Timur. Diharapkan proyek-proyek tersebut dapat menjadi awal suksesnya pengembangan energi sintetis tersebut.

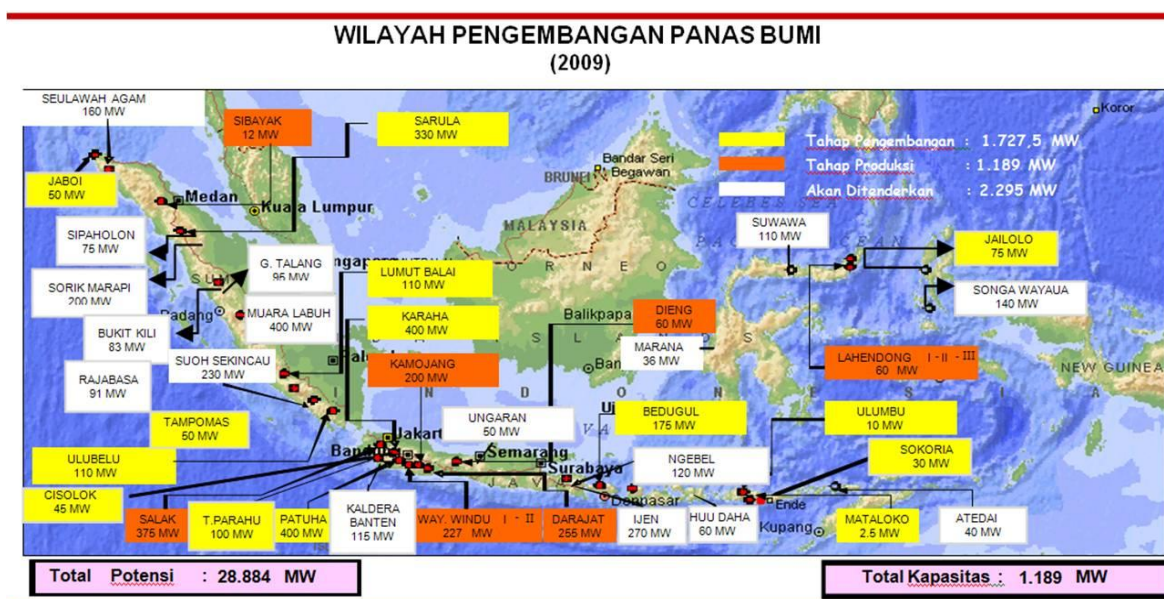
Pembangkit listrik EBT yang terdiri dari PLTP, PLTS, PLTB, PLTMH & Pikohidro dan PLTS Hybrid Surya dan Angin kapasitas terpasangnya meningkat setiap tahun. Pada tahun 2005, kapasitas terpasang pembangkit EBT sekitar 854 MW dan meningkat

URAIAN	SATUAN	2005	2006	2007	2008	2009
Panas Bumi	KW	852.000	852.000	982.000	1.052.000	1.179.000
PLTS	KW	1.692	3.242	5.373	7.477	11.349
PLTB	KW	80	240	976	1.177	2.354
PLTMH & Pikohidro	KW	314	1.028	1.297	3.206	4.544
PLTS Hybrid & Angin	KW	-	-	-	-	252,0
TOTAL	KW	854.086	856.510	989.646	1.063.860	1.197.499

Tabel 1.5 Perkembangan Kapasitas Terpasang Pembangkit Energi Alternatif

menjadi sekitar 1.064 MW pada tahun 2008. Pada tahun 2009, kapasitas terpasang EBT direncanakan menjadi sebesar 1.210 MW. Pertambahan kapasitas terpasang EBT,

utamanya diharapkan dari panas bumi yang kapasitas terpasangnya direncanakan sebesar 1.192 MW.



Gambar 1.11 Wilayah Pengembangan Panas Bumi sampai Tahun 2009

Pada tahun 2008, Kapasitas terpasang panas bumi sebesar 1.052 MW. Selanjutnya berdasarkan hasil penyelidikan tahun 2009 (status sampai dengan Desember 2009) telah ditemukan penambahan 8 lokasi daerah panas bumi di Maluku, Papua Barat dan Sulawesi Barat dan 2 peningkatan status sumber daya dengan total penambahan potensi 460 Mwe. Selain itu juga telah terjadi penambahan kapasitas panas bumi sebesar 137 Mwe dari PLTP Lahendong III (20 Mwe) dan PLTP Wayang Windu II (117 MW), sehingga status potensi panas bumi Tahun 2009, yaitu: 28.884 Mwe, daerah/lapangan panas bumi sebanyak 265 lokasi, kapasitas terpasang 1189 MWe (gambar 1.11 dan Tabel 1.6).

Pulau	Sumber Daya		Cadangan			Terpasang (MWe)
	Spekulatif (MWe)	Hipotetis (MWe)	Terduga (MWe)	Mungkin (MWe)	Terbukti (MWe)	
Sumatera	4975	2261	5995	15	380	12
Jawa	1960	1946	3415	885	1815	1117
Bali	70	-	226	-	-	-
Nusa Tenggara	340	359	747	-	15	-
Kalimantan	45	-	-	-	-	-
Sulawesi	1025	125	1009	150	78	60
Maluku	595	37	341	-	-	-
Papua	75	-	-	-	-	-
Total 265 Lokasi	9085	4728	11733	1050	2288	1189
	13813		15071			
	28884					

Tabel 1.6 Status Sumber daya dan Cadangan Energi panas Bumi (Desember 2009)

Namun kapasitas terpasang tersebut masih sekitar 4 % dari total potensi panas bumi Indonesia yang sebesar 28,8 ribu MW dan merupakan potensi panas bumi terbesar di dunia.

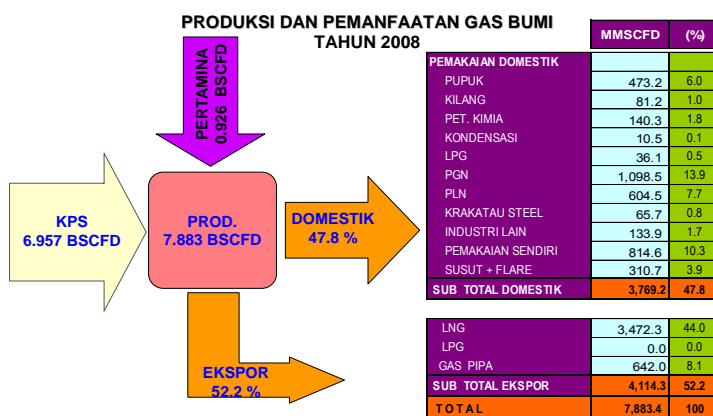
Saat ini, pengembangan panas bumi Indonesia menjadi semakin intensif, khususnya di saat dunia mulai fokus pada masalah lingkungan. Hal

KAPASITAS DAN PRODUKSI ENERGI ALTERNATIF						
URAIAN	SATUAN	2005	2006	2007	2008	2009
						Rencana
- Bio diesel	Ribu KL	120,0	456,6	1.550,0	2.329,1	2.521,5
- Bio etanol	Ribu KL	2,5	12,5	135,0	192,4	212,5
- Bio oil	Ribu KL		2,4	37,2	37,2	40,0
Total Biofuel	Ribu KL	122,5	471,5	1.722,2	2.558,7	2.774,0

Tabel 1.7. Perkembangan Produksi BBN Tahun 2005 - 2009

tersebut juga dapat terlihat dengan besarnya porsi pembangkit panas bumi pada program 10.000 MW tahap II yaitu sebesar 34%.

Dengan diluncurkannya program pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN) dari tahun 2005 sebesar 122,5 ribu KL menjadi 2.558,7 ribu KL pada tahun 2008. Kapasitas produksi BBN terbesar adalah bio-diesel sebesar 2.329,1 ribu KL, disamping bio-etanol sebesar 192,4 ribu KL dan bio-oil sebesar 37,2 ribu KL. Untuk tahun 2009, rencana kapasitas produksi BBN menjadi sebesar 2.774 ribu KL, terdiri dari bio-diesel sebesar 2.521,5 ribu KL, bio-etanol sebesar 212,5 ribu KL dan bio-oil sebesar 40 ribu KL.



Gambar 1.12 Produksi dan Pemanfaatan Gas Bumi Tahun 2008

Terkait pasokan bahan baku domestik, sektor ESDM memberikan kontribusi utamanya pada pasokan gas dan bahan mineral. Pemakaian gas domestik dimanfaatkan untuk industri pupuk, kilang petrokimia, kondensasi, LPG, PGN, PLN, Krakatau steel, industri lainnya. Total produksi gas tahun 2008 sebesar 7.883 MMSCFD, dengan pasokan berasal dari perusahaan-perusahaan migas (KKKS/Kontraktor Kontrak Kerja Sama) yaitu

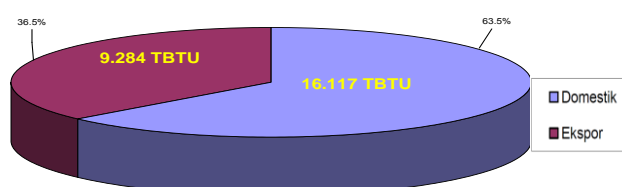
Pertamina 0,926 MMSCFD dan KKKS lainnya 6.957 MMSFCD.

Adapun porsi pemanfaatan gas untuk domestik dan ekspor yaitu domestik 47,8% dan ekspor 52,2%.

Untuk pasokan domestik, mayoritas pemanfaatan gas digunakan oleh PGN yaitu sebesar

13,9%. Sedangkan untuk ekspor mayoritas dimanfaatkan untuk LNG yaitu sebesar 44%.

**ALOKASI GAS BUMI UNTUK DOMESTIK DAN EKSPOR
BERDASARKAN PERJANJIAN JUAL BELI GAS BUMI (PJBG)
(2002 – 2008)**



Gambar 1.13. Alokasi Gas Bumi untuk Domestik dan Ekspor

Terkait dengan gas bumi untuk domestik, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) tahun 2002 – 2008 pasca diterbitkan UU Migas Nomor 22 tahun 2001, alokasi gas bumi domestik mencapai 63,5%, sedangkan alokasi gas bumi ekspor sebesar 36,5%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tataran kebijakan dan perencanaan, upaya pengutamaan pasokan gas bumi domestik sudah berjalan sangat baik. Meskipun saat ini kebijakan alokasi gas untuk domestik sudah diprioritaskan, namun ekspor gas juga tetap diperlukan untuk mencapai skala keekonomian dari suatu lapangan gas bumi, mengingat harga gas bumi domestik pada umumnya lebih rendah dibandingkan untuk ekspor.

No	Komoditi	Unit	Realisasi					Rencana
			2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Kons. Tembaga	ton	2,810,333	3,553,808	2,938,009	2,814,952	2,397,899	3,178,018
2	Logam Tembaga	ton	840,318	1,063,849	817,796	797,605	655,058	868,171
3	Emas	kg	92,936	143,298	85,411	117,727	64,376	105,404
4	Perak	kg	262,935	323,423	261,398	269,376	226,051	232,064
5	Logam Timah	ton	60,698	67,600	65,357	91,284	72,017	105,000
6	Bauksit	mt	1,330,827	1,441,899	1,500,339	15,406,045	9,885,547	10,083,258
7	Bijih Besi	mt	69,991	62,562	240,344	1,894,758	4,503,142	4,044,348
8	Bijih Nikel	ton	4,095,478	4,080,800	4,353,832	6,623,024	10,634,452	10,847,141
9	Ni + Co in matte	ton	73,283	77,471	72,780	77,928	73,356	63,548
10	Nikel dalam feronikel	mt	7,945	7,338	14,474	18,532	17,566	17,917
11	Intan	crt	2,504	21,606	46,856	22,981	27,688	N.a
12	Granit	m3	3,637,441	4,302,849	5,217,807	1,875,526	1,950,494	1,989,504

Catatan :

- untuk komoditi tembaga, emas, perak dan Ni+Co in matte, rencana produksi berdasarkan laporan RKAB 2009
- untuk logam timah, rencana produksi berdasarkan kuota ekspor/produksi yang sudah ditetapkan untuk tahun 2009 sebesar 105.000 ton dan akan dievaluasi setiap tahun.
- untuk intan, tidak ada produksi tahun 2009 (PT. Galuh Cempaka), sedangkan rencana 2010 - 2013 berdasarkan laporan RKAB 2008.
- bijih nikel, feronikel dan bauksit, asumsi kenaikan produksi sebesar 2% per tahun dari realisasi produksi tahun 2008, karena harga yang rendah

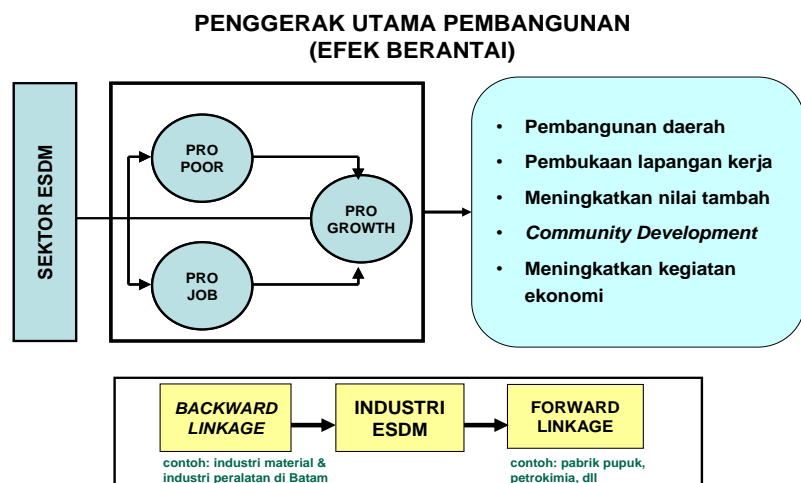
Tabel 1.8. Produksi Mineral tahun 2004 – 2008 dan Rencana tahun 2009

Disamping gas bumi, bahan mineral juga berperan penting sebagai pemasok bahan baku industri. Bahan mineral tersebut antara lain tembaga, emas, perak, bauksit, nikel, granit, intan dan besi. Produksi mineral dapat dilihat pada tabel 1.8.

Pengelolaan pertambangan dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah sesuai UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan PP 75 tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, yang mengatur bahwa Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan izin Kuasa Pertambangan (KP) sesuai dengan kewenangannya. Bila wilayah tambang yang bersangkutan masih dalam satu wilayah kabupaten/kota, maka ijin diterbitkan oleh Bupati/Walikota, untuk wilayah yang meliputi lebih dari satu kabupaten/kota maka ijin diterbitkan oleh Gubernur, sedangkan untuk wilayah yang meliputi lebih dari satu provinsi maka ijin KP dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Selama periode 2001 s.d. 2008 terjadi peningkatan jumlah KP di daerah, khususnya di kabupaten dan kota yang memiliki potensi pertambangan. Sejak otonomi daerah, tercatat 4.324 izin KP yang diterbitkan oleh Pemda terdiri dari : KP Penyelidikan Umum 740 izin, KP Eksplorasi 2.271 izin dan KP Eksploitasi 1.313 izin. Dalam rangka penataan ijin ini, Pemerintah Pusat terus melakukan koordinasi dan kerjasama, diantaranya dengan Pemerintah Daerah setempat serta BPK, Ditjen Pajak dan instansi terkait lainnya, guna meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap KP-KP tersebut. Dengan demikian, maka optimalisasi pengelolaan K3, lingkungan hidup, tenaga kerja serta peningkatan penerimaan negara dapat dilaksanakan.

IHSG dan *Multiplier Effect*

Peran sektor ESDM dalam perekonomian nasional juga dapat terlihat dari dominasi pergerakan saham perusahaan tambang (*mining*) di Bursa Efek Indonesia meskipun tidak



Gambar 1.14. Peran Sektor ESDM sebagai penggerak utama pembangunan

secara langsung. Selain *agriculture*, harga saham komoditas pertambangan relatif baik sehingga turut mendorong IHSI, utamanya pada akhir tahun 2008 yang lalu.

Sektor ESDM turut berkontribusi sebagai penggerak utama pembangunan melalui efek berantai. Disamping pembangunan daerah dan *Community Development*, efek berantai tersebut

PENYERAPAN TENAGA KERJA LANGSUNG*)						
No	Perusahaan	2005	2006	2007	2008	2009
1	Perusahaan Pertambangan Umum	47.662	121.121	112.928	120.639**)	40.683
2	Perusahaan Migas	345.026	337.062	335.039	332.317	315.793
3	Perusahaan Listrik & Energi Terbarukan	263.000	575.000	1.287.000	1.300.000	1.376.000
	Total	655.688	1.033.183	1.734.967	1.752.956	1.732.476

catatan:

*) Tenaga Kerja langsung adalah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam kegiatan Sektor ESDM

**) Tidak termasuk tenaga kerja tidak langsung yaitu tenaga kerja nasional pada perusahaan jasa subsektor mineral dan batubara tahun 2007 sejumlah 44.866 orang dan triwulan III 2008 sejumlah 31.165 orang

dapat terlihat dari

Tabel 1.9. Penyerapan Tenaga Kerja Langsung Sektor ESDM

kegiatan pembukaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah dan peningkatan kegiatan ekonomi.

Sektor ESDM memberikan dampak *backward linkage* dan *forward linkage*. Adanya industri ESDM memberikan *backward linkage* yaitu terciptanya industri yang mendukung kegiatan industri ESDM. Industri tersebut antara lain industri material dan industri peralatan di berbagai daerah seperti pabrikasi pipa, platform, alat-alat berat dan lain-lain. Selain itu, industri ESDM juga memberikan *forward linkage* yang artinya dengan adanya industri ESDM maka tercipta industri lain seperti pabrik pupuk, petrokimia, dan industri lainnya.

Sektor ESDM, meskipun merupakan industri yang bersifat *capital intensive* bukan *labour intensive*, telah mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja langsung sebesar 167% dari tahun 2005 yaitu dari 655 ribu tenaga kerja menjadi 1,75 juta tenaga kerja pada tahun 2008. Penyerapan tenaga kerja langsung mengalami penurunan menjadi sekitar 1,73 juta tenaga kerja, akibat dampak resesi global pada tahun 2009.

Pencapaian Signifikan lainnya

Pencapaian lain selama periode 2005 – 2009 antara lain :

1. Peraturan dan Perundang-undangan.

Telah terbitnya berbagai Undang-undang di sub sektor migas, ketenagalistrikan, mineral batubara dan panas bumi

a. Sub sektor minyak dan gas bumi

Berdasarkan UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah diterbitkan berbagai peraturan pelaksanaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan migas antara lain :

- 1) **Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002** tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 2) **Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2002** tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
- 3) **Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2003** tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- 4) **Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004** tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 5) **Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004** tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas
- 6) **Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2005** tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- 7) **Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2006** tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
- 8) **Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2009** tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
- 9) **Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2009** tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Di samping diterbitkannya 9 Peraturan Pemerintah di sub sektor migas, juga diterbitkan berbagai Peraturan Presiden/Keputusan Presiden/Instruksi Presiden serta berbagai Peraturan Menteri ESDM.

b. Sub sektor ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi

Telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dengan terbitnya kedua Undang-Undang tersebut di atas diperlukan peraturan pelaksanaannya, yang saat ini sedang dipersiapkan.

c. Sub sektor mineral, batubara dan panas bumi

1) Mineral dan Batubara

Ditetapkannya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang merupakan regulasi pengelolaan pertambangan yang disesuaikan dengan perubahan perkembangan nasional terkini dalam pengelolaan pertambangan, di antaranya : memasukkan prinsip otonomi daerah, kepentingan nasional, perhatian pada lingkungan hidup, memperhatikan hak azasi manusia, peningkatan nilai tambah pertambangan, dan pembangunan yang berkelanjutan. UU Minerba ini menggantikan UU No 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Sebagai amanat UU Minerba, saat ini sedang dilakukan pembahasan antar Kementerian mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Minerba yang terdiri dari 4 RPP yaitu : RPP Wilayah Pertambangan, RPP Kegiatan Usaha Pertambangan, RPP Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan, dan RPP Reklamasi dan Pasca Tambang, yang diharapkan pembahasan RPP ini dapat diselesaikan pada tahun 2009.

2) Panas Bumi

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, telah diterbitkan berbagai peraturan pelaksanaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan panas bumi maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi.

2. Bidang penelitian dan pengembangan

Telah dilaksanakan penelitian unggulan antara lain :

- 1) **Evaluasi lahan migas:** evaluasi lahan migas di cekungan Halmahera; Evaluasi Prospek dan Lead serta Play Konsep Lapangan Ogn, Cekungan Sumatera Selatan; evaluasi lahan cekungan di daerah Sahul; kuantifikasi sumber daya hidrokarbon Indonesia.
- 2) **Produksi migas:** inventarisasi cadangan dan produksi migas Indonesia per daerah penghasil, studi penentuan rancangan fluida injeksi surfaktan untuk implementasi teknologi pengurusan minyak tahap lanjut; kajian laboratorium dan studi permodelan simulasi injeksi CO₂ pada *depleted reservoir* untuk meningkatkan perolehan minyak; kajian injeksi surfaktan untuk peningkatan perolehan minyak; kajian laboratorium dan simulasi *reservoir* pendesakan minyak dengan injeksi kimia.
- 3) **Energi alternatif :**
 - (a) Gas Metana Batubara (Coal Bed Methane-CBM) : proses uji coba (*dewatering*) lanjutan untuk menghasilkan gas metana dari 5 buah sumur di lapangan Rambutan, Provinsi Sumatera Selatan telah selesai dibor dan menghasilkan gas;
 - (b) Bahan bakar nabati : *pilot plant* biodiesel kapasitas produksi 8 – 10 ton/hari dan implementasi pengembangan pada industri berupa *Pilot Plant* Biodiesel di Rokan Hulu, Provinsi Riau; yang merupakan bahan bakar setara solar dengan teknologi MO-z sebagai bahan bakar mesin diesel;
- 4) **Bahan bakar gas:** kajian rancangan sistem *mobile flare gas recovery* dengan kapasitas 1 – 10 MMSCFD; penelitian kelayakan tangki hidrat gas untuk pengangkutan gas bumi; dan penelitian pembuatan *prototype* tangki gas hidrat untuk distribusi gas bumi.

Adapun Penelitian-penelitian lainnya:

a. Penelitian dan pengembangan ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan

- 1) **Mikrohidro:** Studi Kelayakan PLTMH di 13 lokasi, Pembangunan 3 PLTMH, dan kajian keekonomian mikrohidro.

- 2) **Panasbumi:** pemanfaatan langsung energi panas bumi untuk proses pengolahan produk pertanian dan perkebunan; simulasi reservoir panasbumi PT. Pertamina dan PT. Amoseas; serta kajian pemanfaatan fluida sumur lapangan panasbumi Mataloko.
- 3) **Biomassa/Biogas:** *pilot plant* gasifikasi biomassa untuk pembakaran keramik; pemanfaatan algae sebagai bahan baku biodiesel; percontohan tiga jenis teknologi biogas; demoplant biogas dari limbah tapioka.
- 4) **Energi Angin:** analisis potensi angin pada daerah-daerah yang prospektif secara ekonomi dan teknis pada ketinggian 30-50 m (3 lokasi); pembangunan PLT Angin 2,5 KW; pembuatan bilah turbin untuk sistem PLT Angin 100 KW, perancangan generator induksi, perancangan *hub*, *shaft*, dan *gearbox* untuk sistem PLT Angin kapasitas 100 KW.
- 5) **Sel Tunam (*Fuel cell*):** pembuatan *stacking* sel tunam kapasitas 50 W; Fabrikasi sel tunam 100-200 W; Pembuatan prototipe MEA.
- 6) **Sel Surya:** pengembangan teknologi *High Speed Circuit Breaker* pada sistem PLTS *on grid* bekerjasama dengan NEDO; Kajian dan analisa tekno-ekonomi kelayakan produksi sel surya di Indonesia

b. Penelitian dan pengembangan mineral dan batubara

- 1) **Upgrading Brown Coal:** Upgrading batubara menghasilkan kalori 6.200-7.000 kkal/kg; penelitian pada *pilot plant* di Palimanan kapasitas 3 ton/hari, Demo Plant di Satui, Kalsel dengan kapasitas 600 ton/hari.
- 2) **Gasifikasi batubara untuk PLTD:** Dual fuel penggantian 65% solar dengan gas batubara menggunakan SPD 250 KVA (high speed).
- 3) **Teknologi *coal water fuel* (CWF):** penelitian pada Pilot plant di Palimanan kapasitas 150 tph ; persiapan demonstration plant kapasitas 10.000 tph dengan JGC Corp. Jepang dan Sinarmas.
- 4) **Karbon aktif batubara:** skala pilot plant di Palimanan, reaktor akvitasi (rotary kiln) kapasitas 1 ton/hari.
- 5) **Pencairan batubara:** kajian Cost Benefit Analysis Proyek CTL-SASOL di Indonesia kapasitas 91.540 barel/hari
- 6) **Pupuk majemuk berbasis mineral (PML):** optimasi proses skala pilot 1 ton/hari

c. Penelitian dan pengembangan geologi kelautan

- 1) Pemetaan geologi kelautan bersistem skala 1:250.000 (22,5%, 82 dari 365 lembar peta).
- 2) Peta anomali gaya berat kelautan Indonesia dan sekitarnya.
- 3) Eksplorasi dan kajian pemanfaatan gas biogenik di Muarakakap, Kalbar.
- 4) Pengembangan basis data toponim morfologi dasar laut perairan Indonesia.
- 5) Penyelidikan geologi dan geofisika.
- 6) Penelitian potensi energi arus laut sebagai pembangkit listrik bagi masyarakat pesisir di Nusa Penida, Bali.
- 7) Pembangunan Kapal Riset Geomarin III untuk penelitian di laut dalam.

3. Bidang pendidikan dan pelatihan

Selama periode tahun 2005 s.d 2009 telah dilakukan peningkatan sumberdaya manusia melalui penyelenggaraan 1.201 diklat dengan

27.049 peserta bersertifikat, mengingat peningkatan kualitas sumberdaya manusia menjadi bagian penting dalam pencapaian kinerja sektor ESDM.

Dari total 22.707 peserta diklat, 11.711 peserta (51,6%) berasal dari Aparatur/PNS (KESDM, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi/Kab/Kota), 9.790 peserta (43,1%) berasal dari tenaga kerja Industri; sedangkan 1.206 peserta (5,3%) berasal dari Masyarakat.

Berdasarkan bidang diklat, dari total 27.049 peserta (50,6%) mengikuti diklat bidang

BERDASARKAN ASAL PESERTA

NO	ASAL PESERTA	Jumlah Peserta					Total	%
		2005	2006	2007	2008	2009		
1	APARATUR/PNS	2,236	2,595	2,725	2,595	1,560	11,711	51.6%
2	INDUSTRI/BUMN	2,792	1,817	2,104	1,817	1,260	9,790	43.1%
3	MASYARAKAT/LAINNYA	82	379	366	379		1,206	5.3%
	JUMLAH	5,110	4,791	5,195	4,791	2,820	22,707	100.0%

Tabel 1.10. Jumlah peserta diklat sektor ESDM berdasarkan asal peserta

BERDASARKAN BIDANG DIKLAT

NO	BIDANG DIKLAT	Jumlah Peserta					Total	%
		2005	2006	2007	2008	2009		
1	MIGAS	3,266	2,313	2,449	2,313	3,340	13,681	50.6%
2	TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA	1,501	1,638	1,496	1,638	1,900	8,173	30.2%
3	KETENAGALISTRIKAN DAN ENERGI BARU TERBARUKAN	183	540	447	540	300	2,010	7.4%
4	GEOLOGI	160	300	352	300	360	1,472	5.4%
5	PENDIDIKAN KEDINASAN	287	271	451	441	263	1,713	6.3%
	JUMLAH	5,397	5,062	5,195	5,232	6,163	27,049	100.0%

migas, 8.173 peserta (30,2%) mengikuti diklat bidang teknologi mineral dan batubara, 2.010 peserta (7,4%) mengikuti diklat bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan, 1.472 peserta (5,4%) mengikuti diklat bidang geologi, sedangkan 1.713 peserta (6,3%) adalah lulusan Perguruan Tinggi Kedinasan Akamigas.

4. Bidang penelitian dan pelayanan geologi

Di bidang penelitian dan pelayanan geologi telah diperoleh capaian pengungkapan potensi Geologi 2005 - 2009 di antaranya berupa :

- a. Penyelesaian pemetaan gaya berat seluruh daratan wilayah Indonesia meliputi wilayah Sulawesi dan Maluku (22 lembar peta), NAD (12 lembar peta), Papua dan Natuna (24 lembar peta)
- b. Deliniasi Cekungan Sedimen berdasarkan data geofisika (gaya berat) dan geologi dari 60 cekungan menjadi 128 cekungan.
- c. Penyelidikan batubara, CBM dan gambut 42 lokasi, 113 peta di wilayah Sumatera, Kalimantan dan Papua.
- d. Penyelidikan Bitumen padat dan migas 18 kabupaten, 54 peta di daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
- e. Penyelidikan Panas bumi 38 kabupaten, 152 peta di wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi, Nusantara dan Maluku.
- f. Penyelidikan Mineral Logam 58 kabupaten, 156 peta di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa.
- g. Penyelidikan Mineral Non-Logam 62 kabupaten, 178 peta di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa.
- h. Pelayanan Informasi dan rekomendasi kebencanaan geologi.
- i. Pembangunan Museum Gunungapi di Jogjakarta dan Bali.
- j. Pembangunan Museum Karst di Wonogiri.
- k. Terbangunnya *Regional Centre* Gunungapi sebanyak 8 lokasi.
- l. Pengembangan *software* untuk pengiriman data via SMS dan pemasangan sistem akuisisi data dengan metoda RTSM (*real time seismic measurement*)
- m. Penemuan fosil gajah purba.
- n. Pemboran air tanah 297 titik bor di daerah sulit air.
- o. Penata ruang berbasis geologi di 14 kota, 21 kabupaten, 5 pulau dan 3 kapet.

- p. Penyelidikan dan pemetaan geologi teknik 24 lokasi.
- q. Penyelidikan geologi teknik geodinamik 7 lokasi, tanah lunak 17 lokasi, dan infrastruktur 13 lokasi.
- r. Penyelidikan geologi lingkungan kawasan pertambangan 30 lokasi.
- s. Penyelidikan geologi kawasan karst dan kawasan lindung geologi 14 lokasi.
- t. Pemetaan hidrogeologi Indonesia bersistem skala 1:250.000, 17 lembar.
- u. Penyelidikan potensi cekungan air tanah 15 lokasi.
- v. Penyelidikan hidrogeologi konservasi air tanah 16 lokasi.

I.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

a. Potensi

1) Potensi Sumber Energi Fosil

CADANGAN DAN PRODUKSI ENERGI INDONESIA (2008)

No	ENERGI FOSIL	SUMBER DAYA (SD)	CADANGAN (CAD)	RASIO SD/CAD (%)	PRODUKSI (PROD)	RASIO CAD/PROD (TAHUN)*
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7 = 4/6
1	Minyak Bumi (miliar barel)	56,6	8,2 **)	14	0,357	23
2	Gas Bumi (TSCF)	334,5	170	51	2,9	59
3	Batubara (miliar ton)	104,94	21,13	20	0,229	91
4	Coal Bed Methane/CBM (TSCF)	453	-	-	-	-

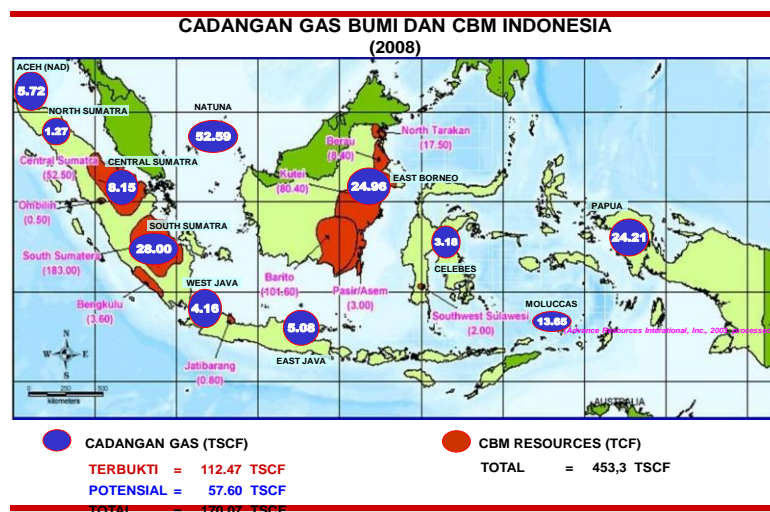
*) Dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru

**) Termasuk Blok Cepu

NO	ENERGI NON FOSIL	SUMBER DAYA (SD)	KAPASITAS TERPASANG (KT)	RASIO KT/SD (%)
1	2	3	4	5 = 4/3
1	Tenaga Air	75.670 MW (e.q. 845 juta SBM)	4.200 MW	5,55
2	Panas Bumi	28.884 MW (e.q. 220 juta SBM)	1.189 MW	4
3	Mini/Micro Hydro	500 MW	86,1 MW	17,22
4	Biomass	49.810 MW	445 MW	0,89
5	Tenaga Surya	4,80 kWh/m ² /hari	12,1 MW	-
6	Tenaga Angin	9.290 MW	1,1 MW	0,012
7	Uranium	3.000 MW (e.q. 24,112 ton) untuk 11 tahun*)	30 MW	1,00

*) Hanya di Kalan – Kalimantan Barat

Tabel 1.12. Cadangan dan Produksi Energi Indonesia (Status 2008)



Gambar 1.15. Cadangan Gas Bumi dan CBM Indonesia (Status 2008)

Indonesia memiliki potensi energi yang beragam, baik yang berasal dari energi fosil maupun non fosil. Sumber energi fosil antara lain minyak bumi, gas

bumi, batubara dan Coal Bed Methane (CBM). Cadangan minyak bumi (status tahun 2008) sebesar 8,2 miliar barel yang apabila diproduksi dengan tingkat produksi sebesar 0,357 miliar barel per tahun, maka potensi minyak bumi masih akan bertahan setidaknya selama 23 tahun. Gas bumi dengan cadangan sebesar 170 TSCF dan tingkat produksi sebesar 2,9 TSCF, maka diharapkan dapat memasok energi hingga 62 tahun ke depan. Ditinjau dari sebarannya, maka cadangan minyak bumi tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dimana cadangan terbesar berada di Provinsi Riau (4,1 miliar barel) dan cadangan gas bumi terbesar berada di daerah Natuna sebesar 52,59 TCF.

Jumlah sumber daya batubara Status Tahun 2009 yang telah



Gambar 1.16. Cadangan Minyak Bumi Indonesia (Status 2008)

diketahui mencapai sebesar 104,94 miliar ton, namun secara ekonomis jumlah batubara yang dapat ditambang, baik secara terbuka maupun dengan cara bawah tanah, masih terbatas. Jumlah cadangan terbukti (*proven reserves*) saat ini baru mencapai 21,13 miliar ton, sisanya masih bersifat terindikasi. Selain itu, sebagian besar dari jumlah sumberdaya tersebut (sekitar 66,39%) tergolong batubara berperingkat sedang (*medium rank coal*) atau sub bituminus dimana jenis batubara ini memiliki nilai kalori (5100-6100 kcl/kg). Pada dasarnya ketiga jenis energi fosil tersebut mempunyai sumber daya cukup besar. Apabila sumber daya tersebut dapat ditingkatkan menjadi cadangan terbukti maka potensi energi fosil akan meningkat. Jumlah sumberdaya batubara yang telah diketahui mencapai lebih dari 90,5 miliar ton, namun secara ekonomis jumlah batubara yang dapat ditambang, baik secara terbuka maupun dengan cara bawah tanah, masih terbatas.


2) Potensi sumber energi non-fosil

Indonesia memiliki sumber energi non fosil yang relatif besar. Namun pemanfaatannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan potensi yang ada. Sebagai ilustrasi, sampai dengan tahun 2008 kapasitas terpasang energi non fosil seperti tenaga air baru mencapai 4,2 Giga Watt (GW) dari sumber daya sebesar 75,67 GW atau baru termanfaatkan sekitar 0,5 %. Potensi sumber daya panas bumi sebesar 27,710 GW baru termanfaatkan sebesar 1,179 GW atau sekitar 4 %.

Potensi sumber daya panas bumi sebesar 28,884 GW baru termanfaatkan sebesar 1,189 GW atau sekitar 4 %. Potensi panas bumi tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Adapun lapangan yang telah berproduksi antara lain di Sibayak, Kamojang, Lahendong, Dieng, Wayang Windu, Derajat, Salak dengan total kapasitas sebesar 1.189 MW, kapasitas lapangan dalam pengembangan sekitar 1.727 MW, sedangkan kapasitas yang akan ditenderkan sebanyak 2295 MW.

3) Potensi Mineral

Indonesia memiliki sebaran mineral dari berbagai jenis, antara lain timah, bijih nikel, nikel, tembaga, emas, perak, bijih besi, bauxite, mangan, intan dan granit.

 CADANGAN DAN PRODUKSI MINERAL INDONESIA (2008)							
NO	MINERAL	UNIT	SUMBER DAYA (SD)	CADANGAN (CAD)	RATIO CAD/SD (%)	PRODUKSI (PROD)	RATIO CAD/PROD (TAHUN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/4)	(7)	8 = (5/6)
1	Timah (metal)	Ton	622.402	462.402	74	71.607	8
2	Bijih Nikel	Ton	1.338.182.200	627.810.000	47	10.673.542	29
3	Nikel – FeNi	Ton	-	-	-	17.566	-
4	Nikel – Matte	Ton	-	-	-	73.356	-
5	Tembaga (metal)	Ton	66.206.347	41.473.267	63	655.058	49
6	Emas (metal)	Ton	5.297	3.156	60	63.593	26
7	Perak (metal)	Ton	36.013	11.417	32	225.665	41
8	Bijih Besi (laterit)	Ton	47.169.416	9.557.846	20	3.965.047	107
9	Bauxite (metal)	Ton	207.931.993	23.999.901	12	9.885.547	5
10	Intan	Karat	539.800	93.565	17	27.688	16
11	Granit	M3	57.509.419	13.320.417	23	1.950.494	8

Tabel 1.13. Cadangan dan Produksi Mineral Indonesia (Status 2008)

4) Potensi peningkatan efisiensi, nilai tambah dan konservasi

Disamping potensi sumber daya alam sektor ESDM tersebut di atas beberapa potensi yang dapat mendukung perkembangan sektor ESDM antara lain potensi

peningkatan efisiensi energi cukup besar, potensi pasar energi nasional, regional dan internasional, potensi pengurangan emisi gas rumah kaca melalui pemanfaatan teknologi bersih, pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dan Carbon Capture dan Storage (CCS) (jangka panjang), dan potensi peningkatan nilai tambah mineral.

Dari hasil studi diketahui bahwa, potensi peningkatan efisiensi energi di tiap-tiap sektor bervariasi antara 10 % sampai dengan 30 %. Potensi peningkatan efisiensi energi di sektor transportasi adalah 25%, sektor industri adalah 15 % - 30 %, dan sektor rumah tangga adalah 10% - 30%

Terkait potensi peningkatan nilai tambah mineral, UU No.4/2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mewajibkan pemurnian, pengolahan serta pemanfaatan mineral dan batubara di dalam negeri. Pasal-pasal yang mengatur tentang nilai tambah, antara lain :

1. Pasal 102: “Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara”
2. Pasal 103 ayat (1) : “Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri”.
3. Pasal 170: “Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No 4 Tahun 2009 tersebut, bahwa pemegang IUP diwajibkan untuk mendirikan fasilitas peleburan/pemurnian yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertambangan sehingga berdampak lebih besar bagi perekonomian nasional melalui: peningkatan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan penerimaan negara. Dengan strategi mendorong pemegang IUP mengolah dulu bahan mentah di dalam negeri akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat

Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan bakar fosil yaitu BBM, gas bumi dan batubara akan berdampak pada meningkatnya emisi gas rumah kaca. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut emisi gas rumah kaca (karbon dioksida (CO₂) di atmosfer akan mengalami peningkatan. Situasi ini menjadi perhatian dunia semenjak dampak dari perubahan emisi gas rumah kaca khususnya CO₂ menjadi pemicu utama kenaikan temperatur bumi yang menyebabkan perubahan iklim global.

Emisi gas rumah kaca dari sektor energi diperkirakan akan meningkat sekitar 7% dari tahun 2006 hingga tahun 2025 sejalan dengan kenaikan konsumsi energi khususnya dari bahan bakar minyak bumi. Penggunaan energi yang bersumber pada energi baru, peningkatan efisiensi energi dan pengembangan teknologi yang bersih terutama dalam menangkap dan penyimpanan karbon akan mengurangi efek gas rumah kaca.

Beberapa potensi program yang bisa mengurangi efek gas rumah kaca antara lain:

- Pengembangan program percepatan pembangkit listrik 10000 MW tahap II yang sebagian besar berasal dari energi baru terbarukan (panas bumi dan tenaga air).
- Penggantian bahan bakar minyak dengan bahan bakar nabati (untuk sektor transportasi)
- Penggantian bahan bakar minyak menjadi CNG (untuk sektor transportasi seperti penggunaan pada bus
- Pengembangan gas kota
- Promosi lampu hemat energi
- Program konversi minyak tanah ke LPG
- Pengembangan DME dengan menggunakan energi baru terbarukan yang potensial (angin, cahaya matahari, air, dan lain-lain).
- Pengurangan pembakaran gas di *flare stack*

5) Potensi sumber daya geologi

Wilayah Indonesia memiliki fenomena dan kondisi geologi yang kompleks dan unik dimana di dalamnya menyimpan potensi sumberdaya geologi yang dapat

dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi dan strategis tinggi. Potensi tersebut terutama yang berkaitan dengan signifikansi kondisi geologi Indonesia yang berhubungan dengan kegiatan eksplorasi hulu di wilayah 15 lajur mineralisasi, 128 wilayah cekungan sedimen, 421 cekungan airtanah, 25 wilayah kegiatan sesar aktif, sejumlah wilayah kars, serta 129 gunung api aktif dan wilayah endapan kuarter yang berpotensi kebencanaan.

6) Potensi kelitbangan dan peningkatan kapasitas SDM

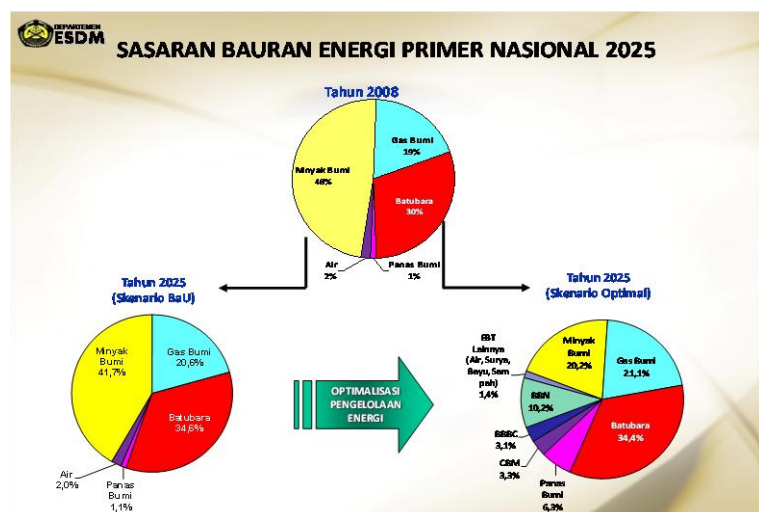
Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM sudah menguasai kemampuan teknologi di bidang efisiensi energi, diversifikasi energi, ekstensifikasi dan intensifikasi energi, konservasi dan lingkungan energi dan sumber daya mineral, peningkatan nilai tambah mineral, peningkatan nilai tambah batubara, data dan informasi infrastruktur jalur ESDM dasar laut.

Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di sektor ESDM sangat terbuka dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya berbagai peraturan perundang-undangan di sektor ESDM dan sektor terkait lainnya yang secara khusus mengamankan ditingkatkannya kualitas sumberdaya manusia untuk menunjang tercapainya tujuan nasional dan sasaran/isu strategis sektor ESDM.

b. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi oleh sektor energi dan sumber daya mineral antara lain:

- 1) **Bauran energi nasional masih didominasi oleh BBM:** Pangsa BBM yang mengambil porsi sebesar 48%. Sedangkan bahan bakar lain seperti batubara mengambil porsi sebesar 30%, gas bumi 19%, air 2%,



Gambar 1.17. Sasaran Bauran Energi Primer Nasional tahun 2025

dan panas bumi yang baru mencapai 1%.

- 2) **Belum optimalnya pengembangan energi alternatif pengganti BBM:** Hal ini disebabkan belum optimalnya pemanfaatan potensi energi di luar minyak bumi yang masih sangat besar seperti panas bumi, gas bumi, energi air skala besar dan skala kecil, bahan bakar nabati, *solar cell* dan lain-lain. Pemanfaatan energi non fosil (EBT) yang masih rendah ini disebabkan antara lain masih tingginya investasi yang dibutuhkan sehingga menyebabkan biaya produksi energi dari non fosil relatif mahal.
- 3) **Penurunan produksi migas nasional:** hal ini terjadi dalam beberapa tahun terakhir yang disebabkan oleh sebagian besar (lebih dari 90%) lapangan yang ada (*existing*) merupakan lapangan tua (*mature*) dan penambahan produksi lapangan baru tidak bisa mengimbangi laju penurunan produksi serta belum optimalnya pengembangan lapangan-lapangan marginal. Kondisi ini juga ditambah pembukaan wilayah kerja migas yang baru masih terkendala dengan keterbatasan data bawah permukaan (*sub surface*).
- 4) **Belum optimalnya pemanfaatan gas bumi dalam negeri:** Sebelum tahun 2000, permintaan gas bumi domestik masih sangat rendah, pemanfaatan gas bumi dari cadangan besar biasanya untuk ekspor, sedangkan gas bumi dari cadangan kecil untuk domestik. Kontrak-kontrak gas bumi yang ditandatangani pada waktu itu merupakan kontrak jangka panjang, sehingga menyebabkan permintaan gas domestik relatif tinggi, kontrak-kontrak tersebut tidak dapat serta merta diubah untuk kebutuhan domestik, karena dapat berakibat pada pelanggaran kontrak (*default*).
- 5) **Kendala eksploitasi batubara:** Kendala ini disebabkan oleh terbatasnya infrastruktur baik berupa pelabuhan maupun jaringan pengangkut batubara. Cadangan batubara secara nasional adalah sekitar 21,13 miliar ton, di mana cadangan batubara Sumatera mencapai 11,55 miliar ton dan sisanya tersebar terutama di Kalimantan sebesar 9,57 miliar ton. Perlu ada peningkatan terhadap kapasitas tampung dan kapasitas kapal/tongkang di pelabuhan yang

ada, sebagai misal, kapasitas kapal di Pelabuhan Tarahan sebesar 43.000 DWT maksimum.

- 6) Belum optimalnya investasi untuk pengembangan sektor energi dan sumber daya mineral :** Hal ini disebabkan antara lain oleh tumpang tindih wilayah pertambangan dengan kehutanan, perkebunan; lamanya pemberian izin pinjam pakai wilayah hutan; alokasi tanah adat/tanah ulayat, dan belum dicapainya nilai keekonomian harga uap/listrik dalam pengembangan panas bumi. Di sub sektor ketenagalistrikan, keterbatasan kemampuan penyediaan tenaga listrik untuk memenuhi pertumbuhan beban akibat investasi untuk penambahan kapasitas terpasang relatif kecil. Penambahan kapasitas pembangkit ini diakibatkan antara lain oleh keterbatasan kemampuan pendanaan ketenagalistrikan baik dari Pemerintah, BUMN, maupun swasta dan rendahnya ketertarikan investor untuk berinvestasi. Keterbatasan pendanaan APBN untuk pembangunan infrastruktur dan eksploitasi potensi sektor energi dan sumber daya mineral selama ini diatasi dengan mengoptimalkan investasi baik dari dalam maupun luar negeri.
- 7) Impor BBM :** di sisi hilir, pemerintah masih harus mengimpor BBM dalam jumlah yang relatif besar untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar di dalam negeri. Hal ini dapat dilihat pada neraca minyak termasuk BBM tahun 2008, dimana ekspor BBM sebesar 37%, sedangkan impor BBM sebesar 63%. Kemampuan memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri yang belum optimal ini disebabkan infrastruktur kilang yang masih terbatas. Saat ini Indonesia memiliki 10 (sepuluh) kilang minyak baik yang dimiliki PT. Pertamina (Persero) maupun badan usaha swasta lainnya dengan total kapasitas pengolahan kilang minyak mentah adalah sebesar 1,156 juta barel per hari.
- 8) Akses masyarakat Indonesia terhadap energi komersial terbatas :** hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur energi yang ada dan diindikasikan oleh rasio elektrifikasi yang masih rendah, dan konsumsi energi per kapita yang masih rendah (0,467 TOE per kapita). Sampai dengan tahun 2008, jumlah rumah tangga di seluruh Indonesia kurang lebih sebanyak 55.400 ribu kepala

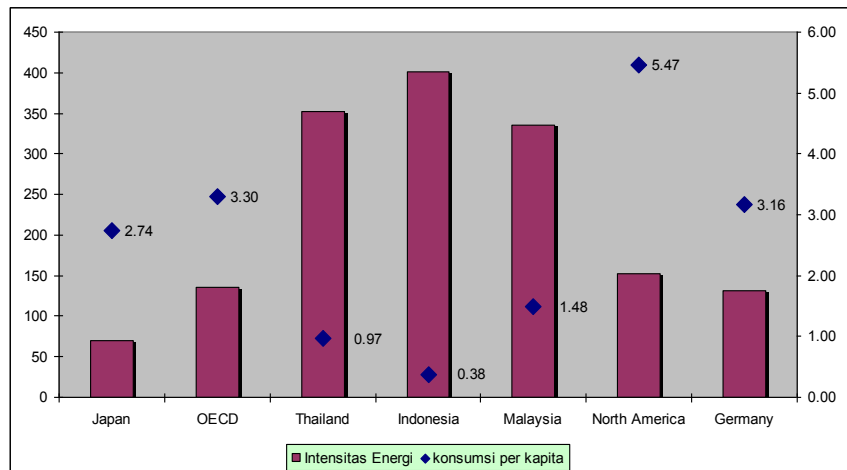
keluarga yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, keluarga yang telah mempunyai akses tenaga listrik adalah sebesar 36.078 ribu kepala keluarga atau sebesar 65,1%. Dengan demikian masih ada lebih dari 19.000 ribu kepala keluarga yang belum mempunyai akses tenaga listrik atau sebesar 34,9 %.

Begitu juga untuk rasio desa berlistrik, sampai dengan tahun 2008 secara administratif, jumlah desa di seluruh Indonesia adalah sebanyak 71 ribu desa yang tersebar di daerah yang telah berkembang, daerah yang belum berkembang, maupun di daerah terpencil. Dari jumlah tersebut, desa yang telah mempunyai akses tenaga listrik adalah sebesar 66 ribu desa atau sebesar 92,29%. Dengan demikian masih lebih dari 5 ribu desa atau sebesar 7,71% yang belum mempunyai akses tenaga listrik.

9) Harga energi belum mencapai nilai keekonomian : Kondisi ini mengakibatkan masih terdapat subsidi energi yang besarnya membebani APBN. Subsidi energi mengambil porsi yang cukup besar dalam APBN, dalam 5 tahun terakhir subsidi yang dikeluarkan pemerintah berkisar antara 100 sampai 200 triliun per tahunnya. Pergeseran subsidi energi menjadi subsidi langsung atau untuk anggaran sektor lain, memiliki dampak politik dan sosial yang lebih tinggi, sehingga upaya pergeseran subsidi harga menjadi subsidi langsung perlu dilakukan secara bertahap. Harga energi yang belum mencerminkan nilai keekonomiannya menyebabkan tidak terdorongnya penggunaan energi secara optimal dan tidak mengembangkan prakarsa masyarakat untuk melakukan penghematan energi serta berakibat energi terbarukan belum kompetitif dibandingkan dengan energi konvensional.

10) Pemanfaatan energi belum efisien : Hal ini ditandai dengan intensitas energi yang tinggi serta elastisitas energi yang masih belum besar (401 TOE per juta US\$ PDB). Pemanfaatan energi yang efisien melalui penerapan konservasi energi masih menghadapi berbagai hambatan antara lain: budaya hemat energi masih sulit diterapkan, kemampuan SDM masih rendah sehingga sikap masyarakat terhadap teknologi juga rendah.

Intensitas energi adalah energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan *gross domestic product (GDP)* atau produk domestik



Gambar 1.18 . Intensitas energi dan konsumsi energi di dunia perkapita

bruto. Semakin efisien suatu negara, maka intensitasnya akan semakin kecil. Intensitas energi Indonesia sebesar 401 TOE (*ton-oil-equivalent*) per 1 juta dolar AS. Artinya untuk menghasilkan nilai tambah (GDP) 1 juta dolar AS, Indonesia membutuhkan energi 401 TOE. Sebagai perbandingan, intensitas energi Malaysia 335 TOE/juta dolar AS, dan intensitas energi rata-rata negara maju yang tergabung dalam OECD (Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan) hanya 136 TOE/juta dolar AS. Intensitas energi dan konsumsi energi perkapita dapat dilihat pada gambar 1.18

- 11) **Struktur Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) masih tergantung penerimaan minyak dan gas bumi** : Situasi ini menyebabkan pengurangan ekspor komoditi ini akan berakibat langsung terhadap penerimaan negara. Di sisi lain saat ini komoditi migas masih menjadi sumber energi utama di Indonesia.
- 12) **Nilai tambah industri pertambangan/mineral rendah** : Dalam bidang pertambangan, potensi mineral cukup besar, namun nilai tambah industri ini masih rendah dikarenakan belum adanya industri pengolahan di dalam negeri, yang dapat mengubah mineral sebagai bahan mentah, bahan setengah jadi, atau bahan jadi.

- 13) Masih rendahnya *local content*** : Situasi ini memerlukan dukungan pemerintah terhadap pengembangan jasa penunjang sektor ESDM. Di subsektor migas rendahnya *local content* disebabkan:
- (a) Industri bahan baku hulu (seperti : *green pipe, seamless pipe, round bar (stud bolt), stainless steel, steel plate*) belum ada
 - (b) Kapasitas/industri dalam negeri masih rendah (*valve, stud bold, pressure gauge, forging, mechanical seal*)
 - (c) Spesifikasi produk belum sesuai (*forging, casting*)
 - (d) Produk masih lisensi luar negeri (*casing, tubing, wellhead, valve, pressure valve*)
- 14) Belum optimalnya pelaksanaan prinsip *good mining practices*** : masih banyaknya perizinan KP di daerah yang tidak mengikuti kaidah pertambangan yang baik dan benar. Maraknya aktivitas pertambangan rakyat yang ilegal dan rendahnya tingkat pengetahuan mengenai pengelolaan pertambangan dari pelaku aktivitas pertambangan menimbulkan permasalahan yang harus diatasi secara komprehensif.
- 15) Kepastian Hukum** : masih diperlukan peraturan pelaksanaan diberbagai UU di sektor ESDM untuk meningkatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha di sektor ESDM
- 16) Belum terungkapnya seluruh informasi mengenai geologi Indonesia** : hal ini terutama untuk memenuhi permintaan pemangku kepentingan pada daerah yang mempunyai potensi energi dan mineral.
- 17) Isu lingkungan pertambangan yang dikaitkan dengan pemanasan global** : Memerlukan penanganan secara benar dan dapat dikaitkan dengan pemecahan masalah secara global dimana secara aktif Indonesia berperan melalui UNFCCC dan COP 15.
- 18) Isu sosial masyarakat di sekitar tambang**: Diperlukan pendekatan sosial ekonomi serta antropologis dalam memecahkan permasalahan ini, karena melibatkan banyak aspek kehidupan.

- 19) Kendala dalam pemboran air tanah :** kegiatan ini menghadapi kendala antara lain kondisi ekstrem geologi lokal di daerah sulit air kadang-kadang menyulitkan dalam proses pemboran air tanah. Sementara itu konservasi air tanah di cekungan air tanah menghadapi kendala dengan makin maraknya aktivitas pengambilan air tanah tanpa izin (PATTI) serta pengambilan air tanah yang kurang terkendali terutama di kawasan perindustrian dan kota besar.
- 20) Minimnya peralatan pemantauan gunung api :** Penanggulangan daerah rawan bencana terkendala dengan peralatan pemantauan gunung api yang saat ini masih minim. Di samping itu, pemahaman masyarakat tentang kebencanaan geologi belum merata seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pemukiman penduduk yang semakin mendekat ke arah daerah rawan bencana geologi.
- 21) Kinerja aparatur KESDM belum optimal :** masih diperlukan peningkatan kinerja aparatur KESDM dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sektor ESDM baik sebagai aparatur Pemerintah Daerah maupun tenaga kerja di industri sektor ESDM. Untuk itu diperlukan beberapa tindakan untuk meningkatkan kinerja aparatur tersebut sbb:
- (a) Penataan perangkat kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang diklat terutama yang mengarah pada akreditasi,
 - (b) Penetapan pedoman diklat terstruktur yang menjadi acuan penyelenggaraan dan penyertaan diklat fungsional dan teknis yang wajib bagi PNS di lingkungan KESDM dan dapat diikuti PNS daerah yang mengelola sektor ESDM dan perlu diikuti dengan implementasi yang konsisten.
 - (c) Pemantapan dalam standar kompetensi pada penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi untuk memenuhi tuntutan agar kapasitas sumber daya manusia sektor ESDM (PNS Pusat dan Daerah serta Industri) semakin meningkat.

22) Pengawasan untuk sektor ESDM : diperlukan peningkatan dalam rangka mendorong terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government*. Untuk itu diperlukan peningkatan kinerja unit/satker melalui :

- (a) Pengawasan yang dititikberatkan pada pengawasan kinerja/*performance audit* (audit 3E) daripada audit kepatuhan dan ketaatan/*compliance audit* (audit 2K) berdasarkan penilaian resiko audit
- (b) Reviu laporan keuangan secara berkala untuk meningkatkan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan dan aset
- (b) Memberdayakan kegiatan pendampingan/*partnering (coaching)* dan konseling untuk membantu unit/satuan kerja dalam mencapai visi dan misinya
- (c) Peningkatan kompetensi auditor dalam bidang teknis dan non-teknis serta mendapatkan sertifikasi internasional (CIA, CFE, CISA dan CPA)
- (d) Evaluasi perencanaan, organisasi dan tata laksana sesuai prinsip *money follow function, structure follow function, human resources follow structure* dan *right man on right place*
- (e) Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan terpadu untuk mengefektifkan pengawasan dan tindak lanjut
- (f) Peningkatan, Pengembangan dan Monitoring Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada setiap unit/satuan kerja
- (g) Pengembangan Sistem Kinerja dan Sistem Pengukuran Kinerja unit/satuan kerja sampai dengan level individu.

23) Kualitas pelayanan publik: diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan cara mendorong pembuatan dan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pelayanan publik bidang ESDM; dan dengan melaksanakan audit pelayanan publik serta memonitor dan mengevaluasi penerapan SPM/NSPK pada unit/satuan kerja dan daerah.

24) Kualitas penelitian dan pengembangan : diperlukan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan menghadapi permasalahan antara lain:

- (a) Untuk menghasilkan produk (barang dan jasa/pelayanan) yang dapat dimanfaatkan stakeholder memerlukan waktu panjang.
- (b) Komposisi jumlah pejabat fungsional dan non fungsional Badan Litbang ESDM masih belum ideal (43 : 57).
- (c) Terdapat 2 (dua) Satuan Kerja (P3TKEBT dan P3GL) yang belum memperoleh Izin Penggunaan Dana PNBP yang bersumber dari pelayanan jasa penelitian sesuai PP Nomor 45 tahun 2003 tentang Tarif atas Jasa Pendapatan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (d) Adanya ketentuan (Keppres Nomor 80 tahun 2003) yang membatasi Instansi Pemerintah berkompetisi dalam rangka memberikan pelayanan jasa teknologi.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

II.1 VISI

Visi KESDM merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pada tahun 2014.

Visi KESDM :

Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi serta peningkatan nilai tambah energi dan mineral yang berwawasan lingkungan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

II.2 MISI

Misi KESDM merupakan rumusan umum mengenai upaya upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi KESDM

Misi KESDM :

- 1. Meningkatkan keamanan pasokan energi dan mineral dalam negeri.**
- 2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap energi, mineral dan informasi geologi.**
- 3. Mendorong keekonomian harga energi dan mineral dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.**
- 4. Mendorong peningkatan kemampuan dalam negeri dalam pengelolaan energi, mineral dan kegeologian.**
- 5. Meningkatkan nilai tambah energi dan mineral.**
- 6. Meningkatkan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan usaha energi dan mineral secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.**
- 7. Meningkatkan kemampuan kelitbangan dan kediklatan ESDM;**
- 8. Meningkatkan kualitas SDM sektor ESDM;**
- 9. Melaksanakan *good governance*.**

II.3 TUJUAN STRATEGIS

Tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi KESDM yang merupakan kondisi yang ingin diwujudkan selama periode 5 tahun (di akhir tahun 2014) :

1. Terjaminnya pasokan energi dan bahan baku domestik
2. Terwujudnya peningkatan investasi sektor ESDM
3. Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam penerimaan negara
4. Terwujudnya peningkatan peran sektor ESDM dalam pembangunan daerah
5. Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM dan Listrik
6. Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam peningkatan surplus neraca perdagangan dengan mengurangi impor
7. Terwujudnya peningkatan efek berantai/ketenagakerjaan

Tujuan tersebut merupakan suatu kondisi yang ingin diwujudkan KESDM dalam kurun waktu 5 tahun sesuai dengan tugas dan fungsi KESDM. Adapun uraian terhadap makna yang terkandung dalam setiap tujuan beserta indikator untuk mengukur kinerja selama lima tahun adalah sebagai berikut:

1. Terjaminnya pasokan energi dan bahan baku domestik

Dalam menjamin penyediaan energi domestik, telah dilakukan optimasi produksi energi fosil yaitu minyak bumi, gas bumi dan batubara. Kecenderungan produksi minyak bumi, sebagai energi tidak terbarukan, cenderung menurun setiap tahunnya. Mulai tahun 2007, produksi minyak sudah dibawah level 1 juta barel per hari. Namun, dengan adanya temuan cadangan baru seperti Blok Cepu, maka dalam jangka pendek akan ada peningkatan produksi minyak Indonesia, meskipun akan menurun kembali karena natural decline rate yang cukup tinggi sekitar 12% per tahun. Mengantisipasi situasi menurunnya produksi minyak bumi, maka ke depan, penyediaan energi difokuskan pada gas dan batubara yang produksinya relatif meningkat setiap tahunnya.

Pada tahun 2010 produksi minyak bumi berada pada angka 965 juta barel per hari dan pada tahun 2014 ditargetkan mencapai 1.010 juta barel. Sedangkan

untuk gas bumi pada tahun 2014 ditargetkan mencapai produksi setara dengan 1.633 juta barel minyak bumi. Coal Bed Methane (CBM) yang merupakan sumber energi baru akan berproduksi pada tahun 2012 dengan tingkat produksi setara dengan 21,7 juta barel minyak bumi dan pada tahun 2014 ditargetkan mencapai tingkat produksi setara dengan 113,21 juta barel. Sementara untuk batubara produksinya akan meningkat dari setara dengan 2875 juta barel minyak bumi, tahun 2010, ke tingkat 3554 juta barel pada tahun 2014. Dengan gambaran di atas, maka pada tahun 2014 target produksi sumber energi fosil adalah setara dengan 6310,21 juta barel per hari.

Gambaran tingkat produksi energi fosil tersebut memastikan bahwa kebutuhan bahan baku dalam negeri seperti pupuk dan petrokimia dapat terpenuhi dengan target setiap tahunnya sebanyak 100 persen.

Sebagai salah satu cara efektif untuk memastikan kesinambungan pasokan adalah konservasi konsumsi sumber energi fosil melalui program konversi minyak tanah ke LPG. Dengan demikian volume minyak tanah bersubsidi tiap tahunnya dikurangi secara signifikan. Selain itu, pengawasan peruntukan minyak tanah sudah semakin baik dengan adanya kartu kendali minyak tanah. Untuk jaminan pasokan BBM, untuk wilayah yang telah dilakukan konversi minyak tanah ke LPG, minyak tanah tetap dijual namun dengan harga pada tingkat keekonomian.

Permintaan energi listrik terus meningkat tiap tahunnya dengan pertumbuhan sekitar 9% per tahun. Untuk mengejar tingginya permintaan tersebut, dilakukan upaya antara lain pembangunan infrastruktur energi dan mineral termasuk pembangkit listrik dengan program 10.000 MW tahap I, 10.000 MW tahap II dan IPP (Independent Power Producer) atau Produsen Listrik Mandiri.

Dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan energi domestik, diversifikasi energi merupakan program prioritas, khususnya pengembangan energi baru terbarukan (EBT) atau energi alternatif non-BBM. Pembangkit listrik EBT terdiri dari PLTP, PLTS, PLTB, PLTMH & Pikohidro, dimana kapasitas terpasangnya ditingkatkan terus setiap tahunnya. Pengembangan sumber-sumber energi

dalam rangka diversifikasi energi meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2005 kapasitas terpasang pembangkit EBT sekitar 850 MW dan meningkat menjadi sekitar 1.062 MW pada tahun 2008. Pada tahun 2009 kapasitas terpasang EBT direncanakan sebesar 1.208 MW. Rencana penambahan kapasitas terpasang EBT terbesar adalah dari sumber energi panas bumi, yaitu direncanakan 140 MW, sehingga kapasitas terpasangnya menjadi sebesar 1.192 MW di tahun 2009. Untuk sumber energi EBT lainnya, penambahan kapasitas di tahun 2009 berada di bawah 4 MW. Saat ini, pengembangan panas bumi Indonesia menjadi semakin intensif, khususnya di saat dunia mulai fokus pada masalah lingkungan. Hal tersebut juga terlihat dari besarnya porsi pembangkit panas bumi pada program 10.000 MW tahap II, yaitu 48%.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Energi No. 30/2007, Pemerintah berkewajiban meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan termasuk bahan bakar nabati (BBN). Sejalan dengan Perpres 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Road Map Pengembangan BBN, Pemerintah telah menetapkan kewajiban minimal pemanfaatan biofuel secara bertahap sampai dengan tahun 2025. Kewajiban ini diatur dalam Permen ESDM No. 32/2008 tertanggal 26 September 2008. BBN yang diatur meliputi biodiesel, bioethanol dan bio oil; sedangkan sektornya meliputi rumah tangga, transportasi PSO dan non-PSO, industri dan komersial, serta pembangkit listrik.

Total pengembangan BBN menunjukkan angka produksi menjadi 2.558,7 ribu KL pada tahun 2008, dimana sebelumnya pada tahun 2005 total produksinya hanya sebesar 120 ribu KL. Pengembangan kapasitas produksi yang konstan menunjukkan fokus Pemerintah dalam pengembangan energi alternatif, untuk lingkungan yang lebih baik danantisipasi terhadap semakin mahal dan langkanya sumber energi habis pakai di masa yang akan datang.

Sektor ESDM memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam penyediaan energi terutama pasokan gas dan bahan mineral. Pemakaian gas domestik dimanfaatkan untuk industri pupuk, kilang petrokimia, kondensasi, LPG, PGN, PLN, Krakatau steel dan industri lainnya.

Sebelum tahun 2000an, kondisi pemanfaatan gas bumi tidak seperti saat ini dimana kebutuhan domestik sangat tinggi. Pada saat itu, pemanfaatan gas bumi dari cadangan besar biasanya untuk ekspor, sedangkan gas bumi dari cadangan yang kecil untuk domestik. Selain itu, permintaan gas bumi domestik pada era tersebut juga masih sangat rendah, sehingga kontrak-kontrak pengembangan gas bumi lebih dominan untuk ekspor. Kontrak-kontrak gas bumi yang ditandatangani pada waktu itu merupakan kontrak jangka panjang. Sehingga, tidak serta merta dapat diubah untuk memenuhi kebutuhan gas domestik ketika permintaan domestik relatif tinggi saat ini. Perubahan tersebut bisa menjadi bentuk pelanggaran kontrak (default).

Saat ini kebijakan alokasi gas lebih mengutamakan pasokan domestik, dimana cadangan besar dapat digunakan baik untuk domestik maupun ekspor dan cadangan kecil untuk domestik. Selain itu, kebijakan DMO gas juga diberlakukan (25% dari bagian KKKS/PSC untuk domestik, sisanya dapat dipergunakan untuk domestik maupun ekspor). Dari tahun ke tahun, ekspor gas sudah mulai dikurangi, sebaliknya pemanfaatan domestik terus diintensifkan.

Terkait dengan gas bumi untuk domestik, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) tahun 2002 – 2008 pasca diterbitkannya UU Migas Nomor 22 tahun 2001, alokasi gas bumi domestik mencapai 63,5%, sedangkan alokasi gas bumi ekspor sebesar 36,5%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tataran kebijakan dan perencanaan, upaya pengutamaan pasokan gas bumi domestik berjalan sangat baik. Meskipun saat ini kebijakan alokasi gas untuk domestik sudah diprioritaskan, namun ekspor gas tetap diperlukan untuk mencapai skala keekonomian dari suatu lapangan gas bumi. Pertimbangannya adalah harga gas bumi domestik umumnya lebih rendah dibandingkan harga untuk ekspor.

Disamping gas bumi, bahan mineral juga berperan penting sebagai pemasok bahan baku industri. Bahan mineral tersebut antara lain tembaga, emas, perak, bauksit, nikel, granit, intan dan besi. Produksi mineral dari tahun ke tahun sesuai dengan harapan. Peranan pengelolaan bahan mineral, lebih dominan

dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini terkait dengan adanya UU Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana kegiatan usaha pertambangan dapat di desentralisasikan, sehingga ijin usaha pertambangan atau Kuasa Pertambangan (KP) dapat dikeluarkan oleh Bupati dan Gubernur. Dengan demikian, koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sangat penting dalam rangka pengelolaan, pengawasan pertambangan di daerah agar penerimaan negara dari pertambangan umum dapat dioptimalkan.

Tujuan strategis lainnya dalam pasokan energi dan mineral untuk kebutuhan domestik adalah peningkatan efisiensi pemakaian dan pengolahan energi, dimana tingkat elastisitas energi perlu diturunkan terus. Pada tahun 2014 direncanakan bahwa elastisitas energi berada pada angka 1,48 yang merupakan penurunan dari tahun 2010 yang berada pada angka 1,64.

Di bawah ini adalah data ringkasan untuk tujuan strategis yang memiliki aspek dampak atau aspek kondisi yang ingin diwujudkan oleh KESDM, sbb:

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2014
1.	Terjaminnya pasokan energi & bahan baku domestik		
	i. Terwujudnya peningkatan kemampuan pasokan energi untuk domestik	• Jumlah produksi minyak bumi (MBOPD)	1.010
		• Jumlah produksi gas bumi (MBOEPD)	1.633
		• Jumlah produksi CBM (MBOEPD)	113,21
		• Jumlah Produksi batubara (MBOEPD)	3554
		• Jumlah produksi BBM (juta KL)	211,5
		• Jumlah Produksi LPG (juta Ton)	9,98
		• Jumlah Produksi LNG (MMTPA)	117,89
		• Jumlah rencana pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (juta ton)	469
	ii. Terwujudnya peningkatan	• Persentase pemenuhan kebutuhan bahan baku pupuk dan petrokimia	100

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2014
	kemampuan pasokan bahan baku untuk domestik:		
ii.	Terwujudnya pengembangan berbagai sumber energi dalam rangka diversifikasi energi :	<ul style="list-style-type: none"> • Pangsa gas bumi (%) 	24,3
		<ul style="list-style-type: none"> • Pangsa CBM (%) 	1,6
		<ul style="list-style-type: none"> • Pangsa batubara (%) 	23,6
		<ul style="list-style-type: none"> • Pangsa panas bumi (%) 	5,4
		<ul style="list-style-type: none"> • Pangsa energi baru terbarukan lainnya (%) 	3,7
v.	Terwujudnya peningkatan pembangunan infrastruktur energi dan mineral :	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas produksi minyak bumi (BOPD) 	726.608
		<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas produksi gas bumi (MMSCFD) 	20.261
		<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas produksi CBM (MMSCFD) 	86
		<ul style="list-style-type: none"> • Kilang minyak (BOPD) 	6.800
		<ul style="list-style-type: none"> • Kilang LPG (ton/hari) 	1.100
		<ul style="list-style-type: none"> • Kilang LNG (MMSCFD) 	250
		<ul style="list-style-type: none"> • LNG receiving terminal (MMSCFD) 	800
		<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan pipa transmisi gas bumi (km) 	1.375
		<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan pipa gas kota (RT) 	80.000
		<ul style="list-style-type: none"> • Rasio elektrifikasi 	80%
		<ul style="list-style-type: none"> • pembangkit listrik (MW) 	19.027
		<ul style="list-style-type: none"> – PLTP (MW) 	4.616
v.	Terwujudnya peningkatan efisiensi pemakaian dan pengolahan energi:	<ul style="list-style-type: none"> • Elastisitas Energi 	1,48
		<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan emisi CO2 	7,3 %

2. Terwujudnya peningkatan investasi sektor ESDM

Sektor ESDM selalu berperan dalam mendorong peningkatan aktifitas investasi di sektor ESDM. Pada tahun 2005 hingga 2008 terjadi peningkatan investasi sekitar 67% dari US\$ 11,9 miliar menjadi US\$ 19,9 miliar. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 ditargetkan total investasi sebesar US\$ 88.021 juta.

Sedangkan untuk sub sektor ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi, total investasinya dari tahun 2010 sampai dengan 2014 ada pada angka US\$ 44.431 juta. Dan untuk sub sektor pertambangan umum, target investasi pada tahun 2014 adalah US\$ 22.735 juta. Dengan total investas pada tahun 2014 sebesar US\$ 110.800 juta, migas masih tetap pemegang proporsi terbesar investasi dengan porsi sekitar 57%.

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2014
2.	Terwujudnya peningkatan Investasi sektor ESDM	Jumlah Investasi sub sektor migas (US\$ juta)	88.021
		Jumlah Investasi bidang listrik dan pemanfaatan energi (US\$ juta)	44.431
		Jumlah investasi sub sektor pertambangan umum (US\$ juta)	22.735
		Total Investasi (US\$ Juta)	155.187

3. Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam penerimaan negara

Sebagai sumber penerimaan negara, sektor ESDM setiap tahunnya memberikan kontribusi diatas 30% terhadap penerimaan nasional. Tahun 2008 mencatat sumbangan sektor ESDM sebesar Rp. 349,5 triliun atau 36,3% yang terdiri dari penerimaan Migas Rp. 304,4 triliun (31,6%), Pertambangan Umum Rp. 42,7 triliun (4,4%) dan lain-lain Rp. 2,4 triliun (0,3%).

Minyak dan gas bumi masih merupakan penghasil terbesar, yakni dengan porsi penerimaan 31% pada tahun 2008. Pada tahun 80an, komoditi migas merupakan sumber utama bagi penerimaan negara, dimana kontribusinya bahkan mencapai lebih dari 70%. Penerimaan dan kontribusi migas terhadap APBN tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat produksi dan harga minyak. Sejak pertengahan tahun 90an produksi minyak bumi, yang merupakan energi habis pakai, mulai menurun.

Namun demikian, seiring dengan optimisme dan kerja keras, meskipun produksi minyak nasional relatif menurun, realisasi penerimaan migas selalu melebihi dari target yang ditetapkan setiap tahunnya. Dengan proporsi

produksi migas yang selalu jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi lainnya di sektor ESDM, maka realisasi total penerimaan sektor ESDM juga selalu lebih tinggi dari targetnya.

Penerimaan sektor ESDM tersebut belum termasuk dividen dari BUMN di lingkungan sektor ESDM, pajak-pajak dari perusahaan sektor ESDM terdiri dari PPN, PBBKB dan PBB serta usaha pertambangan KP yang ijinnya diterbitkan oleh Bupati.

Jenis-jenis penerimaan yang terangkum dalam Indikator tujuan dari penerimaan negara sektor ESDM berasal dari sub-sektor minyak dan gas, PNPB dari pertambangan umum, kegiatan jasa penelitian dan pengembangan, dari kegiatan di Badan Diklat dan dari BPH Migas. Total target penerimaan negara dari sektor ESDM sampai dengan tahun 2014 adalah 1.165,596 triliun rupiah.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2014
3.	Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam penerimaan negara	Jumlah penerimaan negara sub sektor migas (Triliun Rupiah)	859,030
		Jumlah penerimaan negara dari subsektor pertambangan umum (Triliun Rupiah)	303,228
		Jumlah PNPB dari Badan Litbang (Triliun Rupiah)	0,362
		Jumlah PNPB dari Badan Diklat (Triliun Rupiah)	0,783
		Jumlah PNPB dari BPH Migas (Triliun Rupiah)	2,193
		Total Penerimaan Negara Sektor ESDM	1.165,596

4. Terwujudnya peningkatan peran sektor ESDM dalam pembangunan daerah

Di samping berperan penting terhadap penerimaan negara, sektor ESDM juga turut mendukung pembangunan daerah, antara lain melalui dana bagi hasil (DBH), kegiatan pengembangan masyarakat atau community development (comdev) yang merupakan tanggung jawab perusahaan yang sering disebut corporate social responsibility (CSR), listrik perdesaan, dan penyediaan air bersih (pemboran air tanah).

Pada tahun 2008 Dana Bagi Hasil (DBH) sektor ESDM diserahkan sebesar Rp. 40,5 triliun, yang terdiri dari DBH minyak bumi Rp.22,7 triliun, gas bumi Rp.11,5 triliun dan pertambangan umum Rp.6,3 triliun. Besarnya DBH sektor ESDM

selaras dengan penerimaan sektor ESDM. Kenaikan DBH dari tahun 2005 sampai dengan 2008 menunjukkan kenaikan sampai 53% yang merupakan peningkatan peran sektor ESDM dalam mendukung pembangunan daerah. Rencana DBH untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp.38,3 triliun yang terdiri dari minyak bumi Rp.19,2 triliun, gas bumi Rp.12,2 triliun dan pertambangan umum Rp.7,0 triliun.

Pembangunan daerah juga dilakukan melalui program listrik perdesaan (lisodes), melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga bayu/angin (PLTB), gardu distribusi (GD), jaringan tegangan menengah (JTM) dan jaringan tegangan rendah (JTR). Program Listrik Perdesaan beragam jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah. Program ini dari tahun ke tahun cenderung terus ditingkatkan baik dari segi volume maupun intensitasnya, sebagai salah satu wujud nyata dari dukungan terhadap pembangunan daerah.

Pengembangan Masyarakat atau Community Development (Comdev) sektor ESDM dilakukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan sangat penting di masyarakat yaitu: Ekonomi berupa peningkatan pendapatan, perbaikan jalan, sarana pertanian, dan pembangunan/perbaikan sarana ibadah; Pendidikan dan Kebudayaan yaitu kelompok usaha, pelatihan dan perencanaan); Kesehatan meliputi kesehatan terpadu dan air bersih; Lingkungan yaitu penanaman bakau, reklamasi dan lainnya yaitu kegiatan sosial, penyuluhan dan pembangunan sarana olah raga. Comdev sektor ESDM pada tahun 2008 menggunakan dana sebesar Rp. 2,17 triliun yang merupakan peningkatan 97% dari dana yang dipergunakan tahun 2005 sebesar Rp. 1,10 triliun. Dana Comdev ini selalu meningkat dari tahun ke tahun yang menunjukkan perhatian yang berkelanjutan terhadap pengembangan kehidupan masyarakat.

Desa Mandiri Energi (DME) merupakan terobosan dalam mendukung diversifikasi energi dan penyediaan energi daerah. Program ini terdiri dari DME berbasis Bahan Bakar Nabati (BBN) dan non-BBN. DME berbasis BBN menggunakan bahan baku energi jarak pagar, kelapa, sawit singkong dan tebu.

Sedangkan DME berbasis non-BBN memanfaatkan sumber energi setempat yaitu mikrohidro, angin, surya dan biomassa. Pemenuhan kebutuhan sumber energi mandiri bagi desa-desa di Nusantara terus ditingkatkan agar program ini memberikan manfaat langsung berupa kemandirian energi melalui pemberdayaan potensi daerah. Sampai dengan tahun 2009, jumlah desa dengan sumber energi mandiri direncanakan ditingkatkan menjadi 2000, dimana 1000 desa direncanakan berbasis BBN dan 1000 berbasis non-BBN.

Penyediaan air bersih melalui pengeboran air tanah juga merupakan program strategis sektor ESDM yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Program tersebut dilakukan tiap tahunnya melalui pendanaan APBN dari tahun anggaran 1995/1996. Sejak dimulainya program pengeboran air tanah tersebut, lebih dari satu juta jiwa telah menikmati ketersediaan air bersih ini.

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2014
4	Terwujudnya peningkatan peran sektor ESDM dalam pembangunan daerah	i. Jumlah dana bagi hasil Sektor ESDM (Milliar Rupiah)	
		• Subsektor Minerba Pabum	45.483
		• Subsektor Migas	85.689
		ii. Jumlah CSR (Milliar Rupiah)	
		• Subsektor Minerba Pabum	3.559
		• Subsektor Listrik dan Pemanfaatan Energi	470
		• Subsektor Migas	1.940
		iii. Jumlah jaringan distribusi listrik (kms) dan gardu distribusi listrik (MVA)	95.551/ 7.108
		iv. Jumlah desa mandiri energi (desa)	250
		v. Jumlah sumur bor daerah sulit air	500

5. Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM dan Listrik

Subsidi energi yang terdiri dari BBM/LPG dan listrik masih diterapkan dalam rangka mendukung daya beli masyarakat dan aktifitas perekonomian. Besarnya subsidi BBM/LPG bervariasi tiap tahunnya, tergantung dari konsumsi dan harga minyak. Adapun subsidi LPG dilakukan saat diterapkannya program konversi minyak tanah ke LPG tahun 2007. Pada tahun 2008 besarnya subsidi BBM/LPG mencapai Rp. 140 triliun. Sedangkan subsidi listrik mencapai lebih dari Rp. 84 triliun.

Volume subsidi BBM dan listrik tersebut sangat besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena harga minyak yang melonjak sangat tinggi dan sempat mencapai lebih dari US\$ 145/barel pada Juli 2008. Tingginya harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US\$ 101,3 /barel serta konsumsi yang melebihi target merupakan faktor utama yang memicu angka subsidi energi menjadi sangat tinggi.

Subsidi energi mengambil porsi yang cukup besar dalam APBN. Akan sangat bermanfaat dan berdampak ekonomi positif jika anggaran subsidi tersebut dipergunakan untuk pembangunan sektor lain yang lebih penting, seperti pendidikan, kesehatan, subsidi pangan, perawatan/ pembangunan infrastruktur, jalan, transportasi dan bantuan sosial. Pergeseran subsidi energi menjadi subsidi langsung atau untuk anggaran sektor lain, memiliki dampak politik dan sosial yang lebih tinggi, Sehingga perlu dilakukan secara bertahap.

Penurunan subsidi BBM, LPG dan BBN pada tahun 2014 direncanakan menurun sampai dengan 44,3 trilyun dibandingkan rencana tahun 2010 sebesar 68,7 trilyun (penurunan sebesar 24.4 trilyun). Subsidi listrik juga diturunkan menjadi 29,2 trilyun dari sebelumnya pada tahun 2010 sebesar 37,8 trilyun (penurunan sebesar 8,6 trilyun). Dengan penurunan subsidi ini, maka akan tersedia lebih banyak dana untuk pembangunan sektor lain yang lebih memerlukan.

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2014
-----	--------	------------------	-------------

5	Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM dan Listrik	Total subsidi BBM, LPG dan BBN (Trilyun Rupiah)	279,7
		Total subsidi Listrik (Trilyun Rupiah)	175,5

6. Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam peningkatan surplus neraca perdagangan dengan mengurangi impor

Sekitar 60% produksi minyak Indonesia dipasok untuk dalam negeri dan sisanya sebesar 40% untuk ekspor. Terkait Neraca atau balance minyak mentah Indonesia, saat ini ekspor sebesar 399 ribu bph (61%) masih lebih besar dari impor sebesar 254 ribu bph (39%), atau ekspor lebih besar dari impor (net exporter). Namun, jika impor BBM sebesar 418 ribu barel/hari juga diperhitungkan, maka balance minyak berubah menjadi ekspor 399 ribu bph (37%) dan impor 672 bph (77%), sehingga impor lebih besar daripada ekspor (net importer).

Dengan produksi minyak sebesar 976 ribu bph saat ini, sementara konsumsi dalam negeri sebesar 1.038 ribu bph, maka impor BBM tetap diperlukan. Konsumsi terbesar terjadi pada sektor transportasi (56%) dan diikuti oleh pembangkit listrik (18%), industri (13,5%) dan rumah tangga (12,5%).

Sehubungan dengan resesi ekonomi global, dalam konteks perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 ini diproyeksikan masih positif, yaitu 5,5%. Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh dominasi konsumsi domestik, belanja pemerintah yang lebih tinggi, investasi yang relatif konstan dan pendapatan bersih ekspor (ekspor dikurangi impor) yang masih positif.

Sektor ESDM selalu mencatatkan surplus sejak tahun 2005 sampai dengan 2009. Nilai impor per tahun adalah antara 54 s.d. 64 persen dari nilai ekspornya, sehingga neraca perdagangannya selalu positif. Pada tahun 2008, surplus dicapai pada angka yaitu sebesar US\$ 17,9 miliar, dimana ekspornya mencapai US\$ 50,1 miliar dan impornya US\$ 32,2 miliar. Untuk tahun 2009 ini, dimana dampak resesi global masih kuat, meskipun nilai ekspor sektor ESDM

menurun, namun nilai impornya juga menurun, sehingga surplus masih dapat dipertahankan.

Dalam proyeksi tahun 2010 sampai dengan 2014, nilai ekspor dirancang setiap tahunnya sebesar 135 juta barrel. Angka ini adalah setelah memperhitungkan upaya peningkatan produksi dan optimasi lapangan yang ada, serta pembukaan wilayah kerja yang baru. Sementara untuk nilai ekspor gas bumi ditargetkan pada angka 379.539,5 BBTU pada tahun 2014. Sementara itu nilai impor komoditi migas dan pertambangan umum diusahakan tidak meningkat dari tahun ke tahun. Kalaupun ada peningkatan angkanya tidak besar yang selaras dengan upaya konservasi dan menjadikan neraca yang positif atau surplus.

Pada tahun 2014 nilai impor BBM sebesar 42,25 juta kilo liter, sedangkan impor minyak mentah untuk diolah sebesar 90,04 juta barel dan diupayakan penurunan nilai impor pertambangan umum sebesar 903 untuk masing-masing tahun 2010 s.d 2014.

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2014
6	Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam peningkatan surplus neraca perdagangan, dengan mengurangi impor	i. nilai ekspor sektor ESDM	135
		• Nilai ekspor minyak mentah (juta barel)	
		• Nilai ekspor natural gas (BBTU)	379.539,50
		ii. Nilai impor sektor ESDM	
		• Nilai impor BBM (juta KL)	42,25
		• Impor crude oil (juta barel)	90,04
		• Penurunan nilai impor pertambangan umum	903

7. Terwujudnya peningkatan efek berantai/ketenagakerjaan

Sektor ESDM berkontribusi secara nyata sebagai penggerak utama pembangunan melalui efek berantai (Multiplier Effect). Disamping pembangunan daerah dan Pengembangan Masyarakat (Community Development), efek berantai tersebut dapat diidentifikasi dari kegiatan pembukaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah dan peningkatan kegiatan ekonomi.

Sektor ESDM memberikan dampak *backward linkage* dan *forward linkage*. Keberadaan industri ESDM membentuk *backward linkage*, yaitu terciptanya industri yang mendukung kegiatan industri ESDM tersebut. Contoh dari industri tersebut antara lain industri material dan peralatan di Batam seperti pabrikasi pipa, platform, alat-alat berat dan lain-lain. Selain itu, adanya industri ESDM juga menghidupkan *forward linkage* dimana industri lain seperti pabrik pupuk, petrokimia, dan industri lainnya tumbuh dan berkembang karena keberadaan dan operasi industri ESDM.

Kebutuhan sektor ESDM terhadap tenaga kerja terdidik dan terampil banyak sekali membuka lapangan kerja, meskipun sifat dari industri ESDM adalah *capital intensive* atau memerlukan modal besar untuk beroperasi, bukan *labour intensive* atau memerlukan jumlah tenaga yang banyak sekali untuk memulai operasi industrinya. Upaya upaya peningkatan ketrampilan sumber daya manusia sektor sangat didukung melalui kerjasama yang intens antara pemerintah dan industri.

Salah satu upaya nyata adalah Peningkatan Kualitas SDM Nasional dalam Kegiatan Usaha Migas yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja migas tingkat terampil dan ahli dalam negeri yang memiliki kualifikasi dengan pengakuan nasional dan internasional, dalam rangka menjawab isu-isu strategis bidang migas, antara lain peningkatan cadangan dan produksi migas nasional, pembangunan/peningkatan kapasitas sarana pengolahan, distribusi dan transmisi migas, serta peningkatan jumlah dan kompetensi aparatur pusat maupun daerah di bidang pengelolaan dan pengawasan kegiatan usaha migas.

Berdasarkan data yang terkumpul, telah terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja langsung sebesar 167% dalam kurun waktu 3-4 tahun yaitu dari tahun 2005 sebesar 655 ribu tenaga kerja menjadi 1,7 juta tenaga kerja pada tahun 2008. Angka ini belum termasuk tenaga kerja tidak langsung yang terlibat dalam kegiatan pendukung. Namun demikian, akibat dampak resesi global, pada tahun 2009 diperkirakan terjadi sedikit penurunan penyerapan tenaga kerja langsung menjadi sekitar 1,6 juta tenaga kerja. Namun, Dengan potensi yang sangat besar dan perkembangan sektor ESDM, maka di tahun

2014 ditargetkan jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 3,3 juta tenaga kerja atau meningkat lebih dari dua kali lipat jumlah tenaga yang terserap tahun 2009.

KESDM juga berupaya terus membina dan mengembangkan kegiatan usaha penunjang migas sebagai pilar pertumbuhan perekonomian nasional melalui langkah-langkah utama, yaitu, Keberpihakan kepada perusahaan nasional dengan memberikan preferensi, insentif, aliansi strategis (kemitraan), serta proteksi; pengendalian impor barang operasi migas yang bertujuan untuk pemberdayaan produksi dalam negeri, disamping untuk mendapatkan fasilitas bebas bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI); penyusunan dan menerbitkan ADP (*Appreciation of Domestic Product*) List, yang memuat perusahaan/pabrik yang sudah mampu memproduksi barang dan jasa dalam negeri sebagai acuan dalam pengadaan barang dan jasa di Kegiatan Usaha Migas; mewajibkan minimum TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dalam setiap pengadaan barang dan jasa dan penyiapan kebijakan untuk Perusahaan Migas Nasional yang mendominasi pada industri migas.

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2014
7	Terwujudnya Peningkatan Efek Berantai/ Ketenagakerjaan	i. Jumlah Penyerapan tenaga kerja	
		• sub sektor migas	463.594
		• sub sektor Ketenagalistrikan	2.813.000
		• sub sektor pertambangan umum	136.62
		ii. Pemberdayaan nasional	
		• Rasio tenaga kerja asing dengan tenaga kerja nasional	1
		• Persentase pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada usaha minyak dan gas bumi	65
		• Persentase peningkatan pemberdayaan kapasitas nasional sub sektor Migas	50
		• Persentase penggunaan Barang dan Jasa Produksi dalam negeri dalam pembangunan sektor ketenagalistrikan	80
		iii. Peningkatan nilai tambah	
		• Persentase peningkatan kemampuan nasional dalam merancang dan merakit	80

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2014
		instalasi peralatan migas	
		iv. Peningkatan industri jasa (<i>backward linkage</i>) dan industri yang berbahan baku dari sektor ESDM, antara lain pupuk (<i>forward linkage</i>)	
		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah industri jasa penunjang <ul style="list-style-type: none"> Minyak dan gas bumi (perusahaan) Ketenagalistrikan (perusahaan) Pertambangan umum (perusahaan) Persentase pemenuhan bahan baku industri pupuk 	1280 850 800 100

Pengelolaan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral memerlukan pengetahuan dan kompetensi yang cukup khususnya bagi Aparatur Pemerintah Daerah. Kebutuhan sumber daya manusia Aparatur khususnya di sub sektor mineral dan batubara terhadap kebutuhan Aparatur Pemda Propinsi/Kabupaten/Kota dikaitkan dengan prediksi Penyelenggaraan Diklat tipe C, B, A, dan Inspektur Tambang dapat dijelaskan seperti pada Tabel berikut:

JENIS DIKLAT	PERKIRAAN SDM	KEBUTUHAN DIKLAT
Tipe C (setingkat Staf/Eselon IV) . 8 orang/Prov; 2 orang/Kab/Kota	1394 orang (278 orang/tahun)	14 angkatan/tahun (perlu waktu 5 tahun)
Tipe B (setingkat Eselon III) . 4 orang/Prov; 2 orang/Kab/Kota	984 orang (200 orang/tahun)	10 diklat/tahun (perlu waktu 5 tahun)
Tipe A (setingkat Eselon II) . 1 orang/Prov	33 orang (33 orang/tahun)	2 diklat/tahun (perlu waktu 1 tahun)
Inspektur Tambang (Fungsional) 3 orang/Prov; 1 orang/Kab/Kota	578 orang (193 orang/tahun)	10 diklat/tahun (perlu waktu 3 tahun)

Untuk mendukung target capaian produksi di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral perlu didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dengan

kualifikasi yang dibutuhkan oleh Industri. Berdasarkan prediksi kebutuhan tenaga kerja industri sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, diperoleh distribusi data tenaga kerja sub sector minyak dan gas bumi, mineral, batubara, dan panas bumi, dan ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan seperti pada Tabel berikut:

No.	Data	Target Diklat				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti diklat Diklat Migas	2.780	2.920	3.020	3.080	3.220
2	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti diklat Diklat Ketenagalistrikan dan Energi baru Terbarukan	720	760	800	860	920
3	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti diklat Diklat Mineral, Batubara, dan Panas Bumi	2.785	2.885	2.985	3.085	3.185
4	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti diklat Diklat Geologi	800	980	1.200	1.440	1.600
5	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti diklat Diklat Tambang Bawah Tanah	60	60	60	60	60
6	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Pendidikan Tinggi Migas	241	277	319	367	422
7	Jumlah Tenaga Kerja Kegiatan Usaha Migas yang tersertifikasi	4.000	4.250	4.500	4.750	5.000
8	Jumlah Tenaga Kerja Kegiatan Usaha Ketenagalistrikan dan Energi baru Terbarukan yang tersertifikasi	2.180	2.290	2.400	2.520	2.650
9	Jumlah Tenaga Kerja Kegiatan Usaha Mineral, Batubara, dan Panas Bumi yang tersertifikasi	100	150	150	150	200

II.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh KESDM setiap tahun. Sasaran ditetapkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai selama 5 tahun. Sasaran strategis KESDM selama 5 tahun mulai tahun 2010 s.d. 2014 adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran strategis yang terkait dengan tujuan **terjaminnya pasokan energi dan bahan baku domestik** adalah sebagai berikut:

Sasaran/indikator	Target				
	2010	2011	2012	2013	2014
i. Meningkatnya kemampuan pasokan energi untuk domestik :					
• produksi minyak bumi (MBOPD)	965	970	990	1.000	1.010
• produksi gas bumi (MBOEPD)	1.593	1.592	1.594	1.544	1.633
• Produksi CBM (MBOEPD)	-	-	21,7	61,34	113,21
• Produksi batubara (MBOEPD)	2875	3220	3335	3416	3554
• Produksi BBM (juta KL)	39,9	39,9	39,9	45,9	45,9
• Produksi LPG (juta Ton)	1,98	2	2	2	2
• Produksi LNG (MMTPA)	24,12	23,29	23,52	23,81	23,15
• Rencana pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (juta ton)	75	93	95	96	110
ii. Meningkatnya kemampuan pasokan bahan baku untuk domestik					
• Persentase pemenuhan kebutuhan bahan baku pupuk dan petrokimia	100	100	100	100	100
iii. Meningkatnya pengembangan berbagai sumber energi dalam rangka diversifikasi energi :					
• Pangsa gas bumi (%)	24,5	30,0	29,3	25,1	24,3
• Pangsa CBM (%)	-	-	0,3	0,9	1,6
• Pangsa batubara (%)	23,3	22,1	22,9	23,6	23,6
• Pangsa panas bumi (%)	2,6	2,8	3,0	4,7	5,4
• Pangsa energi baru terbarukan lainnya (%)	3,0	3,0	3,1	3,3	3,7
iv. Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi dan mineral :					
• Fasilitas produksi minyak bumi (BOPD)	60.000	66.534	160.816	234.258	205.000
• Fasilitas produksi gas bumi (MMSCFD)	1.020	1.375	1.900	13.456	2.510
• Fasilitas produksi CBM (MMSCFD)	1	8	12	25	40
• Kilang minyak (BOPD)	6.800	-	-	-	-
• Kilang LPG (ton/hari)	21	12	-	1.100	-
• Kilang LNG (MMSCFD)	-	-	-	250	-
• LNG receiving terminal	-	-	300	500	-

Sasaran/indikator	Target				
	2010	2011	2012	2013	2014
(MMSCFD)					
• Jaringan pipa transmisi gas bumi (km)	200	420	230	275	250
• Jaringan pipa gas kota (RT)	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
• Rasio elektrifikasi	67,2%	70,4%	73,6%	76,8%	80%
• pembangkit listrik (MW)	8.689	5.279	6.598	4.930	5.059
• PLTP (MW)	70	158	973	795	2620
v. Peningkatan efisiensi pemakaian dan pengolahan energi :					
• Elastisitas Energi	1,64	1,60	1,56	1,52	1,48
• Penurunan emisi CO ₂ (%)	5,4	5,9	6,4	6,9	7,3

2) Sasaran yang terkait dengan tujuan **meningkatnya investasi sektor ESDM** adalah sebagai berikut:

Sasaran/Indikator	Target				
	2010	2011	2012	2013	2014
Meningkatnya investasi sektor ESDM					
Jumlah Investasi sub sektor migas (US\$ juta)	15.415	17.177	17.851	18.390	19.188
Jumlah Investasi bidang listrik dan pemanfaatan energi (US\$ juta)	10.146	9.279	8.933	8.184	7.889
Jumlah investasi sub sektor pertambangan umum (US\$ juta)	2.502	3.077	5.008	4.680	7.468
Total Investasi (US\$ Juta)	28.063	29.533	31.792	31.254	34.545

3) Sasaran yang terkait dengan tujuan **terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam penerimaan negara** adalah sebagai berikut:

Sasaran/Indikator	Target				
	2010	2011	2012	2013	2014
Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam penerimaan negara					
• Jumlah penerimaan negara sub sektor migas (Triliun Rupiah)	159,75	179,20	178,54	174,33	167,21
• Jumlah penerimaan negara dari subsektor pertambangan umum (Rp Triliun)	57,139	58,843	60,585	62,402	64,258
• Jumlah PNB dari Badan Litbang (Rp Triliun)	0,0497	0,059	0,070	0,084	0,099

• Jumlah PNBP dari Badan Diklat (Triliun Rupiah)	0,154	0,155	0,156	0,158	0,160
• Jumlah PNBP dari BPH Migas (Triliun Rupiah)	0,433	0,436	0,439	0,441	0,444
Total Penerimaan Negara Sektor ESDM	218	238,693	239,79	237,415	232,17

- 4) Sasaran yang terkait dengan tujuan **terwujudnya peningkatan peran sektor ESDM dalam pembangunan daerah** adalah sebagai berikut:

Sasaran / indikator	Target				
	2010	2011	2012	2013	2014
Terwujudnya peningkatan peran sektor ESDM dalam pembangunan daerah					
• Jumlah dana bagi hasil subsektor Minerba Pabum (Milliar Rupiah)	8.231	8.643	9.075	9.529	10.005
• Jumlah dana bagi hasil subsektor Migas (Milliar Rupiah)	16.082	18.423	18.055	17.196	15.933
• Jumlah CSR subsektor Minerba Pabum (Milliar Rupiah)	705	708	711	717	718
• Jumlah CSR subsektor Listrik dan Pemanfaatan Energi (Milliar Rupiah)	94	94	94	94	94
• Jumlah CSR subsektor Migas (Milliar Rupiah)	380	385	390	395	390
• Jumlah jaringan distribusi listrik(kms) dan gardu distribusi listrik (MVA)	18004/ 1266	18091 /1311	18960/1 416	19988 /1548	20508/ 1567
• Jumlah desa mandiri energi (desa)	50	50	50	50	50
• Jumlah sumur bor daerah sulit air	100	100	100	100	100

- 5) Sasaran yang terkait dengan tujuan **terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM dan Listrik** adalah sebagai berikut:

Sasaran / indikator	Target				
	2010	2011	2012	2013	2014

Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM dan Listrik					
• Jumlah subsidi BBM, LPG dan BBN (Trilyun Rupiah)	68,7	59,6	56	51,1	44,3
• Jumlah subsidi Listrik (Trilyun Rupiah)	37,8	41,5	37,9	29,1	29,2

- 6) Sasaran yang terkait dengan tujuan **peningkatan peran penting sektor ESDM dalam peningkatan surplus neraca perdagangan dengan mengurangi impor** adalah sebagai berikut:

Sasaran / Indikator	Target				
	2010	2011	2012	2013	2014
Optimalnya ekspor dan impor sektor ESDM					
• Jumlah ekspor minyak mentah (juta barel)	135	135	135	135	135
• Jumlah nilai ekspor natural gas (BBTU)	354.632,5	355.956,8	400.572,3	400.184,5	379.539,5
• Jumlah nilai impor BBM (juta KL)	27,08	30,06	34,29	38,17	42,25
• Jumlah impor crude oil (juta barel)	90,04	90,04	90,04	90,04	90,04
• Jumlah impor pertambangan umum (Juta US\$)	903	903	903	903	903

- 7) Sasaran yang terkait dengan tujuan **terwujudnya peningkatan efek berantai/ketenagakerjaan** adalah sebagai berikut:

Sasaran/Indikator	Target				
	2010	2011	2012	2013	2014
i. Terwujudnya penyerapan tenaga kerja					
• Jumlah tenaga kerja sub sektor migas	411.898	424.254	436.982	450.092	463.594
• Jumlah tenaga kerja sub sektor Ketenagalistrikan	1.787.000	2.102.000	2.325.000	2.497.000	2.813.000

Sasaran/Indikator	Target				
	2010	2011	2012	2013	2014
• Jumlah tenaga kerja sub sektor pertambangan umum	121.680	124.182	127.535	131.856	136.620
ii. Terwujudnya pemberdayaan nasional					
• Rasio tenaga kerja asing dengan tenaga kerja nasional	1	1	1	1	1
• Persentase pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada usaha minyak dan gas bumi	55	55	60	60	65
• Persentase peningkatan pemberdayaan kapasitas nasional sub sektor Migas	30	30	40	40	50
• Penggunaan Barang dan Jasa Produksi dalam negeri dalam pembangunan sektor ketenagalistrikan	60%	65%	70%	75%	80%
iii. Peningkatan nilai tambah					
• Persentase peningkatan kemampuan nasional dalam merancang dan merakit instalasi peralatan migas	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %
iv. Peningkatan industri jasa (<i>backward linkage</i>) dan industri yang berbahan baku dari sektor ESDM, antara lain pupuk (<i>forward linkage</i>)					
iv.a Peningkatan industri jasa penunjang					
• Jumlah industri jasa penunjang	1270	950	1275	955	1280

Sasaran/Indikator	Target				
	2010	2011	2012	2013	2014
Migas (perusahaan)					
• Jumlah industri jasa penunjang ketenagalistrikan (perusahaan)	650	680	785	830	850
• Jumlah industri jasa penunjang Pertambangan umum (perusahaan)	600	650	750	750	800
iv.b Terpenuhinya bahan baku industri pupuk					
• Persentase pemenuhan bahan baku industri pupuk	100	100	100	100	100

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Kebijakan dan strategi adalah pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang menjadi isu utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran nasional serta sasaran strategis KESDM. Arah kebijakan dan strategi Pada Bab III ini akan diawali dengan apa yang dirangkum dalam penugasan tingkat nasional pada RPJMN dan dilanjutkan dengan tingkat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

III. 1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Terkait dengan penugasan dari RPJM kepada KESDM, terdapat 2 bidang yang harus dikelola yang merupakan sasaran pembangunan. Kedua bidang tersebut adalah: *a. Bidang Sarana Prasarana, b. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*. Setiap bidang memiliki fokus prioritas sebagai pengejawantahan dari sasaran yang ada tersebut. Penjelasan dari kedua bidang tersebut adalah sbb:

A. BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Pembangunan nasional bidang sarana dan prasarana terkait dengan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral berfokus kepada beberapa prioritas dengan fokus yang berada pada tingkat yang menjangkau kebutuhan seluruh Indonesia. Fokus prioritas tersebut terdiri dari 1) Mendukung peningkatan daya saing sektor riil dan 2) Meningkatkan kerjasama pemerintah dan swasta (KPS).

Fokus Prioritas

1) Mendukung peningkatan daya saing sektor riil

Prioritas di atas mengidentifikasikan beberapa sasaran dan strategi di bawah ini:

a) *Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan terutama untuk mendukung pembangunan ekonomi*. Hal ini dilakukan dengan:

(1) Peningkatan kapasitas pembangkit listrik;

- (2) Pembangunan tambahan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi dan ketenagalistrikan;
 - (3) Peningkatan jumlah gardu transmisi ketenagalistrikan;
 - (4) Melanjutkan program pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (pltn);
 - (5) Fasilitasi peningkatan pemanfaatan dan pengembangan potensi panas bumi skala besar dan kecil termasuk penyempurnaan regulasi terkait panas bumi;
 - (6) Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana minyak dan gas bumi serta energi alternatif seperti coal bed methane (CBM), dimethyl eter (DME) dan lain-lain; serta
 - (7) Pemanfaatan potensi pendanaan domestik baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan, termasuk pengembangan skema pendanaannya.
- b) *Penyesuaian tarif secara bertahap dan sistematis menuju nilai keekonomiannya yang terjangkau, dan berkeadilan.* Hal ini dilakukan dengan:
- (1) Fasilitasi kebijakan dan regulasi berkaitan dengan penyesuaian tarif (BBM dan listrik) yang wajar sekaligus mendorong pemakaian energi yang lebih hemat dan mendorong sistem bisnis yang lebih sehat,
 - (2) Pelaksanaan tarif regional dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kondisi geografis setempat serta disesuaikan dengan kualitas pelayanan yang diterima,
 - (3) Fasilitasi penetapan tarif regional bersama pemerintah daerah.
- c) *Subsidi secara bertahap akan dikurangi dan diarahkan langsung kepada penerima kaum dhuafa serta dimanfaatkan untuk pengembangan energi baru terbarukan.* Hal ini dilakukan dengan:
- (1) Fasilitasi kebijakan subsidi,
 - (2) Pemberian subsidi listrik kepada pelanggan golongan rumah tangga dan
 - (3) Penurunan jumlah subsidi BBM
- d) *Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sarana dan prasarana energi, terutama upaya peningkatan diversifikasi energi, peningkatan efisiensi dan konservasi*

energi, pengurangan losses, peremajaan sarana dan prasarana yang kurang efisien, serta penerapan good governance pengelolaan korporat. Hal ini dilakukan dengan:

- (1) Meningkatkan program efisiensi dan konservasi energi baik pada sisi hilir maupun hulu;
- (2) Restrukturisasi dan penerapan *good governance* pengelolaan BUMN bidang energi dan ketenagalistrikan;
- (3) Penggunaan teknologi yang lebih mutakhir dan efisien;
- (4) Penelitian dan pengembangan teknologi energi dan ketenagalistrikan yang efisien dan ramah lingkungan; serta
- (5) Menyusun dan menyempurnakan regulasi dan kebijakan guna meningkatkan jaminan dan kepastian hukum pengembangan konservasi dan efisiensi energi serta pemanfaatan energi baru terbarukan.

e) *Menjaga dampak lingkungan dalam pembangunan energi dan ketenagalistrikan.* Hal ini dilakukan dengan:

- (1) Penggunaan energi baru terbarukan dan membuat inovasi dalam pemanfaatan energi yang ramah lingkungan;
- (2) Mendorong pembangunan pembangkit listrik selain pembangkit berbahan bakar minyak seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP dan upaya penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk pembangkit listrik (seperti *clean coal technology*, pemakaian FGD, dan *carbon capture storage/CCS*); serta
- (3) Penetapan regulasi dan fasilitasi kebijakan yang memperkecil dampak terhadap lingkungan serta mengakomodasi program terkait mitigasi dalam konteks perubahan iklim.

2) *Meningkatkan kerjasama pemerintah dan swasta (KPS)*

Arah kebijakan pembangunan prasarana ketenagalistrikan nasional dalam rangka meningkatkan kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) adalah meningkatkan diversifikasi dalam pemanfaatan energi non-minyak khususnya dalam pembangkitan tenaga listrik, yang dikaitkan dengan penurunan tarif dan perubahan iklim (*climate change*).

Dalam pelaksanaan arah kebijakan tersebut, strategi yang akan diterapkan adalah sebagai berikut:

- a) Memberi kepastian hukum yang adil kepada badan usaha dalam penyediaan tenaga listrik sesuai UU Ketenagalistrikan yang baru;
- b) Meningkatkan kualitas standar dan prosedur penyiapan proyek yang dapat diterima semua pihak;
- c) Memberi kepastian yang adil dalam kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama proyek dan perjanjian jual beli energi atau tenaga listrik dengan memperhatikan pengelolaan resiko yang adil dan tepat serta mengikutsertakan pemerintah daerah;
- d) Mendorong usaha penyediaan ketenagalistrikan pada pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan secara terintegrasi atau secara terpisah.

B. BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pembangunan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terkait dengan upaya pengelolaan, pemanfaatan dan konservasi sumber energi di Indonesia. Sasaran pembangunan bidang ini adalah *1) Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi dan 2) Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan.*

1) Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi

Pembangunan dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi dilakukan untuk mencapai beberapa hal, yakni:

- a) Diversifikasi atau bauran energi yang dapat menjamin kelangsungan dan jumlah pasokan energi di seluruh wilayah Indonesia dan untuk seluruh penduduk Indonesia dengan tingkat pendapatan yang berbeda-beda;
- b) Meningkatnya penggunaan Energi Baru Terbarukan dan berpartisipasi aktif dan memanfaatkan berkembangnya perdagangan carbon secara global;
- c) Meningkatnya efisiensi konsumsi dan penghematan energi baik di lingkungan rumah tangga maupun industri dan sektor transportasi; dan
- d) Meningkatnya produksi dan pemanfaatan energi yang bersih dan ekonomis.

Sasaran

Sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan ketahanan dan kemandirian energi pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a) Tercapainya peranan gas bumi sebesar 20% dan batubara sebesar 30% dalam bauran energi primer, serta EBT sebesar 16%;
- b) Tercapainya produksi minyak bumi 1,010 juta barel per hari, produksi gas bumi 1.633 ribu SBM per hari atau 9.000 MMSCF per hari serta gas metana batubara 113 ribu SBM per hari;
- c) Meningkatnya produksi BBM 45,9 juta KL, LPG 2 juta ton, LNG 23,15 juta ton;
- d) Meningkatnya cadangan minyak bumi menjadi 8.651,8 milyar barel, gas bumi 172 TSCF, gas metana batubara 24 TSCF;
- e) Tercapainya produksi BBN, yakni bio-diesel 2.737 ribu KL dan bio-ethanol 1.334 ribu KL, dan penggunaan BBN dalam pemakaian bahan bakar total, yakni bio-diesel 8% dan bio-ethanol 5%;
- f) Tercapainya pengalihan pemakaian minyak tanah ke LPG sebesar 77,7 persen;
- g) Tercapainya penggunaan panas bumi PLTP 5.795 MW, mikrohidro PLTMH 46,17 MW, tenaga surya PLTS 102,1 MWp, tenaga angin PLT Angin 21,67 MW;
- h) Tercapainya efisiensi pemanfaatan energi dengan elastisitas energi sebesar 1,48 dan intensitas energi sebesar 370 SBM/US\$ PDB;
- i) Meningkatnya tingkat penghematan energi sebesar 13-15% dari perkiraan penggunaan energi *business as usual*; dan tercapainya penurunan emisi CO₂ untuk energi sebesar 7,3% dari emisi CO₂ *business as usual*.

Kebijakan Umum

Untuk mencapai sasaran dari segi **ketahanan dan kemandirian energi** di atas, kebijakan umum peningkatan ketahanan dan kemandirian energi diarahkan pada tiga hal pokok, yaitu:

- a) *Menjamin keamanan pasokan energi.*
Kebijakan ini dilaksanakan dengan meningkatkan (intensifikasi) eksplorasi dan optimasi produksi minyak dan gas bumi, serta eksplorasi untuk meningkatkan cadangan minyak dan gas bumi, termasuk gas metana batubara;
- b) *Mengurangi ketergantungan yang berlebihan terhadap minyak bumi.*

Kebijakan ini dilaksanakan dengan menganekaragamkan atau diversifikasi energi primer, termasuk memanfaatkan EBT serta energi bersih; dan

c) *Meningkatkan produktivitas pemanfaatan energi.*

Kebijakan ini dilaksanakan melalui gerakan efisiensi dan konservasi (penghematan), serta pemerataan penyediaan energi sesuai dengan kebutuhan dan daya beli masyarakat.

Disamping itu, ketahanan dan kemandirian energi juga akan didukung oleh adanya kebijakan harga energi serta insentif yang rasional, artinya kebijakan harga energi yang secara bertahap menggambarkan nilai ekonomi energi.

Penghematan pemanfaatan energi terutama akan dilakukan untuk sektor-sektor yang mengkonsumsi energi yang besar seperti industri, pembangkit listrik dan transportasi. Dalam pelaksanaannya, kebijakan umum ini akan dilakukan secara integratif antara penguasaan teknologi energi, baik teknologi pencarian sumber daya energi (eksplorasi), pengambilan atau pemanfaatan energi (eksploitasi) maupun teknologi konversi dan distribusi energi. Selain itu pembangunan infrastruktur energi juga memegang peranan penting di dalam upaya meningkatkan penyaluran energi, terutama dalam upaya untuk meningkatkan penggunaan energi non-minyak bumi (diversifikasi).

Fokus Prioritas

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketiga kebijakan umum tersebut, maka arah dan kebijakan strategi menentukan fokus prioritas bagi kebijakan *peningkatan ketahanan dan kemandirian energi* dalam RPJMN 2010 yaitu:

a) **Peningkatan produksi dan cadangan minyak dan gas bumi.**

Fokus prioritas ini mengidentifikasi strategi-strategi yang dilaksanakan melalui *peningkatan daya tarik investasi eksplorasi dan eksploitasi* terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan baik itu bahan bakar dan bahan baku industri dalam negeri maupun sumber penerimaan devisa negara.

Beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilakukan diarahkan dalam rangka:

- (1) *Mendorong penyelidikan dan pemetaan geologi* untuk meningkatkan penguasaan data cadangan serta melakukan inventarisasi dan

pemutakhiran data potensi pengembangan lapangan minyak bumi, gas bumi, dan gas metana batubara;

- (2) *Menerapkan insentif yang lebih efektif* untuk mendorong kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi, gas bumi, dan gas metana batubara, serta meningkatkan kualitas promosi dan penawaran lapangan minyak dan gas bumi serta pengawasan produksi dan pemanfaatan minyak dan gas bumi untuk kepentingan bahan baku, terutama pupuk dan petrokimia, di dalam negeri;
- (3) *Mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi*, terutama teknologi tinggi EOR (*enhanced oil recovery*) untuk memanfaatkan lapangan-lapangan minyak bumi yang sudah tua umurnya; dan
- (4) *Meningkatkan transparansi, tata kelola, dan menghilangkan korupsi* serta biaya yang tidak efisien di sektor hulu energi, yakni eksplorasi dan eksploitasi.

b) Peningkatan produktivitas dan pemerataan pemanfaatan energi dan penggunaan energi baru dan terbarukan.

Fokus prioritas ini mengidentifikasikan strategi *peningkatan produktivitas dan pemerataan pemanfaatan energi* ini ditujukan untuk peningkatan efisiensi penyediaan dan pemanfaatan energi, penghematan penggunaan energi, peningkatan akses masyarakat akan energi, serta penggunaan sumber energi bukan fosil, seperti tenaga panas bumi, matahari, angin, dan sebagainya.

Efisiensi di bidang penggunaan energi selain ditujukan untuk meningkatkan produksi nasional dengan menggunakan energi yang lebih rendah, juga dimaksudkan untuk menurunkan emisi karbon, memperbaiki daya saing dan mendorong perekonomian, serta meningkatkan kesejahteraan. Penyediaan energi secara merata sesuai dengan kebutuhan dan daya beli masyarakat dilakukan melalui penerapan diversifikasi energi final serta peningkatan tingkat pelayanan jaringan distribusi serta akses energi.

Beberapa strategi yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan *produktifitas dan pemerataan pemanfaatan energi* diarahkan untuk:

- (1) Menyesuaikan harga energi melalui penyempurnaan subsidi BBM/LPG dan listrik untuk mendorong masyarakat pemakai energi menggunakan secara lebih hemat dan memperbesar akses pelayanan energi untuk masyarakat yang belum terlayani;
- (2) Menerapkan insentif-disinsentif secara tepat untuk mendorong penggunaan teknologi yang efisien pada kegiatan produksi (eksploitasi) energi primer, pengolahan (kilang minyak dan gas, pusat pembangkit listrik), penghantaran (sistem jaringan transmisi dan distribusi), serta pemakaian energi (transportasi, rumah tangga, listrik dan industri);
- (3) Mempromosikan budaya hemat energi ke berbagai kalangan masyarakat, termasuk pendidikan hemat energi sejak dini;
- (4) Memperkuat kelembagaan dan peraturan perundangan gerakan efisiensi dan konservasi energi;
- (5) Meningkatkan kualitas pengawasan atas efisiensi fasilitas dan kegiatan produksi, pengolahan, penghantaran, dan konsumsi energi;
- (6) Menambah pasokan energi melalui pembangunan kilang minyak dan gas, infrastruktur pembangkit listrik, transmisi dan distribusi energi dengan mutu yang memadai;
- (7) Meningkatkan kompetisi yang sehat dan transparan di sektor hilir energi, agar tercapai pelayanan yang baik dan harga yang rasional dan terjangkau bagi masyarakat luas;
- (8) Meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi energi sehingga terdapat tambahan energi yang dapat disediakan bagi masyarakat yang belum memiliki pelayanan energi.

Untuk *meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan*, serta energi bersih, beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilakukan diarahkan untuk

- (1) Mendorong pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik skala menengah dan besar;
- (2) Mendorong pemanfaatan mikrohidro untuk pembangkit listrik skala kecil dan menengah, terutama di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh sistem jaringan kelistrikan nasional;

- (3) Mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati, dengan penanamannya pada wilayah-wilayah yang memiliki lahan tidak terpakai namun luas dan memiliki potensi produksi pertanian yang tinggi; dan
- (4) Mendorong pemanfaatan tenaga surya dan angin pada daerah/kepulauan terpencil dan daerah-daerah dengan tingkat ketersediaan energi yang masih rendah namun memiliki intensitas sinar matahari/angin yang cukup tinggi seperti NTT, NTB, Papua, Maluku, dan sebagainya.

2) Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

Pembangunan dalam rangka meningkatkan pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan dilakukan untuk mencapai beberapa hal, yakni:

- a) Meningkatnya produksi dan jenis produk tambang untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar dan bahan baku di dalam negeri;
- b) Terwujudnya penambangan yang efisien dan produktif didukung oleh kemampuan penguasaan teknologi, kualitas sumber daya manusia dan manajemen usaha pertambangan;
- c) Meningkatnya peran serta masyarakat, terutama melalui wadah koperasi, dalam perusahaan pertambangan, terutama pertambangan rakyat;
- d) Meluasnya kegiatan perusahaan pertambangan yang mendukung pengembangan wilayah, terutama kawasan timur Indonesia;
- e) Tersedianya pelayanan informasi geologi/sumber daya mineral, baik untuk keperluan eksplorasi, penataan ruang, reklamasi kawasan bekas tambang, maupun mitigasi bencana alam.

Sasaran

Sasaran produksi *pertambangan mineral dan batubara* yang akan dicapai pada tahun 2014 adalah:

- a) Tercapainya produksi batubara 309 juta ton, dengan *Domestic Market Obligation* sebanyak 110 juta ton;
- a) Tercapainya produksi timah sebesar 110,25 ribu ton;

- b) Tercapainya produksi bijih nikel sebesar 12,32 juta ton, feronikel sebesar 20,36 ribu ton, dan nikel matte sebesar 91,82 ribu ton;
- c) Tercapainya produksi bauksit sebesar 11,46 juta ton;
- d) Tercapainya produksi tembaga sebesar 944,92 ribu ton;
- e) Tercapainya produksi emas sebesar 117,75 ton dan perak sebesar 274,41 ton; dan
- f) Tercapainya produksi bijih besi sebesar 4,59 juta ton.

Sasaran dalam *penyediaan informasi dasar geologi dan reklamasi kawasan tambang* yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- a) Telesainya rekomendasi usulan rata-rata per tahun sebanyak 40 wilayah kerja pertambangan (WKP) dan wilayah pertambangan (WP);
- b) Selesainya pemetaan/peta geologi daerah bahaya seluruh gunung api;
- c) Selesainya pemetaan geofisika udara di Pulau Kalimantan dan Sulawesi;
- d) Selesainya peta dasar geologi bagi daerah-daerah pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa;
- e) Selesainya pemetaan geologi teknik tata ruang kawasan di beberapa daerah;
- f) Selesainya reklamasi kawasan pertambangan seluas rata-rata 6200 ha per tahun; dan
- g) Pengurangan volume gas flare (100%), limbah (75%), dan peningkatan penggunaan bahan-bahan kimia dan lumpur pemboran ramah lingkungan (100%).

Kebijakan Umum

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, kebijakan umum pembangunan *pertambangan mineral dan batubara* diarahkan pada dua hal pokok, yaitu:

- a) Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk tambang mineral dan batubara; dan
- b) Mengurangi dampak negatif akibat kegiatan pertambangan dan bencana geologi. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kedua hal pokok tersebut, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan pertambangan mineral dan batubara dalam RPJMN 2010-2014 adalah sebagai berikut:

Fokus Prioritas

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kedua kebijakan umum tersebut, maka arah dan kebijakan strategi menentukan fokus prioritas bagi kebijakan *Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan* dalam RPJMN 2010 yaitu:

a) Peningkatan produksi nilai tambah produk tambang mineral dan batubara.

Strategi ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan bahan bakar terutama untuk industri di dalam negeri. Beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilakukan diarahkan untuk:

- (1) Memberikan insentif fiskal (*fiscal regime*) yang stabil dan kompetitif dalam menarik investasi pertambangan mineral dan batubara;
- (2) Memperbaiki dan menyederhanakan birokrasi perijinan (*licensing regime*) perusahaan pertambangan;
- (3) Memperjelas pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan pemberian ijin dalam perusahaan pertambangan;
- (4) Mengembangkan informasi potensi dan wilayah cadangan;
- (5) Meningkatkan kemampuan teknis dan managerial aparat pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan perijinan dan inventarisasi cadangan;
- (6) Menciptakan keamanan usaha dan berusaha dalam perusahaan pertambangan mineral dan batubara;
- (7) Mengembangkan industri pengolahan dan pemurnian (*smelter*) untuk mengubah bahan-bahan mentah mineral logam dan non logam menjadi bahan setengah jadi atau bahkan menjadi bahan yang final;
- (8) Meningkatkan produksi batubara serta pemanfaatannya untuk kepentingan dalam negeri (*domestic market obligation*) terutama sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik;
- (9) Mendorong berkembangnya industri *oil synthetic* dan *clean-coal technology*, serta industri peningkatan mutu batubara (*upgraded brown*

coal), pencairan batubara (*coal liquefaction*) dan gasifikasi batubara (*coal gasification*);

(10) Meningkatkan produksi uap panas bumi melalui kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi; dan

(11) Mendorong pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik;

b) Pengurangan dampak negatif akibat dari kegiatan pertambangan dan bencana geologi.

Strategi ini dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan, baik air, tanah, maupun udara, yang berlebihan akibat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan batubara, dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup termasuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang berpotensi menyebabkan perubahan iklim global. Beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilakukan diarahkan untuk:

(1) Mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pembinaan lingkungan lingkungan, keselamatan operasi, dan usaha penunjang bidang migas;

(2) Mencegah kerusakan cadangan mineral dan batubara serta mengembangkan wilayah pencadangan tambang nasional dengan melakukan *best mining practices* dan menerapkan mekanisme *depletion premium*;

(3) Meningkatkan rehabilitasi kawasan bekas tambang; dan

(4) Mitigasi, pengembangan teknologi, dan fasilitasi dalam rangka penetapan langkah-langkah penanggulangan krisis energi dan bencana geologi.

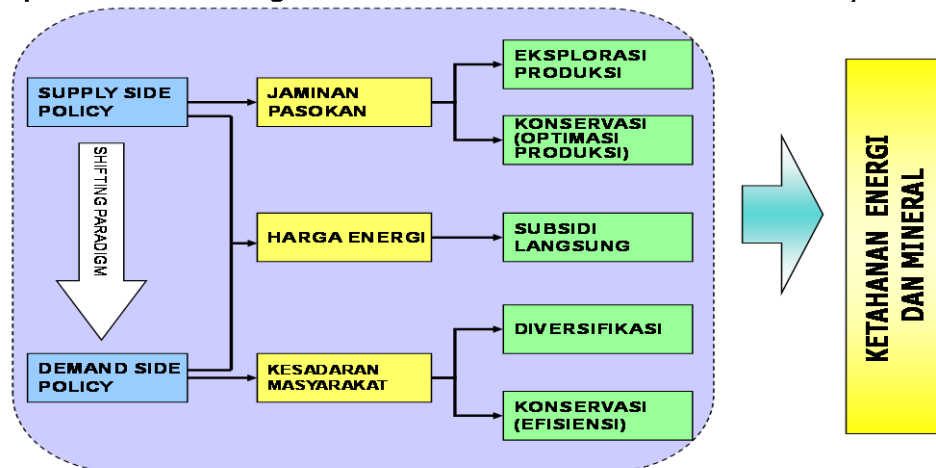
III.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN ESDM

A. KEBIJAKAN

Kebijakan Pengelolaan Energi dan sumber daya mineral nasional mempunyai landasan konstitusional yaitu UUD 1945 pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5). Landasan kebijakan nasional yaitu UU nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Bab III dan Bab IV), landasan operasional UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi pasal 4 ayat (3), UU nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Undang Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Landasan operasional dalam pengelolaan energi lainnya adalah peraturan perundangan dibawah Undang undang antara lain peraturan pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri sepanjang diamanatkan oleh peraturan yang lebih tinggi dan atau dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara (hak atribusi).

KEBIJAKAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Berdasarkan UU Energi No. 30 tahun 2007 & UU Minerba No. 4 tahun 2009)



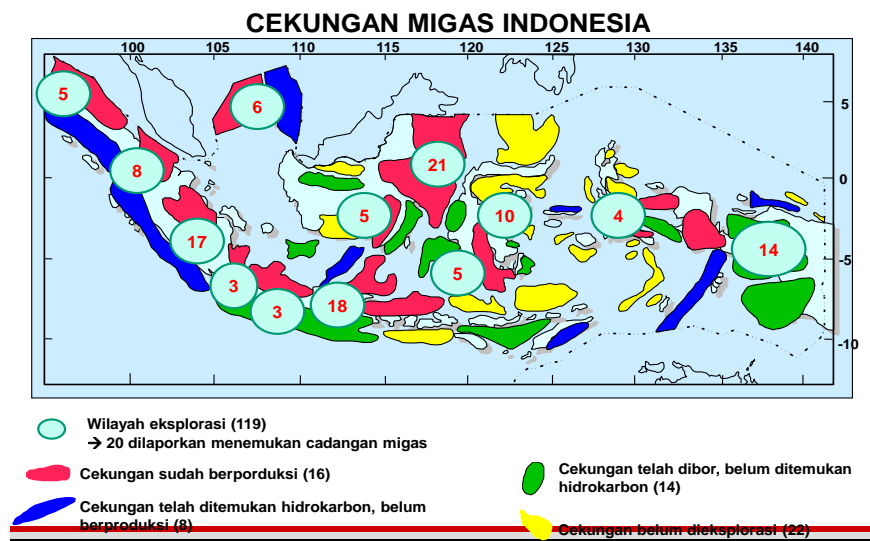
Gambar 3.1. Diagram Kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral

Kebijakan di sektor energi dan sumber daya mineral berdasarkan UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi dan UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara diarahkan untuk mewujudkan ketahanan energi dan mineral di Indonesia. Tujuan ini hendak dicapai dengan melakukan pergeseran paradigma arah kebijakan yang selama ini mengatur sisi penyediaan (*Supply Side Management*) menjadi kebijakan yang arahnya tidak hanya mengatur sisi penyediaan namun juga mengatur sisi permintaan (*Demand Side Management*).

Kebijakan utama sektor energi dan sumber daya mineral diarahkan kepada :

1) Menjamin keamanan pasokan energi

Untuk menjamin pasokan energi, maka upaya eksplorasi dan optimasi produksi energi nasional terus ditingkatkan sehingga mampu mengimbangi perkembangan permintaan energi di dalam negeri. Hal ini dilakukan mengingat masih sangat besarnya potensi energi yang terkandung di bumi Indonesia ini. Dalam rangka meningkatkan produksi, maka eksplorasi telah dilakukan di 107



Gambar 3.2. Cekungan Migas Di Indonesia

wilayah kerja migas. Dari jumlah tersebut dilaporkan 19 lokasi temuan yang



Gambar 3.3. Cekungan Batubara dan CBM Indonesia

sedang dievaluasi potensi cadangan migasnya. Diharapkan dalam waktu dekat akan ada tambahan temuan lagi. Kegiatan eksplorasi ini disamping diharapkan dapat menambah produksi dari lapangan baru juga dimaksudkan

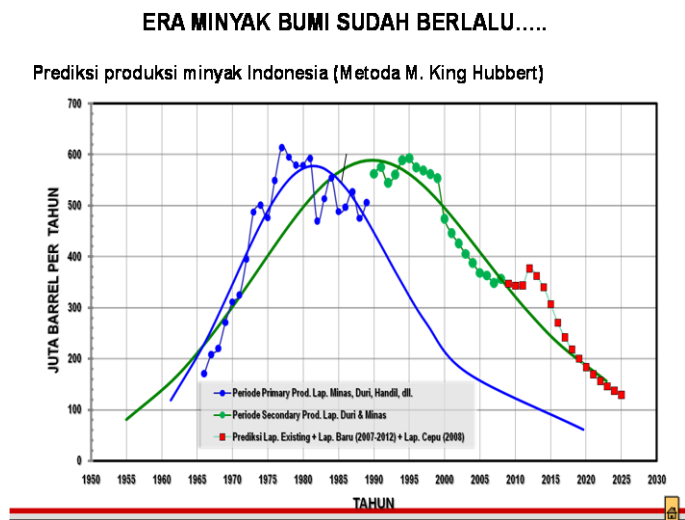
untuk mengkompensasi penurunan alamiah produksi lapangan existing.

Saat ini kebijakan alokasi gas lebih diutamakan untuk pasokan domestik, cadangan besar dapat digunakan baik untuk domestik maupun ekspor dan cadangan kecil untuk domestik. Selain itu, kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) gas juga diberlakukan (25% dari bagian KKKS/PSC, sisanya dapat dipergunakan untuk domestik maupun ekspor). Dari tahun ke tahun, ekspor gas sudah mulai dikurangi, sebaliknya pemanfaatan domestik terus diintensifkan. Hal ini menunjukkan bahwa pada tataran kebijakan dan perencanaan, upaya pengutamaan pasokan gas bumi domestik sudah berjalan sangat baik. Meskipun saat ini kebijakan alokasi gas untuk domestik sudah diprioritaskan, namun ekspor gas juga tetap diperlukan untuk mencapai skala keekonomian dari suatu lapangan gas bumi, mengingat harga gas bumi domestik pada umumnya lebih rendah dibandingkan untuk ekspor. Selain potensi migas, energi fosil lainnya yang potensi besar adalah batubara dan gas metana batubara. Saat ini 54 perusahaan telah mengajukan permohonan Wilayah Kerja CBM melalui Penawaran Langsung di daerah Sumatera dan Kalimantan dimana 2 perusahaan telah selesai melakukan joint evaluation, 3 perusahaan sedang melakukan joint evaluation, 1 perusahaan sedang melakukan joint study, 3 perusahaan telah menandatangani kontrak kerja sama dan 45 lainnya masih dalam proses melengkapi persyaratan administrasi. Sementara itu 3 perusahaan yang telah menandatangani kontrak, sebagai berikut:

- 1 blok yaitu Blok Sekayu (Medco, Ephindo, dan McLaren) ditandatangani tanggal 27 Mei 2008
- 2 blok yaitu Blok Indragiri Hulu (PT. Samantaka Mineral Prima) dan Blok Bentian Besar (PT. Ridlatama Mining Utama) ditandatangani tanggal 26 Juni 2008.

Untuk pengembangan produksi gas metana batubara, penyempurnaan dan optimalisasi penerimaan negara telah diterbitkan Permen ESDM No. 36/2008 sebagai revisi dari Permen ESDM No. 33/2006 tentang pengusahaan gas metana batubara.

Upaya lainnya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan konservasi atau optimalisasi produksi. Hal ini dilakukan mengingat masa keemasan minyak bumi yang sudah akan berlalu.



Gambar 3.4. Prediksi produksi Minyak Bumi Indonesia

Dalam sejarah perminyakan Indonesia terjadi dua puncak produksi. Puncak produksi pertama terjadi pada akhir tahun 1970-an yang merupakan hasil produksi alamiah/primer, terutama dari lapangan Minas, Duri, dan Handil. Untuk mempertahankan laju produksi, upaya optimalisasi telah dilakukan yang menghasilkan puncak produksi kedua pada pertengahan tahun 1990-an. Mengingat minyak bumi adalah sumber daya tak terbarukan, walaupun berbagai upaya dilakukan, penurunan produksi tidak dapat dihindari.

Di sub sektor ketenagalistrikan jaminan pasokan ketenagalistrikan diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan optimasi pembangunan ketenagalistrikan. Kapasitas infrastuktur yang ada akan terus ditingkatkan, baik kapasitas pembangkit, transmisi yang terinterkoneksi pada tegangan 500 kV, 150 KV maupun transmisi yang belum terinterkoneksi, jaringan distribusi tegangan menengah maupun tegangan rendah.

Peningkatan kapasitas pembangkit diatur melalui Peraturan Presiden No. 71 tahun 2006 tentang pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap I, program pembangunan pembangkit listrik tahap II serta program pembangunan pembangkit melalui IPP. Optimalisasi pasokan dilaksanakan dengan melakukan :

- Diversifikasi penggunaan energi primer BBM ke non BBM untuk pembangkit tenaga listrik

- Mempercepat penggantian bahan bakar solar (HSD) menjadi MFO
- Mempercepat pasokan gas
- Menurunkan susut jaringan dan meningkatkan efisiensi administrasi
- Pemanfaatan *captive power*
- Optimalisasi kapasitas terpasang yang ada
- Penyelesaian/peningkatan kemampuan jaringan transmisi/distribusi dan interkoneksi.

2) Melakukan pengaturan harga energi

Kebijakan kedua yaitu dengan mengarahkan harga energi untuk mencapai nilai keekonomiannya sehingga diharapkan subsidi tidak dilakukan dengan mekanisme pada subsidi harga energi namun dilakukan melalui subsidi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk melaksanakan itu telah dilakukan pengurangan subsidi BBM secara bertahap melalui pengurangan volume BBM yang disubsidi. Volume minyak tanah bersubsidi mulai dikurangi tiap tahunnya seiring dengan diterapkannya program konversi minyak tanah ke LPG. Namun demikian jangkauan konversi minyak tanah ke LPG yang belum sampai ke seluruh pelosok Indonesia, maka tetap disediakan minyak tanah bersubsidi sebanyak 100.000 KL.

Diharapkan dengan dilakukan pengurangan subsidi BBM dan listrik maka akan dapat terhindarkan pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran, penyalahgunaan BBM seperti penyelundupan, pengoplosan dan penyimpangan penggunaan BBM, pemborosan penggunaan BBM, mempercepat pengembangan energi alternatif dan meningkatkan efisiensi energi serta yang tidak kalah pentingnya adalah mengurangi beban subsidi pada keuangan Negara sehingga dapat menambah alokasi untuk pengembangan sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur lainnya.

3) Meningkatkan kesadaran masyarakat

Kebijakan ketiga adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan diversifikasi energi dan konservasi energi. Diversifikasi energi menjadi langkah penting dalam penyediaan energi untuk masyarakat.

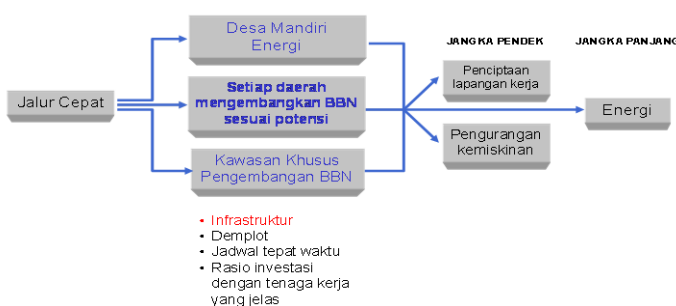
PROGRAM DIVERSIFIKASI ENERGI

Jenis Bahan Bakar	Rumah Tangga	Transportasi	Industri	Pembangkit
• Gas				
➢ LPG	√	√	√	–
➢ BGG	√	√	√	√
• Coal				
➢ Coal	√	–	√	√
➢ Briket batubara	√	–	√	–
➢ Coal gasification	√	√	√	√
➢ Coal liquefaction	–	√	√	√
• Biofuel				
➢ Bio-ethanol	√	√	–	–
➢ Bio-diesel	√	√	√	√
➢ Bio-oil	√	–	√	√
• Panas Bumi	√	–	–	√
• Energi lainnya				
➢ Biomass	√	–	–	√
➢ Air	–	–	–	√
➢ Solar cell	√	√	–	√
➢ Angin	–	–	–	√
➢ CBM	√	√	√	√
➢ Hydrogen / Fuel Cell	–	√	–	√
➢ Oil Shale	–	√	√	√
➢ Biogenic Gas	√	–	–	√

Gambar 3.5. Program Diversifikasi Energi

Diversifikasi energi direncanakan di seluruh sektor pemakai, baik di rumah tangga, komersial, transportasi, industri maupun pembangkit listrik. Diharapkan dengan adanya diversifikasi energi maka sasaran bauran energi primer nasional dapat tercapai.

**JALUR CEPAT
PENGEMBANGAN BAHAN BAKAR NABATI**



Gambar 3.6. Jalur Cepat Pengembangan Bahan Bakar Nabati

Berbagai bahan bakar dari jenis LPG, gas kota, batubara, briket batubara, biofuel, panas bumi, biomassa, solar cell, Coal bed Methane, *biogenic gas* akan

dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Di sektor transportasi akan dikembangkan substitusi BBM dengan LPG, BGG, coal gasification, coal liquefaction, bioethanol, biodiesel, solar cell, CBM, Fuel Cell, dan *oil Shale*, demikian juga di sektor industri dan pembangkit akan dilakukan substitusi BBM dengan energi alternatif lain.

Untuk pengembangan Bahan Bakar Nabati diharapkan akan dapat dilaksanakan jalur cepat pengembangan BBN melalui program Desa Mandiri Energi, Kawasan khusus pengembangan BBN dan setiap daerah mengembangkan BBN sesuai potensi. Dengan jalur cepat pengembangan BBN tersebut diharapkan pada jangka pendek akan bermanfaat untuk penciptaan lapangan pekerjaan dan pengurangan

kemiskinan, sedangkan jangka panjang diharapkan BBN dapat menjadi alternatif energi yang dapat diandalkan.

PENTAHAPAN KEWAJIBAN MINIMAL PEMANFAATAN BIODIESEL (PERMEN ESDM NO. 32 TAHUN 2008)							
Jenis Sektor	September 2008 s.d Desember 2008	Januari 2009	Januari 2010	Januari 2015**	Januari 2020**	Januari 2025**	Keterangan
Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	Saat ini tidak ditentukan
Transportasi PSO	1 %	1 %	2,5 %	5 %	10 %	20 %	* Terhadap kebutuhan total
Transportasi Non PSO	-	1 %	3 %	7 %	10 %	20 %	
Industri dan Komersial	2,5 %	2,5 %	5 %	10 %	15 %	20 %	* Terhadap kebutuhan total
Pembangkit Listrik	0,1 %	0,25 %	1 %	10 %	15 %	20 %	* Terhadap kebutuhan total

** Spesifikasi disesuaikan dengan spesifikasi global (WWFC) dan kepentingan domestik

Tabel 3.1. Pentahapan Kewajiban Minimal Pemanfaatan Biodiesel

Sesuai Peraturan Menteri

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain, telah diatur pentahapan kewajiban minimal pemanfaatan biodiesel, bioetanol dan minyak nabati murni. Pentahapan untuk biodiesel masing-masing sektor yang menggunakan solar dengan persentase pencampuran biodiesel dimulai dari 1% sampai dengan 20%.

Pentahapan yang sama

diberlakukan pada

bioethanol untuk

dicampurkan dengan

bensin. Kewajiban

pentahapan dilakukan

secara berbeda antara

transportasi PSO

PENTAHAPAN KEWAJIBAN MINIMAL PEMANFAATAN BIOETANOL (PERMEN ESDM NO. 32 TAHUN 2008)							
Jenis Sektor	September 2008 s.d Desember 2008	Januari 2009	Januari 2010	Januari 2015**	Januari 2020**	Januari 2025**	Keterangan
Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	Saat ini tidak ditentukan
Transportasi PSO	3 %	1 %	3 %	5 %	10 %	15 %	* Terhadap kebutuhan total
Transportasi Non PSO	5 %	5 %	7 %	10 %	12 %	15 %	* Terhadap kebutuhan total
Industri dan Komersial	-	5 %	7 %	10 %	12 %	15 %	* Terhadap kebutuhan total
Pembangkit Listrik	-	-	-	-	-	-	Saat ini tidak ditentukan

** Spesifikasi disesuaikan dengan spesifikasi global (WWFC) dan kepentingan domestik

Tabel 3.2. Pentahapan Kewajiban Minimal Pemanfaatan Bioetanol

dengan Non PSO, dimana persentase yang lebih besar diberlakukan pada transportasi non PSO. Hal ini dilakukan karena bensin non PSO sudah dijual dalam harga keekonomian sehingga akan lebih mudah dalam implementasinya. Target pada tahun 2025 adalah bensin yang dikonsumsi oleh masyarakat

mengandung 15% bioethanol. Meskipun demikian, volume pencampuran ini, termasuk juga untuk biodiesel, akan disesuaikan dengan melihat spesifikasi global dan kepentingan domestik termasuk perkembangan teknologi.

Jenis BBN ketiga yang diatur pemanfaatannya adalah minyak nabati murni atau yang juga dikenal dengan biooil.

PENTAHAPAN KEWAJIBAN MINIMAL PEMANFAATAN MINYAK NABATI MURNI (PERMEN ESDM NO. 32 TAHUN 2008)							
Jenis Sektor	September 2008 s.d Desember 2008	Januari 2009	Januari 2010	Januari 2015	Januari 2020	Januari 2025	Keterangan
Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	Saat ini tidak ditentukan
Industri dan Transportasi (Low and medium speed engine)	Industri	-	1 %	3 %	5 %	10 %	
	Marine	-	1 %	3 %	5 %	10 %	
Pembangkit Listrik	-	0,25 %	1 %	5 %	7 %	10 %	Terhadap kebutuhan total

** Spesifikasi disesuaikan dengan spesifikasi global (WWFC) dan kepentingan domestik

Tabel 3.3. Pentahapan Kewajiban Minimal Pemanfaatan Minyak Nabati Murni

Pemanfaatan

minyak nabati murni diarahkan untuk menggantikan sebagian bahan bakar yang digunakan pada peralatan yang menggunakan teknologi diesel putaran rendah dan tinggi yang umumnya berada di sektor industri, kelautan serta pembangkit listrik. Adapun untuk rumah tangga, saat ini pemanfaatannya tidak ditentukan; tetapi bukan berarti Pemerintah tidak mendorong upaya pemanfaatan minyak nabati murni pada sektor ini. Pendekatan pemanfaatan minyak nabati murni untuk rumah tangga dilakukan melalui pengembangan Desa Mandiri Energi.

Upaya konservasi telah dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi dan penerbitan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air sebagai revisi Inpres nomor 10 tahun 2005 tentang Penghematan Energi. Dalam Inpres tersebut diinstruksikan pimpinan lembaga pemerintahan baik di pusat dan daerah untuk:

- Melakukan langkah-langkah dan inovasi penghematan energi dan air meliputi penerangan dan alat pendingin ruangan (AC), dan peralatan yang menggunakan energi listrik, bahan bakar minyak atau gas
- Melaksanakan program dan kegiatan penghematan energi dan air sesuai Kebijakan Penghematan Energi dan Air yang telah ditetapkan
- melakukan sosialisasi dan mendorong masyarakat untuk melaksanakan penghematan energi dan air

- Membentuk gugus tugas di lingkungan masing-masing untuk mengawasi pelaksanaan penghematan energi dan air.

Di sub sektor pertambangan mineral dan batubara, secara eksplisit didalam Undang Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diamanatkan bahwa perusahaan pertambangan mineral harus disertai dengan peningkatan nilai tambah melalui pengolahan di dalam negeri. Ini membuka peluang untuk lebih memanfaatkan sumberdaya dan kemampuan lokal. Dengan melaksanakan ketentuan tersebut akan dapat meningkatkan pendapatan negara jika dibandingkan dengan hanya menjual bijih (ore) ataupun konsentrat saja. Demikian pula pembukaan berbagai pabrik pengolahan di dalam negeri akan memberikan peluang penggunaan tenaga dan sumberdaya lokal yang lebih besar. Selain itu, diamanatkan pula untuk mengatur sumberdaya mineral dan batubara sehingga kita memiliki cadangan nasional yang kelak dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan nasional. Kedua hal tersebut di atas dapat dipandang sebagai upaya konservasi sumberdaya mineral dan batubara yang kongkrit. Upaya ini secara langsung juga telah meletakkan fondasi dalam upaya menuju kemandirian dalam pemanfaatan dan perusahaan mineral dan batubara.

Pengelolaan pertambangan dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah, hal ini sejalan dengan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sesuai dengan PP 75 tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan izin Kuasa Pertambangan sesuai dengan kewenangannya, yaitu bila wilayah tambang yang bersangkutan masih dalam satu wilayah kabupaten/kota maka bupati/walikota yang mengeluarkan izin, bila berbatasan lebih dari satu kabupaten maka gubernur yang mengeluarkan izin, sedangkan bila berbatasan lebih dari satu provinsi maka KP tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Selama periode 2001 s.d. 2008 terjadi

peningkatan jumlah KP di daerah, khususnya di kabupaten dan kota yang memiliki potensi pertambangan, saat ini jumlah KP mencapai total 4.538 ijin KP yang terdiri dari : KP Penyelidikan Umum 750 ijin, KP Eksplorasi 2.440 ijin dan KP Eksploitasi 1.348 izin. Di dalam hal ini Pemerintah Pusat terus melakukan koordinasi dan kerjasama, di antaranya dengan Pemerintah Daerah setempat serta BPK, Ditjen Pajak dan instansi terkait lainnya dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap KP-KP tersebut sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan K3, lingkungan hidup, tenaga kerja serta peningkatan penerimaan negara.

Kebijakan Lain Sektor ESDM

Disamping kebijakan utama, beberapa kebijakan lain adalah sebagai berikut:

1) Kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO)

Untuk mengupayakan keamanan pasokan minyak dan gas bumi serta batubara dalam negeri telah ditetapkan kebijakan domestic market obligation (DMO). Untuk sub sektor migas, sesuai Undang Undang nomor 22 Tahun 2001 pasal 22 ayat 1, badan usaha atau badan usaha tetap wajib menyerahkan 25 % bagiannya dari hasil produksi minyak bumi dan atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pada tahun 2008 produksi minyak sebesar 357,50 juta barel atau 62,3 % dari produksi dipasok untuk kebutuhan dalam negeri, sedangkan gas bumi dari sebesar 7,883 bscfd atau 47,8 % dipasok untuk kebutuhan dalam negeri.

Untuk mengupayakan keamanan pasokan batubara dalam negeri, pemerintah menetapkan kebijakan DMO batubara.

Kebijakan DMO batubara merupakan kebijakan bagi produsen batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi mengamanatkan terjaminnya ketahanan energi nasional melalui kewajiban Pemerintah untuk menyediakan cadangan penyangga energi. Dari kajian yang dilaksanakan diketahui, bahwa kebijakan DMO batubara sangat diperlukan untuk menjamin ketahanan energi nasional. Kemudian berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 5

ayat 2 s.d. 5, Pemerintah untuk kepentingan nasional wajib melaksanakan pengendalian produksi dan ekspor. Selanjutnya berwenang menetapkan produksi tiap-tiap komoditas per tahun setiap provinsi, yang wajib ditaati oleh Pemerintah Daerah.

Pada dasarnya perusahaan pertambangan batubara harus mendukung keamanan pasokan batubara untuk dalam negeri, dengan cara menjual batubara yang diproduksikannya kepada pemakai batubara dalam negeri sesuai dengan yang dibutuhkan. Sebagai contoh adalah kebutuhan DMO batubara tahun 2008 sebesar 57,5 juta ton lalu dibagikan secara proporsional kepada perusahaan batubara nasional.

Perusahaan pertambangan batubara dapat menjual batubara yang diproduksikannya ke luar negeri, apabila kebutuhan batubara dalam negeri telah terpenuhi. Konsekuensi dari hal ini adalah:

- a) harus ditetapkan besarnya kebutuhan batubara dalam negeri, dan
- b) harus ditetapkan Persentase Minimal Penjualan Batubara Dalam Negeri (PMPBDN) atas produksi batubara dari perusahaan pertambangan batubara.

Besarnya kebutuhan batubara dalam negeri dan PMPBDN merupakan suatu besaran yang dinamis dan dapat berubah setiap waktu. Kedua hal ini harus dihitung dan ditetapkan pemerintah, misalnya sekali dalam setahun. Penentuan besarnya kebutuhan batubara ditentukan secara bersama oleh Menteri ESDM c.q. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi (Dirjen Minerbapabum); Menteri Perindustrian; asosiasi industri pemakai batubara; asosiasi perusahaan produsen batubara; dan asosiasi perusahaan niaga (*trader*) batubara.

Penetapan PMPBDN dilakukan oleh Menteri ESDM c.q. Dirjen Minerbapabum pada setiap bulan Juni tahun berjalan, yang digunakan sebagai patokan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan batubara pada tahun selanjutnya, dan RKAB dari perusahaan pertambangan batubara harus memenuhi PMPBDN yang ditetapkan.

Untuk mendukung kebijakan DMO, diperlukan langkah untuk mendorong pembangunan dan penyebaran keberadaan infrastruktur batubara. Potensi cadangan batubara yang berlimpah di Indonesia khususnya di Kalimantan dan Sumatera harus didukung oleh keberadaan infrastruktur pendukung pemanfaatan batubara antara lain : pelabuhan pengapalan batubara, jalur transportasi darat kereta api dan jalur jalan, dan areal penyimpanan batubara (coal stockpile). Pembangunan sarana infrastruktur ini akan memudahkan kepada pemegang IUP dan konsumen batubara dalam menjalankan penyediaan energy batubara dan akan mengurangi biaya transportasi bagi kedua belah pihak.

2) Kebijakan Untuk Peningkatan *Local Content*

Di sub sektor minyak dan gas bumi, sebagaimana yang diamanatkan Undang Undang nomor 22 Tahun 2001, yaitu mendukung dan menumbuhkan-kembangkan kemampuan nasional, menciptakan lapangan kerja, untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional, maka telah didukung dengan berbagai peraturan pelaksanaan dalam upaya mencapai sasaran Peningkatan Kapasitas Migas Nasional pada tahun 2025, adalah :

a) Operatorship 50% oleh perusahaan nasional.

- Permen ESDM Nomor 01/2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua;
- Permen ESDM Nomor 03/2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembalian Bagian Wilayah Kerja yang tidak dimanfaatkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam rangka peningkatan produksi minyak dan gas bumi;
- PP No. 35/2004 ps 34: memberikan *participating interest* sebesar 10% kepada perusahaan nasional untuk lapangan-lapangan yang sudah mendapatkan persetujuan POD I;
- Secara *business to business* dimungkinkan untuk pengalihan *working interest*;

- Badan Usaha (BU) dimungkinkan untuk mengikuti sistim pelelangan dalam pengelolaan Wilayah Kerja (WK).
- b) Penggunaan barang dan jasa nasional sebesar 91%
- PP No. 35/2004 ps 79 : Pengutamaan penggunaan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri telah tersedia dan memenuhi persyaratan mutu, waktu penyerahan dan harga sesuai ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa.
 - Permen ESDM No. 037 Tahun 2006 bahwa Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) wajib mengutamakan penggunaan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi
 - ADP (Apresiasi Domestic Product) LIST: menyusun daftar kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri untuk dipergunakan sebagai acuan dalam pengadaan barang dan jasa kontraktor migas
 - Pemberian preferensi terhadap nilai *Local Content* (LC) untuk barang 15% terhadap LC dan jasa 7.5% terhadap LC dalam pengadaan barang dan jasa
 - Permen ESDM No. 027 Tahun 2008, sebagai dukungan usaha penunjang dalam mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional dalam kegiatan usaha migas
- c) Penggunaan sumber daya manusia (SDM) Nasional sebesar 99%
- PP 35/2004 ps. 82, kewajiban BU/BUT dalam penggunaan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan;
 - PP 35/2004 ps. 84, kewajiban BU/BUT dalam pengembangan kemampuan tenaga kerja Indonesia dengan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan;
 - Pemagangan fresh graduated di industri migas (dalam POD);
 - Meningkatkan *link & match* antara kegiatan usaha migas dengan perguruan tinggi;

- Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi Tenaga Kerja Indonesia dengan memberdayakan training center dalam negeri.

Sesuai dengan kebijakan diatas, Pembebasan Bea Masuk dapat diberikan terhadap barang modal impor dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Barang belum dapat diproduksi di dalam negeri
- (2) Barang sudah diproduksi tetapi spesifikasi yang dibutuhkan belum terpenuhi, atau
- (3) Barang sudah diproduksi di dalam negeri tetapi jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

Selain itu, untuk mendukung hal tersebut sedang disusun konsep petunjuk teknis penilaian tingkat komponen dalam negeri dalam rangka pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk kepentingan umum.

Di sub sektor ketenagalistrikan untuk memajukan daya saing dan produksi dalam negeri serta meningkatkan *local content*, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 tahun 2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor barang Modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 57-12/20/600.3/2009 tanggal 11 Februari 2009 tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan dan Penandasahan Rencana Impor Barang Modal untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit Listrik, hal tersebut berkaitan dengan kebijakan Impor Barang Modal.

3) Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan

Kebijakan peningkatan nilai tambah terbagi menjadi peningkatan *local content* dan peningkatan nilai tambah pertambangan. Upaya optimalisasi dan peningkatan pemanfaatan barang dan peralatan produk dalam negeri (*local content*) untuk mendukung usaha pertambangan perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dari semua pihak, hal ini akan sejalan dengan amanat UU No. 4 tahun 2009 dan direktif Presiden. Pemerintah terus

mendorong upaya peningkatan kandungan lokal di dalam kegiatan pertambangan, karena hal ini akan dapat mendorong perekonomian nasional. Di dalam kegiatan ini, khususnya di dalam sektor pertambangan yang ditekankan adalah pembelian di dalam negeri (*local expenditure*) terhadap kebutuhan pelaksanaan kegiatan pertambangan. Seiring dengan hal tersebut diharapkan agar industri di dalam negeri juga dapat terus tumbuh di dalam mendukung kegiatan pertambangan, sehingga kebutuhan terhadap kegiatan pertambangan dapat dipenuhi. Untuk efektifitas terhadap pelaksanaan kegiatan ini, maka dilakukan perencanaan, pengawasan dan pemantauan terus menerus. Pada tahap perencanaan, di dalam setiap pengajuan masterlist khususnya perusahaan KK dan PKP2B ditekankan tentang ketentuan kandungan lokal tersebut serta dibahas bersama antara pemerintah dan pengusaha pertambangan. Setiap masterlist yang diajukan oleh subsektor pertambangan membutuhkan rekomendasi dan persetujuan dari KESDM sebelum diproses lebih lanjut di BKPM. Setelah tahapan ini dilaksanakan, dilakukan pengawasan terus-menerus di dalam pelaksanaannya. Salah satu kegiatan yang penting dilaksanakan disini adalah promosi penggunaan kandungan lokal dan *local expenditure* bagi industri pertambangan. Kebijakan fiskal terhadap produk dalam negeri yang bahan bakunya masih berasal dari impor harus lebih intensif, sehingga harga akan lebih bersaing dengan produk impor. Kebijakan tersebut harus dilakukan secara komprehensif sehingga akan memperkuat pertumbuhan produsen dalam negeri dan dapat mensuplai usaha tambang secara kontinu. Kebijakan peningkatan nilai tambah pertambangan menjadi salah satu butir penting dalam UU Minerba yang pelaksanaannya membutuhkan komitmen besar serta kerjasama dari semua pihak. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendorong manfaat optimal produk pertambangan, sehingga produk pertambangan tidak di ekspor semata dalam bentuk barang mentah (*raw material*) seperti selama ini terjadi. Selaku pemilik komoditas tersebut kita memang berhak mendapatkan manfaat yang lebih besar melalui integrasi industri hulu dan

hilir, yaitu mulai dari proses pertambangan, pengolahan dan pemanfaatannya.

Kebijakan tentang nilai tambah akan berdampak kepada mengoptimalkan nilai tambah dari produk, tersedianya bahan baku industri, peningkatan pendapatan negara, kesempatan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mewajibkan pemurnian, pengolahan serta pemanfaatan mineral dan batubara di dalam negeri. Pasal-pasal yang mengatur tentang nilai tambah, antara lain :

4. Pasal 102 : “Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara”
5. Pasal 103 ayat 1 : “Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri”.
6. Pasal 170 : “Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Pasal-pasal di atas ini pada dasarnya mendorong nilai tambah dari produk pertambangan, termasuk diantaranya adalah persyaratan tersedianya bahan baku industri, terjadinya penyerapan tenaga kerja, dan terjadinya peningkatan penerimaan negara.

Sesuai dengan pasal 103 ayat 3 UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, kewajiban tentang nilai tambah dimasukkan dalam RPP Tentang Kegiatan usaha Mineral dan Batubara. Kewajiban

peningkatan nilai tambah, pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara di dalam RPP ini antara lain menyebutkan:

- a) Pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan di dalam negeri
- b) Pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi dilarang melakukan ekspor mineral yang diproduksi sebelum diolah
- c) Pengolahan dapat dilakukan secara kerja sama dengan pihak lain.

4) Kebijakan Untuk Peningkatan Investasi

Beberapa kebijakan untuk peningkatan daya saing investasi di sub sektor migas antara lain :

- a) *Geological Prospect*, untuk peningkatan investasi migas
 - Meningkatkan kegiatan survei G&G dan survei umum di wilayah terbuka untuk mendorong pembukaan wilayah kerja baru
 - Peningkatan kualitas dan transparansi di dalam mengakses data dan informasi pada kegiatan usaha migas untuk mendukung penawaran Wilayah Kerja Migas.
 - Penerbitan Permen ESDM No. 03 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembalian Wilayah Kerja Yang Tidak Dimanfaatkan Oleh KKKS Dalam Rangka Peningkatan Produksi Migas
 - Menerbitkan Permen ESDM No. 036 Tahun 2008 tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara
- b) Infrastruktur migas
 - UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, memberikan peluang yang terbuka bagi swasta untuk melakukan kegiatan usaha hilir migas.
 - Menerbitkan PP No. 62 Tahun 2008 tentang Insentif Fasilitas Perpajakan, yang meliputi :
 - a. Penyusunan dan amortisasi dipercepat
 - b. Pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak LN sebesar 10% atau tarif *tax treaty*.

- c. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun dan tidak lebih dari 10 tahun dengan persyaratan tertentu.
 - Menyusun Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional
 - Menerbitkan peraturan-peraturan percepatan penyediaan infrastruktur seperti Perpres No. 42 Tahun 2005 dan Perpres No. 67 Tahun 2005.
- c) Regulatory Framework
- Untuk mengatasi perbedaan penafsiran Pasal 31 UU 22 tahun 2001 tersebut dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 177,178, dan 179. Sehingga sejalan dengan investasi di kegiatan Hulu Migas yang memerlukan kepastian investasi jangka panjang
 - Menerbitkan Permen ESDM No. 008 Tahun 2005 tentang Insentif Pengembangan Lapangan Minyak Bumi Marginal
 - Menerbitkan Permen ESDM No. 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua.
 - Menerbitkan Permen ESDM No 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain.

Di sub sektor ketenagalistrikan, kebijakan investasi diprioritaskan untuk mendorong peningkatan peran swasta, peningkatan dan pemanfaatan teknologi dalam negeri, serta pemanfaatan *renewable energy* dan energi setempat. Untuk itu Pemerintah terus berusaha menyempurnakan produk-produk regulasi yang mendorong investasi.

Pemerintah menyadari keterbatasan finansial untuk pendanaan di sektor ketenagalistrikan sehingga peran swasta sangat diharapkan untuk memperkuat penyediaan tenaga listrik nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 sebagai perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989, dimungkinkan pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dari koperasi,

BUMD, swasta, dan swadaya masyarakat setelah mendapat persetujuan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2005 Tentang Prosedur Pembelian tenaga Listrik Dan/Atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum jis Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2007, mekanisme pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dari pihak lain dapat dilakukan melalui pelelangan umum, penunjukan langsung atau pemilihan langsung.

Pada bulan September 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui sidang paripurna telah menyetujui Undang Undang tentang Ketenagalistrikan yang baru. Pada Undang Undang ini pelaku usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, swasta, koperasi dan swadaya masyarakat. Dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tersebut, BUMN diberi prioritas pertama. Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada BUMD, badan usaha swasta atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi. Dalam hal tidak ada BUMD, swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, pemerintah wajib menugaskan BUMN untuk menyediakan tenaga listrik.

Sedangkan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri meliputi jenis usaha: pembangkitan tenaga listrik; pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik.

Undang Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan untuk memprioritaskan kepentingan bangsa (pasal

2), namun juga mendukung pembangunan nasional melalui pengembangan mineral dan batubara. Pada intinya UU Minerba mendorong partisipasi pemerintah dan swasta untuk tercapainya peningkatan investasi baik di sisi hulu maupun hilir. Beberapa peluang investasi dalam UU Minerba diantaranya:

- (1) Peningkatan investasi terhadap existing KK, PKP2B dan IUP (dulu KP) baik dari sisi proses penambangan ataupun terhadap adanya kewajiban pengolahan
- (2) Peningkatan investasi terhadap IUP baru (melalui pelelangan) ataupun IUPK
- (3) Peningkatan investasi terhadap upaya nilai tambah pertambangan (local content, local expenditure, dan pengolahan)
- (4) Peningkatan investasi terhadap berkembangnya usaha jasa.
- (5) Pengembangan Infrastruktur pertambangan (terutama Kalimantan dan Sumatra)
- (6) Pengembangan Panas Bumi
- (7) Pengembangan Crash Program 10.000 MW Tahap I (Batubara) dan Tahap II (30 % batubara dan 70 % *non-renewable energy* terutama panas bumi)
- (8) Penggunaan Batubara mutu rendah (LRC) (*Coal liquafaction, Coal gasification*, Pembangunan pembangkit listrik mulut tambang)

B. STRATEGI

Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi

Untuk pemenuhan kebutuhan migas dan mencapai sasaran yang diinginkan, beberapa strategi di sub sektor migas antara lain:

1) Mempertahankan produksi migas

Untuk peningkatan keamanan pasokan migas dan untuk mempertahankan penerimaan negara dari sub sektor migas maka produksi migas harus tetap dipertahankan dengan melakukan upaya-upaya :

- Meningkatkan pemboran pengembangan
- Memproduksi lapangan baru (optimalisasi lapangan baru)

- pengusahaan sumur sumur tua
 - membuka dan menawarkan wilayah kerja migas
 - meningkatkan kegiatan eksplorasi untuk meningkatkan cadangan
- 2) Pengaturan penggunaan Domestic Market Obligation (DMO) Minyak Bumi
- 3) Pengembangan cadangan strategis minyak bumi
- Pemerintah akan melakukan pengaturan mengenai cadangan strategis minyak bumi yang meliputi lokasi, pembiayaan, pengelolaan, jumlah dan sumber minyak bumi. Cadangan strategis ini meliputi cadangan minyak mentah untuk pasokan kilang dan cadangan penyangga BBM yang akan memanfaatkan tangki minyak yang ada sesuai dengan rencana pengembangan infrastruktur migas dan mendorong peran swasta untuk berpartisipasi.
- 4) Insentif untuk peningkatan investasi
- 5) Pembangunan kilang BBM dan Peningkatan pembangunan jaringan gas
- Untuk mengatasi kendala keterbatasan infrastruktur migas diperlukan langkah langkah untuk mendorong pembangunan kilang BBM dan peningkatan pembangunan jaringan gas
- 6) Peningkatan rasio gasifikasi (jumlah rumah tangga berbahan bakar gas)
- Untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap bahan bakar gas yang bersih dilakukan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga melalui dana APBN. Diharapkan dengan adanya pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga maka akan meningkatkan jumlah rumah tangga yang menggunakan bahan bakar berbahan bakar gas
- 7) Peningkatan penggunaan barang dan jasa nasional
- Pemerintah berkewajiban untuk membina dan mengembangkan kegiatan usaha penunjang migas sebagai pilar pertumbuhan perekonomian nasional. Untuk itu langkah utama yang harus dilakukan adalah :
- Keberpihakan kepada perusahaan nasional dengan memberikan preferensi, insentif, aliansi strategis (kemitraan), serta proteksi
 - Mengendalikan impor barang operasi migas yang bertujuan untuk pemberdayaan produksi dalam negeri, disamping untuk mendapatkan fasilitas bebas bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI)

- Menyusun dan menerbitkan ADP (*Appreciation of Domestic Product*) List, yang memuat perusahaan/pabrikasi yang sudah mampu memproduksi barang dan jasa dalam negeri sebagai acuan dalam pengadaan barang dan jasa di Kegiatan Usaha Migas.
- Kewajiban minimum TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dalam setiap pengadaan barang dan jasa
- Menetapkan kebijakan penyiapan Perusahaan Migas Nasional yang mendominasi pada industri migas.

8) Peningkatan Kualitas SDM Nasional dalam Kegiatan Usaha Migas

Ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja migas tingkat terampil dan ahli dalam negeri yang memiliki kualifikasi dengan pengakuan nasional dan internasional dalam rangka menjawab isu-isu strategis bidang migas, antara lain peningkatan cadangan dan produksi migas nasional, pembangunan/peningkatan kapasitas sarana pengolahan, distribusi dan transmisi migas, serta peningkatan jumlah dan kompetensi aparatur pusat maupun daerah di bidang pengelolaan dan pengawasan kegiatan usaha migas.

Strategi tersebut di atas dilaksanakan melalui kegiatan :

- a) Pemetaan kebutuhan (demand) sumber daya manusia sub sektor migas untuk berbagai kelompok tingkatan kompetensi/jabatan;
- b) Penyusunan/penyempurnaan, penetapan serta pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) baru di sub sektor migas sesuai kebutuhan;
- c) Penyusunan/penyempurnaan, penetapan serta pemberlakuan Standar Latih/Kurikulum dan rekayasa program diklat baru berdasarkan Standar Diklat tersebut (diklat berbasis kompetensi);
- d) Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Diploma, Diklat Berbasis Kompetensi serta Diklat Khusus bidang Migas oleh Lembaga Diklat Pemerintah/Profesi sesuai kebutuhan pengguna baik untuk Tenaga Kerja Industri maupun Aparatur Pemerintah;
- e) Modernisasi sarana dan prasarana diklat sesuai perkembangan dan kebutuhan;

- f) Penguatan Lembaga Diklat melalui Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah/Pemda dan Profesi (yang dikelola Perguruan Tinggi dan Swasta) oleh Komite Akreditasi Lembaga Diklat dalam rangka meningkatkan kapasitas daya tampung diklat serta percepatan dalam mencetak tenaga terampil yang diperlukan;
 - g) Perluasan lingkup sertifikasi ketrampilan dan penyelenggaraan Sertifikasi Keterampilan oleh Lembaga Sertifikasi Keterampilan/Personil untuk mempercepat peningkatan jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi dengan pengakuan nasional dan internasional;
 - h) Pengembangan kerjasama diklat dengan lembaga/institusi dan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri dalam rangka penguatan kelembagaan diklat, penyusunan standar diklat, penyelenggaraan diklat serta sertifikasi personil.
- 9) Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan bidang migas
Untuk menunjang kegiatan perusahaan migas yang memerlukan teknologi tinggi diperlukan penelitian dan pengembangan teknologi untuk menunjang perkembangan industri migas dalam negeri.
- g) Untuk mengendalikan *business process* dan meningkatkan pelayanan publik bidang migas, diperlukan institusi pembinaan dan pengawasan untuk memastikan dilaksanakannya Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Norma, Standar, prosedur dan Kriteria (NSPK). Langkah-langkah yang diambil adalah dengan menyusun SPM dan NSPK, audit pelayanan publik, monitoring & evaluasi penerapan SPM/NSPK, *counselling & partnering* yang ditunjang peningkatan kompetensi dan sumber daya manusia.

Sub Sektor Ketenagalistrikan

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka Pemerintah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Memastikan kecukupan penyediaan tenaga listrik untuk jangka menengah dengan mendorong pelaku usaha untuk menambah kapasitas pasokan listrik

- 2) Mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan termasuk pemanfaatan biofuel untuk pembangkitan tenaga listrik
- 3) Meningkatkan kemampuan sistem penyaluran tenaga listrik akibat adanya pertumbuhan beban dan pembangunan pembangkit baru
- 4) Fasilitasi penyelenggaraan investasi dan pendanaan infrastruktur tenaga listrik.
- 5) Pemerintah terus mendorong tarif dasar listrik mencapai nilai ekonominya dengan tujuan agar dapat menutup biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan memperoleh keuntungan yang wajar dalam rangka investasi penyediaan tenaga listrik. Menaikkan tarif listrik menuju nilai keekonomiannya merupakan salah satu langkah yang penting di dalam menyehatkan keuangan PLN sehingga perusahaan mendapatkan *return* yang wajar dan penyediaan tenaga listrik dapat berlangsung secara berkesinambungan. Tarif listrik pada nilai keekonomiannya juga merupakan sinyal yang positif bagi investor untuk menanamkan investasinya di sektor ketenagalistrikan.

Selain itu dalam pengaturan harga tenaga listrik, Pemerintah akan menerapkan tarif regional. Skema regionalisasi tarif akan diterapkan dengan standar mutu layanan listrik. Sehingga tarif listrik per daerah akan disesuaikan dengan kualitas pasokan listrik di daerah tersebut. Semakin baik kualitas pasokannya (jarang padam), maka tarifnya akan lebih mahal dibandingkan wilayah lain yang sering mengalami pemadaman. Karena itu, jika diberlakukan, maka tarif listrik di Jawa-Madura-Bali relatif akan lebih mahal dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang masih sering mengalami pemadaman.

- 6) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan diversifikasi energi
- 7) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan konservasi energi dengan :
 - Meningkatkan budaya hemat energi bagi masyarakat dan kantor-kantor pemerintah
 - Mendorong implementasi dan penerapan efisiensi energi melalui kebijakan insentif dan disinsentif

- Mendorong penggunaan peralatan pemanfaat energi yang efisien melalui standard dan label
 - Mendorong industri dan bangunan komersial untuk meningkatkan pelaksanaan efisiensi energi.
- 8) Mendorong pelaksanaan diversifikasi energi
- Menugaskan PT PLN (Persero) untuk melakukan diversifikasi energi primer untuk pembangkitan tenaga listrik (10.000 MW Tahap I dan Tahap II).
 - Mendorong pengembangan infrastruktur energi terbarukan yang bertumpu kepada masyarakat
 - Mengambil langkah untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel dengan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan untuk daerah yang memiliki potensi dalam memenuhi kebutuhan listrik di perdesaan
 - Memfasilitasi interkoneksi pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan skala kecil dan menengah ke jaringan PLN
 - Pengembangan Desa Mandiri Energi, untuk meningkatkan penyediaan energi di perdesaan berbasis BBN dan non-BBN yang tersedia setempat untuk memenuhi kebutuhan energi dan mendukung usaha produktif masyarakat
- 9) Penyusunan peraturan perundangan di bidang listrik dan pemanfaatan energi sebagai tindak lanjut UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi dan UU No. 30 tahun
- 10) Peningkatan SDM nasional dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan
- Ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja usaha ketenagalistrikan khususnya tingkat terampil yang memiliki kualifikasi dengan pengakuan nasional dan internasional dalam rangka menjawab isu-isu strategis bidang ketenagalistrikan, antara lain peningkatan kapasitas pembangkit, transmisi dan distribusi listrik, serta peningkatan jumlah dan kompetensi Aparatur Pusat maupun Daerah di bidang pengelolaan dan pengawasan kegiatan usaha ketenagalistrikan.
- Strategi tersebut diatas dilaksanakan melalui kegiatan :

- a) Pemetaan kebutuhan (*demand*) sumberdaya manusia sub sektor ketenagalistrikan untuk berbagai kelompok tingkatan kompetensi/jabatan
 - b) Penyusunan/penyerpurnaan, penetapan serta pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKNI) baru di sub sektor ketenagalistrikan sesuai kebutuhan;
 - c) Penyusunan/penyerpurnaan, penetapan serta pemberlakuan Standar Latih/ Kurikulum dan rekayasa program diklat baru berdasarkan Standar Diklat tersebut (diklat berbasis kompetensi)
 - d) Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Diploma, Diklat Berbasis Kompetensi serta Diklat Khusus bidang Ketenagalistrikan oleh Lembaga Diklat Pemerintah/Profesi sesuai kebutuhan pengguna baik untuk Tenaga Kerja Industri maupun Aparatur Pemerintah
 - e) Modernisasi sarana dan prasarana diklat sesuai perkembangan dan kebutuhan
 - f) Penguatan Lembaga Diklat melalui Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah/Pemda dan Profesi (yang dikelola Perguruan Tinggi dan Swasta) oleh Komite Akreditasi Lembaga Diklat dalam rangka meningkatkan kapasitas daya tampung diklat serta percepatan dalam mencetak tenaga terampil yang diperlukan.
 - g) Perluasan lingkup sertifikasi ketrampilan dan penyelenggaraan Sertifikasi Ketrampilan oleh Lembaga Sertifikasi Keterampilan/Personil untuk mempercepat peningkatan jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi dengan pengakuan nasional dan internasional.
 - h) Pengembangan kerjasama diklat dengan lembaga/institusi dan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri dalam rangka penguatan kelembagaan diklat, penyusunan standar diklat, penyelenggaraan diklat serta sertifikasi personil.
- 11) Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang ketenagalistrikan untuk memberi kemudahan aksesibilitas masyarakat terhadap energi listrik diperlukan pengembangan teknologi tepat guna, sehingga dapat meningkatkan rasio elektrifikasi.

- 12) Untuk mengendalikan *business process* dan meningkatkan pelayanan publik bidang ketenagalistrikan, diperlukan institusi pembinaan dan pengawasan untuk memastikan dilaksanakannya Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Norma, Standar, prosedur dan Kriteria (NSPK). Langkah-langkah yang diambil adalah dengan menyusun SPM dan NSPK, audit pelayanan publik, monitoring & evaluasi penerapan SPM/NSPK, *counselling & partnerning* yang ditunjang peningkatan kompetensi dan sumber daya manusia.

Sub Sektor Mineral, Batubara dan Panas Bumi

Untuk menjamin keamanan pasokan mineral, batubara dan panas bumi serta mencapai sasaran yang diinginkan maka diambil langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

- 1) Menjamin keamanan pasokan batubara melalui Pengendalian Produksi dan Ekspor

Berdasarkan ketentuan di dalam Undang Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah dapat melakukan pengendalian produksi mineral atau batubara yang dilakukan oleh Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi Mineral atau Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi Batubara. Pengendalian produksi mineral dan batubara sebagaimana disebutkan pada ayat (1) selain untuk memenuhi ketentuan aspek lingkungan dan melakukan konservasi sumberdaya mineral atau batubara juga dilakukan untuk menjamin kebutuhan di dalam negeri dan mengendalikan harga mineral dan batubara. Pengendalian ekspor dapat digunakan sebagai salah satu mekanisme di dalam upaya mengutamakan pasokan kebutuhan mineral atau batubara dalam negeri. Langkah ini meliputi berbagai kegiatan, diantaranya adalah perencanaan produksi, penyusunan kebutuhan di dalam negeri, penyusunan harga patokan batubara bulanan, pengembangan infrastruktur dan peningkatan pengawasan dan pembinaan.

- 2) Meningkatkan nilai tambah pertambangan dengan :

- Mewajibkan ekspor produk tambang dalam bentuk produk akhir
- Pemerintah perlu untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan di dalam pelaksanaan kebijakan nilai tambah produk pertambangan, yaitu

dengan menekankan terhadap produk akhirnya, sedangkan yang masih dalam bentuk barang mentah sebaiknya tidak boleh untuk di ekspor. Dengan strategi ini mendorong pemegang IUP mengolah dulu bahan mentah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

- Memberikan kemudahan bagi investor

Pemerintah pada sisi lain juga harus memberikan kemudahan bagi investor terutama dalam mekanisme dan perizinan pendirian fasilitas pengolahan peleburan/pemurnian, masalah penggunaan lahan untuk fasilitas pengolahan, fasilitas fiskal, serta dengan peran pemerintah melengkapi pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan pengolahan seperti jalan dan pelabuhan.

- Penyusunan kajian master plan pendirian fasilitas pengolahan mineral utama

Dengan adanya kewajiban pendirian fasilitas pengolahan bagi pemegang IUP, maka perlu disiapkan master plan pendirian fasilitas pengolahan terutama bagi mineral utama seperti : nikel di Sulawesi, tembaga di Papua, bauksit di Kalimantan Barat. *Master plan* ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi pemerintah dan pemegang IUP dalam pendirian fasilitas pengolahan.

- Peningkatan Kualitas Dan Kontinuitas Peralatan Produksi Dalam Negeri

Masih banyaknya peralatan yang digunakan oleh pemegang IUP berasal dari luar negeri disebabkan karena masih rendahnya kualitas dan kontinuitas peralatan produksi dalam negeri. Kebijakan peningkatan kandungan lokal yang akan digunakan oleh pemegang IUP diharapkan mendorong industri peralatan tambang dalam negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksinya sehingga kegiatan pertambangan memberikan manfaat yang semakin besar.

3) Meningkatkan investasi pertambangan dengan :

- Menyelesaikan regulasi pendukung UU No 4 Tahun 2009

Sebagai peraturan pelaksanaan dari UU Minerba, penyelesaian Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri yang akan menjabarkan lebih detail pengaturan pertambangan mineral dan batubara penting untuk secepatnya diselesaikan, karena hal tersebut akan mendukung iklim investasi pertambangan.

- Promosi Investasi

Sekalipun secara kegeologian potensi mineral, batubara dan panas bumi Indonesia masih sangat menarik, diperlukan berbagai upaya promosi investasi untuk meyakinkan para investor di dalam dan luar negeri tentang prospek dan keamanan investasi pertambangan di Indonesia. Terkait di dalam strategi ini diantaranya adalah upaya/kegiatan sebagai berikut :

- 4) Pengembangan Panas Bumi

Program 10.000 MW Tahap II memberikan porsi yang besar bagi kontribusi dari panas bumi (4.733 MW), yang akan mendorong pengembangan panas bumi. Pemberian insentif bagi para investor diharapkan akan menjadikan daya tarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Pemanfaatan pengembangan panas bumi ini akan dapat mendorong sisi hilir yaitu untuk meningkatkan penyediaan listrik bagi rakyat.

- 5) Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang mineral dan batubara

- 6) Peningkatan SDM nasional dalam kegiatan usaha mineral, batubara dan panas bumi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja kegiatan usaha pertambangan mineral (minerba), batubara dan panas bumi pada berbagai tingkatan yang memiliki kualifikasi dengan pengakuan nasional dan internasional dalam rangka menjawab isu-isu strategis bidang minerba, antara lain peningkatan cadangan dan produksi minerba, pembangunan/peningkatan kapasitas sarana pengolahan dan transportasi minerba, serta peningkatan jumlah dan kompetensi Aparatur Pusat maupun Daerah di bidang pengelolaan dan pengawasan kegiatan usaha mineral, batubara dan panas bumi.

Strategi tersebut diatas dilaksanakan melalui kegiatan :

- a) Pemetaan kebutuhan (demand) sumberdaya manusia bidang mineral, batubara dan panas bumi untuk berbagai kelompok tingkatan kompetensi/jabatan, termasuk pertambangan bawah tanah
 - b) Penyusunan/penyempurnaan, penetapan serta pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKNI) baru di bidang mineral, batubara dan panas bumi berdasarkan kebutuhan;
 - c) Penyusunan/penyerpurnaan, penetapan serta pemberlakuan standar latih/kurikulum dan rekayasa program diklat baru berdasarkan standar diklat tersebut (dklat berbasis kompetensi)
 - d) Penyelenggaraan pendidikan jenjang Diploma, diklat berbasis kompetensi serta diklat khusus oleh Lembaga Diklat Pemerintah/Profesi sesuai kebutuhan pengguna baik untuk Tenaga Kerja Industri maupun Aparatur Pemerintah
 - e) Modernisasi sarana dan prasarana diklat sesuai perkembangan dan kebutuhan
 - f) Penguatan lembaga diklat melalui Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah/Pemda dan Profesi (yang dikelola Perguruan Tinggi dan Swasta) oleh Komite Akreditasi Lembaga Diklat dalam rangka meningkatkan kapasitas daya tampung diklat serta percepatan dalam mencetak tenaga terampil yang diperlukan.
 - g) Perluasan lingkup sertifikasi ketrampilan dan penyelenggaraan Sertifikasi Ketrampilan oleh Lembaga Sertifikasi Keterampilan/Personil untuk mempercepat peningkatan jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi dengan pengakuan nasional dan internasional.
 - h) Pengembangan kerjasama diklat dengan lembaga/institusi dan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri dalam rangka penguatan kelembagaan diklat, penyusunan standar diklat, penyelenggaraan diklat serta sertifikasi personil.
- 7) Untuk mengendalikan *business process* dan meningkatkan pelayanan publik bidang mineral, batubara dan panas bumi diperlukan institusi pembinaan dan pengawasan untuk memastikan dilaksanakannya Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Norma, Standar, prosedur dan Kriteria (NSPK). Langkah-langkah

yang diambil adalah dengan menyusun SPM dan NSPK, audit pelayanan publik, monitoring & evaluasi penerapan SPM/NSPK, *counselling & partnerning* yang ditunjang peningkatan kompetensi dan sumber daya manusia.

C. STRATEGI INVESTASI DAN PENDANAAN

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, maupun badan usaha swasta dalam rangka pembiayaan pembangunan sektor ESDM. Intervensi anggaran pemerintah pusat merupakan stimulus yang digunakan untuk penyusunan kebijakan, pembinaan, pengawasan, penelitian, pendidikan dan pelatihan, pengumpulan data, survei serta pemetaan yang menjadi tugas pokok pemerintah, di samping itu dilakukan untuk pembangunan sebagian kecil kelistrikan antara lain pembangunan pembangkit skala kecil, sebagian transmisi dan distribusi dan pembangunan pembangkit Energi Baru Terbarukan.

Investasi

KESDM telah menargetkan masuknya investasi di bidang migas, listrik dan pertambangan umum dengan total nilai selama 5 tahun sebesar 1.598 Triliun rupiah.

Sasaran investasi setiap tahun dari tiap bidang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.4. Rencana Investasi Sektor ESDM
Tahun 2010 – 2014**

	2010	2011	2012	2013	2014
Migas	15.415	17.177	17.851	18.390	19.188
Listrik	10.146	9.279	8.933	8.184	7.889
Pertambangan Umum	2.502	3.077	5.008	4.680	7.468
Total (juta US\$)	28.063	29.533	31.792	31.254	34.545
Total (Rp Triliun)	280,63	295,33	317,92	312,54	345,45

(Juta US\$)

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, maupun badan usaha swasta dalam rangka pembiayaan pembangunan sektor ESDM. Intervensi anggaran pemerintah pusat merupakan stimulus yang digunakan untuk penyusunan kebijakan, pembinaan, pengawasan, penelitian, pendidikan dan pelatihan, pengumpulan data, survei serta pemetaan yang menjadi tugas pokok pemerintah, di samping itu dilakukan untuk pembangunan sebagian kecil kelistrikan antara lain pembangunan pembangkit skala kecil, sebagian transmisi dan distribusi dan pembangunan pembangkit Energi Baru Terbarukan.

Pendanaan

Rencana sumber pendanaan pengembangan sektor ESDM tahun 2010 – 2014 menurut sumber pendanaan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.5. Rencana Sumber Pendanaan Pengembangan Sektor ESDM
Tahun 2010 – 2014**

SUMBER PENDANAAN	2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL
1. APBN	14.984,194	15.672,716	15.757,591	16.496,478	17.910,020	80.821.000
• Kegiatan KESDM	4.414,446	4.624,420	4.844,419	5.081,363	5.331,095	24.295,743
• Infrastruktur Migas	287,5	386,1	502,6	555,4	428,4	2.160.0
• Infrastruktur listrik (transmisi & distribusi & EBT)	10.282,21	10.662,195	10.410,573	10.859,715	12.150,526	54.365,218
2. SWASTA + BUMN *)	237.996	246.594	250.185	247.282	250.264	1.459.554
• Migas	154.150	171.800	178.510	183.900	191.880	880.240
• Listrik	83.825	74.772	71.652	63.357	58.358	351.964
• Pertambangan Umum	20,76	22,01	23,33	24,73	26,21	227.350
TOTAL KEBUTUHAN PENDANAAN	252.980,19	262.266,72	265.942,59	263.778,48	268.174,02	1.313.142

*) asumsi 1 US\$ = Rp. 10.000,-

Adapun perkiraan kebutuhan anggaran per program yang bersumber dari APBN selama lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6. Kebutuhan Anggaran yang Bersumber Dari APBN 2010-2014

NO	PROGRAM	2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL
1.	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KESDM	648.679	676.284	702.232	732.621	764.683	3.524.498
	PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR KESDM	42.727	49.137	56.507	64.983	74.731	288.085
2.	PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	111.310	122.441	134.685	148.154	162.969	679.559
3.	PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN MINYAK DAN GAS BUMI	608.824	723.449	856.817	927.327	818.924	3.935.341
	- OVERHEAD MIGAS	321.285	337.349	354.217	371.927	390.524	1.775.302
	- INFRASTRUKTUR MIGAS	287.539	386.100	502.600	555.400	428.400	2.160.039
4.	PENGELOLAAN LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI	10.565.465	10.957.613	10.720.862	11.185.618	12.492.824	55.922.382
	a. OVERHEAD LPE	283.255	295.418	310.289	325.903	342.299	1.557.163
	b. KELISTRIKAN:	10.282.210	10.662.195	10.410.573	10.859.715	12.150.526	54.365.218
	- INDUK PIKITRING	4.635.234	5.576.750	5.054.625	5.070.963	5.983.071	26.320.642
	- LISDES JARINGAN	5.085.445	5.085.445	5.355.948	5.788.752	6.167.455	27.483.046
	- LISDES EBT	561.530	-	-	-	-	561.530
5.	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL. BATUBARA. PANAS BUMI DAN AIR TANAH	440.568	462.589	485.719	510.004	535.505	2.434.385
6.	PENELITIAN, MITIGASI DAN PELAYANAN GEOLOGI	718.555	754.483	792.207	831.817	873.408	3.970.470
7.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ESDM	735.592	772.373	810.990	851.541	894.118	4.064.614
8.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ESDM	795.156	829.989	866.680	905.209	946.104	4.343.139
9.	PENGATURAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA	266.170	268.093	268.993	271.135	271.817	1.346.208
10.	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEWAN ENERGI NASIONAL	51.149	56.265	61.900	68.069	74.937	312.319
	TOTAL	14.984.194	15.672.716	15.757.591	16.496.478	17.910.020	80.821.000
	PAGU INDIKATIF	14.984.194	15.672.716	15.757.591	16.496.478	17.910.020	80.821.000
	DIPA 2010	7.797.454					
	APBN-P 2010	7.186.740					
	- TOTAL OVERHEAD	4.414.446	4.624.420	4.844.419	5.081.363	5.331.095	24.295.743
	- TOTAL INFRASTRUKTUR	10.569.749	11.048.295	10.913.173	11.415.115	12.578.926	56.525.257

D. PROGRAM KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan nasional melalui pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian ESDM, maka telah ditetapkan program KESDM yang meliputi sub-sektor migas, ketenagalistrikan dan pertambangan yang dilaksanakan oleh unit KESDM, dengan perincian sebagai berikut:

1) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN MINYAK DAN GAS BUMI

Program tersebut bertujuan mewujudkan pengelolaan dan penyediaan minyak, gas bumi, dan gas metana batubara yang efisien, handal dan berkelanjutan.

Sesuai tugas dan fungsinya KESDM akan melakukan pengaturan dan pembinaan di sub sektor migas yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Melalui pengaturan dan pembinaan tersebut KESDM mendorong pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan sumber daya alam minyak, gas bumi dan gas metana batubara agar berjalan secara efisien, handal dan berkelanjutan. Pengelolaan secara efisien diindikasikan dengan biaya, pemroduksian dan pendistribusian minyak dan gas yang wajar, serta rendahnya rugi-rugi minyak dan gas bumi dalam proses produksi, pengolahan dan transportasi. Sedangkan pengelolaan yang handal dan berkelanjutan ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan BBM dan bahan baku pupuk, serta industri secara terus menerus, rendahnya gangguan operasi, kecelakaan serta terhentinya kegiatan operasi yang tidak direncanakan. Disamping itu, berkelanjutannya sub sektor migas ditunjukkan dengan terjadinya penemuan-penemuan cadangan baru untuk menggantikan cadangan yang telah diproduksi sehingga terjadi rasio penggantian cadangan yang diproduksi yang memungkinkan keberlangsungan produksi, dan berkembangnya produksi bahan bakar alternatif seperti bahan bakar nabati untuk mendukung jaminan pasokan BBM.

Adapun Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi, indikator keberhasilan dan target yang ingin dicapai setiap tahunnya selama kurun waktu 5 tahun adalah :

Tujuan Program	Indikator Keberhasilan	Target				
		2010	2011	2012	2013	2014
Pengelolaan dan penyediaan minyak, gas bumi, dan gas metana batubara yang efisien, handal dan berkelanjutan	Jumlah realisasi penerimaan negara sub sektor migas terhadap target APBN (US\$ Juta)	15.975	17.920	17.854	17.433	16.721
	Jumlah Investasi sub sektor migas (US\$ Juta)	15.415	17.180	17.851	18.390	19.188
	Jumlah kontrak kerja sama sub sektor migas	40	40	40	40	40
	Jumlah kontrak kerja sama CBM	10	10	10	10	10
	Jumlah persetujuan harga gas bumi	15	15	16	16	16
	Jumlah persetujuan amandemen dan atau perpanjangan kontrak	3	3	3	3	3
	Jumlah ijin migas hilir:					
	a. Jumlah usaha pengolahan minyak bumi	2	--	--	--	2
	b. Jumlah usaha pengolahan gas bumi	1	1	--	1	1
	c. Jumlah usaha pengolahan hasil olahan	1	--	--	--	--
	d. Jumlah usaha pengangkutan:					
	- Minyak bumi, BBM dan hasil olahan	37	36	36	36	36
	- LPG	2	2	2	2	2
	- CNG	1	1	1	1	1
	e. Jumlah usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa	--	1	1	1	1
	f. Jumlah usaha penyimpanan:					
	- BBM (Ribuan KL)	40	42	44	46	48
	- LPG, CNG (Ribuan Ton)	10	10	10	10	20
	- LNG (MMSCFD)	--	--	300	--	400
	Jumlah usaha niaga minyak bumi, BBM, LPG, LNG, CNG, serta hasil olahan	28	25	22	17	17
	Jumlah usaha niaga gas bumi melalui pipa	12	5	3	3	3

Tujuan Program	Indikator Keberhasilan	Target				
		2010	2011	2012	2013	2014
	Jumlah produksi minyak bumi (MBOPD)	965	970	990	1000	1010
	Jumlah produksi gas bumi (MBOEPD)	1.593	1.592	1.594	1.544	1.633
	Jumlah produksi BBM (juta KL)	39,9	39,9	39,9	45,9	45,9
	Jumlah Produksi LPG (juta Ton)	1,98	2,0	2,0	2,0	2,0
	Jumlah Produksi LNG (MMTPA)	24,12	23,29	23,52	23,81	23,15
	Jumlah Produksi Bahan Bakar Nabati					
	a. Biodiesel (ribu KL)	1.076	1.297	1.641	2.017	2.734
	b. Bioethanol (ribu KL)	661	694	968	1.167	1.334
	Persentase penggunaan BBN dalam pemakaian Bahan Bakar total					
	a. Biodiesel (%)	4	4	5	6	8
	b. Bioetanol (%)	3	3	4	4	5
	Jumlah penjualan hasil olahan migas (Ribu MT)	808,7	832,96	857,95	808,69	910,2
	Jumlah kegiatan eksplorasi dalam upaya mencari cadangan baru					
	a. Survei Seismik 2D (km)	14.700	8.870	8.700	2.520	2.000
	b. Survei Seismik 3 D (km ²)	7.975	4.500	5.650	4.420	1.000
	c. Pemboran (sumur)	63	88	69	34	45
	Potensi cadangan migas dan CBM :					
	a. Potensi Cadangan Minyak (MMSTB)	8.363,19	8.435,19	8.507,19	8.579,18	8.651,18
	b. Potensi Cadangan Gas Bumi (TSCF)	170,7	171,1	171,4	171,7	172,0
	c. Potensi Cadangan CBM (TSCF)	-	-	19,3	21	24
	Jumlah sumber daya migas dan CBM (BBOE)	163,64	170,42	177,2	183,98	190,76
	Jumlah pelaksanaan survei umum di wilayah terbuka (Seismik 2 D) (km)	2000 (Lepas Pantai Sul-Sel)	2000 (Lepas Pantai Timur)	2000 (Lepas Pantai Indonesia Barat Selatan sepanjang)	2000 (Lepas Pantai Indonesia Timur sepanjang)	2000 (Lepas Pantai Indonesia Barat sepanjang)
	Jumlah kegiatan	8	9	10	11	12

Tujuan Program	Indikator Keberhasilan	Target				
		2010	2011	2012	2013	2014
	penyiapan, promosi dan penawaran WK baru (event)					
	Jumlah persetujuan POD I	2	6	2	13	14
	Persentase pengurangan subsidi BBM dan LPG					
	a. Persentase Volume BBM yang disubsidi	13,48	0,24	0,24	0,24	0,24
	b. Persentase pengalihan minyak tanah ke LPG	61,89	77,77	77,77	77,77	77,77
	Persentase pemberdayaan kapasitas nasional sub sektor migas	30	30	40	40	50
	Persentase pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri	55	55	60	60	65
	Jumlah persetujuan participating interest kepada BUMD atau perusahaan nasional terkait dengan POD I	2	3	2	7	7
	Ratio tenaga kerja asing dengan tenaga kerja nasional	1	1	1	1	1
	Persentase kemampuan pasokan migas dalam negeri	70	70	70	70	70
	Persentase pemanfaatan gas bumi untuk dalam negeri	50	94	98	94	96
	Presentase pemanfaatan BBN:	4	4	5	6	8
	a. Biodiesel	3	3	4	4	5
	b. Bioetanol					
	Persentase substitusi minyak tanah dengan LPG	61,89	77,77	77,77	77,77	77,77
	Jumlah sambungan rumah yang teraliri gas kota	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan baku pupuk dan petrokimia	100	100	100	100	100
	Kapasitas kilang minyak (MBCD)	1163,8	1163,8	1163,8	1163,8	1313,8

Tujuan Program	Indikator Keberhasilan	Target				
		2010	2011	2012	2013	2014
	Kapasitas kilang LPG (Juta ton)	2,61	2,66	2,71	2,76	2,81
	Kapasitas kilang LNG (MMSCFD)	41,9	41,9	42,9	43,9	43,9
	Kapasitas penyimpanan dalam negeri					
	– BBM (ribu KL)	40	42	44	46	48
	– LPG (ribu Ton)	10	10	10	10	20
	– LNG (MMSCFD)	-	-	300	-	400
	Kapasitas pengangkutan:					
	- BBM (%)	6	6	6	6	6
	- LPG (%)	6	6	6	6	6
	- LNG ((%)	5	5	5	5	5
	Kapasitas pembangunan Depot baru	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	a. BBM (KL)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	b. LPG (M Ton)					
	Peningkatan kapasitas infrastruktur	4	4	4	4	4
	Jumlah kilang baru	1	1	-	1	1
	Jumlah kejadian kelangkaan BBM dan LPG	3	3	2	1	3
	Jumlah kelangkaan pendistribusian LPG 3 kg (PSO) ke seluruh Indonesia	16000	16000	16000	-	-
	Rasio produksi dalam negeri dan impor	65 : 35	65 : 35	65 : 35	65 : 35	70 : 30
	Persentase pengurangan volume pembakaran <i>gas flare</i> (%)	60	80	100	100	100
	Persentase pengurangan volume pembuangan air limbah ke lingkungan (%)	20	35	50	65	75
	Persentase pengurangan volume limbah pada sumbernya (%)	20	35	50	65	75
	Persentase peningkatan jumlah penggunaan bahan, bahan kimia dan lumpur bor yang ramah lingkungan Persentase penurunan jumlah	50	60	70	85	100

Tujuan Program	Indikator Keberhasilan	Target				
		2010	2011	2012	2013	2014
	tingkat kegagalan operasi infrastruktur kegiatan usaha migas (%)					
	Penurunan Jumlah tingkat kegagalan operasi infrastruktur kegiatan usaha Migas pada Badan Usaha Hilir migas (BU)	50	65	70	73	75
	Persentase penurunan jumlah tingkat kecelakaan kerja operasi kegiatan usaha migas	70	72	73	75	80
	Persentase peningkatan pemahaman peraturan keselamatan operasi kegiatan usaha migas (%)	20	40	60	80	100
	Persentase peningkatan penggunaan sistem basis data usaha penunjang migas dalam operasi internal (%)	0	5	5	5	5
	Jumlah tersedianya Rancangan Standar Nasional Indonesia untuk kegiatan usaha migas	5	5	5	5	5
	Jumlah tersedianya Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) untuk kegiatan usaha migas	3	3	3	3	3
	Persentase tingkat kegagalan operasi kegiatan migas (%)	30	28	27	25	20
	Jumlah propinsi yang tidak mengalami kelangkaan.	28	29	30	31	32

2) PROGRAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

Program tersebut bertujuan untuk mewujudkan pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa yang optimal

Adapun Pengaturan Dan Pengawasan Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang dilaksanakan oleh BPH Migas, dengan indikator keberhasilan dan target yang ingin dicapai setiap tahunnya selama kurun waktu 5 tahun adalah :

Tujuan Program	Indikator Keberhasilan	Target				
		2010	2011	2012	2013	2014
Terwujudnya pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa yang optimal	Waktu ketahanan stock Cadangan BBM Nasional (Hari)	23	24	24	24	24
	Jumlah wilayah untuk penetapan harga Gas Bumi untuk RT dan PK.	11	12	13	14	15
	Jumlah hak khusus untuk ruas transmisi dan WJD yang diberikan	2 ruas transmisi dan 4 WJD	3 ruas transmisi dan 5 WJD	4 ruas transmisi dan 6 WJD	5 ruas transmisi dan 7 WJD	6 ruas transmisi dan 8 WJD
	Jumlah penetapan tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang wajar dan efisien untuk pengguna (Shipper)	2 ruas transmisi	3 ruas transmisi	4 ruas transmisi	5 ruas transmisi	6 ruas transmisi
	Jumlah keluhan Badan Usaha di bidang usaha BBM dan Gas Bumi melalui pipa	0	0	0	0	0
	Jumlah Pelaksanaan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi dan Jaringan Distribusi Gas Bumi melalui pipa	2 Badan Usaha	3 Badan Usaha	4 Badan Usaha	5 Badan Usaha	6 Badan Usaha
	Jumlah penarikan iuran dari Badan Usaha (miliar Rp)	433	436	439	441	444

3) PROGRAM PENGELOLAAN LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI

Program tersebut bertujuan menyediakan tenaga listrik dalam jumlah cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar serta meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dan penerapan konservasi energi.

Sesuai tugas dan fungsinya KESDM akan melakukan pengaturan dan pembinaan di sub sektor ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi. Dalam pengaturan dan pembinaan tersebut KESDM akan mendorong dan ikut melaksanakan pembangunan di bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan serta konservasi energi. Pembangunan di sub sektor ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi selama 5 tahun diarahkan untuk menyediakan listrik yang handal, aman dan akrab lingkungan. Selain itu KESDM mendorong dan ikut melaksanakan peningkatan pemanfaatan energi terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik dengan menggunakan energi setempat, membangun desa mandiri energi dan mendorong masyarakat baik dari kalangan industri, pemerintah, komersial, rumah tangga dan transportasi untuk melaksanakan konservasi energi.

Adapun Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi, indikator keberhasilan dan target yang ingin dicapai setiap tahunnya selama kurun waktu 5 tahun adalah :

Tujuan Program	Indikator Keberhasilan	Target				
		2010	2011	2012	2013	2014
Penyediaan listrik dalam jumlah cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar serta meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dan penerapan konservasi	Investasi bidang listrik dan pemanfaatan energi (US\$ juta)	10.146	9.279	8.933	8.184	7.889
	Rasio Elektrifikasi (%)	67,2	70,4	73,6	76,8	80
	Rasio Desa Berlistrik (%)	94,59	95,59	96,7	97,8	98,9
	Kapasitas pembangkit tenaga listrik yang dibangun (MW)	22	37			
	Panjang (kms) jaringan transmisi yang dibangun	3.381	4.129	3.881	3.774	4.297

Tujuan Program	Indikator Keberhasilan	Target				
		2010	2011	2012	2013	2014
energi	Kapasitas gardu induk yang dibangun (MVA)	2.159	2.389	2.464	2.603	3.244
	Panjang (kms) jaringan distribusi yang dibangun	18.004	18.091	18.960	19.988	20.508
	Jumlah (unit dan kapasitas) gardu distribusi yang dibangun (MVA)	1.266	1.311	1.416	1.548	1.567
	Pangsa energi baru terbarukan (%)	8,27	10,23	12,18	14,14	16,10
	Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari:					
	PLTMH (MW)	1,53	10,42 (DAK)	10,90 (DAK)	11,38 (DAK)	11,94 (DAK)
	PLTS (MWp)	3,55	24,49 (DAK)	24,59 (DAK)	24,69 (DAK)	24,78 (DAK)
	PLT Angin (MW)	0,00	5,16 (DAK)	5,32 (DAK)	5,55 (DAK)	5,64 (DAK)
	PLT Biomassa (MW)	0	0,1 (DAK)	0,1 (DAK)	0,1 (DAK)	0,1 (DAK)
	Jumlah desa mandiri energi (desa)	50	50	50	50	50
	Jumlah tenaga teknik yang tersertifikasi (orang)	2180	2290	2400	2520	2650
	Tingkat kepedulian masyarakat terhadap pemanfaatan sumber energi baru terbarukan (indeks)	50	50	50	50	50
	Jumlah peserta bimbingan teknis energi baru terbarukan (orang)	180	180	180	180	180
	Elastisitas Energi	1,64	1,60	1,56	1,52	1,48
	Jumlah regulasi di bidang efisiensi energi (buah)	3	3	2	2	2
	Jumlah jenis peralatan pemanfaat tenaga listrik yang menerapkan labelisasi hemat energi (buah)	3	2	2	2	2

Tujuan Program	Indikator Keberhasilan	Target				
		2010	2011	2012	2013	2014
	Jumlah manager energi dan auditor energi yang bersertifikat (orang)	-	50	100	100	100
	Jumlah gedung dan industri yang menerima layanan audit energi (objek)	185	185	199	226	208
	Jumlah peserta bimbingan teknis konservasi energi	170	170	170	170	170
	Tingkat kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan konservasi energi (indeks)	50	60	65	70	70
	Tingkat mutu dan keandalan pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik	70%	70%	75%	75%	80%
	Jumlah pemberlakuan SNI sebagai standard wajib	4	4	5	4	5
	Jumlah sertifikasi peralatan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik	40	45	50	55	60
	Jumlah pembangkit tenaga listrik yang bersertifikat	25	30	30	30	30
	Jumlah instalasi transmisi dan distribusi yang bersertifikat	75	80	80	80	80
	Jumlah instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang bersertifikat	300	300	300	300	300
	Jumlah penetapan dan pemberlakuan standar kompetensi (buah)	3	3	3	3	3
	Jumlah sertifikat kompetensi (buah)	560	590	620	650	680

Tujuan Program	Indikator Keberhasilan	Target				
		2010	2011	2012	2013	2014
	Jumlah Lembaga Sertifikasi Produk Yang Terakreditasi	2	3	5	10	15
	Jumlah Lembaga Inspeksi Teknik yang terakreditasi	2	5	15	20	25
	Jumlah Tenaga Teknik yang tersertifikasi (orang)	2180	2290	2400	2520	2650
	Jumlah updating fakotr emisi Clean Development Mechanism (CDM) sistem grid koneksi ketenagalistrikan	1 grid koneksi	8 grid koneksi	8 grid koneksi	8 grid koneksi	8 grid koneksi
	Jumlah data analisis medan magnit dan medan listrik di bawah jaringan SUTET 500 KV serta kesehatan masyarakat yang terpajan medan magnit dan medan listrik di bawah jaringan SUTET	400 responden 1 Kabupaten	400 responden 1 Kabupaten	400 responden 1 Kabupaten	400 responden 1 Kabupaten	400 responden 1 Kabupaten
	Jumlah fasilitasi penyelesaian kasus-kasus lingkungan ketenagalistrikan (SUTET 500 kV, Pembangkitan dll)	10 kasus	12 kasus	14 kasus	16 kasus	20 kasus
	Jumlah pembinaan dan pengawasan teknis bidang lingkungan sektor ketenagalistrikan baik pada ijin usaha (AMDAL dan atau UKL/UPL) maupun kelaikan teknis bidang lingkungan ketenagalistrikan	13 unit usaha	16 unit usaha	19 unit usaha	22 unit usaha	25 unit usaha
	Jumlah mitigasi teknologi strategi penurunan emisi CO2 di sektor ketenagalistrikan	1 teknologi	6 teknologi	6 teknologi	6 teknologi	6 teknologi
	Jumlah IMJ (Ijin Menggunakan	3	10	15	20	30

Tujuan Program	Indikator Keberhasilan	Target				
		2010	2011	2012	2013	2014
	Jaringan) Badan Usaha Pemanfaat jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika					
	Jumlah rekomendasi pembinaan dan pengawasan kepada PKUK dan PIUKU (buah)	10	12	12	12	14
	Rata-rata pelayanan permohonan daerah usaha atau ekspansi daerah usaha (hari)	30	30	30	25	25
	Jumlah penetapan/penyesuaian harga jual tenaga listrik oleh Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) (buah)	4	4	4	4	4
	Persentase izin usaha yang diterbitkan (%)	20	20	20	25	25
	Jumlah perhitungan subsidi listrik PT PLN (Persero) (buah)	10	10	10	10	10
	Penggunaan Barang dan Jasa Produksi dalam negeri dalam pembangunan sektor ketenagalistrikan	60%	65%	70%	75%	80%
	Jumlah aturan pendukung peraturan perundang-undangan bidang listrik dan pemanfaatan energi	3 PP, 3 RPP	3 PP, 3 peraturan lainnya	6 peraturan lainnya	6 peraturan lainnya	6 peraturan lainnya
	Jumlah regulasi di bidang energi baru terbarukan (buah)	4	2	1	2	1

4) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL. BATUBARA. PANAS BUMI DAN AIR TANAH

Program tersebut bertujuan untuk pembinaan, pelayanan, dan pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi yang profesional.

Sesuai tugas dan fungsinya KESDM akan melakukan pengaturan dan pembinaan di sub sektor mineral, batubara dan panas bumi serta air tanah yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi. KESDM melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pelayanan untuk mendorong pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi yang profesional. Pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi yang profesional ditandai oleh meningkatnya jumlah produksi mineral, batubara dan panas bumi; meningkatnya pasokan batubara untuk dalam negeri, meningkatnya kualitas kegiatan pertambangan umum, meningkatnya investasi, meningkatnya penerimaan negara, meningkatnya nilai tambah pertambangan/mineral, meningkatnya jumlah perusahaan jasa nasional, meningkatnya pelayanan terpadu bidang pertambangan, tersedianya peraturan perundangan di bawah UU tentang pertambangan mineral dan batubara, meningkatnya pemanfaatan energi panas bumi.

Adapun Program Teknis, indikator keberhasilan dan target yang ingin dicapai setiap tahunnya selama kurun waktu 5 tahun adalah :

Tujuan Program	Indikator Keberhasilan	Target				
		2010	2011	2012	2013	2014
Pembinaan dan pelayanan pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi yang profesional	Rencana investasi di sektor mineral, batubara dan panas bumi (Juta US\$)	2.502	3.077	5.008	4.680	7.468
	Jumlah penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP), Wilayah pencadangan negara (WPN), dan Wilayah ijin usaha Pertambangan (WIUP) mineral dan batubara	3	3	3	3	3
	Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi	6	6	6	6	6
	kapasitas PLTP terpasang (MW)	1.261	1.419	2.260	3.000	5.795

Tujuan Program	Indikator Keberhasilan	Target				
		2010	2011	2012	2013	2014
	Jumlah lokasi penugasan survei pendahuluan untuk meningkatkan status potensi panas bumi	6	6	6	6	6
	Jumlah pemanfaatan langsung energi panas bumi	0	0	1	2	2
	Penerimaan Negara subsektor Mineral, Batubara dan Panas Bumi (Trilyun Rp)	57,139	58,843	60,585	62,402	64,258
	Jumlah perencanaan produksi mineral, batubara dan panas bumi					
	1) Batubara (juta ton)	250	280	290	297	309
	2) Panas Bumi (Mwe)	1.249	1.407	2.260	3.000	5.795
	3) Mineral					
	– Tembaga (ton)	1.016.949	644.098	609.171	899.923	944.919
	– Emas (kg)	115.998	91.171	60.488	112.147	117.754
	– Perak (kg)	261.897	246.608	214.183	261.347	274.415
	– Logam Timah (ton)	105.000	105.000	105.000	105.000	110.250
	– Ni+Co in matte (ton)	77.700	82.372	82.009	87.452	91.825
	– Bijih Nikel (ton)	11.064.084	11.285.366	11.511.073	11.741.294	12.328.359
	– Feronikel (mt)	18.276	18.641	19.014	19.394	20.364
	– Bauksit (mt)	10.284.923	10.490.622	10.700.434	10.914.443	11.460.165
	– Intan (crt)	96.000	96.000	96.000	96.000	100.800
	– Bijih Besi (mt)	4.125.235	4.207.739	4.291.894	4.377.732	4.596.618
	– Granit (m3)	2.029.294	2.069.880	2.111.277	2.153.503	2.261.178
	Jumlah rencana pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (juta ton)	75	93	95	96	110
	Peningkatan Nilai tambah batubara : peningkatan produksi briket batubara per tahun	10% – 20%	10% – 20%	10% – 20%	10% – 20%	10% – 20%

Tujuan Program	Indikator Keberhasilan	Target				
		2010	2011	2012	2013	2014
	Pengembangan daerah percontohan pemanfaatan briket di	2 kab/kota: Klaten dan Pacitan.	2 kab/kota : Malang dan Tasikmalaya.	1 kab/kota: Samarinda	2 kab/kota Bengkulu dan Semarang.	2 kab/kota Mataram dan Takalar.
	Optimalisasi nilai tambah mineral dan batubara (Provinsi)	2	2	2	2	2
	Persentase peningkatan penggunaan kandungan lokal (local content) (% kenaikan)	2	2	3	3	3
	Jumlah usaha jasa lokal dan nasional yang berusaha di bidang usaha jasa pertambangan	600	650	750	750	800
	Jumlah daerah yang mendapat program pengembangan masyarakat (wilayah)	25	25	25	30	30
	Jumlah evaluasi pelaksanaan <i>Community Development</i> (perusahaan)	20	23	25	27	30
	Jumlah Pedoman/NSPK untuk aplikasi pengelolaan kegiatan pertambangan di Provinsi/Kabupaten/Kota	8	8	7	7	5
	Jumlah daerah yang terkait dengan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI)	3 Prov, 25 kab	3 Prov, 25 kab	3 Prov, 25 kab	3 Prov, 25 kab	3 Prov, 25 kab
	Jumlah lokasi pelaksanaan pembinaan perizinan pengusahaan mineral dan batubara	3 prov, 25 kab	3 prov, 25 kab	3 prov, 25 kab	3 prov, 25 kab	3 prov, 25 kab
	Tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan pertambangan	0,74	0,72	0,70	0,68	0,66
	Luas lahan pertambangan rusak akibat kegiatan pertambangan, yang direklamasi (ha)	6000	6200	6300	6400	6500
	Jumlah rancangan SNI dan SKKNI bidang pertambangan	5 SNI & 4 SKKNI	5 SNI & 4 SKKNI	5 SNI & 4 SKKNI	5 SNI & 4 SKKNI	5 SNI & 4 SKKNI

Tujuan Program	Indikator Keberhasilan	Target				
		2010	2011	2012	2013	2014
	Minerbapabum					
	Jumlah kompetensi tenaga kerja industri pertambangan minerbapabum melalui sertifikasi	100	150	150	150	200
	Persentase recovery penambangan dan pengolahan terkait konservasi bahan galian pada kegiatan usaha pertambangan	85	87	90	93	95
	Jumlah regulasi bidang pertambangan mineral, batubara dan panas bumi	16	17	18	19	20

5) PROGRAM PENELITIAN, MITIGASI DAN PELAYANAN GEOLOGI

Program tersebut bertujuan untuk Pengungkapan potensi geologi Indonesia untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat.

KESDM mempunyai tugas antara lain melaksanakan penelitian dan pelayanan bidang geologi yang dilaksanakan oleh Badan Geologi. Identifikasi, survei, penyelidikan, penelitian, serta eksplorasi potensi aspek geologi yaitu aspek sains geologi (*geo-science*), sumber daya geologi (*geo-resources*), lingkungan geologi (*geo-environment*), dan kebencanaan atau bahaya geologi (*geo-hazards*) merupakan kegiatan hulu dan dasar dari pengelolaan sumber daya energi dan mineral, pengelolaan lingkungan, serta sebagian besar dari mitigasi bencana alam. Pengungkapan potensi geologi untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat mengandung arti bahwa potensi sumber daya alam Indonesia yang berada di bawah permukaan tanah perlu diungkapkan dalam bentuk data dan informasi sehingga dapat bermanfaat bagi peningkatan investasi, penataan ruang berbasis geologi, dan mitigasi bencana geologi.

Terwujudnya pengungkapan potensi geologi antara lain terwujudnya peningkatan status potensi sumber daya geologi menjadi cadangan, penataan ruang berbasis geologi, pemenuhan kebutuhan air bersih, mitigasi bencana geologi, pelayanan informasi geologi.

Adapun Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi, indikator keberhasilan dan target yang ingin dicapai setiap tahunnya selama kurun waktu 5 tahun (di akhir tahun 2014) adalah :

Tujuan Program	Indikator Keberhasilan	Target				
		2010	2011	2012	2013	2014
pengungkapan potensi geologi Indonesia untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat	Jumlah usulan wilayah kerja pertambangan (WKP) dan WP	8	8	8	8	8
	Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekan sumber daya Panas bumi	22	22	22	22	22
	Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekan sumber daya Batubara dan CBM	18	18	18	18	18
	Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekan sumber daya Gambut dan Bitumen Padat	5	5	5	5	5
	Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekan sumber daya mineral	28	28	29	29	30
	Jumlah wilayah/kawasan pemetaan geologi bersistem dan bertema	2	2	2	2	2
	Jumlah peta geofisika yang dihasilkan	2	3	3	3	3
	Jumlah peta geokimia yang dihasilkan	6	6	6	6	6
	Jumlah peta seismotektonik yang dihasilkan ,	2	2	2	2	2
	Jumlah peta geomorfologi yang dihasilkan	2	2	2	2	2
	Jumlah peta geologi kuarter yang dihasilkan	2	2	2	2	2
	Jumlah perolehan / pendaftaran sistim mutu	7	7	7	7	7
	Jumlah survei, kajian dan penelitian geologi	12	12	12	12	12

Tujuan Program	Indikator Keberhasilan	Target				
		2010	2011	2012	2013	2014
	yang dihasilkan					
	Jumlah peta hidrogeologi bersistem skala 1:250.000	5	5	5	5	5
	Jumlah peta potensi CAT skala 1:100.000	2	3	2	2	5
	Jumlah peta geologi teknik bersistem 1:100.000	6	6	6	6	6
	Jumlah lokasi yang telah dilakukan penyelidikan kondisi geologi teknik geodinamik dan infrastruktur kawasan andalan pertambangan	9	9	8	8	8
	Jumlah informasi hasil penelitian geologi teknik	1	1	1	1	1
	Jumlah kawasan karst terpetakan pada skala 1:50.000	2	2	2	2	2
	Jumlah peta geologi teknik untuk tata ruang	6	6	7	7	7
	Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan geologi lingkungan untuk tata ruang pada skala 1:100.000	17	17	17	17	17
	Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan geologi lingkungan kawasan pertambangan untuk tata ruang pada skala 1:100.000	7	7	7	7	7
	Jumlah rekomendasi teknis penataan ruang berbasis geologi	17	17	17	17	17
	Jumlah daerah sulit air yang memanfaatkan air tanah sebagai sumber air bersih	100	100	100	100	100
	Jumlah peta konservasi air tanah	5	3	2	3	2
	Jumlah sumur bor sumber air bersih penduduk di desa tertinggal dan daerah	100	100	100	100	100

Tujuan Program	Indikator Keberhasilan	Target				
		2010	2011	2012	2013	2014
	sulit air					
	Jumlah peta konservasi air tanah	5	3	2	3	2
	Jumlah rekomendasi konservasi kawasan lindung geologi dan air tanah, dan pengelolaan tata ruang	19	21	18	20	18
	Jumlah layanan pemberian rekomendasi teknis hasil mitigasi bencana geologi;	1	1	1	1	1
	Jumlah Peta Geologi Gunungapi Aktif	2	2	2	2	2
	Jumlah Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Aktif Skala 1:50.000	1	1	1	1	1
	Jumlah peta yang diterbitkan Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah	5	5	5	5	5
	Jumlah peta yang diterbitkan Peta Kawasan Rawan Bencana Gempabumi dan Tsunami	3	3	3	3	3
	jumlah gunung api yang dipantau untuk kegiatan gunungapi aktif tipe A dari Pos Pengamatan Gunungapi	10	10	13	15	18
	Jumlah data geokimia gunungapi di 25 gunungapi	4	4	5	6	6
	Jumlah kegiatan mitigasi di kawasan Bencana G. Merapi	15	15	16	17	17
	Jumlah layanan pemberian rekomendasi teknis hasil mitigasi bencana geologi	1	1	1	1	1
	Jumlah Instansi/Pemda/Negara maju yang melakukan kerjasama penelitian	13	13	13	15	15

Tujuan Program	Indikator Keberhasilan	Target				
		2010	2011	2012	2013	2014
	dan penyelidikan bidang sumber daya geologi					
	Jumlah sarana dan prasarana peragaan Museum Geologi	7 Corner/Sudut	7 Corner /Sudut	15 Corner /Sudut	-	-
	Jumlah kegiatan publikasi dan diseminasi informasi	7	7	7	7	7

6) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEWAN ENERGI NASIONAL

Program tersebut bertujuan untuk pemfasilitasian yang efektif dan efisien untuk menunjang ketahanan energi nasional.

Dalam pengelolaan energi nasional telah dibentuk Dewan Energi Nasional dengan tugas: a) merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional, b) menetapkan rencana umum energi nasional, c) menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, d). mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang energi lintas sektoral. Untuk mendukung pelaksanaan tugas DEN maka dibentuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dengan tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi DEN dan fasilitasi kegiatan kelompok kerja.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional, indikator keberhasilan dan target yang ingin dicapai setiap tahunnya selama kurun waktu 5 tahun adalah :

Tujuan Program	Indikator Keberhasilan	Target				
		2010	2011	2012	2013	2014
Pemfasilitasian yang efektif dan efisien untuk menunjang ketahanan energi nasional	Jumlah rancangan kebijakan di bidang energi yang terselesaikan	7	2	2	2	2
	Jumlah daerah yang menyusun Rencana Umum Energi Daerah	33	33	33	33	33

	Jumlah penetapan dan review Rencana Umum Energi Nasional	1	1	1	1	1
	Jumlah wilayah rawan krisis dan darurat energi yang teridentifikasi	33	33	33	33	33
	Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan kebijakan energi lintas sektor	1	1	1	1	1
	Persentase rekomendasi lokasi dan besaran (volume) cadangan penyangga energi	100%	100%	100%	100%	100%

7) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KESDM

Program tersebut bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di KESDM.

Untuk mendukung visi dan misi KESDM, diperlukan tata kelola pemerintahan KESDM yang baik. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik antara lain:

- Penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya
- Opini BPK terhadap laporan keuangan KESDM yaitu WTP
- Penyelesaian terhadap rancangan perundang undangan yang telah ditargetkan
- Adanya perencanaan KESDM yang sinergis
- Tersedianya layanan data dan informasi yang handal
- Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang sesuai standar

Adapun Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KESDM, indikator keberhasilan dan target yang ingin dicapai setiap tahunnya selama kurun waktu 5 tahun adalah :

Tujuan Program	Indikator Keberhasilan	Target				
		2010	2011	2012	2013	2014
Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase CPNS diangkat dibanding formasi kebutuhan pegawai	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan Program	Indikator Keberhasilan	Target				
		2010	2011	2012	2013	2014
	Jumlah PNS yang dikembangkan kompetensinya	850	900	900	900	900
	Jumlah pembinaan PNS (KESDM)	5877	5900	5900	5900	5900
	Jumlah rancangan pengembangan organisasi	620	600	600	600	600
	Persentase kegiatan yang sesuai prioritas nasional	50	50	55	55	60
	Persentase anggaran yang menunjang prioritas nasional dan K/L	50	50	55	55	60
	Persentase output pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan prioritas nasional dan K/L	60	65	70	75	80
	Persentase/Jumlah kesepakatan kerja sama yang dilaksanakan mendukung prioritas rencana strategis	60	65	70	75	80
	Persentase Penyajian LK tepat waktu (e.g hari,minggu,dll)	70	75	78	80	85
	Opini BPK terhadap LK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	jumlah rancangan peraturan perUUan sektor ESDM yang diselesaikan	25	25	25	25	25
	Persentase peraturan yang tidak sinkron dan harmonis	40	30	25	20	10
	Jumlah bantuan hukum dan kasus yang dimenangkan dan diselesaikan	3	4	4	3	4
	% kegiatan pimpinan yang sesuai sop keprotokolan	80%	82,50%	85%	87,50%	90%

Tujuan Program	Indikator Keberhasilan	Target				
		2010	2011	2012	2013	2014
	jumlah arsip permanen & vital KESDM yang terselamatkan (berkas)	6250	6875	7.563	8.319	9.151
	% Penyerahan data eksplorasi /eksploitasi dan spec survey	100	100	100	100	100
	Tingkat komplain data yang tidak akurat	< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 5 %
	Tingkat layanan jaringan komunikasi data dan internet (100%=24jam/7hari)	100%	100%	100%	100%	100%

8) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARTUR KESDM

Program tersebut bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan standar untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM

Adapun tujuan program dan indikator keberhasilan serta target yang ingin dicapai setiap tahunnya selama kurun waktu 5 tahun adalah :

Tujuan Program	Indikator Keberhasilan	Target				
		2010	2011	2012	2013	2014
Menyediakan sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan standar untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Persentase sarana dan prasarana kerja yang sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja	80	83	87	91	95

9) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Program tersebut bertujuan untuk merwujudkan KESDM yang bersih, akuntabel dan transparan.

Untuk mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan, diperlukan kelembagaan dan aparatur yang bersih, akuntabel dan transparan. Terwujudnya KESDM yang

bersih, akuntabel dan transparan ditandai dengan menurunnya praktek KKN, peningkatan efisiensi penggunaan anggaran, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan *good governance* dan *clean government*, peningkatan kinerja aparatur KESDM yang dititikberatkan pada jenis pengawasan Kinerja (3E), pengawasan terhadap pelayan public baik pada unit/satuan kerja pusat maupun daerah, pemberdayaan kegiatan *partnering* dan konseling dan implementasi sistem AKIP serta peningkatan dan pemberdayaan pengendalian internal unit/satuan kerja.

Adapun Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, indikator keberhasilan dan target yang ingin dicapai setiap tahunnya selama kurun waktu 5 tahun adalah :

Tujuan Program	Indikator Keberhasilan	Target				
		2010	2011	2012	2013	2014
Pewujudan KESDM yang bersih, akuntabel dan transparan	Persentase kasus di Dep. ESDM yang ditangani aparat penegak hukum	0	0	0	0	0
	Persentase penyelesaian kasus KKN atau Tuntutan Ganti Rugi	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah rekomendasi hasil audit yang diimplementasikan	160	180	200	220	240
	Persentase penyelesaian LHP yang tepat waktu	100%	100%	10%	100%	100%
	Persentase rekomendasi yang tuntas ditindaklanjuti dalam 6 (enam) bulan sejak diterimanya MHP oleh unit	50%	55%	60%	65%	70%
	Persentase laporan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti oleh Itjen Dep. ESDM	100%	100%	100%	100%	100%
	Indeks kepuasan unit Eselon I (<i>lichert scale</i>)	3 (cukup)	3 (cukup)	4 (puas)	4 (puas)	5 (sangat puas)

10) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Program tersebut bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan teknologi sektor energi dan sumber daya mineral.

Tujuan terwujudnya peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan teknologi sektor energi dan sumber daya mineral antara lain tersedianya teknologi, data dan informasi, hasil kajian kebijakan sektor ESDM untuk menunjang pemerintah, swasta dan industri serta meningkatnya PNBPN melalui pelayanan jasa riset dan teknologi, konsultasi dan bantuan tenaga ahli.

Adapun program Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, indikator keberhasilan dan target yang ingin dicapai setiap tahunnya selama kurun waktu 5 tahun adalah :

Tujuan Program	Indikator Sasaran	Target				
		2010	2011	2012	2013	2014
Pewujudan kualitas penelitian dan pengembangan teknologi sektor energi dan sumber daya mineral	Jumlah usulan paten dan hak cipta	10	10	11	8	10
	Jumlah makalah ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal baik di tingkat nasional maupun internasional dan laporan ilmiah	83	91	99	112	109
	Jumlah masukan/rekomendasi kebijakan	28	33	34	34	39
	Jumlah pilot plant dan demo plant atau rancangan produk rancang bangun penerapan teknologi unggulan bidang energi dan sumber daya mineral					
	- bidang mineral dan batubara	7	13	8	11	10

Tujuan Program	Indikator Sasaran	Target				
		2010	2011	2012	2013	2014
	- bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan	14	9	8	3	2
	- bidang migas	3	3	3	2	3
	- bidang geologi kelautan	3	3	3	3	3
	Jumlah produksi peta potensi geologi kelautan	9	9	9	9	9
	Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kegiatan jasa Penelitian dan Pengembangan terhadap target yang ditetapkan (dalam juta Rupiah)	49.723	59.214	70.268	83.506	99.364
	Jumlah kegiatan penunjang kelitbangan lainnya	223	184	184	184	184
	Jumlah kegiatan yang didanai dari PNBP	129	123	123	123	123

11) PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Program tersebut bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia sektor ESDM yang profesional, berdaya saing tinggi dan bermoral selaras dengan upaya pelaksanaan reformasi birokrasi di KESDM, maka sumber daya manusia juga menjadi fokus yang sangat penting dan karena SDM dipandang sebagai tulang punggung pelaksanaan tugas kementerian. Pewujudan kualitas SDM yang mumpuni di kaitkan dengan peningkatan penguasaan kompetensi teknis maupun non-teknis. Karena itu kriteria profesional, berdaya saing dan bermoral melibatkan bukan hanya penguasaan aspek teknis ke ESDM an tetapi juga aspek kematangan emosi dan spiritual.

Adapun program Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, indikator keberhasilan dan target yang ingin dicapai setiap tahunnya selama kurun waktu 5 tahun adalah :

Tujuan Program	INDIKATOR	TARGET				
		2010	2011	2012	2013	2014
Pewujudan sumber daya manusia sektor ESDM yang profesional, berdaya saing tinggi dan bermoral	Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun	346	366	378	394	409
	Jumlah jenis diklat sektor ESDM yang diselenggarakan	34	39	52	59	69
	Jumlah peserta yang selesai mengikuti diklat di Badiklat KESDM	6.829	7.249	7.609	7.969	8.329
	Jumlah lulusan pendidikan formal tingkat Diploma I, II, III, dan IV.	241	277	319	367	422
	Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan	461	477	485	489	494
	Jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan kemampuannya	1.728	1.809	1.880	1.941	2.013
	Jumlah Lembaga Diklat Profesi/LDP yang terakreditasi sebagai penyelenggara Diklat Teknis	16	27	31	32	44
	Persentase tingkat kinerja organisasi	90	92	92	93	95
	Jumlah publikasi karya ilmiah	6	8	10	13	14
	Jumlah kegiatan administrasi pengelolaan kepegawaian, umum dan keuangan	124	129	135	137	140
	Jumlah kegiatan penyempurnaan organisasi	5	5	5	5	5
	Jumlah karya ilmiah	87	91	97	112	121
	Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan	51	70	51	75	51
	Jumlah dokumen perencanaan	48	46	46	46	48
	Jumlah kegiatan pengadaan pembangunan dan renovasi sarana dan prasarana	59	96	85	65	69
	Jumlah sarana diklat yang terakreditasi standar mutu	8	11	12	13	14
	Jumlah kegiatan pelayanan jasa sarana, keahlian, dan sertifikasi	33	38	45	49	55
	Jumlah kerjasama diklat yang diimplementasikan	120	131	145	160	172
	Jumlah kegiatan promosi diklat	17	19	23	25	28
	Jumlah sistem informasi yang diimplementasikan	19	24	27	30	30

* * *

MATRIKS TARGET KINERJA DAN PENDANAAN
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN 2010 - 2014

(Juta Rupiah)

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	- Meningkatkan kualitas pengelolaan SDM Aparatur dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dan pengembangan organisasi.	o Jumlah formasi berdasarkan kebutuhan organisasi (KESDM)	567	680	816	979	1174	1.237	1.300	1.300	1.300	1.300
			o Jumlah PNS yang dikembangkan kompetensinya (KESDM & Setjen)	850	450	450	450	450	16.269	17.000	17.000	17.000	17.000
			o Persentase pemrosesan pembinaan pegawai (KESDM)	95%	95%	95%	95%	95%	21.490	22.000	22.000	22.000	22.000
			o Perancangan susunan satuan organisasi (angka kumulatif) KESDM	620	600	600	600	600	10.479	11.000	11.000	11.000	11.000
			o Persentase kegiatan yang sesuai prioritas nasional	50%	51%	52%	53%	54%	22.321	22.321	22.321	22.321	22.321
		- Meningkatkan kualitas perencanaan dan kerjasama sektor ESDM yang efektif dan efisien	o Jumlah kesepakatan kerja sama yang dilaksanakan mendukung prioritas rencana strategis	60%	65%	70%	75%	80%	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230
			o Persentase output pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan prioritas nasional dan K/L	60%	65%	70%	75%	80%	19.366	19.366	19.366	19.366	19.366
			o Persentase anggaran KESDM yang menuniang Prioritas nasional	50%	52%	54%	56%	60%	35.078	35.078	35.078	35.078	35.078
			o Persentase Penyajian LK tepat waktu (e.g hari,minggu,dll)	70%	75%	78%	80%	85%	34.618	7.718	7.873	8.109	8.190
			o Opini BPK terhadap LK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	59.743	23.272	23.738	24.450	24.694
		- Terwujudnya pelayanan perbendaharaan, administrasi pengelolaan dan informasi keuangan yang cepat, tepat, transparan serta akuntabel di lingkungan KESDM	Prosentase peningkatan produktifitas kinerja pegawai KESDM	100%	100%	100%	100%	100%	217.080	217.080	217.080	217.080	217.080
			Pelaksanaan Dekonsentrasi (Provinsi)	33 prov	33 prov	33 prov	33 prov	33 prov	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
			o jumlah rancangan peraturan perUUan sektor ESDM yang diselesaikan	25	25	25	25	25	2.860	3.289	3.780	4.233	4.765
		- Terwujudnya kepastian hukum sektor ESDM dalam rangka mendorong peningkatan investasi dan citra KESDM.	o Persentase peraturan yang tidak sinkron dan harmonis	40%	30%	25%	20%	10%	2.780	3.115	3.489	4.012	4.495
			o Persentase bantuan hukum dan kasus yang dimenangkan dan diselesaikan	3	4	4	3	4	2.500	2.870	3.300	3.800	4.300
			o Rasio berita negatif dan positif	50% ; 38%	54% ; 36%	60% ; 35%	64% ; 34%	68% ; 33%	11.384	12.522	13.140	13.937	14.634
		- Mewujudkan tertib administrasi kerumah tanggaan, keprotokolan pimpinan KESDM dan Sekjen serta tertib administrasi perlengkapan, persuratan dinas dan kearsipan KESDM	Jumlah arsip permanen& vital KESDM yang berhasil diselamatkan	6250 berkas	6875 berkas	7562 berkas	8318 berkas	9150 berkas	12.908	14.845	17.071	19.632	22.577
			Tingkat Penghematan Energi dan air Gedung perkantoran di lingkungan KESDM	10%	11%	12%	13%	15%	6.015	6.917	7.955	9.148	10.521
			% temuan auditor dalam pengadaan barang& jasa di lingkungan KESDM	20%	15%	10%	5%	2%	6.213	7.145	8.217	9.450	10.867
			% BMKN Setjen KESDM yang berhasil dicatat dalam BIB	80%	85%	90%	95%	99%	4.805	5.525	6.354	7.307	8.403
			Jumlah pembayaran gaji, lembur, honorarium dan vakasi	100%	100%	100%	100%	100%	24.376	28.033	32.238	37.073	42.634
			% rapat yang terselenggara sesuai jadwal	75%	80%	85%	90%	95%	22.120	25.438	29.254	33.642	38.688
			% kegiatan pimpinan yang sesuai sop keprotokolan	80%	82,5%	85%	87,5%	90%	24.841	28.567	32.852	37.779	43.446

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		- Meningkatnya kualitas data dan informasi sektor ESDM yang lengkap, akurat dan tepat waktu	o Rasio penyerahan data eksplorasi/eksploitasi dan spek survey	100%	100%	100%	100%	100%	18.999	20.899	22.989	25.288	27.817
			o Tingkat komplain data ESDM yang tidak akurat	<10%	<10%	<10%	<10%	<5%	-	-	-	-	-
			Status kemutakhiran data	90%	90%	90%	90%	95%	13.505	14.856	16.342	17.976	19.774
			Tingkat apresiasi panelis terpilih (maksudnya ada tim ahli yang menilai)	>=C	>=C	>=C	>=C	>=B	4.500	4.950	5.400	5.940	6.500
			o Tingkat layanan jaringan komunikasi data dan internet (100%-24jam/7hari)	100%	100%	100%	100%	100%	6.967	7.664	8.430	9.273	10.200
1	Kegiatan Pengelolaan SDM aparatur dan pengembangan organisasi KESDM	- Terlaksananya perencanaan dan pengembangan SDM Aparatur: - Terlaksananya pembinaan SDM Aparatur: - Terlaksananya pengembangan organisasi dan tata laksana.	- Jumlah PNS yang dikembangkan kompetensinya (KESDM & Setjen)	850	900	900	900	900	15.688	16.000	16.000	16.000	16.000
			- Jumlah pengembangan jabatan (KESDM)	20	20	20	20	20	1.612	1.700	1.700	1.700	1.700
			- Jumlah PNS yang lulus seleksi untuk ditugaskan pada pendidikan formal, diklat, bintek, orientasi, studi banding bidang teknis ESDM (KESDM)	1200	1200	1200	1200	1200	235	300	300	300	300
			- Jumlah jenis kebutuhan diklat PNS KESDM	8	8	8	8	8	346	400	400	400	400
			- Jumlah pembinaan PNS (KESDM)	5877	5900	5900	5900	5900	16.652	17.000	17.000	17.000	17.000
			- Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin menurun (KESDM)	10	10	6	5	5	378	500	500	500	500
			- Jumlah PNS yang memperoleh penghargaan (KESDM)	400	425	450	500	500	487	600	600	600	600
			- Jumlah PNS yang lulus ujian dinas dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (KESDM)	120	130	150	150	170	238	300	300	300	300
			- Rata-rata jumlah PNS yang di update data melalui SIPEG (KESDM)	6255	6455	6655	6855	7055	3.257	3.300	3.300	3.300	3.300
			- Jumlah dokumentasi dan tata naskah pegawai yang tertata baik (KESDM)	10296	10976	11972	12771	13945	478	500	500	500	500
			- Jumlah Juklak/Juknis pembinaan pegawai	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-
			- Jumlah pengembangan SOP (angka kumulatif)	369	400	420	440	460	1.511	1.600	1.600	1.600	1.600
			- Persentase CPNS diangkat dibanding formasi kebutuhan pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	1.237	1.300	1.300	1.300	1.300
			- Pengembangan Organisasi	620	600	600	600	600	7.355	7.500	7.500	7.500	7.500
2	Kegiatan Pembinaan dan koordinasi perencanaan dan kerja sama KESDM	- Tersedianya Dokumen Perencanaan yang sinergis - Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran berbasis kinerja:	penyusunan RKKL, Renstra dan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja	12 lap, 5 kajian	12 lap, 5 kajian	12 lap, 5 kajian	12 lap, 5 kajian	12 lap, 5 kajian	22.321	22.321	22.321	22.321	22.321
			kerjasama bilateral, multilateral dan dalam negeri	9 lap, 1 kajian	9 lap, 1 kajian	9 lap, 1 kajian	9 lap, 1 kajian	9 lap, 1 kajian	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		- Terkendalinya pelaksanaan kegiatan renstra dan dokumen perencanaan	penyusunan LAKIP, evaluasi kebijakan, bahan sidang pimpinan dan monitoring program dan kegiatan	16 lap	16 lap	16 lap	16 lap	16 lap	19.366	19.366	19.366	19.366	19.366
		- Terlaksananya kesepakatan kerja sama yang mendukung prioritas rencana strategis	penyusunan RKAKL, KPJM dan Koordinasi Perencanaan Anggaran	9 lap, 1 kajian	9 lap, 1 kajian	9 lap, 1 kajian	9 lap, 1 kajian	9 lap, 1 kajian	35.078	35.078	35.078	35.078	35.078
3	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan KESDM	- Terwujudnya pengelolaan keuangan yang baik;	Jumlah kegiatan analisa, koordinasi pelaksanaan anggaran, pemantauan LHP dan penghapusan	3 lap	3 lap	3 lap	3 lap	3 lap	5.389	5.659	5.772	5.945	6.005
		- Terwujudnya sistem pengendalian intern yang memadai terhadap informasi keuangan;	jumlah kegiatan implementasi sistem, sinkronisasi, pembuatan pedoman, inventarisasi BMN	11 lap, 2 pedoman	11 lap, 2 pedoman	11 lap, 2 pedoman	11 lap, 2 pedoman	11 lap, 2 pedoman	11.146	11.703	11.937	12.295	12.418
		- Tercapainya optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara dan pelanoran	Jumlah pelaksanaan serah terima kegiatan selesai	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	719	755	770	793	801
		- Terlaksananya pelayanan prima perbendaharaan keuangan negara di lingkungan KESDM-	Jumlah pencatatan, usulan penyaluran dan pemanfaatan	9 lap, 1 kajian	9 lap, 1 kajian	9 lap, 1 kajian	9 lap, 1 kajian	9 lap, 1 kajian	10.092	10.597	10.809	11.133	11.244
		- Terlaksananya Manajemen Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan KESDM.	jumlah analisa, sinkronisasi, kajian, bimtek keuangan, penelaahan revisi, kinerja, harmonisasi penetapan daerah bidang PU, koordinasi, analisa, evaluasi dan pembinaan PNPB	45 lap, 7 kajian, 5 kegiatan	45 lap, 7 kajian, 5 kegiatan	45 lap, 7 kajian, 5 kegiatan	45 lap, 7 kajian, 5 kegiatan	45 lap, 7 kajian, 5 kegiatan	32.164	33.272	33.738	34.450	34.694
		- Terwujudnya kesejahteraan pegawai	jumlah kegiatan implementasi sistem, sinkronisasi, pembuatan pedoman, inventarisasi BMN	11 lap, 2 pedoman	11 lap, 2 pedoman	11 lap, 2 pedoman	11 lap, 2 pedoman	11 lap, 2 pedoman	7.351	7.718	7.873	8.109	8.190
			Jumlah penyusunan dan revisi RAPBN dan Nota Keuangan	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	1.491	1.566	1.597	1.645	1.662
			Jumlah rasio SOP yang ditetapkan, penvertaan dan administrasi	3 lap	3 lap	3 lap	3 lap	3 lap	19.841	20.833	21.249	21.887	22.106
			Jumlah pelaksanaan penyelesaian TP/TGR	3 lap, 1 pedoman	3 lap, 1 pedoman	3 lap, 1 pedoman	3 lap, 1 pedoman	3 lap, 1 pedoman	1.628	1.710	1.744	1.796	1.814
			Monitoring dan Evaluasi	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1.425	1.496	1.526	1.572	1.587
			Jumlah implementasi peningkatan sistem SPM	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	474	497	507	522	528
			Jumlah penyusunan target PNPB	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	2.636	2.768	2.824	2.908	2.937
			persentase peningkatan disiplin kerja pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	217.080	217.080	217.080	217.080	217.080
			Pelaksanaan Dekonsentrasi (Provinsi)	33 prov	33 prov	33 prov	33 prov	33 prov	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4	Kegiatan Pembinaan Administrasi Hukum dan Kehumasan	- Terbentuknya peraturan perundang-undangan sektor ESDM sesuai dengan perencanaan	Jumlah peraturan PerUUan	25	25	25	25	25	2.860	3.289	3.780	4.233	4.765

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		- Terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi per-UU-an;	Persentase peraturan yang tidak sinkron dan harmonis	40%	30%	25%	20%	10%	2.780	3.115	3.489	4.012	4.495
		- Terselaikannya masalah hukum yang diajukan;	Jumlah bantuan hukum dan kasus yang dimenangkan dan diselesaikan	3	4	4	3	4	2.500	2.870	3.300	3.800	4.300
		- Terwujudnya penyajian informasi yang mendukung pembangunan citra KESDM	Rasio berita negatif dan positif	50% ; 38%	54% ; 36%	60% ; 35%	64% ; 34%	68% ; 33%	11.384	12.522	13.140	13.937	14.634
5	Kegiatan Pengelolaan administrasi perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga KESDM	- Terwujudnya kelancaran pelaksanaan persuratan dinas dan terselamatkannya arsip vital dan permanen di lingkungan KESDM;	Jumlah arsip permanen & vital KESDM yang berhasil diselamatkan (Berkas)	6250	6875	7.563	8.319	9.151	12.908	14.845	17.071	19.632	22.577
		- Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan;	% BMKN Setjen KESDM yang berhasil dicatat dalam BIB	10%	11%	12%	13%	15%	4.805	5.525	6.354	7.307	8.403
		- Terwujudnya kelancaran administrasi ketatausahaan dan perlengkapan	Tingkat Penghematan Energi dan air Gedung perkantoran di lingkungan KESDM	20%	15%	10%	5%	2%	6.015	6.917	7.955	9.148	10.521
			% temuan auditor dalam pengadaan barang & jasa di lingkungan KESDM	80%	85%	90%	95%	99%	6.213	7.145	8.217	9.450	10.867
			Jumlah pembayaran gaji, lembur, honorarium dan vakasi	100%	100%	100%	100%	100%	24.376	28.033	32.238	37.073	42.634
			% rapat yang terselenggara sesuai jadwal	75%	80%	85%	90%	95%	22.120	25.438	29.254	33.642	38.688
			% kegiatan pimpinan yang sesuai sop keprotokolan	80%	82,50%	85%	87,50%	90%	24.841	28.567	32.852	37.779	43.446
6	Kegiatan Pengelolaan data dan informasi KESDM	- Meningkatkan daya dukung pengelolaan data dan informasi sektor ESDM;	Rasio penyerahan data eksplorasi/eksploitasi dan spek survey	100%	100%	100%	100%	100%	18.999	20.899	22.989	25.288	27.817
		- Meningkatkan penyajian data dan informasi yang <i>up to date</i> ;	Status kemutakhiran data	90%	90%	90%	90%	95%	13.505	14.856	16.342	17.976	19.774
		- Meningkatkan kualitas kajian data dan informasi ESDM;	Rata-rata waktu pemutakhiran data (sejak data diterima sampai database terupdate)	90%	90%	90%	90%	95%	-	-	-	-	-
		- Meningkatkan ketersediaan (continuity of service) infrastruktur teknologi informasi dalam mendukung penyediaan, penyajian, dan kajian data dan informasi ESDM	Tingkat komplain data ESDM yang tidak akurat	<10%	<10%	<10%	<10%	<5%	-	-	-	-	-
			Tingkat apresiasi panelis terpilih (maksudnya ada tim ahli yang menilai)	>=C	>=C	>=C	>=C	>=B	4.500	4.950	5.400	5.940	6.500
			Indeks kegunaan kajian	>=6	>=6	>=6	>=6	>=7	-	-	-	-	-
			Tingkat layanan jaringan komunikasi data dan internet (100%=24jam/7hari)	100%	100%	100%	100%	100%	6.967	7.664	8.430	9.273	10.200

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR KESDM	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang efektif dan efisien	Persentase sarana dan prasarana kerja yang sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja	80%	83%	87%	91%	95%	7.861		56.507	64.983	74.731
1	Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana aparatur KESDM	Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai dengan kebutuhan	Persentase sarana dan prasarana kerja yang sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja	80%	83%	87%	91%	95%	42.727	49.137	56.507	64.983	74.731
III	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Meningkatnya kinerja; dan akuntabilitas kinerja dan anggaran; serta kepatuhan dan ketaatan kepada peraturan dan perundang-undangan	o Persentase kasus di Dep. ESDM yang ditangani aparat penegak hukum	0%	0%	0%	0%	0%	125	138	142	156	172
			o Persentase penyelesaian kasus KKN atau Tuntutan Ganti Rugi	100%	100%	100%	100%	100%	17.810	19.591	21.552	23.706	26.078
			o Jumlah rekomendasi hasil audit yang diimplementasikan	160	180	200	220	240	62.697	68.969	75.868	83.457	91.804
			o Persentase penyelesaian LHP yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	5.380	5.920	6.512	7.164	7.880
			o Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang selesai ditindaklanjuti dalam 6 (enam) bulan sejak MHP diterima unit/satuan kerja	50%	55%	60%	65%	70%	19.908	21.899	24.089	26.498	29.148
			o Persentase laporan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti oleh Itjen Dep. ESDM	100%	100%	100%	100%	100%	4.000	4.400	4.840	5.324	5.856
			o Indeks kepuasan unit Eselon I (lichert scale)	Cukup (3)	Cukup (3)	Puas (4)	Puas (4)	Sangat puas (5)	1.390	1.524	1.682	1.849	2.031
			o Jumlah pegawai yang terkena kasus disiplin dan KKN (dalam rangka proses administrasi kepegawaian)	0	0	0	0	0	125	138	142	156	172
			o Tersedianya gaji, lembur, honorarium dan vakasi	13 bulan	13 bulan	13 bulan	13 bulan	13 bulan	8.754	9.629	10.592	11.651	12.816
			o Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang selesai ditindaklanjuti dalam 6 (enam) bulan sejak MHP diterima unit/satuan kerja	50%	55%	60%	65%	70%	19.908	21.899	24.089	26.498	29.148
1.	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Inspektorat Jenderal KESDM	Pembinaan, koordinasi, pelayanan administratif dan dukungan teknis bagi Inspektorat Jenderal yang optimal dan berkualitas	o Jumlah SOP yang dibuat dan dilaksanakan	1	1	2	2	3	17.468	19.215	21.136	23.250	25.575
			o Indeks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (lichert scale)	3 (cukup)	3 (cukup)	3 (cukup)	4 (baik)	4 (baik)	795	872	962	1.057	1.161
			o Penggunaan anggaran Itjen sesuai rencana	100%	100%	100%	100%	100%	810	891	980	1.078	1.186
			o Jumlah jam pelatihan per pegawai	24 jam	32 jam	32 jam	40 jam	40 jam	4.095	4.505	4.956	5.452	5.997
			o Indeks kepuasan unit Eselon I (lichert scale)	Cukup (3)	Cukup (3)	Puas (4)	Puas (4)	Sangat puas (5)	595	652	720	792	870

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Lingkup Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi dan Satuan Kerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan DEN.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, anggaran dan aparatur di lingkup Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi dan satuan kerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan DEN	- Jumlah rencana pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi dan satuan kerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan DEN yang terealisasi	48	48	48	48	48	4.250	4.675	5.143	5.657	6.223
			- Persentase laporan pengaduan lingkup Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi dan satuan kerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan DEN yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	1.000	1100	1.210	1.331	1.464
			- Persentase rekomendasi evaluasi pelaksanaan pengawasan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi dan satuan kerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan DEN yang diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100%	2.427	2.670	2.937	3.231	3.554
			- Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan hasil pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	1.345	1.480	1.628	1.791	1.970
			- Persentase evaluasi kebijakan-kebijakan yang diterbitkan dan pelayanan publik oleh Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi dan satuan kerja PT PLN (Persero) dan DEN dan pembuatan SOP di lingkungannya	100%	100%	100%	100%	100%	1.200	1.320	1.452	1.597	1.757
			- Jumlah jam pelatihan per pegawai	40 jam	40 jam	40 jam	40 jam	40 jam	3.268	3.595	3.955	4.351	4.786
			- Jumlah pelaksanaan pendampingan (partnering dan consulting)	4	6	8	10	12	1.200	1.320	1.452	1.597	1.757
			- Jumlah rencana pengawasan lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi yang terealisasi	49	49	49	49	49	4.250	4.675	5.143	5.657	6.223
3.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, anggaran dan aparatur di lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi	- Persentase laporan pengaduan lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	1.000	1100	1.210	1.331	1.464
			- Persentase rekomendasi evaluasi pelaksanaan pengawasan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi yang diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100%	2.427	2.670	2.937	3.231	3.554
			- Jumlah rencana pengawasan lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi yang terealisasi	49	49	49	49	49	4.250	4.675	5.143	5.657	6.223

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Persentase evaluasi kebijakan-kebijakan yang diterbitkan dan pelayanan publik oleh Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi dan pembuatan SOP di lingkungannya	100%	100%	100%	100%	100%	1.345	1.480	1.628	1.791	1.970
			- Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan hasil pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	1.200	1.320	1.452	1.597	1.757
			- Jumlah jam pelatihan per pegawai	40 jam	40 jam	40 jam	40 jam	40 jam	3.268	3.595	3.955	4.351	4.786
			- Jumlah pelaksanaan pendampingan (partnering dan consulting)	4	6	8	10	12	1.200	1.320	1.452	1.597	1.757
4.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Inspektorat Jenderal, Badan Geologi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Meningkatnya akuntabilitas aparatur di lingkup Inspektorat Jenderal, Badan Geologi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	- Jumlah rencana pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal, Badan Geologi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang terealisasi	41	41	41	41	41	4.250	4.675	5.143	5.657	6.223
			- Persentase laporan pengaduan lingkup Inspektorat Jenderal, Badan Geologi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	1.000	1.100	1.210	1.331	1.464
			- Persentase rekomendasi evaluasi pelaksanaan pengawasan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup Inspektorat Jenderal, Badan Geologi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100%	2.427	2.670	2.937	3.231	3.554
			- Persentase evaluasi kebijakan-kebijakan yang diterbitkan dan pelayanan publik oleh Inspektorat Jenderal, Badan Geologi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral dan pembuatan SOP di lingkungannya	100%	100%	100%	100%	100%	1.345	1.480	1.628	1.791	1.970
			- Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan hasil pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	1.200	1.320	1.452	1.597	1.757
			- Jumlah jam pelatihan per pegawai (minimal)	40 jam	40 jam	40 jam	40 jam	40 jam	3.268	3.595	3.955	4.351	4.786
			- Jumlah pelaksanaan pendampingan (partnering dan consulting)	4	6	8	10	12	1.200	1.320	1.452	1.597	1.757

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, BPH Migas	Meningkatnya akuntabilitas aparatur di lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral dan BPH Migas	- Jumlah rencana pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, BPH Migas yang terealisasi	29	29	29	29	29	4.250	4.675	5.143	5.657	6.223
			- Persentase laporan pengaduan lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, BPH Migas yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	1.000	1100	1.210	1.331	1.464
			- Persentase rekomendasi evaluasi pelaksanaan pengawasan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, BPH Migas yang diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100%	2.427	2.670	2.937	3.231	3.554
			- Persentase evaluasi kebijakan-kebijakan yang diterbitkan dan pelayanan publik oleh lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, BPH Migas dan pembuatan SOP di lingkungannya	100%	100%	100%	100%	100%	1.345	1.480	1.628	1.791	1.970
			- Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan hasil pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	1.200	1.320	1.452	1.597	1.757
			- Jumlah jam pelatihan per pegawai (minimal)	40 jam	40 jam	40 jam	40 jam	40 jam	3.268	3.595	3.955	4.351	4.786
			- Jumlah pelaksanaan pendampingan (partnering dan consulting)	4	6	8	10	12	1.200	1.320	1.452	1.597	1.757
IV	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN MINYAK DAN GAS BUMI	Meningkatnya produksi migas yang berkelanjutan, kapasitas nasional, kehandalan bahan bakar dan bahan baku industri, kehandalan infrastruktur serta menurunnya kecelakaan dan dampak lingkungan dari kegiatan migas	Jumlah realisasi penerimaan Negara dari subsektor migas terhadap target APBN (US\$ juta)	15.975	17.920	17.854	17.433	16.721	20.149,00	24.831,45	26.073,02	27.376,67	28.745,51
			Jumlah realisasi investasi subsektor migas (US\$ juta)	15.415	17.177	17.851	18.390	19.188	7.817,00	8.207,85	8.618,24	9.049,15	9.501,61
			Jumlah Kontrak Kerja Sama Migas dan Gas Metana Batubara yang telah ditandatangani	40 KKS Migas dan 10 KKS CBM	40 KKS Migas dan 10 KKS CBM	40 KKS Migas dan 10 KKS CBM	40 KKS Migas dan 10 KKS CBM	40 KKS Migas dan 10 KKS CBM	72.753,00	76.390,65	80.210,18	82.364,87	84.441,71
			Jumlah produksi (<i>lifting</i>) minyak bumi (MBOPD)	965	970	990	1.000	1.010	28.324,70	29.740,94	31.227,98	32.789,38	34.428,85
			Jumlah produksi gas bumi (MBOEPD)	1.593	1.592	1.594	1.544	1.633	28.324,70	29.740,94	31.227,98	32.789,38	34.428,85
			Prosentase jaminan pasokan Bahan Baku dan Bahan Bakar Migas	70%	70%	70%	70%	70%	31.133,08	25.364,74	149.132,97	151.795,43	154.776,62
			Prosentase Pengurangan Volume Subsidi BBM	13,48%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	30.551,75	32.079,34	33.683,30	35.367,47	37.135,84
			Prosentase Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN)						27.315,75	28.681,54	30.115,61	31.621,40	33.202,46
			a. Biodiesel (%)	4	4	5	6	8					
			b. Bioetanol (%)	3	3	4	4	5					

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Prosentase peningkatan pemberdayaan kapasitas nasional	30	30	40	40	50	5.973,90	6.272,60	6.586,22	6.915,54	7.261,31
			Jumlah penerapan standardisasi teknis sub sektor migas yang disertifikasi SNI dan/atau diberlakukan wajib	2	2	2	3	3	41.994,20	44.093,91	46.298,61	48.613,54	51.044,21
			Sambungan Rumah yang teraliri gas bumi melalui pipa	16.000*) SR	16000*)	16.000	16.000	16.000	269.238,95	275.400,00	255.400,00	275.400,00	295.400,00
			- <u>Konstruksi</u>	(4 kota)	SR	SR	SR	SR	252.838,95	260.000	240.000	260.000	280.000
			- <u>Kajian:</u>		(4 kota)	(4 kota)	(4 kota)	(4 kota)	16.400,00	15.400	15.400	15.400	15.400
			o FEED & DEDC						10.000,00	10.000,00	10.000	10.000	10.000
			o UKL/UPL						2.400,00	2.400,00	2.400	2.400	2.400
			o Sosialisasi						3.000,00	3.000,00	3.000	3.000	3.000
			o Kajian O&M Jaringan Gas Untuk Rumah Tangga						1.000,00				
			prosentase konversi minyak tanah dengan LPG	61,89	77,77	77,77	77,77	77,77	16.253,77	17.066,46	17.919,78	18.815,77	19.756,55
			Penggunaan Gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan di Palembang, Surabaya dan Balikpapan	1 lap	1 kota; 7 SPBG	1 kota; 7 SPBG	1 kota; 7 SPBG		5.300,00	100.700,00	114.200,00	147.000,00	
			Prosentase pemenuhan gaji pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	23.694,10	24.878,8	26.122,7	27.428,9	28.800,3
1.	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Mias	Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan dukungan teknis bagi Ditjen Migas secara optimal	Penggunaan Gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan di Palembang, Surabaya dan Balikpapan						5.300,00	100.700,00	114.200,00	147.000,00	-
			-FEED & DEDC	1 kota	1 kota	1 kota							
			- Konstruksi		7 SPBG	7 SPBG	7 SPBG						
			Prosentase peningkatan pengunjung website	10%	10%	10%	10%	10%	3.866,70	4.060,04	3.468,70	3.815,60	4.197,20
			-Jumlah pemeliharaan website	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt					
			-Jumlah pengembangan website dan peningkatan keamana jaringan	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt					
			Jumlah laporan RKAKL yang disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerja dalam kerangka pengeluaran berjangka menengah	1	1	1	1	1	674,00	707,70	743,09	780,24	819,25
			Jumlah buku LAKIP Ditjen Migas	1	1	1	1	1	604,80	635,04	666,79	700,13	735,14
			Jumlah draft Peraturan Perundang-undangan migas yang telah diselesaikan	15	15	10	10	10	1.037,90	1.089,80	1.144,28	1.201,50	1.261,57
			Jumlah draft Kontrak Kerjasama Migas dan Gas Metana Batubara yang disusun	40 Kontrak Migas 10 Kontrak CBM	40 Kontrak Migas 10 Kontrak CBM	40 Kontrak Migas 10 Kontrak CBM	40 Kontrak Migas 10 Kontrak CBM	40 Kontrak Migas 10 Kontrak CBM		1.603,88	1.684,07	1.768,27	1.856,69
			-Jumlah penyiapan & penyempurnaan draft kontrak KKS Migas dan CBM	1pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt			-	-	-
			Jumlah penyidikan pelanggaran pidana bidang migas	17	20	20	20	20	723,50	759,68	797,66	837,54	879,42

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			· Jumlah laporan penyuluhan & pemantauan pelaksanaan peraturan migas	17	20	20	20	20		-	-	-	-
			Transformasi dan konsolidasi BUMN bidang energi dimulai dari PLN dan Pertamina yang selesai selambat-lambatnya 2010 (SDM)	1 rumusan kebijakan	-	-	-	-	1.384,40	1.453,62	1.526,30	1.602,62	1.682,75
			· Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam rangka peningkatan fungsi informasi hukum dan perUU-an	1 pkt						-	-	-	-
			Prosentase penempatan pegawai dalam jabatan sesuai dengan kompetensi personil	70%	80%	90%	100%	100%	28.236,13	29.647,94	31.130,33	30.182,13	29.691,91
			· Jumlah penyertaan diklat struktural	1pkt	1 pkt	1pkt	1pkt	1pkt		-	-	-	-
			· Jumlah penyertaan pendidikan dan pelatihan teknis	1pkt	1 pkt	1pkt	1pkt	1pkt		-	-	-	-
			· Jumlah sosialisasi jabatan fungsional inspektur migas	1pkt	1 pkt	1pkt	1pkt	1pkt		-	-	-	-
			· Jumlah pembinaan dan pengelolaan adm migas	1pkt	1pkt	1pkt	1pkt	1pkt		-	-	-	-
			· Jumlah pemeliharaan sistem informasi kepegawaian	1pkt	1pkt	1pkt	1pkt	1pkt		-	-	-	-
			· Jumlah laporan pengkajian pengembangan organisasi dan tata laksana	1pkt	1 pkt	1pkt	1pkt	1pkt		-	-	-	-
			· Jumlah laporan penilaian angka kredit dan pembinaan jabatan fungsional inspektur migas	1pkt	1pkt	1pkt	1pkt	1pkt		-	-	-	-
			· Jumlah laporan pejabat Ditjen Migas yang berkualitas & berkompeten	1pkt	1 pkt	1pkt	1pkt	1pkt		-	-	-	-
			Prosentase pemenuhan pelayanan pimpinan	100%	100%	100%	100%	100%	6.218,20	6.529,11	6.855,57	7.198,34	7.558,26
			· Jumlah poliklinik obat-obatan	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt		-	-	-	-
			· Jumlah pakaian kerja sopir/teknisi/perawat/dokter	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt		-	-	-	-
			· Jumlah pemeliharaan gedung & bangunan	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt		-	-	-	-
			· Jumlah perawatan kendaraan roda 4 dan 6	1pkt	1pkt	1pkt	1pkt	1pkt		-	-	-	-
			· Prosentase pemenuhan sewa lahan parkir	100%	100%	100%	100%	100%		-	-	-	-
			· Jumlah operasional perkantoran dan pimpinan Ditjen Migas	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt		-	-	-	-
			Prosentase sarana dan prasarana yang berada dalam kondisi baik (layak pakai)	100%	100%	100%	100%	100%	3.680,50	3.864,53	4.057,75	4.260,64	4.473,67
			· Prosentase pengelolaan dan perlengkapan perkantoran dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%		-	-	-	-
			Prosentase pencapaian realisasi anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	2.168,20	2.276,61	2.390,44	2.509,96	2.635,46
			· Jumlah Laporan evaluasi sistem informasi pengelolaan keuangan	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			·Jumlah laporan pelayanan informasi pelaksanaan pengelolaan SAP	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			·Jumlah laporan implementasi pengelolaan SAP	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			·Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan dan neraca	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			Hasil Opini Pemeriksaan BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	667,50	700,88	735,92	772,71	811,35
			· Jumlah laporan hasil pemeriksaan hasil temuan pemeriksaan dan tindak lanjutnya	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			Prosentase target realisasi PNB Migas	100%	100%	100%	100%	100%	1.338,00	1.404,90	1.475,15	1.548,90	1.626,35
			· Jumlah monitoring, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt		-	-	-	-
			Prosentase BMN Ditjen Migas yang tercatat	100%	100%	100%	100%	100%	5.822,10	6.113,21	6.418,87	6.739,81	7.076,80
			·Jumlah laporan pelaksanaan labeling barang milik negara Ditjen Migas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Jumlah laporan pemutakhiran data kekayaan negara subsektor migas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			·Jumlah Pemeliharaan FSO Ardjuna Sakti	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			Prosentase BMN Migas yang dihapuskan	100%	100%	100%	100%	100%	1.167,10	1.225,46	1.286,73	1.351,06	1.418,62
			·Jumlah laporan penilaian aset negara eks KKS dalam rangka penghapusan aset subsektor migas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			·Jumlah laporan koordinasi kegiatan penilaian aset negara eks KKKS dlm rangka tindak lanjut penghapusan	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			Prosentase pemenuhan gaji pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	23.694,10	24.878,81	26.122,75	27.428,88	28.800,33
2.	Kegiatan Penyiapan Kebijakan dan Peningkatan Kerja Sama Bilateral/Multilateral, Peningkatan Investasi Kegiatan Usaha Migas dan Pemberdayaan Kapasitas Nasional	Pengembangan program, peningkatan penerimaan negara, investasi, kerjasama, dan kapasitas nasional bidang migas	Jumlah kejadian kelangkaan pasokan BBM dan LPG	3	3	2	1	3	500,00	525,00	551,25	578,81	607,75
			· Jumlah laporan monitoring dan pengawasan pendistribusian BBM dan LPG	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap					
			Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan baku pupuk dan petrokimia dalam negeri	100%	100%	100%	100%	100%	1.629,20	1.710,66	1.796,19	1.886,00	1.980,30
			·Jumlah laporan rencana alokasi dan neraca gas bumi nasional	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			·Jumlah laporan monitoring pasokan gas bumi pasokan hulu dalam rangka meningkatkan pasokan gas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Jumlah laporan penyiapan rekomendasi alokasi gas bumi	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			Peningkatan kapasitas infrastruktur	4	4	4	4	4	2.791,10	2.930,66	3.077,19	3.231,05	3.392,60
			· Jumlah penyusunan rencana pengembangan infrastruktur gas bumi berbasis tata ruang nasional	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt		-	-	-	-

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			· Jumlah Pemeliharaan data base infrastruktur	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt		-	-	-	-
			· Jumlah laporan Penyusunan evaluasi rencana induk transmisi dan distribusi gas bumi nasional	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt		-	-	-	-
			Roadmap rasionalisasi subsidi BBM						1.000,00	-	-	-	-
			· Jumlah Penyusunan cetak biru kebijakan bahan bakar Indonesia	1 lap									
			· Jumlah Penyusunan Roadmap rasionalisasi subsidi BBM	1 lap	-	-	-	-					
			Jaminan pasokan gas untuk industri, transportasi, pembangkit listrik	70%	70%	70%	70%	70%	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
			· Jumlah laporan rencana alokasi dan neraca gas bumi nasional							-	-	-	-
			· Jumlah laporan monitoring pasokan gas bumi pasokan hulu dalam rangka meningkatkan pasokan gas		1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Jumlah laporan penyiapan rekomendasi alokasi gas bumi	1 lap						-	-	-	-
			Jumlah realisasi Investasi subsektor migas (US\$)	15,415	17,177	17,851	18,39	19,188	7.322,10	7.688,21	8.072,62	8.476,25	8.900,06
			· Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi perkiraan nilai investasi migas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Jumlah laporan investasi subsektor migas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			Transparansi dan akuntabilitas pencatatan pendapatan negara	100%	100%	100%	100%	100%	13.619,18	14.300,14	15.015,15	15.765,90	16.554,20
			· Jumlah laporan PNPB Bidang Migas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Jumlah pemeliharaan, perbaikan sistem monitoring lifting migas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Jumlah monitoring ICP	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			Ratio tenaga kerja asing dengan tenaga kerja nasional	1	1	1	1	1	2.513,10	2.638,76	2.770,69	2.909,23	3.054,69
			· Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penggunaan TKA dan pelaksanaan alih teknologi subsektor migas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Jumlah laporan monitoring & evaluasi pasokan dan permintaan tenaga kerja subsektor migas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Jumlah laporan Penyiapan kebijakan ketenagakerjaan subsektor migas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			Persentase pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada usaha minyak dan gas bumi	55	55	60	60	65	2.912,00	3.057,60	3.210,48	3.371,00	3.539,55
			· Jumlah laporan pengawasan dan pemanfaatan barang dan jasa teknologi dan rekayasa rancang bangun dalam negeri	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Jumlah laporan Pengendalian impor dan pemantauan barang operasi perminyakan	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			· Jumlah laporan Monitoring pemanfaatan rencana impor barang	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	9.886,90	-	-	-	-
			Jumlah Pelaksanaan Pertemuan Kerjasama Dalam Negeri, Bilateral, Regional, dan Multilateral, Minyak dan Gas Bumi	3	4	4	4	5		10.381,25	10.900,31	10.445,32	10.446,85
			· Jumlah laporan pelaksanaan kerjasama DN , bilateral, multilateral dan regional	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Penyusunan roadmap kerjasama migas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Ratifikasi perjanjian ABSA	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Pemantauan dan kerjasama migas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
3.	Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Meningkatnya pengelolaan, pengusaha dan pembinaan usaha hulu minyak dan gas bumi dan CBM	Jumlah Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi dan CBM yang ditawarkan dan ditandatangani	40 KKS Migas dan 10 KKS GMB ditawarkan	40 KKKS Migas dan 10 KKS GMB ditawarkan	40 KKKS Migas dan 10 KKS GMB ditawarkan	40 KKKS Migas dan 10 KKS GMB ditawarkan	40 KKKS Migas dan 10 KKS GMB ditawarkan	20.683,70	21.717,89	22.803,78	25.448,77	26.721,21
			· Jumlah laporan usulan wilayah kerja baru migas & CBM	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Studi dan evaluasi potensi pasar wilayah kerja	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Jumlah laporan penyiapan dan penawaran wilayah kerja baru migas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Penyiapan wilayah kerja migas dan CBM	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Penyusunan term & condition WK migas dan CBM	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Evaluasi dan penyiapan draft KKKS WK migas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Penawaran WK Migas dan CBM	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Lelang WK Migas & CBM	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Penilaian WK Migas & CBM	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Negosiasi penawaran WK	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Pengambilan dan pengumpulan sertapengolahan data seismik 2d	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Pengolahan data seismik 2 D sepanjang 200	2000km	2000km	2000km	2000km	2000km		-	-	-	-
			Jumlah produksi migas dan CBM						10.490,50	11.015,03	11.565,78	12.144,07	12.751,27
			- Minyak Bumi (MBOPD)	965	970	990	1.000	1.010		-	-	-	-
			- Gas Bumi (MBOEPD)	1.593	1.592	1.594	1.544	1.633		-	-	-	-
			- CBM (MBOEPD)	-	-	21,7	61,34	113,21		-	-	-	-
			· Jumlah laporan pengembangan data informasi sumur tua	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Kajian teknis dan keekonomian pengembangan lapangan idle	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Pemantauan & inventarisasi data lap.minyak yang tidak/belum diproduksi	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Monitoring dan sinkronisasi data migas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Pemantauan dan peningkatan produksi migas dgn metode IOR	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			· Pemantauan & evaluasi kegiatan eksploitasi lap. Baru	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Pemantauan dan evaluasi stok minyak mentah	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Pemantauan pemboran sumur pengembangan	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			Jumlah investasi sub sektor minyak dan gas bumi dan CBM	554 Juta USD dan 150 Juta USD dari komitmen 3 tahun pertama	582 Juta USD dan 160 Juta USD dari komitmen 3 tahun pertama	609 Juta USD dan 160 Juta USD dari komitmen 3 tahun pertama	637 Juta USD dan 180 Juta USD dari komitmen 3 tahun pertama	665 Juta USD dan 180 Juta USD dari komitmen 3 tahun pertama	1.316,50	1.382,33	1.451,44	1.524,01	1.600,21
			· Jumlah laporan peningkatan promosi dan pelayanan investasi migas dan CBM	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Jumlah laporan peningkatan promosi dan pelayanan investasi migas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			Jumlah kegiatan eksplorasi dalam upaya mencari cadangan migas baru	Survei Seismik 2D 14.700 km, Survei Seismik 3D 7.975 km ² , Pemboran 63 sumur	Survei Seismik 2D 8.870 km, Survei Seismik 3D 4.500 km ² , Pemboran 88 sumur	Survei Seismik 2D 8.700 km, Survei Seismik 3D 5.650 km ² , Pemboran 69 sumur	Survei Seismik 2D 2.520 km, Survei Seismik 3D 4.420 km ² , Pemboran 34 sumur	Survei Seismik 2D 2.000 km, Survei Seismik 3D 1.000 km ² , Pemboran 45 sumur	10.847,20	11.389,56	11.959,04	12.556,99	13.184,84
			· Penilaian kinerja KKKS status eksplorasi	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Pembinaan dan pengawasan pembukaan data migas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Evaluasi dan penyerahan data hasil survei umum, eksplorasi dan eksploitasi	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Evaluasi dan verifikasi penemuan migas pada kegiatan pemboran sumur eksplorasi	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			Potensi Cadangan Minyak dan Gas Bumi dan CBM						633,50	665,18	698,43	733,36	770,02
			· Jumlah laporan evaluasi cadangan migas dan CBM	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			a. Potensi Cadangan Minyak (MMSTB)	8.363,19	8.435,19	8.507,19	8.579,18	8.651,18					
			b. Potensi Cadangan Gas Bumi (TSCF)	170,7	171,1	171,4	171,7	172					
			c. Potensi Cadangan CBM (TSCF)	-	-	19,3	21	24					
			Jumlah Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi dan CBM	163,64 BBOE	170,42 BBOE	177,2 BBOE	183,98 BBOE	190,76 BBOE	1.130,00	1.186,50	1.245,83	1.308,12	1.373,52
			· Jumlah laporan sumber daya migas dan CBM di seluruh cekungan Indonesia	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah pelaksanaan Survei Umum di Wilayah Terbuka	Data seismik 2D dan hasil pengolahannya di Lepas Pantai Sulawesi Selatan sepanjang 2000 km	Data seismik 2D dan hasil pengolahannya di Lepas Pantai Timur Indonesia sepanjang 2000 km	Data seismik 2D dan hasil pengolahannya di Lepas Pantai Indonesia Barat Selatan sepanjang 2000 km	Data seismik 2D dan hasil pengolahannya di Lepas Pantai Indonesia Timur sepanjang 2000 km	Data seismik 2D dan hasil pengolahannya di Lepas Pantai Indonesia Barat sepanjang 2000 km	35.000,00	38.500,00	42.350,00	46.585,00	51.243,50
			Jumlah kegiatan penyiapan, promosi dan penawaran Wilayah Kerja Baru Migas	8 (delapan) event	9 (sembilan) event	10 (sepuluh) event	11 (sebelas) event	12 (duabelas) event	5.186,50	5.445,83	5.718,12	6.004,02	6.304,22
			· Jumlah laporan promosi wilayah kerja baru migas	1 lap	1 lap	1 lap	1lap	1 lap		-	-	-	-
			Jumlah persetujuan Plan of Development (POD) I	2	6	2	13	14	1.193,50	1.253,18	1.315,83	1.381,63	1.450,71
			· Jumlah laporan evaluasi geologi,geofisika reservoir pada rencana POD I	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Studi geologi geofisik reservoir (GGR) dalam perhitungan keekonomian pada rencana POD I	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Monitoring dan pengawasan pelaksanaan rencana POD I	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Penyiapan dan pelaksanaan konsultasi daerah dalam rangka persetujuan POD I	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			Jumlah persetujuan harga gas bumi	15	15	16	16	16	1.394,01	1.463,71	1.536,90	1.613,74	1.694,43
			· Jumlah laporan evaluasi persetujuan harga gas bumi	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Jumlah laporan Penyusunan kebijakan di bidang pemanfaatan gas bumi	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			Jumlah persetujuan amandemen dan atau perpanjangan kontrak	3	3	3	3	3	360,30	378,32	397,23	417,09	437,95
			· Jumlah laporan evaluasi teknis usulan perpanjangan dan/atau amandemen kontrak	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			Jumlah persetujuan Participating Interest (PI) kepada BUMD atau perusahaan nasional terkait dengan POD I.	2	3	2	7	7	428,50	449,93	472,42	496,04	520,84
			· Jumlah laporan fasilitasi pelaksanaan PI kepada BUMD atau perusahaan nasional terkait dengan POD I	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			Menyiapkan Rencana Induk Petrokimia (DME)	1,8% dari produksi nasional	1,85 % produksi nasional	1,9 % produksi nasional	1,95 % produksi nasional	2% produksi nasional	400,00	420,00	441,00	463,05	486,20
			Jumlah pedoman dan prosedur pelayanan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan CBM.	10	11	12	12	13					
			Prosentasi pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri.	50%	54%	60%	64%	67%	1.129,20	1.185,66	1.244,94	1.307,19	1.372,55

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			· Jumlah monitoring pasokan gas bumi konsumen hulu guna meningkatkan <u>jaminan pasokan gas</u>	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt		-	-	-	-
			· Jumlah laporan penyiapan rekomendasi penetapan alokasi gas bumi	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			Prosentase pengembangan dan pemanfaatan gas bumi.	97%	97%	98%	98%	99%	818,50	859,43	902,40	947,52	994,89
			· Jumlah laporan penyusunan kebijakan pemanfaatan gas bumi	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			Prosentase penyerahan data minyak dan gas bumi dan CBM.	90%	90%	93%	95%	95%	800,00	840,00	882,00	926,10	972,41
			· Jumlah laporan evaluasi dan penyerahan data hasil kegiatan survei umum, eksplorasi dan eksploitasi	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			Prosentase pengelolaan data dan informasi bidang eksplorasi dan eksploitasi migas.	90%	90%	93%	95%	95%	1.057,20	1.110,06	1.165,56	1.223,84	1.285,03
			· Jumlah laporan implementasi pengembalian dan pengelolaan data lama perminyakan Indonesia	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			Prosentase perkembangan penanganan tumpang tindih lahan.	20%	30%	40%	50%	60%	235,30	247,07	259,42	272,39	286,01
			· Jumlah laporan penanganan masalah tumpang tindih lahan kegiatan hulu migas dengan kawasan hutan	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			Prosentase Pengelolaan, Pembahasan dan Evaluasi Laporan Kegiatan KKKS dari BPMIGAS.	100%	100%	100%	100%	100%	998,00	1.047,90	1.100,30	1.155,31	1.213,08
			· Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan studi bersama WK produksi dan komitmen pasti 2 tahun masa eksplorasi KKS	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
4.	Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	Peningkatan Kapasitas, kehandalan dan efisiensi infrastruktur sistem penyediaan bahan bakar dan bahan baku industri	Ratio antara produksi dalam negeri dengan impor	65%-35%	65%-35%	65%-35%	65%-35%	70%-30%	5.000,00	2.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
			· Pembangunan kilang mini plant LPG	1 lap	1 lap	1 unit kilang miniplant LPG							
			Kapasitas dalam negeri						1.360,00	1.428,00	1.499,40	1.574,37	1.653,09
			· Jumlah laporan Pengembangan infrastruktur cadangan strategis minyak bumi dan BBM	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			a. kilang minyak (MBCD)	1163,8	1163,8	1163,8	1163,8	1163,8					
			b. kilang LPG (Juta ton)	2,61	2,66	2,71	2,76	2,81					
			c. kilang LNG (MMTPA)	41,9	41,9	42,9	43,9	43,9					
			Kapasitas penyimpanan dalam negeri						500,00	525,00	551,25	578,81	607,75
			· Jumlah laporan Pemutakhiran peta fasilitas pengangkutan dan penyimpanan migas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Jumlah laporan pemutakhiran data keg. Pengangkutan dan penyimpanan migas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			a. BBM, (Ribu KL)	40	42	44	46	48					
			b. LPG (Ribu Ton)	10	10	10	10	20					
			c. LNG (MMSCFD)	-	-	300	-	400					

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			kapasitas pengangkutan						500,00	525,00	551,25	578,81	607,75
			· Jumlah laporan pemetaan kapasitas infrastruktur dan kebutuhan fasilitas pendistribusian bahan bakar minyak dan gas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			a. BBM (%)	6	6	6	6	6					
			b. LPG (%)	6	6	6	6	6					
			c. CNG (%)	5	5	5	5	5					
			Produksi						651,80	684,39	718,61	754,54	792,27
			· Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kegiatan operasi kilang	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			a. BBM, (Juta KL)	39,9	39,9	39,9	45,9	45,9					
			b. LPG (Juta ton)	1,98	2	2	2	2					
			c. LNG (MMTPA)	24,12	23,29	23,52	23,81	23,15					
			Pemenuhan BBM dalam negeri untuk Indonesia bagian timur	73,36%	73,42%	73,48%	73,54%	73,60%	2.792,25	2.931,86	3.078,46	3.232,38	3.394,00
			Prosentase penggunaan BBN dalam pemakaian Bahan Bakar total						21.454,90	21.827,45	22.918,82	24.064,76	25.268,00
			· Jumlah laporan monitoring mandatory BBN	1lap	1lap	1lap	1lap	1lap		-	-	-	-
			· Jumlah laporan pengawasan volume dan prosentase pencampuran BBN ke dalam BBM	1lap	1lap	1lap	1lap	1lap		-	-	-	-
			· Pengawasan standar dan mutu BBN	1lap	1lap	1lap	1lap	1lap		-	-	-	-
			· Sosialisasi kebijakan pemanfaatan BBN	1lap	1lap	1lap	1lap	1lap		-	-	-	-
			· Penetapan dan evaluasi harga BBN	1lap	1lap	1lap	1lap	1lap		-	-	-	-
			· Penyusunan sistem distribusi BBN bersubsidi	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			a. Biodiesel (%)	4	4	5	6	8					
			b. Bioetanol (%)	3	3	4	4	5					
			Jumlah Desa Mandiri Energi berbasis BBN	LPE	LPE	LPE	LPE	LPE	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	3.646,52
			· Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan kegiatan DME berbasis energi	1 lap	1lap	1lap	1lap	1lap		-	-	-	-
			· Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan DME berbasis energi	1 lap	1lap	1lap	1lap	1lap		-	-	-	-
			Pembangunan unit pengolahan Biofuel dalam rangka pembentukan DME di 8 desa terpilih	unit pengolahan biofuel di 8 desa	unit pengolahan biofuel di 8 desa	unit pengolahan biofuel di 8 desa	unit pengolahan biofuel di 8 desa	unit pengolahan biofuel di 8 desa	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			Jumlah penjualan hasil olahan migas (Ribuan MT)	808,7	832,96	857,95	808,69	910,2	2.820,10	2.961,11	3.109,16	3.264,62	3.427,85
			· Jumlah laporan Monitoring dan evaluasi keg.penjualan ekspor impor komoditas migas dan hasil olahannya	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Implementasi dibukanya usaha hilir migas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Sosialisasi tata niaga migas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			Jumlah kelangkaan pendistribusian LPG 3 kg (PSO) ke seluruh Indonesia	16000	16000	16000	-	-	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
			· Jumlah laporan penentuan wilayah distribusi LPG tertentu	1 lap	1 lap	1 lap				-	-	-	-

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			· Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan P3JBT	1 lap	1 lap	1 lap				-	-	-	-
			· Kebijakan penetapan harga LPG untuk PSO dan non PSO	1 lap	1 lap	1 lap				-	-	-	-
			Jumlah penambahan kapasitas Depot						2.299,80	2.414,79	2.535,53	2.662,31	2.795,42
			· Jumlah laporan pemutakhiran data kegiatan pengangkutan dan penyiapanan migas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Sosialisasi keg.usaha pengangkutan dan penyimpanan migas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Pelaksanaan pedoman penerbitan ijin usaha pengangkutan dan penyimpanan migas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Monitoring dan evaluasi kegiatan usaha pengangkutan dan penyimpanan migas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			a. BBM (KL)	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000					
			b. LPG (M Ton)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000					
			Indeks kepuasan konsumen bahan bakar (Pengujian Sampel)	1300	1450	1600	1750	1900	6.421,00	6.742,05	7.079,15	7.433,11	7.804,77
			· Jumlah laporan penyebaran informasi kebijakan perlindungan konsumen	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Jumlah laporan sosialisasi kebijakan perlindungan konsumen	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Pembinaan koordinasi dan konsultasi pengawasan mutu BBM, LPG dan BBG	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Pengujian dan analisis mutu BBM,LPG dan BBG yang beredar di DN dalam rangka pengawasan	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			Jumlah usaha pengolahan minyak bumi	2	-	-	-	2	651,80	684,39	718,61	754,54	792,27
			· Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kegiatan operasi kilang minyak dan gas bumi	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			Jumlah usaha pengolahan gas bumi	1	1	-	1	1	651,80	684,39	718,61	754,54	792,27
			· Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kegiatan operasi kilang minyak dan gas bumi	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			Jumlah usaha pengolahan Hasil Olahan	1	-	-	-	-	651,80	684,39	718,61	754,54	792,27
			· Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kegiatan operasi kilang minyak dan gas bumi	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1lap					
			Jumlah usaha pengangkutan						651,80	684,39	718,61	754,54	792,27
			· Implementasi pedoman ijin usaha pengangkutan dan penyimpanan migas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1lap		-	-	-	-
			a. Minyak Bumi, BBM dan hasil olahan	37	36	36	36	36					
			b. LPG	2	2	2	2	2					
			c. CNG	1	1	1	1	1					
			Jumlah usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa	-	1	1	1	1	1.200,00	1.260,00	1.323,00	1.389,15	1.458,61
			· Penyusunan prosedur pemanfaatan bersama sarana pengangkutan gas bumi melalui pipa (open access)	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah usaha penyimpanan						400,00	420,00	441,00	463,05	486,20
			· Pelaksanaan pedoman penerbitan ijin usaha pengangkutan dan penyimpanan migas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			a. minyak bumi,	4	4	4	4	3					
			b. BBM,	1	1	-	1	1					
			c. LPG, CNG	-	-	-	-	-					
			d. LNG	-	-	1	-	1					
			Jumlah usaha niaga minyak bumi, Bahan Bakar Minyak, LPG, LNG, CNG serta hasil Olahan	28	25	22	17	17	622,90	654,05	686,75	721,08	757,14
			· Jumlah laporan sosialisasi tata niaga minyak bumi, Bahan Bakar Minyak, LPG, LNG, CNG serta hasil Olahan	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			Jumlah usaha niaga gas bumi melalui pipa	12	5	3	3	3	622,90	654,05	686,75	721,08	757,14
			· Jumlah laporan sosialisasi tata niaga gas bumi melalui pipa	1 LAP	1 LAP	1LAP	1 LAP	1 LAP		-	-	-	-
			Jumlah rekomendasi						1.537,50	1.614,38	1.695,09	1.779,85	1.868,84
			· Jumlah laporan pemantauan realisasi ekspor minyak mentah, kondensat, natural gas, LPG dan LNG dan hasil kegiatan usaha hulu migas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi stok minyak mentah	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			a. ekspor Migas	15	20	25	17	15					
			b. impor Migas	100	200	125	115	110					
			Jumlah pelanggaran regulasi usaha hilir (Sosialisasi dan menyusun peraturan, pameran)	0	0	0	0	0	1.926,00	2.022,30	2.123,42	2.229,59	2.341,07
			· investigasi kecelakaan pada kegiatan usaha hilir migas	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt		-	-	-	-
			Prosentase penghematan BBM Bersubsidi (%)	13,48	0,24	0,24	0,24	0,24	2.847,60	2.989,98	3.139,48	3.296,45	3.461,28
			· Jumlah laporan penetapan kebijakan subsidi BBM	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Jumlah laporan studi kebijakan pengurangan subsidi BBM tahun 2011	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			Prosentase pengalihan pemakaian minyak tanah ke LPG (%)	61,89	77,77	77,77	77,77	77,77	3.640,00	3.822,00	4.013,10	4.213,76	4.424,44
			· Jumlah laporan studi kebijakan penetapan harga LPG untuk PSO dan non PSO	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			Penambahan jaringan gas kota (kota)	3	4	4	4	4	269.238,95	275.400,00	255.400,00	275.400,00	295.400,00
			Sambungan Rumah yang teraliri gas bumi melalui pipa	16.000 SR	16.000 SR	16000 SR	16.000 SR	16.000 SR					
			- Konstruksi						252.838,95	260.000,00	240.000,00	260.000,00	280.000,00
			- Kajian:						16.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
			o FEED & DEDC						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			o UKL/UPL						2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
			o Sosialisasi						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			o Kajian O&M Jaringan Gas Untuk Rumah Tangga						1.000,00				
5.	Kegiatan Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Migas	Pembinaan dan Pengawasan Kehandalan Infrastruktur, K3, dan Lingkungan, serta Usaha Penunjang dan Teknis serta Standardisasi	Prosentase pengurangan volume pembakaran gas flare (%)	60	80	100	100	100	750,00	787,50	826,88	868,22	911,63
			· Jumlah laporan implementasi pengurangan emisi pada gas flare	1 LAP	1 LAP	1 LAP	1 LAP	1 LAP		-	-	-	-
			Prosentase pengurangan volume pembuangan air limbah ke lingkungan (%)	20	35	50	65	75	6.997,40	7.347,27	6.584,17	6.913,38	7.259,05
			· Jumlah laporan sosialisasi pedoman teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Jumlah laporan peningkatan koordinasi pengawasan lindungan lingkungan dengan instansi terkait	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Jumlah laporan pengawasan evaluasi daya dukung lingkungan	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			Prosentase pengurangan volume limbah pada sumbernya (%)	20	35	50	65	75	1.174,90	1.233,65	1.295,33	1.360,09	1.428,10
			· Jumlah laporan Sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan lingkungan paska operasi pada keg usaha migas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Sosialisasi pedoman teknis AMDAL dan UKL/UPL	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			Prosentase peningkatan jumlah penggunaan bahan, bahan kimia dan lumpur bor yang ramah lingkungan	50	60	70	85	100	500,00	525,00	551,25	578,81	607,75
			o Pengawasan penggunaan bahan, bahan kimia dan lumpur bor yang ramah lingkungan	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			Prosentase Penurunan Jumlah tingkat kegagalan operasi infrastruktur kegiatan usaha hilir Migas	penurunan tingkat kegagalan operasi infrastruktur pada 50 BU	penurunan tingkat kegagalan operasi infrastruktur pada 65 BU	penurunan tingkat kegagalan operasi infrastruktur pada 70 BU	penurunan tingkat kegagalan operasi infrastruktur pada 72 BU	penurunan tingkat kegagalan operasi infrastruktur pada 75 BU	4.814,70	5.055,44	5.308,21	5.573,62	5.852,29
			· Jumlah laporan pengawasan & pemeriksaan kelaikan teknis peralatan, instalasi & instrumentasi kegiatan usaha hilir migas	1 LAP	1 LAP	1 LAP	1 LAP	1 LAP		-	-	-	-
			· Jumlah laporan evaluasi hasil pemeriksaan teknis peralatan, instalasi & instrumentasi kegiatan usaha hilir migas	1 LAP	1 LAP	1 LAP	1 LAP	1 LAP		-	-	-	-
			Prosentase penurunan jumlah tingkat kecelakaan kerja operasi kegiatan usaha hulu migas	70%	72%	73%	75%	80%	4.079,00	4.282,95	4.497,10	4.721,95	4.958,05

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			· Jumlah laporan penyusunan pedoman teknis keselamatan operasi hulu migas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Jumlah laporan pedoman teknis pemeriksaan pipa penyalur, instalasi pemboran, kriteria jam kerja	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			Prosentase peningkatan pemahaman peraturan keselamatan operasi kegiatan usaha migas (%)	20	40	60	80	100	1.257,50	1.320,38	1.386,39	1.455,71	1.528,50
			· Jumlah laporan pembinaan pemahaman aspek keselamatan migas bagi para pekerja kegiatan hulu migas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			Prosentase peningkatan penggunaan sistem basis data usaha penunjang migas dalam operasi internal (%)	0	5	5	5	5	820,20	861,21	904,27	949,48	996,96
			· Jumlah laporan pengembangan sistem basis data internal usaha penunjang migas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			Jumlah tersedianya Rancangan Standar Nasional Indonesia untuk kegiatan usaha migas (buah)	5	5	5	5	5	5.417,65	5.688,53	5.972,96	6.271,61	6.585,19
			· Jumlah laporan penyediaan SNI dan SKKNI pada kegiatan usaha migas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Jumlah laporan pembinaan teknis penerapan standar keselamatan pada kegiatan usaha migas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Jumlah pembinaan & pengawasan standarisasi teknis di bidang minyak bumi	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			Jumlah tersedianya Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) untuk kegiatan usaha migas	3	3	3	3	3	5.417,65	5.688,53	5.972,96	6.271,61	6.585,19
			· Jumlah laporan penyediaan SNI dan SKKNI pada kegiatan usaha migas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			· Jumlah pembinaan & pengawasan standarisasi teknis di bidang minyak bumi	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			Jumlah tenaga migas yang mendapatkan Sertifikat kompetensi (domain Badiklat (Pusdiklat Migas Cepu))	5000	5000	5000	5000	5000					
			Prosentase tingkat kegagalan operasi kegiatan hilir migas (%)	30%	28%	27%	25%	%	2.436,30	2.558,12	2.686,02	2.820,32	2.961,34
			· Jumlah laporan pengawasan & pemeriksaan kelaikan teknis peralatan, instalasi & instrumentasi kegiatan usaha hilir migas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			· Jumlah laporan evaluasi hasil pemeriksaan teknis peralatan, instalasi & instrumentasi kegiatan usaha hilir migas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			Prosentase penurunan angka kecelakaan kerja kegiatan usaha migas	20%	40	60	80	100	296,27	311,28	326,64	342,97	360,12
			· Jumlah laporan pembinaan pemahaman aspek keselamatan migas bagi para pekerja kegiatan hulu migas	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		-	-	-	-
			Prosentase peningkatan kemampuan nasional dalam merancang dan merakit instalasi peralatan migas	Tercapainya prosentase peningkatan kemampuan nasional dalam merancang dan merakit sistem alat ukur migas sebesar 65 %	Tercapainya prosentase peningkatan kemampuan nasional dalam merakit sistem alat ukur migas sebesar 65 %	Tercapainya prosentase peningkatan kemampuan nasional dalam merakit sistem alat ukur migas sebesar 70 %	Tercapainya prosentase peningkatan kemampuan nasional dalam merakit sistem alat ukur migas sebesar 75 %	Tercapainya prosentase peningkatan kemampuan nasional dalam merakit sistem alat ukur migas sebesar 80 %	8.032,81	8.434,45	8.856,17	9.007,94	9.458,34
			· Jumlah laporan pembinaan, pengawasan serta pemberdayaan usaha penunjang migas	1 LAP	1 LAP	1LAP	1 LAP	1 LAP		-	-	-	-
V	PROGRAM PENGELOLAAN LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI	Meningkatnya pemanfaatan energi listrik yang andal, aman, dan akrab lingkungan serta meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dan konservasi energi	Pertumbuhan realisasi investasi bidang listrik dan pemanfaatan energi (USD/Rp) (Dalam juta US \$)	10.146	9.279	8.933	8.184	7.889	4.140	4.968	5.962	7.154	8.585
			Rasio Elektrifikasi (%)	67,2	70,4	73,6	76,8	80	9.801.587	10.745.195	10.493.573	10.942.715	12.233.526
			Rasio Desa Berlistrik (%)	94,59	95,59	9670%	97,8	98,9	561.530	-	-	-	-
			Pangsa Energi Baru Terbarukan (%)	8,27	10,23	12,18	14,14	16,10	98.500	93.750	97.125	99.750	102.125
			Elastisitas Energi	1,64	1,60	1,56	1,52	1,48	24.375	24.475	26.059	29.219	27.095
			Jumlah penerapan Standardisasi teknis bidang ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi yang disertifikasi SNI dan atau diberlakukan wajib (buah)	4	4	5	4	5	15.200	19.432	25.861	31.666	38.464
			Sertifikasi kompetensi bidang listrik dan pemanfaatan energi (sertifikat)	560	590	620	650	680	4.950	5.127	5.246	5.484	5.607
			Prosentase izin usaha yang diterbitkan (%)	20	20	20	25	25	15.891	15.518	16.364	17.192	18.001
			Pangsa energi primer non BBM untuk pembangkit listrik (%)	95	95,8	96,6	97,4	98	39.291	49.147	50.673	52.439	59.422
			· Jumlah SOP pelayanan administratif dan teknis	50 SOP	50 SOP	50 SOP	50 SOP	50 SOP	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan	Pelayanan yang optimal baik administratif maupun teknis untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Ditjen LPE	· Jumlah kumulatif aset pembangunan ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi yang dapat dilaporkan sebagai barang milik negara	3 Triliun	3 Triliun	3 Triliun	3 Triliun	3 Triliun	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			· Jumlah aturan pendukung	3 PP,	3 PP,	6 peraturan	6 peraturan	6 peraturan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			peraturan perundang-undangan bidang listrik dan pemanfaatan energi	3 RPP	3 peraturan lainnya	lainnya	lainnya	lainnya					
			· Jumlah kasus administratif kepegawaian	5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			· Jumlah laporan perencanaan program dan kegiatan bidang listrik dan pemanfaatan energi	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
			· Biaya pemutakhiran sistem dan jaringan informasi	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	17.908	20.000	20.000	20.000	20.000
2.	Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan	Terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik dan meningkatnya ratio elektrifikasi.	· Jumlah kebijakan investasi listrik (laporan)	6	6	7	7	8	4.140	4.968	5.962	7.154	8.585
			· Jumlah Kapasitas pembangkit (MW)	22	37				222.000	373.000			
			· Transmisi (kms)	3.381	4.129	3.881	3.774	4.297	2.796.026	3.414.704	3.209.370	3.121.320,75	3.553.244,62
			· Gardu Induk	2.159	2.389	2.464	2.603	3.244	1.617.207,41	1.789.045,73	1.845.254,53	1.949.642,30	2.429.826,03
			· Panjang jaringan dan gardu distribusi (kms/MVA)/satker Lisdes	18004/1266	18091/1311	18960/1416	19988/1548	20508/1567	5.085.445	5.085.445	5.355.948	5.788.752	6.167.455
			· Jumlah Perencanaan dan Program Ketenagalistrikan (Laporan)	7	7	7	7	8	33.521	33.523	33.523	33.523	38.312
			· Jumlah rekomendasi pembinaan dan pengawasan kepada PKUK dan PIUKU (buah)	10	12	12	12	14	750	900	900	900	1.050
3.	Kegiatan Pembinaan, Pengaturan, Pengawasan dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Meningkatnya pelayanan usaha penyediaan tenaga listrik, meningkatnya pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik, dan meningkatnya mutu usaha penyediaan tenaga listrik	· Rata-rata pelayanan permohonan daerah usaha atau ekspansi daerah usaha (hari)	30	30	30	25	25	500	510	510	425	425
			· Jumlah konsep persetujuan harga beli tenaga listrik yang disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (buah)	24	24	24	24	24	500	500	500	500	500
			· Rata-rata waktu penyelesaian evaluasi permohonan persetujuan harga beli tenaga listrik (hari)	20	20	20	20	20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			· Jumlah penetapan/penyesuaian harga jual tenaga listrik oleh Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) (buah)	4	4	4	4	4	750	750	750	750	750
			· Rata-rata waktu penetapan besar susut jaringan PT PLN (Persero) setiap triwulan (hari)	15	15	15	15	15	750	360	432	518	622
			· Jumlah perhitungan biaya pokok penyediaan tenaga listrik PT PLN (Persero) (buah)	10	10	10	10	10	500	500	500	500	500
			· Jumlah perhitungan subsidi listrik PT PLN (Persero) (buah)	10	10	10	10	10	650	650	650	650	650
			· Jumlah pelaksanaan fasilitasi perselisihan konsumen listrik dengan penyedia listrik (buah)	80	80	70	60	50	700	704	616	528	440
			· Jumlah pelaksanaan sosialisasi peningkatan usaha (kali)	6	6	6	5	5	1.350	1.350	1.350	1.125	1.125

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			· Prosentase penyempurnaan dan penyederhanaan aturan usaha (%)	20	20	25	25	30	500	500	625	625	750
			· Prosentase penyelesaian permohonan daerah usaha dan ekspansi nva (%)	100	100	100	100	100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
			· Prosentase izin usaha yang diterbitkan (%)	20	20	20	25	25	1.100	1.100	1.100	1.375	1.375
			· Prosentase pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha yang diterbitkan	20	20	20	25	25	1.125	500	600	725	870
			· Prosentase persetujuan dan penandasahan Rencana Impor Barang Modal (%)	20	20	20	25	25	750	750	750	938	938
			· Prosentase pengawasan terhadap pelaksanaan Impor Barang Modal	20	20	20	25	25	750	750	750	938	938
			· Tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan pengaduan (indeks)	100	100	100	100	100	750	750	750	750	750
			· Prosentase penyelesaian pengaduan konsumen listrik (%)	100	100	100	100	100	500	500	500	500	500
			· Prosentase pencapaian indikator Tingkat Mutu Pelayanan tenaga listrik (%)	25	40	60	70	80	750	1.200	1.800	2.100	2.400
			· Prosentase penyelesaian fasilitasi perselisihan (%)	90	95	95	100	100	500	528	528	556	556
			· Tingkat pemahaman sosialisasi peningkatan usaha (indeks)	70	70	75	80	90	516	516	553	590	663
4.	Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan dan pelaksanaan konservasi energi	Terwujudnya penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi	· Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari sumber energi mikro hidro (MW)	1,53	10,42	10,90	11,38	11,94	68.962,70	DAK	DAK	DAK	DAK
			· Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari sumber energi surya (MWp)	3,55	24,49	24,59	24,69	24,78	492.567,70	DAK	DAK	DAK	DAK
			· Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari sumber energi angin (MW)	0,00	5,16	5,32	5,55	5,64	-	DAK	DAK	DAK	DAK
			· Jumlah desa mandiri energi (desa)	50	50	50	50	50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
			· Tingkat kepedulian masyarakat terhadap pemanfaatan sumber energi baru terbarukan (indeks)	50	50	50	50	50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			· Jumlah peserta bimbingan teknis energi baru terbarukan (orang)	180	180	180	180	180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			· Jumlah regulasi di bidang energi baru terbarukan (buah)	4	2	1	2	1	8.500	250	125	250	125
			· Jumlah fasilitas energi baru terbarukan yang sudah dikembangkan secara komersial (unit)	10	10	10	10	10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			· Jumlah regulasi di bidang efisiensi energi (buah)	3	3	2	2	2	1.000	1.000	600	600	600

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			· Jumlah jenis peralatan pemanfaat tenaga listrik yang menerapkan labelisasi hemat energi (buah)	3	2	2	2	2	600	300	300	300	300
			· Jumlah manager energi dan auditor energi yang bersertifikat (orang)	-	50	100	100	100	-	300	600	600	600
			· Jumlah gedung dan industri yang menerima layanan audit energi (objek)	185	185	199	226	208	21.275	21.275	22.909	26.019	23.895
			· Jumlah peserta bimbingan teknis konservasi energi	170	170	170	170	170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			· Tingkat kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan konservasi energi (indeks)	50	60	65	70	70	500	600	650	700	700
			Jumlah studi kelayakan energi laut (laporan)	1	1	1	1	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			Jumlah Pilot project pembangkit listrik dari sumber energi laut (laporan)	0	1	2	3	4	-	2.500	5.000	7.500	10.000
			Kapasitas pembangkit dari sumber energi biomassa (MW)	0	0,1	0,1	0,1	0,1	-	DAK	DAK	DAK	DAK
			Jumlah pemanfaatan biomassa untuk rumah tangga (laporan)	1	1	1	1	1	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000
5.	Kegiatan Pembinaan keselamatan dan lingkungan ketenagalistrikan serta usaha jasa penunjang tenaga listrik	Meningkatnya pembinaan keselamatan dan lingkungan ketenagalistrikan	· Jumlah perumusan SNI	45	45	45	45	45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
			· Jumlah pemberlakuan SNI sebagai standard wajib	10	10	10	10	10	200	200	200	200	200
			· Jumlah sertifikasi peralatan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik	40	45	50	55	60	500	563	625	688	750
			· Jumlah lokasi pengawasan dan sosialisasi SNI	8	8	8	8	8	250	225	250	265	275
			· Jumlah lokasi sidang dalam rangka kerjasama internasional standarisasi	8	8	8	8	8	350	350	350	350	350
			· Jumlah pembangkit tenaga listrik yang bersertifikat	25	30	30	30	30	900	1.080	1.080	1.080	1.080
			· Jumlah instalasi transmisi dan distribusi yang bersertifikat	75	80	80	80	80	800	880	880	880	880
			· Jumlah instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang bersertifikat	300	300	300	300	300	1.000	1.094	1.094	1.094	1.094
			· Jumlah sosialisasi regulasi teknik dan lingkungan ketenagalistrikan	2	3	3	4	4	800	1.200	1.200	1.600	1.600
			· Instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang aman, andal, dan akrab lingkungan	50%	60%	65%	70%	75%	1.500	1.504	1.629	1.755	1.880
			· Tingkat Tertib administrasi dan teknis di bidang sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik	60%	65%	70%	75%	80%	400	325	350	375	400

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Tingkat tertib administrasi dan teknis di bidang sertifikasi produk peralatan dan pemanfaat tenaga listrik	60%	65%	70%	75%	80%	400	433	466	500	533
			- Tingkat mutu dan keandalan pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik	70%	70%	75%	75%	80%	900	900	965	965	1.029
			- Jumlah Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang tersertifikasi di bidangnya	5	5	5	5	5	700	700	700	700	700
			- Jumlah Lembaga Sertifikasi Produk Yang Terakreditasi	2	3	5	10	15	700	1.050	1.750	3.500	5.250
			- Jumlah Lembaga Inspeksi Teknik yang terakreditasi	2	5	15	20	25	800	2.000	6.000	8.000	10.000
			- Jumlah IMJ (Ijin Menggunakan Jaringan) Badan Usaha Pemanfaat jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika	3	10	15	20	30	800	2.670	4.005	5.340	8.010
			- Penggunaan Barang dan Jasa Produksi dalam negeri dalam pembangunan sektor ketenagalistrikan	60%	65%	70%	75%	80%	700	759	817	875	934
			- Jumlah standar kompetensi ketenagalistrikan (buah)	350	350	350	350	350	2.500	2.520	2.520	2.520	2.520
			- Jumlah penetapan dan pemberlakuan standar kompetensi (buah)	3	3	3	3	3	500	500	500	500	500
			- Jumlah sertifikat kompetensi (buah)	560	590	620	650	680	700	767	806	845	884
			- Jumlah sosialisasi tentang standar kompetensi ketenagalistrikan (buah)	3	3	3	4	4	350	351	351	468	468
			- Jumlah rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	40	45	50	55	60	450	509	565	622	678
			- Jumlah Tenaga Teknik yang tersertifikasi (orang)	2180	2290	2400	2520	2650	450	481	504	529	557
			- Jumlah updating faktor emisi Clean Development Mechanism (CDM) sistem grid koneksi ketenagalistrikan	1 grid koneksi	8 grid koneksi	8 grid koneksi	8 grid koneksi	8 grid koneksi	1.670	6.000	7.200	8.640	10.368
			(sistem Jamali)	- Jamali (1 grid)	- Sumatera (1 grid)	- Kalimantan (3 grid)	- Sulawesi (2 grid)						
				- Sumatera (1 grid)	- Kalimantan (3 grid)	- Sulawesi (2 grid)							
				- Batam (1 grid)	- Kalimantan (3 grid)	- Sulawesi (2 grid)							

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah data analisis medan magnet dan medan listrik di bawah jaringan SUTET 500 KV serta kesehatan masyarakat yang terpajan medan magnet dan medan listrik di bawah jaringan 	400 responden, 1 Kabupaten	400 responden, 1 Kabupaten	400 responden, 1 Kabupaten	400 responden, 1 Kabupaten	400 responden, 1 Kabupaten	800	800	800	800	800
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah fasilitasi penyelesaian kasus-kasus lingkungan ketenagalistrikan (SUTET 500 kV, Pembelekitan dll) 	10 kasus	12 kasus	14 kasus	16 kasus	20 kasus	700	840	980	1.120	1.400
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Community Development Sektor Ketenagalistrikan 	13 unit usaha	16 unit usaha	19 unit usaha	22 unit usaha	25 unit usaha	800	992	1.178	1.364	1.550
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pembinaan dan pengawasan teknis bidang lingkungan sektor ketenagalistrikan baik pada ijin usaha (AMDAL dan atau UKL/UPL) maupun kelaikan teknis bidang lingkungan ketenagalistrikan 	13 sektor	16 sektor	19 sektor	22 sektor	25 sektor	800	992	992	992	992
6.	Pembinaan keselamatan dan lingkungan ketenagalistrikan serta usaha jasa penunjang tenaga listrik	Meningkatnya pembinaan keselamatan dan lingkungan ketenagalistrikan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah mitigasi teknologi strategi penurunan emisi CO2 di sektor ketenagalistrikan 	1 teknologi	6 teknologi	6 teknologi	6 teknologi	6 teknologi	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL, BATUBARA, PANAS BUMI DAN AIR TANAH		Jumlah Pedoman/NSPK untuk aplikasi pengelolaan kegiatan pertambangan di Provinsi/Kabupaten/Kota	8	8	7	7	5	5.000	5.060	5.000	4.000	3.500
			Jumlah kapasitas PLTP terpasang sebesar 5795 MW di tahun 2014	1.261	1.419	2.260	3.000	5.795	63.234	91.835	94.477	93.066	91.588
			Jumlah peraturan perundang-undangan bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tanah yang telah selesai	16	17	18	19	20	11.890	11.807	14.651	15.388	17.304
			Jumlah penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP), Wilayah pencadangan negara (WPN), dan Wilayah ijin usaha Pertambangan (WIUP) mineral dan batubara	3	3	3	3	3	16.383	9.850	12.400	13.900	15.900
			Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi	6	6	6	6	6	600	600	650	700	750

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Rencana investasi di sektor mineral. batubara dan panas bumi (Juta USD)	2.502	3.077	5.008	4.680	7.468	7.900	8.786	9.000	11.033	12.150
			Penerimaan Negara sub sektor Mineral. Batubara dan Panas Bumi (Trilyun Rp)	57,139	58,843	60,585	62,402	64,258	25.800	29.560	33.189	40.500	46.216
			Dana bagi hasil sektor pertambangan ke pemerintah daerah sesuai dan tepat waktu	90-92%	92-94%	94-96%	96-98%	98-100%					
			Predikat Wajar Tanpa Pengecualiann dari BPK atas pencatatan PNPB sektor pertambangan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi Pemerintah (SAI)	Tercapai predikat WTP	Tercapai predikat WTP	Tercapai predikat WTP	Tercapai predikat WTP	Tercapai predikat WTP					
			Jumlah perencanaan produksi mineral. batubara dan panas bumi						22.614	23.800	24.700	26.800	29.000
			a. Batubara (juta ton)	250	280	290	297	309					
			b. Panas Bumi (MWe)	70	158	973	795	2.620					
			c. Mineral										
			- Tembaga (ton)	1.016.949	644.098	609.171	899.923	944.919					
			- Emas (kg)	115.998	91.171	60.488	112.147	117.754					
			- Perak (kg)	261.897	246.608	214.183	261.347	274.415					
			- Logam Timah (ton)	105.000	105.000	105.000	105.000	110.250					
			- Ni+Co in matte (ton)	77.700	82.372	82.009	87.452	91.825					
			- Bijih Nikel (ton)	11.064.084	11.285.366	11.511.073	11.741.294	12.328.359					
			- Feronikel (mt)	18.276	18.641	19.014	19.394	20.364					
			- Bauksit (mt)	10.284.923	10.490.622	10.700.434	10.914.443	11.460.165					
			- Intan (crt)	96.000	96.000	96.000	96.000	100.800					
			- Bijih Besi (mt)	4.125.235	4.207.739	4.291.894	4.377.732	4.596.618					
			- Granit (m3)	2.029.294	2.069.880	2.111.277	2.153.503	2.261.178					
			Tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan pertambangan	0.74	0.72	0.70	0.68	0.66	47.812	48.514	47.450	43.100	44.123
			Luas lahan pertambangan rusak akibat kegiatan pertambangan. yang direklamasi	6000 ha	6200 ha	6300 ha	6400 ha	6500 ha	6.603	7.000	6.750	6.041	6.450
			Jumlah pengawasan produksi kepada perusahaan KK dan PKP2B	Produksi:10KK/45PKP2B Konstruksi: 5 KK/ 15 PKP2B	Produksi:10KK/45PKP2B Konstruksi: 5 KK/ 15 PKP2B	Produksi:10KK/45PKP2B Konstruksi: 5 KK/ 15 PKP2B	Produksi:10KK/45PKP2B Konstruksi: 5 KK/ 15 PKP2B	Produksi:10KK/45PKP2B Konstruksi: 5 KK/ 15 PKP2B	81.883	79.023	79.107	81.627	82.426
			Jumlah daerah yang terkait dengan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI)	3 Prov. 25 Kab	3 Prov. 25 Kab	3 Prov. 25 Kab	3 Prov. 25 Kab	3 Prov. 25 Kab	4.042	3.100	3.250	3.971	3.415
			Persentase target pelayanan prima bidang mineral, batubara dan panas bumi	100	100	100	100	100	140.250	136.454	146.645	159.928	172.483
			Persentase Realisasi Masterlist (pembelian dalam negeri dan impor) perusahaan KK dan PKP2B	33%:67%	35%:65%	38%:62%	40%:60%	42%:58%	4.350	4.000	4.250	4.750	4.000
			Jumlah pengelolaan kerja sama sub sektor mineral. batubara dan panas bumi	8	8	9	11	12	2.200	3.200	4.200	5.200	6.200

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi	Terintegrasinya informasi pertambangan se-Indonesia	Jumlah SOP yang akan dibuat dan direvisi dalam penyempurnaan tata laksana organisasi	108	115	120	125	130					
			- Penyusunan SOP DJMBP	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	600	600	650	650	675
		Tersusunnya Rancangan Peraturan Perundang-undangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi (sebanyak 28 pedoman dan 4 RPP);	Jumlah publik yang mengunjungi situs informasi bidang mineral, batubara dan panas bumi	20000	24000	28000	32000	35000					
			- Pelaksanaan integrasi jaringan DJMBP	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	8.232	5.297	6.405	6.699	7.325
		Terlaksananya sinkronisasi kebijakan usaha pertambangan umum, panas bumi, dan air tanah dengan sektor lain dapat dilaksanakan;	Jumlah regulasi bidang pertambangan mineral, batubara dan panas bumi	16	17	18	19	20					
			- Penyusunan konsep rancangan PP dan Permen ESDM bidang mineral, batubara dan panas bumi	22 keg	25 keg	29 keg	31 keg	35 keg	11.890	11.807	14.651	15.388	17.304
		Tercapainya sistem dan mekanisme perencanaan dan pelaporan efisien dan efektif	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran di lingkungan DJMBP	100	100	100	100	100					
			- Pembinaan dan evaluasi hasil pemeriksaan dan tindak lanjut	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	2.316	2.090	2.200	2.150	2.200
			- Pembukuan verifikasi dan pelaksanaan anggaran	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan					
		Tercapainya peningkatan SDM yang berkualitas	- Pembinaan Pengelolaan keuangan dan akuntansi pemerintah	13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan					
			Persentase pelaksanaan koordinasi bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tanah dengan instansi terkait	100	100	100	100	100					
		Terlaksananya koordinasi internal yang optimal dan pelayanan publik yang prima.	- Pelaksanaan koordinasi bidang mineral, batubara dan panas bumi	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	12.089	11.474	11.748	12.186	12.442
			Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran berbasis kinerja yang disusun dan disempurnakan	6	6	6	6	6					
		Terkelolanya sarana dan prasarana secara optimal dalam mendukung pelaksanaan kebijakan;	- Penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran berbasis kinerja	6	6	6	6	6	2.818	1.600	1.800	1.950	1.600
			Jumlah pelaporan hasil pemeriksaan (LHP)	13	13	13	13	13					
			- Penyusunan pelaporan hasil pemeriksaan (LHP)	10	10	10	10	10	900	990	1.089	1.198	1.318
			Jumlah dan jenis layanan informasi bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tanah	15	18	20	22	25					

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Pelaksanaan dan pembuatan jenis dan layanan informasi bidang mineral, batuabara dan panas bumi	15	18	20	22	25	3.989	3.290	3.344	3419	3.519
			Jumlah penyelenggaraan inspektur tambang	23	46	96	146	196	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
			Persentase PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai spesifikasi bidang mineral. batubara, panas bumi dan air tanah	29	50	70	80	100					
			- Pembinaan terhadap PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai spesifikasi bidang mineral. batubara, panas bumi dan air tanah	135	225	315	360	450	1.250	1.350	1.375	1.400	1.425
			Kualitas data yang mutakhir untuk periode triwulan dan tahunan	5 dok	8 dok	10 dok	12 dok	15 dok					
			- Penyusunan data yang mutakhir untuk periode triwulan dan tahunan	5 dok	8 dok	10 dok	12 dok	15 dok	805	805	805	805	845
			Prosentasi Pengumpulan dan evaluasi laporan di DJMBP yang akurat dan tepat waktu.	100	100	100	100	100					
			- Pelaksanaan Pengumpulan dan evaluasi laporan di DJMBP yang akurat dan tepat waktu.	7 keg	7 keg	7 keg	7 keg	7 keg	3.170	2.923	2.969	3.067	3.150
			Prosentasi Pelaksanaan program dan kegiatan di DJMBP sesuai dengan rencana dan tepat waktu	100	100	100	100	100					
			- Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di DJMBP sesuai dengan rencana dan tepat waktu	6 lap	6 lap	6 lap	6 lap	6 lap	2.873	2.500	2.449	2.697	3.200
			Persentase tingkat pengelolaan administrasi perbendaharaan dan barang milik negara	100	100	100	100	100					
			- Penyusunan pengelolaan administrasi perbendaharaan dan barang milik Negara	3 lap	3 lap	3 lap	3 lap	3 lap	14.304	15.384	17.351	18.453	20.266
			Tingkat tertib administrasi pengelolaan ketatausahaan. kearsipan dan rumah tangga	80	85	90	95	100					
			- Penyusunan administrasi pengelolaan ketatausahaan. kearsipan dan rumah tangga	17 keg	17 keg	17 keg	17 keg	17 keg	17.472	18.100	20.906	22.653	24.831
			Persentase tingkat pengelolaan administrasi kepegawaian	99	99	99	99	99					
			- Pembinaan pengelolaan kepegawaian	11 lap	11 lap	11 lap	11 lap	11 lap	5.546	5.695	6.185	6.779	7.370
			Persentase Terbayarnya gaji/honor/tunjangan pegawai	100	100	100	100	100					
			- Terbayarnya gaji/honor/tunjangan pegawai	453 org	453 org	453 org	453 org	453 org	23.622	25.984	28.583	31.441	34.585
			Persentase Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran dengan baik	100	100	100	100	100					
			- Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran dengan baik	13 pkt	13 pkt	13 pkt	13 pkt	13 pkt	23.395	24.516	26.728	29.330	32.001

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Persentase Terselenggaranya pelayanan publik/birokrasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing saker	100	100	100	100	100					
			- Terlaksananya pelayanan publik/birokrasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing satker	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	15.869	15.956	15.058	18.951	20.531
2.	Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Program dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Mineral. Batubara dan Panas Bumi	Tersedianya pelayanan data dan informasi Mineral, Batubara, Panas Bumi dan air tanah secara lengkap, aktual dan on line; Terinventarisinya potensi PNPB dari KP/IUP seluruh Indonesia; Tersedianya data on line PNPB, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; Tersedianya dekonsentrasi penagihan PNPB KP terbitan daerah; Tersedianya data mineral, batubara, panas bumi dan air tanah secara on line antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; Tersosialisasinya UU Nomor 4 Tahun 2009;	- Jumlah Pedoman/NSPK untuk aplikasi pengelolaan kegiatan pertambangan di Provinsi/Kabupaten/ Kota Penerimaan Negara sub sektor Mineral. Batubara dan Panas Bumi (Trilyun RP) - verifikasi/ inventarisasi/ rekonsiliasi/ sosialisasi kajian PNPB bidang pertambangan mineral, batubara dan panas bumi Dana bagi hasil sektor pertambangan ke pemerintah daerah sesuai dan tepat waktu Predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas pencatatan PNPB sektor pertambangan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi Pemerintah (SAI) Jumlah evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dalam pengelolaan kegiatan pertambangan di pemerintah provinsi/kabupaten/kota - Pelaksanaan otonomi daerah dalam pengelolaan kegiatan pertambangan di pemerintah provinsi/ kabupaten/kota Rencana investasi di sektor mineral. batubara dan panas bumi - Penyusunan kajian investasi di sektor mineral. batubara dan panas bumi Jumlah pengelolaan kerja sama sub sektor mineral. batubara dan panas bumi	8 57,139 7 keg 90-92% Tercapai predikat WTP 50 kab/kota 50 kab/kota US\$ 2.502 juta 8 keg 8	8 58,843 7 keg 92-94% Tercapai predikat WTP 60 kab/kota 60 kab/kota US\$ 3.077 juta 8 keg 8	7 60,585 7 keg 94-96% Tercapai predikat WTP 70 kab/kota 70 kab/kota US\$ 5.008 juta 8 keg 9	7 62,402 7 keg 96-98% Tercapai predikat WTP 80 kab/kota 80 kab/kota US\$ 4.680 juta 8 keg 11	5 64,258 7 keg 98-100% Tercapai predikat WTP 90 Kab/kota 90 Kab/kota US\$ 7.468 juta 8 keg 12	5.000 18.800 7.000 7.000	5.060 20.800 7.500 8.000	5.000 22.800 9.000 9.000	4.000 24.800 10.000 10.000	3.500 28.000 11.000 11.000

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Tumbuhnya perijinan IUP; Tersedianya data dan informasi peluang investasi pembangunan smelter mineral logam utama (Ni, Au, Cu, Al, Sn); Tersedianya data dan informasi infrastruktur penunjang pelabuhan angkut batubara; Meningkatnya pemanfaatan briket batubara; Terlaksananya pengembangan; Meningkatnya pemahaman aparat daerah dan pelaku tambang rakyat dalam pengelolaan/ pemahaman Pedoman Teknis Pertambangan Rakyat pertambangan skala kecil;	- Pelaksanaan pengelolaan kerja sama sub sektor mineral. batubara dan panas bumi	8 keg	8 keg	9 keg	11 keg	12 keg	2.200	3.200	3.200	3.700	5.200
			Jumlah perencanaan produksi mineral. batubara dan panas bumi:										
			a. Batubara (juta ton)	250	280	290	297	309					
			b. Panas Bumi	70	158	853	740	2.795					
			c. Mineral										
			- Tembaga (ton)	1.016.949	644.098	609.171	899.923	944.919					
			- Emas (kg)	115.998	91.171	60.488	112.147	117.754					
			- Perak (kg)	261.897	246.608	214.183	261.347	274.415					
			- Logam Timah (ton)	105.000	105.000	105.000	105.000	110.250					
			- Ni+Co in matte (ton)	77.700	82.372	82.009	87.452	91.825					
			- Bijih Nikel (ton)	11.064.084	11.285.366	11.511.073	11.741.294	12.328.359					
			- Feronikel (mt)	18.276	18.641	19.014	19.394	20.364					
			- Bauksit (mt)	10.284.923	10.490.622	10.700.434	10.914.443	11.460.165					
			- Intan (crt)	96.000	96.000	96.000	96.000	100.800					
			- Bijih Besi (mt)	4.125.235	4.207.739	4.291.894	4.377.732	4.596.618					
			- Granit (m3)	2.029.294	2.069.880	2.111.277	2.153.503	2.261.178					
			- Penyusunan perumusan sistem prosedur teknis (inventarisasi, evaluasi, pemantauan, pembinaan aparat, identifikasi) perencanaan produksi	12 keg	12 keg	12 keg	12 keg	12 keg	11.114	6.700	7.300	8.000	9.000
			Jumlah rencana pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (juta ton)	75	93	95	96	110	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
			Nilai tambah pertambangan	Peningkatan produksi briket batubara 10% – 20% per tahun	Peningkatan produksi briket batubara 10% – 20% per tahun	Peningkatan produksi briket batubara 10% – 20% per tahun	Peningkatan produksi briket batubara 10% – 20% per tahun	Peningkatan produksi briket batubara 10% – 20% per tahun					
			Pengembangan daerah percontohan pemanfaatan pemanfaatan briket di 2 kab/kota: Klaten dan Pacitan	Pengembangan daerah percontohan pemanfaatan pemanfaatan briket di 2 kab/kota : Malang dan Tasikmalaya.	Pengembangan daerah percontohan pemanfaatan pemanfaatan briket di 1 kab/kota: Samarinda	Pengembangan daerah percontohan pemanfaatan pemanfaatan briket di 2 kab/kota : Bengkulu dan Sumatera	Pengembangan daerah percontohan pemanfaatan pemanfaatan briket di 2 kab/kota : Mataram dan Takalar						
			Optimalisasi nilai tambah mineral dan batubara 2 Provinsi	Optimalisasi nilai tambah mineral dan batubara 2 Provinsi	Optimalisasi nilai tambah mineral dan batubara 2 Provinsi	Optimalisasi nilai tambah mineral dan batubara 2 Provinsi	Optimalisasi nilai tambah mineral dan batubara 2 Provinsi	Optimalisasi nilai tambah mineral dan batubara 2 Provinsi					
			-Pengembangan pemanfaatan briket batubara, pengembangan daerah percontohan dan optimalisasi nilai tambah mineral dan batubara	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	10.500	12.500	14.500	17.500	19.416

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP), Wilayah pencadangan negara (WPN), dan Wilayah ijin usaha Pertambangan (WIUP) mineral dan batubara	3	3	3	3	3	15.000	10.000	10.000	14.000	15.800
			Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi	6	6	6	6	6	600	600	650	700	750
			Jumlah buku data informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah	1	2	1	2	1	900	1.250	1189	1.700	1.150
			Evaluasi Penggunaan Lahan Pertambangan	1	1	1	1	1	1.383	846	900	933	900
3.	Kegiatan Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Terciptanya optimalisasi penerimaan negara khususnya dari sektor batubara diperlukan pengumpulan dan evaluasi data biaya penjualan dalam kaitannya dengan penetapan DHPB secara kontinu	Jumlah TKA yang sesuai dengan standar kompetensi	6 wilayah dan 20 Perusahaan	7 wilayah dan 23 Perusahaan	7 wilayah dan 25 Perusahaan	8 wilayah dan 27 Perusahaan	8 wilayah dan 30 Perusahaan					
			- Evaluasi dan verifikasi ketenagakerjaan sub sector mineral, batubara dan panas bumi	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	5.733	5.000	5.000	5.250	5.250
		Terlaksananya program dalam rangka meningkatkan investasi dan penerimaan negara dari sektor pertambangan secara berkelanjutan	Jumlah evaluasi pelaksanaan Community Development	25 Wilayah dan 20 Perusahaan KK dan PKP2B	25 wilayah dan 23 Perusahaan KK dan PKP2B	25 wilayah dan 25 Perusahaan KK dan PKP2B	25 wilayah dan 27 Perusahaan KK dan PKP2B	25 wilayah dan 30 Perusahaan KK dan PKP2B					
			- Evaluasi pelaksanaan Community Development	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg	6.339	5.923	6.000	6.000	6.000
		Terciptanya penguatan kelembagaan daerah dalam sektor pertambangan dalam rangka OTDA dan dekosentrasi, serta terlaksananya kertasama terpadu pusat, daerah, masyarakat dan pengusaha	Peningkatan Nilai Tambah Bahan Galian Tambang	6 Wilayah	6 Wilayah	7 Wilayah	7 Wilayah	8 Wilayah					
			- Kajian (verifikasi dan inventarisasi) nilai tambah bahan galian tambang	6 Wilayah	6 Wilayah	7 Wilayah	7 Wilayah	8 Wilayah	1.139	1.000	1.000	1.250	1.150

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Terciptanya pengembangan batubara sebagai energi alternatif utama melalui peningkatan produksi, pemanfaatan dalam negeri, dll.	Jumlah terselesaikannya konflik tumpang tindih dalam wilayah PKP2B	10 Wilayah	10 Wilayah	10 Wilayah	11 Wilayah	11 Wilayah					
			- Terselesaikannya konflik tumpang tindih dalam wilayah PKP2B	10 Wilayah	10 Wilayah	10 Wilayah	11 Wilayah	11 Wilayah	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		Terciptanya bank data mineral dan batubara nasional yang komprehensif, sehingga dapat meningkatkan pelayanan di sektor mineral dan batubara	Jumlah penagihan PNPB bidang Minerba	34%	33%	32%	31%	30%					
			- Terlaksananya penagihan PNPB bidang Minerba	34%	33%	32%	31%	30%	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Terciptanya perusahaan mineral dan batubara yang kondusif	Persentase Realisasi Masterlist (pembelian dalam negeri dan impor) perusahaan KK dan PKP2B	33%:67%	35%:65%	38%:62%	40%:60%	42%:58%					
			- Evaluasi masterlist	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	4.350	4.000	4.000	4.300	4.200
		Terciptanya penanggulangan PETI melalui program verifikasi terhadap perusahaan tambang	Jumlah Divestasi dan Perubahan Saham Bidang Mineral dan Batubara	33 Perusahaan	31 Perusahaan	31 Perusahaan	31 Perusahaan	31 Perusahaan					
			- Evaluasi Divestasi dan Perubahan Saham Bidang Mineral dan Batubara (pembuatan buku susunan)	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	2.098	2.000	2.000	2.100	2.100
		Terlaksananya inventarisasi batubara mutu rendah dan cara peningkatan nilai tambahnya	Persentase penggunaan kandungan lokal (local content) untuk menunjang pembangunan berkelanjutan	Naik 2 %	Naik 2 %	Naik 3 %	Naik 3 %	Naik 3 %					
			- Penyusunan peningkatan penggunaan kandungan lokal (local content) untuk menunjang pembangunan berkelanjutan	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	3.750	3.000	3.000	3.750	3.650

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Terlaksananya promosi kepentingan nasional dalam rangka pelaksanaan dan pembinaan usaha jasa mineral dan batubara dan peningkatan local content	Sistem yang terintegrasi, mudah digunakan, handal dan pelayanan publik yang lebih baik.	6 sistem	-	-	-	-					
			- Pembuatan Sistem yang terintegrasi, mudah digunakan, handal dan pelayanan publik yang lebih baik	6 sistem	6 sistem	6 sistem	6 sistem	6 sistem	875	550	550	650	650
			Jumlah Perusahaan yang diawasi kegiatan usaha pertambangannya	42 KK dan 76 PKP2B	42 KK dan 76 PKP2B	42 KK dan 76 PKP2B	42 KK dan 76 PKP2B	42 KK dan 76 PKP2B					
			- Pelaksanaan pengawasan Perusahaan terhadap perusahaan tambang	42 KK dan 76 PKP2B	42 KK dan 76 PKP2B	42 KK dan 76 PKP2B	42 KK dan 76 PKP2B	42 KK dan 76 PKP2B	2.500	2.500	2.500	2.495	2.495
			Tersusunnya laporan akuntabilitas Kinerja DBM	1 LAKIP	1 LAKIP	1 LAKIP	1 LAKIP	1 LAKIP	450	450	450	475	475
			Jumlah perusahaan KK dan PKP2B Eksplorasi dan FS yang dievaluasi RKAB nya	42 KK dan 76 PKP2B	42 KK dan 76 PKP2B	42 KK dan 76 PKP2B	42 KK dan 76 PKP2B	42 KK dan 76 PKP2B					
			- Evaluasi terhadap perusahaan KK dan PKP2B Eksplorasi dan FS yang dievaluasi RKAB nya	42 KK dan 76 PKP2B	42 KK dan 76 PKP2B	42 KK dan 76 PKP2B	42 KK dan 76 PKP2B	42 KK dan 76 PKP2B	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			Jumlah laporan kegiatan perusahaan KK dan PKP2B yang dievaluasi	20 provinsi dan 30 perusahaan KK/PKP2B	20 provinsi dan 30 perusahaan KK/PKP2B	20 provinsi dan 30 perusahaan KK/PKP2B	20 provinsi dan 30 perusahaan KK/PKP2B	20 provinsi dan 30 perusahaan KK/PKP2B					
			- Penyusunan laporan kegiatan perusahaan KK dan PKP2B yang dievaluasi	20 provinsi dan 30 perusahaan KK/PKP2B	20 provinsi dan 30 perusahaan KK/PKP2B	20 provinsi dan 30 perusahaan KK/PKP2B	20 provinsi dan 30 perusahaan KK/PKP2B	20 provinsi dan 30 perusahaan KK/PKP2B	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			Jumlah Neraca cadangan, sumberdaya dan cadangan Izin usaha, KK dan PKP2B yang dievaluasi	5 cadangan Izin Usaha dan 20 KK	5 cadangan Izin Usaha dan 20 KK	5 cadangan Izin Usaha dan 20 KK	5 cadangan Izin Usaha dan 20 KK	5 cadangan Izin Usaha dan 20 KK					
			- Evaluasi terhadap Neraca cadangan, sumberdaya dan cadangan Izin usaha, KK dan PKP2B yang dievaluasi	5 cadangan Izin Usaha dan 20 KK	5 cadangan Izin Usaha dan 20 KK	5 cadangan Izin Usaha dan 20 KK	5 cadangan Izin Usaha dan 20 KK	5 cadangan Izin Usaha dan 20 KK	2.750	2.500	2.600	2.650	2.650
			Jumlah Kebijakan eksplorasi perusahaan induk (principal) dari perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia yang dievaluasi	40 KK/20 PKP2B	40 KK/20 PKP2B	40 KK/20 PKP2B	40 KK/20 PKP2B	40 KK/20 PKP2B					
			- Penyusunan Kebijakan eksplorasi perusahaan induk (principal) dari perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia yang dievaluasi	40 KK/20 PKP2B	40 KK/20 PKP2B	40 KK/20 PKP2B	40 KK/20 PKP2B	40 KK/20 PKP2B	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah laporan rencana kerja dalam amandemen kontrak/perjanjian Minerba yang dievaluasi	42 KK dan 76 PKP2B	-	-	-	-					
			- Penyusunan laporan rencana kerja dalam amandemen kontrak/perjanjian Minerba yang dievaluasi	42 KK dan 76 PKP2B	42 KK dan 76 PKP2B	42 KK dan 76 PKP2B	42 KK dan 76 PKP2B	42 KK dan 76 PKP2B	700	700	700	900	850
			Jumlah Pengadaan alat-alat software, sistem pengawasan eksplorasi dan penyampaian laporan kegiatan eksplorasi perusahaan	1 software, 2 sistem dan 5 unit	1 software, 2 sistem dan 5 unit	1 software, 2 sistem dan 5 unit	1 software, 2 sistem dan 5 unit	1 software, 2 sistem dan 5 unit					
			- Terencananya Pengadaan alat-alat software, sistem pengawasan eksplorasi dan penyampaian laporan kegiatan eksplorasi perusahaan	1 software, 2 sistem dan 5 unit	1 software, 2 sistem dan 5 unit	1 software, 2 sistem dan 5 unit	1 software, 2 sistem dan 5 unit	1 software, 2 sistem dan 5 unit	5.450	5.000	5.000	5.500	5.500
			Jumlah seminar prospek eksplorasi Sumber Daya Mineral batubara di Indonesia	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi					
			- Pelaksanaan seminar prospek eksplorasi Sumber Daya Mineral batubara di Indonesia	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
			Jumlah Pedoman untuk perusahaan KK/PPK2B dan Kajian tahap Produksi Mineral	1 Pedoman dan 10 KK	1 Pedoman dan 10 KK	1 Pedoman dan 10 KK	-	-					
			- Tersusunnya Pedoman untuk perusahaan KK/PPK2B dan Kajian tahap Produksi Mineral	1 Pedoman dan 10 KK	1 Pedoman dan 10 KK	1 Pedoman dan 10 KK	1 Pedoman dan 10 KK	1 Pedoman dan 10 KK	4.650	4.500	4.550	4.750	4.650
			Jumlah pengawasan produksi kepada perusahaan KK dan PPK2B	Produksi: 10KK/ 45PKP2B Konstruksi: 5 KK/ 15 PKP2B	Produksi: 10KK/ 45PKP2B Konstruksi: 5 KK/ 15 PKP2B	Produksi 10KK/ 45PKP2B Konstruksi: 5 KK/ 15 PKP2B	Produksi: 10KK/ 45PKP2B Konstruksi: 5 KK/ 15 PKP2B	Produksi: 10KK/ 45PKP2B Konstruksi: 5 KK/ 15 PKP2B	10.626	10.300	10.500	10.700	10.700
			Evaluasi Rencana dan Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan KK dan PPK2B	Produksi: 10KK/ 45PKP2B Konstruksi: 5 KK/ 15 PKP2B	Produksi: 10KK/ 45PKP2B Konstruksi: 5 KK/ 15 PKP2B	Produksi: 10KK/ 45PKP2B Konstruksi: 5 KK/ 15 PKP2B	Produksi: 10KK/ 45PKP2B Konstruksi: 5 KK/ 15 PKP2B	Produksi: 10KK/ 45PKP2B Konstruksi: 5 KK/ 15 PKP2B	1.550	1.500	1.500	1.550	1.550
			Jumlah invoice/kontrak penjualan KK/PPK2B yang dievaluasi	10 KK/ 45 PKP2B	11 KK/ 45 PKP2B	12 KK/ 45 PKP2B	13 KK/ 45 PKP2B	14 KK/ 45 PKP2B					
			- Terevaluasinya invoice/kontrak penjualan KK/PPK2B yang dievaluasi	10 KK/ 45 PKP2B	11 KK/ 45 PKP2B	12 KK/ 45 PKP2B	13 KK/ 45 PKP2B	14 KK/ 45 PKP2B	12.050	12.000	12.000	12.100	12.100
			Jumlah KP Mineral di Sulteng dan Sultra & batubara di Kalsel dan Kaltim yang diinventarisir	700	700	800	800	800					
			- Inventarisir jumlah KP Mineral di Sulteng dan Sultra & batubara di Kalsel dan Kaltim yang diinventarisir	100	100	120	120	140	700	700	700	703	700
			Jumlah daerah yang terkait dengan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI)	3 Prov. 25 Kab	3 Prov. 25 Kab	3 Prov. 25 Kab	3 Prov. 25 Kab	3 Prov. 25 Kab					

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Inventarisasi daerah yang terkait dengan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI)	3 Prov. 25 Kab	3 Prov. 25 Kab	3 Prov. 25 Kab	3 Prov. 25 Kab	3 Prov. 25 Kab	4.042	4.000	4.000	4.100	4.100
			Jumlah proses Persetujuan Prinsip. Peningkatan Tahap dan Perubahan Luas Wilayah KK dan PKP2B	42 KK 76 PKP2B	42 KK 76 PKP2B	42 KK 76 PKP2B	42 KK 76 PKP2B	42 KK 76 PKP2B					
			- Evaluasi proses Persetujuan Prinsip. Peningkatan Tahap dan Perubahan Luas Wilayah KK dan PKP2B	42 KK 76 PKP2B	42 KK 76 PKP2B	42 KK 76 PKP2B	42 KK 76 PKP2B	42 KK 76 PKP2B	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
			Jumlah dokumen elektronik berupa rekapitulasi data perizinan IUP. IUPK. KK dan PKP2B	500	600	600	700	700					
			- Terdatanya dokumen elektronik berupa rekapitulasi data perizinan IUP. IUPK. KK dan PKP2B	500	600	600	700	700	910	900	932	950	950
			Jumlah lokasi pelaksanaan pembinaan perizinan perusahaan mineral dan batubara	3 Provinsi 25 Kab	3 Provinsi 25 Kab	3 Provinsi 25 Kab	3 Provinsi 25 Kab	3 Provinsi 25 Kab					
			- Pelaksanaan pembinaan perizinan perusahaan mineral dan batubara	3 Provinsi 25 Kab	3 Provinsi 25 Kab	3 Provinsi 25 Kab	3 Provinsi 25 Kab	3 Provinsi 25 Kab	4.040	4.000	4.000	4.150	4.096
			Jumlah lokasi pelaksanaan sosialisasi PP tentang Perusahaan Pertambangan Minerba Sebagai Pelaksanaan UU No.4 Tahun 2009	5 Provinsi	5 Provinsi	5 Provinsi	5 Provinsi	5 Provinsi					
			- Pelaksanaan sosialisasi PP tentang Perusahaan Pertambangan Minerba Sebagai Pelaksanaan UU No.4 Tahun 2009	5 Provinsi	5 Provinsi	5 Provinsi	5 Provinsi	5 Provinsi	2.075	2.000	2.000	2.100	2.100
			Peningkatan mutu serta kinerja pelayanan Pelayanan Usaha Minerba dalam menjalankan tugas dan fungsinya	1 PKT	1 PKT	1 PKT	1 PKT	1 PKT	750	750	775	775	775
			Persentase Pelaksanaan Pedoman	1 pedoman	1 pedoman	1 pedoman	1 pedoman	1 pedoman	750	750	750	750	750
			Jumlah kontrak KK dan PKP2B yang sudah di amandemen	42 KK 76 PKP2B	-	-	-	-					
			- Evaluasi Jumlah kontrak KK dan PKP2B yang sudah di amandemen	42 KK 76 PKP2B	42 KK 76 PKP2B	42 KK 76 PKP2B	42 KK 76 PKP2B	42 KK 76 PKP2B	1.905	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	Kegiatan Pembinaan dan Pengusahaan Panas Bumi dan Air Tanah	Tercapainya target kontribusi PLTP pada program 10.000 MW tahun II Tersedianya regulasi bidang panas bumi dan	Jumlah kapasitas PLTP terpasang sebesar 5795 MW di tahun 2014	1.261	1.419	2.260	3.000	5.795	21.912	66.835	69.977	69.566	68.088
			Jumlah regulasi panas bumi dan air tanah	20	10	10	7	3	9.971	5.000	4.000	3.000	3.000
			Jumlah PNB dari sektor panas bumi (ribu USD)	63.961	74.067	99.397	126.531	188.867					
		Tercapainya target PNB dari sektor panas bumi	- Verifikasi/ inventarisasi/ rekonsiliasi/ sosialisasi kajian PNB bidang pertambangan panas bumi	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	2.774	3.000	4.000	4.500	5.000
			Jumlah pemanfaatan langsung energi panas bumi	0	0	1	2	2					

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Tercapainya target produksi listrik panas bumi	- Penyusunan klasifikasi data potensi dan cadangan panas bumi untuk ketenagalistrikan dan pemanfaatan langsung energi panas bumi	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	371	3.000	3.000	3.500	4.000
			Jumlah lokasi pengusutan survei pendahuluan untuk meningkatkan status potensi	6	6	6	6	6					
		Tercapainya target pemanfaatan langsung panas bumi	- Pelaksanaan pengusutan survei pendahuluan untuk meningkatkan status potensi	6	6	6	6	6	605	1.000	1.000	1.000	1.000
			Jumlah inventarisasi pajak air tanah (provinsi)	6	6	7	7	7					
		Tersedianya data potensi panas bumi yang menarik bagi investor	- Inventarisasi pajak air tanah (provinsi)	6	6	7	7	7	4.971	2.000	1.500	1.000	1.000
			Jumlah Penetapan Zona Pemanfaatan Air Tanah (CAT)	6	6	7	7	7					
		Tersedianya informasi yang lengkap tentang pajak air tanah di daerah dari 33 provinsi	- Penetapan Zona Pemanfaatan Air Tanah (CAT)	6	6	7	7	7	17.307	5.000	5.000	4.000	3.000
			Jumlah inventarisasi investasi produksi industri minuman berbahan baku air tanah (Provinsi)	1	1	1	1	1					
		Tersedianya zona pemanfaatan air tanah dari 33 provinsi	- Inventarisasi investasi produksi industri minuman berbahan baku air tanah (Provinsi)	1	1	1	1	1	1.152	2.000	1.500	1.500	1.500
			Jumlah perencanaan produksi listrik dari panas bumi (MWh)	9.712.224	10.940.832	17.573.760	23.328.000	45.061.920					
		Tersedianya informasi investasi produksi industri minuman berbahan baku air tanah dari 33 provinsi	- Perencanaan produksi listrik dari panas bumi (MWh)	9.712.224	10.940.832	17.573.760	23.328.000	45.061.920	4.171	4.000	4.500	5.000	5.000
	5. Kegiatan Pembinaan Ketenagalistrikan, Lingkungan dan Usaha Penunjang Mineral, Batubara, Panas Bumi dan air Tanah	Tersedianya sebanyak 200 standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang lingkungan	Jumlah rancangan SNI dan SKKNI bidang pertambangan Minerabapabum	5 SNI & 4 SKKNI	5 SNI & 4 SKKNI	5 SNI & 4 SKKNI	5 SNI & 4 SKKNI	5 SNI & 4 SKKNI					

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		lingkungan, keselamatan pertambangan, standarisasi, teknik pertambangan serta usaha jasa pertambangan minerbapabum	- Penyusunan rancangan SNI dan SKKNI bidang pertambangan Minerbapabum	5 SNI & 4 SKKNI	5 SNI & 4 SKKNI	5 SNI & 4 SKKNI	5 SNI & 4 SKKNI	5 SNI & 4 SKKNI	3.189	3.100	3.200	3.300	3.400
		Terciptanya kegiatan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi yang memenuhi kaidah good mining practice	Jumlah kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang taat melakukan pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang	60	60	64	64	64					
			- Pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang taat melakukan pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang	60	60	64	64	64	1.657	1.864	1.500	1.600	1.700
		Tersedianya 1000 orang inspektur tambang di seluruh Indonesia dan peningkatan kemampuan teknis melalui diklat pusat	Jumlah kompetensi tenaga kerja industri pertambangan minerbapabum melalui sertifikasi	100	150	150	150	200					
		Meningkatnya kompetensi KTT dan penanggung jawab kegiatan di lapangan pada IUP (KP)	- Pelaksanaan kompetensi tenaga kerja industri pertambangan minerbapabum melalui sertifikasi	100	150	150	150	200	1.560	1.500	1.500	1.500	1.500
			Persentase recovery penambangan dan pengolahan terkait konservasi bahan galian pada kegiatan usaha pertambangan	85	87	90	93	95	3.778	1.100	1.200	1.200	1.200
			Tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan pertambangan	0.74	0.72	0.70	0.68	0.66					
			- Evaluasi kekerapan kecelakaan pada perusahaan pertambangan	0,74	0,72	0,7	0,68	0,66	1.799	1.800	1.800	1.800	1.900
			Luas lahan kegiatan usaha pertambangan yang reklamasi oleh pemegang usaha pertambangan	6000 ha	6200 ha	6300 ha	6400 ha	6500 ha					
			- Pengawasan luas lahan kegiatan usaha pertambangan yang reklamasi oleh pemegang usaha pertambangan	6000 ha	6200 ha	6300 ha	6400 ha	6500 ha	564	600	700	800	850
			Jumlah peraturan menteri tentang pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan	6	10	5	1	1					
			- Penyusunan peraturan menteri tentang pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan	6	10	5	1	1	2.366	3.400	1.700	1.000	1.000
			Jumlah norma/pedoman teknis/juknis/kriteria aspek K3. keselamatan operasi. teknis pertambangan. lindungan lingkungan. usaha jasa dan standarisasi	14	45	43	22	22					

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Penyusunan norma/pedoman teknis/juknis/kriteria aspek K3. keselamatan operasi. teknis pertambangan. lindungan lingkungan. <u>usaha jasa dan standarisasi</u>	14	45	43	22	22	4.332	9.500	8.650	2.591	2.223
			Jumlah usaha jasa lokal dan nasional yang berusaha di bidang usaha jasa pertambangan	600	650	750	750	800					
			- Evaluasi usaha jasa lokal dan nasional yang berusaha di bidang usaha jasa pertambangan	600	650	750	750	800	4.125	4.000	4.100	4.200	4.300
			Prosentasi penjaminan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan	100	100	100	100	100					
			- Terlaksananya penjaminan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan	100	100	100	100	100	563	600	700	800	900
			Kualitas baku mutu air limbah tambang pada kegiatan usaha pertambangan	100%	100%	100%	100%	100%					
			- Evaluasi Kualitas baku mutu air limbah tambang pada kegiatan usaha pertambangan	100%	100%	100%	100%	100%	498	400	550	600	700
			Jumlah SNI/SKKNi hasil kaji ulang	6	7	8	8	7					
			- Penyusunan SNI/SKKNi hasil kaji ulang	6	7	8	8	7	444	750	800	900	900
			Jumlah Propinsi/perguruan tinggi/perusahaan yang memahami dengan baik system kompetensi dan SNI	3	3	3	3	3					
			- Sinkronisasi dan sosialisasi mengenai sistem kompetensi dan SNI	3	3	3	3	3	758	800	800	800	800
			Jumlah Perusahaan yang menerapkan standar	15	20	20	20	20					
			- Pengawasan terhadap Perusahaan yang menerapkan standar	15	20	20	20	20	778	800	800	800	800
			Jumlah Pemda yg melaksanakan pengelolaan usaha pertambangan yg benar	20	20	20	20	20					
			- Evaluasi Pemda yg melaksanakan pengelolaan usaha pertambangan yg benar	20	20	20	20	20	2.452	2.000	2.100	2.200	2.700
			Jumlah perusahaan yang laik secara teknik	60	60	60	60	60					
			- Evaluasi perusahaan yang laik secara teknik	60	60	60	60	60	3.637	3.200	3.300	3.400	3.400
			Jumlah Inventarisasi daerah yg terkena dampak pengolahan emas menggunakan bahan kimia	3	3	3	3	3					
			- Inventarisasi daerah yg terkena dampak pengolahan emas menggunakan bahan kimia	3	3	3	3	3	649	600	600	600	600
			Jumlah perusahaan tambang yg melakukan perencanaan pasca tambang sesuai dengan tata guna lahan	15	15	15	15	15					

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Evaluasi perusahaan tambang yg melakukan perencanaan pasca tambang sesuai dengan tata guna lahan	15	15	15	15	15	601	600	600	700	750
			Jumlah Inventarisasi Penguasaan dan penetapan teknologi perusahaan	3	3	3	3	3					
			Inventarisasi Penguasaan dan penetapan teknologi perusahaan	3	3	3	3	3	409	400	400	400	400
			Jumlah pengawasan perusahaan usaha jasa	40	40	40	40	40					
			Pengawasan perusahaan usaha jasa	40	40	40	40	40	1.743	1.600	1.700	1.800	1.900
			Jumlah perusahaan yang dinilai dlm rangka penilaian prestasi K3	60	60	60	60	60					
			Pengawasan perusahaan yang dinilai dlm rangka penilaian prestasi K3	60	60	60	60	60	599	600	650	700	750
			Jumlah tim yg berperan dlm fire & rescue challenge regional	19	20	20	20	20					
			Pengawasan tim yg berperan dlm fire & rescue challenge regional	19	20	20	20	20	600	700	800	900	1.000
			Jumlah pemda yg berperan aktif dlm pengawasan K3	40	40	40	40	40					
			Monitoring pemda yg berperan aktif dlm pengawasan K3	40	40	40	40	40	1.077	1.000	1.000	1.200	1.300
			Jumlah perusahaan yg dinilai dlm rangka prestasi pengelolaan lingkungan	45	45	45	45	45					
			Penilaian terhadap perusahaan dlm rangka prestasi pengelolaan lingkungan	45	45	45	45	45	1.251	1.200	1.200	1.300	1.300
			Penyelesaian kasus lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	784	700	800	800	800
			Jumlah perusahaan yg berperan dlm meningkatkan nilai tambah, pegelolaan pertambangan dengan baik	15	15	15	15	15					
			Evaluasi terhadap perusahaan yg berperan dlm meningkatkan nilai tambah, pegelolaan pertambangan dengan baik	15	15	15	15	15	4.845	4.500	4.600	4.700	4.800
			Jumlah Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1	1	1	1	1					
			Penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1	1	1	1	1	225	300	350	350	400
			Jumlah kepala dinas dan aparat yang meningkat memahaminya dalam GMP	50	50	50	50	50					
			Penilaian terhadap kepala dinas dan aparat yang meningkat memahaminya dalam GMP	50	50	50	50	50	4.800	4.400	4.500	4.600	4.700
			Jumlah SDM yg meningkat kemampuan keteknikan dan lingkungan	50	50	50	50	50					
			Penilaian terhadap SDM yg meningkat kemampuan keteknikan dan lingkungan	50	50	50	50	50	4.332	3.500	3.600	3.600	3.600

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VII	PROGRAM PENELITIAN, MITIGASI DAN PELAYANAN GEOLOGI	Peningkatan status data dasar geologi, sumber daya geologi, penataan ruang berbasis geologi, dan mitigasi bencana geologi :	o Terpenuhinya kebutuhan pegawai, sarana parasarana dan lancarnya kegiatan sehari hari perkantoran (bulan)	12	12	12	12	12	251.494	264.069	277.272	291.136	305.693
			Jumlah lokasi Penyelidikan keprospekkan sumber daya Panas bumi	22	22	22	22	22	28.000	29.400	30.870	32.414	34.034
			Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekkan sumber daya Batubara, Gambut, Migas, Ritumen dan CBM	23	23	23	23	23	90.000	94.500	99.225	104.186	109.396
			Jumlah lokasi Penyelidikan keprospekkan sumber daya mineral	28	28	29	29	30	16.000	16.800	17.640	18.522	19.448
			Jumlah kegiatan kajian/evaluasi WKP dan WP	8	8	8	8	8	10.400	10.920	11.466	12.039	12.641
			o Jumlah peta-peta kegeologian yang dihasilkan	83	82	81	82	84	120.000	126.000	132.300	138.915	145.861
			o Jumlah daerah sulit air yang memanfaatkan air tanah sebagai sumber air bersih	100	100	100	100	100	60.500	63.525	66.701	70.036	73.538
			o Jumlah rekomendasi teknis penataan ruang berbasis geologi	17	17	17	17	17	68.825	72.266	75.880	79.674	83.657
			o Jumlah rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi	17	17	17	17	17	73.336	77.003	80.853	84.896	89.140
1.	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Geologi	Meningkatnya manajemen, dukungan teknis, dan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan Geologi	· Jumlah kegiatan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran; laporan dan evaluasi Badan Geologi	8	8	8	8	9	2.920	3.066	3.219	3.380	3.549
			· Terpenuhinya kebutuhan pegawai, sarana parasarana dan lancarnya kegiatan sehari hari perkantoran (bulan)	12	12	12	12	12	9.083	9.537	10.014	10.515	11.540
			· Pengembangan organisasi dan kelembagaan Badan Geologi Indonesia	1					2500				
			· Jumlah kegiatan pengembangan jaringan sistem informasi	1	1	1	1	1	550	578	606	637	669
			· Jumlah kegiatan pengelolaan data dan informasi Geologi	4	4	4	4	4	2.270	2.384	2.503	2.628	2.759
			· Jumlah kegiatan pembinaan aparatur, pola karier dan administrasi kepegawaian	17	17	17	17	17	7.500	7.875	8.269	8.682	9.116
			· Jumlah PNS Badan Geologi yang dikembangkan kompetensinya	15	15	15	20	25	1.650	1.733	1.819	2.410	2.531
			· Jumlah kegiatan publikasi dan diseminasi informasi	7	7	7	7	7	2.600	2.730	2.867	3.010	3.160

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			· Jumlah kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan Badan Geologi menuju kesesuaian dengan dengan standar yang ditetapkan	17	17	17	18	18	8.200	8.610	9.041	9.493	9.967
			· Jumlah usulan peraturan bidang geologi	4	3	3	3	3	2.700	2.835	2.977	3.126	3.282
			· Jumlah kegiatan pengembangan hukum dan kehumasan Badan Geologi	15	15	15	15	15	3.500	3.675	3.859	4.052	4.254
			· Jumlah kegiatan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, kearsipan, tatausaha, dan rumah tangga Badan Geologi menuju kesesuaian dengan standar yang ditetapkan Geologi dengan standar yang ditetapkan	7	7	7	7	7	8.500	8.925	9.871	10.365	10.883
			· Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Konsolidasi Badan Geologi yang dilaksanakan (Bulan)	12	12	12	12	12	6.300	8.615	9.046	9.498	9.973
2.	Kegiatan Survei dan Pelayanan Geologi	Meningkatnya pemanfaatan hasil survei penelitian, penyelidikan dan pelayanan geologi	· Jumlah wilayah/kawasan pemetaan geologi bersistem dan bertema	2	2	2	2	2	63.100	66.255	69.568	73.046	76.698
			· Terpenuhinya kebutuhan pegawai, sarana prasarana dan lancarnya kegiatan sehari hari perkantoran (bulan)	12	12	12	12	12	66.620	69.951	73.449	77.121	80.977
			· Terwujudnya museum tsunami NAD yang terpelihara	1	1				42.500	10.000	10.000	10.000	10.000
			· Jumlah peta geofisika bersistem dan bertema yang dihasilkan	2	3	3	3	3	55.000	87.500	91.875	96.469	101.292
			· Jumlah peta geokimia yang dihasilkan	6	6	6	6	6	5.500	6.775	7.114	7.469	7.843
			· Jumlah peta seismotektonik yang dihasilkan	2	2	2	2	2	2.000	3.100	3.255	3.418	3.589
			· Jumlah peta geomorfologi yang dihasilkan	2	2	2	2	2	2.000	3.100	3.255	3.418	3.589
			· Jumlah peta geologi kuarter yang dihasilkan	2	2	2	2	2	2.000	4.600	4.830	5.072	5.325
			· Jumlah perolehan / pendaftaran sistim mutu	7	7	7	7	7	2.000	2.100	2.205	2.315	2.431
			· Kegiatan Pengelolaan Museum Geologi untuk meningkatkan pelayanan pengunjung	2	2	2	2	2	750	788	827	868	912
3.	Kegiatan Dokumentasi Koleksi dan Pelayanan Museum Geologi	Meningkatnya pemanfaatan informasi geologi bagi masyarakat	· Terpenuhinya kebutuhan pegawai, sarana prasarana dan lancarnya kegiatan sehari hari perkantoran (bulan)	12	12	12	12	12	9.958	10.456	10.979	11.528	12.104
			· Jumlah survei, kajian dan penelitian geologi yang dihasilkan	12	12	12	12	12	650	683	717	752	790
			· Peningkatan jumlah koleksi	1	1	1	1	1	630	662	695	729	766

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			· Jumlah koleksi geologi yang dipelihara	5	5	5	5	5	200	210	221	232	243
			· Jumlah koleksi geologi yang terdata	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	1.100	1.155	1.213	1.273	1.337
			· Jumlah sarana dan prasarana peragaan Museum Geologi	7 Corner/Sudut	7 Corner /Sudut	15 Corner /Sudut	15 Corner /Sudut	15 Corner /Sudut	4.000	4.200	4.410	4.631	4.862
4.	Kegiatan Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Geologi	Meningkatnya pemanfaatan wilayah keprospekaan sumber daya geologi	· Terpenuhinya kebutuhan pegawai, sarana parasarana dan lancarnya kegiatan sehari hari <i>nerkantoran</i>	12	12	12	12	12	43.300	45.465	47.738	50.125	52.631
			Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekan sumber daya Panas bumi	22	22	22	22	22	28.000	29.400	30.870	32.414	34.034
			Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekan sumber daya Batubara dan CBM	18	18	18	18	18	87.000	91.350	95.918	100.713	105.749
			Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekan sumber daya Gambut dan Bitumen Padat	5	5	5	5	5	3.000	3.150	3.308	3.473	3.647
			Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekan sumber daya mineral	28	28	29	29	30	16.000	16.800	17.640	18.522	19.448
			Jumlah kegiatan kajian/evaluasi WKP dan WP	8	8	8	8	8	10.400	10.920	11.466	12.039	12.641
5.	Kegiatan Penelitian dan Pelayanan Geologi Lingkungan dan Air Tanah	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian, penyelidikan, dan pemetaan bidang lingkungan geologi dan air tanah	· Jumlah peta geologi teknik bersistem 1:100.000	6	6	6	6	6	1.350	1.418	1.488	1.563	1.641
			· Jumlah peta geologi teknik untuk Infrastruktur	6	6	7	7	7	1.350	1.418	1.488	1.563	1.641
			· Terpenuhinya kebutuhan pegawai, sarana parasarana dan lancarnya kegiatan sehari hari <i>perkantoran (bulan)</i>	12	12	12	12	12	43.867	46.060	48.363	50.782	53.321
			· Jumlah lokasi yang telah dilakukan penyelidikan kondisi geologi teknik geodinamik dan infra struktur kawasan andalan <i>pertambangan</i>	9	9	8	8	8	2.025	2.126	2.233	2.344	2.461
			· Jumlah informasi hasil penelitian geologi teknik	1	1	1	1	1	225	236	248	260	273
			· Jumlah kawasan karst terpetakan pada skala 1:50.000	2	2	2	2	2	450	473	496	521	547
			· Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan geologi lingkungan untuk tata ruang pada skala 1:100.000	17	17	17	17	17	3.825	4.016	4.217	4.428	4.649
			· Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan geologi lingkungan kawasan pertambangan untuk tata ruang pada skala 1:100.000	7	7	7	7	7	1.575	1.654	1.736	1.823	1.914
			· Jumlah sumur bor sumber air bersih penduduk di desa tertinggal dan daerah sulit air	100	100	100	100	100	60.500	63.525	66.701	70.036	73.538

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah rekomendasi konservasi kawasan lindung geologi dan air tanah, dan pengelolaan tata ruang 	19	21	18	20	18	4.275	4.489	4.713	4.949	5.196
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah peta hidro geologi bersistem skala 1:250.000 	5	5	5	5	5	1.350	1.418	1.488	1.563	1.641
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah peta potensi cekungan air tanah skala 1:100.000 	2	3	2	2	5	1.350	1.418	1.488	1.563	1.641
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah peta konservasi air tanah 	5	3	2	3	2	2.025	2.126	2.233	2.344	2.461
6.	Kegiatan Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan penyelidikan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Peta Geologi Gunungapi Aktif 	2	2	2	2	2	3.200	3.360	3.528	3.704	3.890
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Aktif Skala 1:50,000 	1	1	1	1	1	1.500	1.575	1.654	1.736	1.823
			<ul style="list-style-type: none"> Terpenuhinya kebutuhan pegawai, sarana parasarana dan lancarnya kegiatan sehari hari perkantoran (bulan) 	12	12	12	12	12	53.255	55.918	58.714	61.649	64.732
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah peta yang diterbitkan Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah 	5	5	5	5	5	6.220	6.531	6.858	7.200	7.560
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah peta yang diterbitkan Peta Kawasan Rawan Bencana Gempabumi dan Tsunami 	3	3	3	3	3	2.730	2.867	3.010	3.160	3.318
			<ul style="list-style-type: none"> jumlah gunung api yang dipantau untuk kegiatan gunungapi aktif tipe A dari Pos Pengamatan Gunungapi 	10	10	13	15	18	9.090	9.545	10.022	10.523	11.049
			<ul style="list-style-type: none"> jumlah kegiatan pemahaman masyarakat tentang kebencanaan geologi melalui pelatihan kebencanaan, pameran, dan pembuatan film yang lebih intensif 	7	7	7	7	7	704	739	776	815	856
			<ul style="list-style-type: none"> jumlah Pedoman/peraturan/norma Mitigasi Bencana Gunungapi dan Pedoman Gerakan Tanah, Gempabumi dan Tsunami 	2	2	2	2	2	1.470	1.544	1.621	1.702	1.787
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah layanan pemberian rekomendasi teknis hasil mitigasi bencana geologi; 	1	1	1	1	1	1.900	1.995	2.095	2.199	2.309
7.	Kegiatan Riset dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi	Meningkatnya pemanfaatan hasil pengembangan metoda dan teknologi dalam mendukung upaya mitigasi bencana geologi	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perangkat sistem monitoring kegunungapian hasil rancang bangun sendiri di 20 gunung api 	4	4	4	4	4	2.500	2.625	2.756	2.894	3.039
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah data geokimia gunungapi di 25 gunungapi 	4	4	5	6	6	3.500	3.675	3.859	4.052	4.254
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kegiatan mitigasi di kawasan Bencana G. Merapi 	15	15	16	17	17	4.338	4.555	4.783	5.022	5.273

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VIII	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi bidang energi dan sumber daya mineral	o Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan	126	117	116	104	97	112.097	153.293	159.739	165.055	171.035
			- Usulan Paten dan Hak Cipta	10	10	11	8	10					
			- Jumlah Makalah Ilmiah yang Dipublikasikan Pada Jurnal baik di tingkat Nasional maupun Internasional dan Laporan Ilmiah	83	91	99	112	109					
			- Jumlah Masukan/Rekomendasi Kebijakan	28	33	34	34	39					
			- Jumlah Pilot Plant dan Demo Plant atau Rancangan Produk Rancang Bangun Penerapan Teknologi Unggulan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	27	28	22	19	18					
			- Jumlah Produksi Peta Potensi Geologi Kelautan	9	9	9	9	9					
			o Jumlah Kontrak Pelayanan Jasa Teknologi	48	52	58	63	63					
			o Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kegiatan Jasa Penelitian dan Pengembangan terhadap target yang ditetaskan (Dalam Rupa)	49.723	59.214	70.268	83.506	99.364	46.390	59.214	70.268	83.506	99.364
			o Jumlah Pembayaran Gaji, Operasional Perkantoran dan Pelayanan Publik	3	3	3	3	3	165.732	245.436	245.702	246.711	245.446
			o Jumlah Kegiatan Penunjang Kelitbangan Lainnya	223	184	184	184	184	153.737	127.740	144.406	159.930	176.206
			o Jumlah Kegiatan Yang Didanai oleh PNBP	129	123	123	123	123	257.637	186.691	190.875	196.339	202.066
1.	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Meningkatnya pembinaan, koordinasi dan dukungan teknis bagi Badan Penelitian dan Pengembangan secara optimal.	o Jumlah Koordinasi Perencanaan Kebijakan Program	3	4	4	4	4	1.155	1.386	1.497	1.602	1.730
			o Jumlah Kegiatan Pengelolaan Administratif Kepegawaian	13	13	13	13	13	2.272	2.499	2.674	2.835	3.061
			o Jumlah Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan	6	6	6	6	6	1.425	1.568	1.693	1.811	1.974
			o Jumlah Pengelolaan Aset Barang Milik Negara yang Dilaporkan Sebagai Kekayaan Negara	5	5	5	5	5	1.656	1.822	1.913	2.008	2.169
			o Jumlah Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi	6	6	6	6	6	2.977	3.275	3.438	3.610	3.827
			o Jumlah Penilaian Jabatan Struktural dan Fungsional	3	3	3	3	3	1.230	1.353	1.421	1.492	1.581
			o Jumlah Koordinasi Kerjasama Litbang	3	3	3	3	3	1.228	1.351	1.418	1.489	1.608
			o Jumlah Penyelenggaraan Diseminasi Hasil Litbang	4	4	4	4	4	1.410	1.833	1.650	1.765	1.589
			o Jumlah Pengelolaan Ketatausahaan, Kearsipan dan Rumah Tangga	5	5	5	5	5	1.425	1.568	1.677	1.778	1.920

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			o Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Dibangun/Direhab/Ditingkatkan	2	2	2	2	2	1.650	1.815	1.906	2.001	2.101
			o Jumlah Pembayaran Gaji, Operasional Perkantoran dan Pelayanan Publik	3	3	3	3	3	12.001	13.201	14.125	14.831	15.572
			o Jumlah Kegiatan Yang Didanai oleh PNB	2	2	2	2	2	5.000	3.410	3.481	3.575	3.664
2.	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi mineral dan batubara.	o Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan	44	48	47	41	36	32.095	32.950	28.525	25.775	22.950
			- Usulan Paten dan Hak Cipta	3	1	2	1	1					
			- Jumlah Makalah Ilmiah yang Dipublikasikan Pada Jurnal baik di tingkat Nasional maupun Internasional dan Laporan Ilmiah	41	44	40	38	31					
			- Jumlah Masukan/Rekomendasi Kebijakan	16	19	18	17	18					
			- Jumlah Pilot Plant dan Demo Plant atau Rancangan Produk Rancang Bangun Penerapan Teknologi Unggulan bidang ESDM	7	13	8	11	10					
			o Jumlah Kontrak Pelayanan Jasa Teknologi	5	5	5	5	5					
			o Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kegiatan Jasa Penelitian dan Pengembangan terhadap target yang ditetapkan (Dalam Rupa Rp)	3.028	3.420	3.555	3.690	3.825	3.028	3.420	3.555	3.690	3.825
			o Jumlah Pembayaran Gaji, Operasional Perkantoran dan Pelayanan Publik	3	3	3	3	3	42.449	42.449	42.449	42.449	42.449
			o Prosentase kegiatan yang memperoleh nilai perencanaan lebih dari 800	20	20	20	20	20					
			o Prosentase kegiatan yang memperoleh nilai evaluasi laporan minimal 800	20	20	20	20	20					
			o Jumlah kapasitas kelembagaan (sertifikasi personil, penerapan sistem manajemen mutu, jumlah kerjasama kelitbangan)	6	6	6	7	7					
			o Jumlah Kegiatan Penunjang Kelitbangan Lainnya	36	36	36	36	36	17.456	22.461	33.315	42.822	52.749
			o Jumlah Kegiatan Yang Didanai oleh PNB	30	30	30	30	30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi minyak dan gas bumi.	o Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan	47	35	34	31	32	33.130	71.127	79.538	85.020	91.112
			- Usulan Paten dan Hak Cipta	6	6	6	4	6					
			- Jumlah Makalah Ilmiah yang Dipublikasikan Pada Jurnal baik di tingkat Nasional maupun Internasional dan Laporan Ilmiah	15	20	28	43	47					
			- Jumlah Masukan/Rekomendasi Kebijakan	9	11	13	14	18					
			- Jumlah Pilot Plant dan Demo Plant atau Rancangan Produk Rancang Bangun Penerapan Teknologi Unggulan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	3	3	3	2	3					
			- Jumlah Makalah Ilmiah yang memiliki nilai cutting edge technology			2	2	3					
			- Jumlah sumberdaya migas dan CBM tambahan yang diprospekan (MMSTB)	400	450	500	600	800					
			- Jumlah cadangan migas baru yang diusulkan	10	20	30	30	40					
			- Jumlah solusi persoalan migas nasional yang memiliki indeks kepuasan pelanggan 80%	15	10	11	10	11					
			o Jumlah Kontrak Pelayanan Jasa Teknologi	40	44	50	55	55					
			o Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kegiatan Jasa Penelitian dan Pengembangan terhadap target yang ditetapkan (Dalam Juta Rp)	45.495	54.594	65.513	78.616	94.339	43.361	54.594	65.513	78.616	94.339
			- Jumlah solusi persoalan industri hulu dan hilir migas yang memiliki indeks kepuasan pelanggan 80%	20	26	35	44	50					
			o Jumlah Pembayaran Gaji, Operasional Perkantoran dan Pelayanan Publik	3	3	3	3	3	71.605	149.125	145.384	143.499	139.197
			o Jumlah Kegiatan Penunjang Kelitbangan Lainnya	50	24	24	24	24	72.862	37.470	39.997	42.318	44.778
			o Jumlah Kegiatan Yang Didanai oleh PNBP	6	2	2	2	2	124.105	50.000	50.000	50.000	50.000

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistikan dan Energi Baru Terbarukan	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.	o Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan	22	20	20	16	12	24.204	25.415	26.685	28.020	29.421
			- Usulan Paten dan Hak Cipta	1	2	2	2	2					
			- Jumlah Makalah Ilmiah yang Dipublikasikan Pada Jurnal baik di tingkat Nasional maupun Internasional dan Laporan Ilmiah	12	12	16	16	16					
			- Jumlah Masukan/Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	2					
			- Jumlah Pilot Plant dan Demo Plant atau Rancangan Produk Rancang Bangun Penerapan Teknologi Unggulan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	14	9	8	3	2					
			o Jumlah Kontrak Pelayanan Jasa Teknologi	1	1	1	1	1					
			o Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kegiatan Jasa Penelitian dan Pengembangan terhadap target yang ditetapkan (Dalam Juta Rp)	200	200	200	200	200	0	200	200	200	200
			o Jumlah Pembayaran Gaji, Operasional Perkantoran dan Pelayanan Publik	3	3	3	3	3	10.991	11.541	12.118	12.724	13.360
			o Jumlah Kegiatan Penunjang Kelitbangan Lainnya	38	24	24	24	24	11.845	12.437	13.059	13.712	14.398
			o Jumlah Kegiatan Yang Didanai oleh PNBP	4	4	4	4	4	20.000	21.000	22.050	23.153	24.310
5.	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan geologi kelautan	o Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan	13	14	15	16	17	22.667	23.801	24.991	26.240	27.552
			- Usulan Paten dan Hak Cipta	-	1	1	1	1					
			- Jumlah Makalah Ilmiah yang Dipublikasikan Pada Jurnal baik di tingkat Nasional maupun Internasional dan Laporan Ilmiah	15	15	15	15	15					
			- Jumlah Masukan/Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1					
			- Jumlah Pilot Plant dan Demo Plant atau Rancangan Produk Rancang Bangun Penerapan Teknologi Unggulan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	3	3	3	3	3					
			- Jumlah Produksi Peta Potensi Geologi Kelautan	9	9	9	9	9					
			o Jumlah Kontrak Pelayanan Jasa Teknologi	2	2	2	2	2					

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			o Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kegiatan Jasa Penelitian dan Pengembangan terhadap target yang ditetapkan (Dalam Rupa Rp)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
			o Jumlah Pembayaran Gaji, Operasional Perkantoran dan Pelayanan Publik	3	3	3	3	3	28.686	30.121	31.626	33.208	34.868
			o Jumlah Kegiatan Penunjang Kelitbangan Lainnya	49	49	49	49	49	35.146	36.904	38.749	40.686	42.721
			o Jumlah Kegiatan Yang Didanai oleh PNBP	85	85	85	85	85	78.532	81.280	85.344	89.612	94.092
IX	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Terwujudnya sumberdaya manusia sektor energi dan sumber daya mineral yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan Terwujudnya Infrastruktur Diklat Sektor ESDM sesuai kebutuhan	o Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun	346	366	378	394	409	94.614	99.345	104.312	109.529	115.008
			o Jumlah jenis diklat sektor ESDM yang diselenggarakan	29	34	47	54	64	-	-	-	-	-
			o Jumlah peserta yang selesai mengikuti diklat di Badiklat KESDM	7.085	7.605	8.065	8.525	8.985	-	-	-	-	-
			o Jumlah lulusan pendidikan formal tingkat Diploma I, II, III, dan IV.	241	277	319	367	422	19.259	20.221	21.232	22.294	23.409
			o Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan	461	476	484	488	493	24.918	26.163	27.472	28.845	30.288
			o Jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan kemampuannya	1.728	1.809	1.880	1.941	2.013	32.767	34.406	36.126	37.931	39.828
			o Jumlah Lembaga Diklat Profesi/LDP yang terakreditasi sebagai penyelenggara Diklat Teknis	16	27	31	32	44	1.688	1.772	1.861	1.955	2.052
			o Prosentase tingkat kinerja organisasi	90	92	92	93	95	3.268	3.432	3.603	3.782	3.972
			o Jumlah publikasi karya ilmiah	6	8	10	13	14	581	810	851	893	1.138
			o Jumlah kegiatan administrasi pengelolaan kepegawaian, umum dan keuangan	124	129	135	137	140	137.130	143.987	151.186	158.745	166.683
			o Jumlah kegiatan penyempurnaan organisasi	5	5	5	5	5	5.155	5.413	5.683	5.968	6.266
			o Jumlah karya ilmiah	87	91	97	112	121	2.193	2.303	2.418	2.539	2.666
			o Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan	51	70	51	75	51	4.263	4.476	4.700	4.935	5.181
			o Jumlah dokumen perencanaan	48	46	46	46	48	7.850	8.242	8.654	9.087	9.541
			o Jumlah kegiatan pengadaan pembangunan dan renovasi sarana dan prasarana	59	96	85	65	69	340.682	352.392	364.952	378.395	392.748
			o Jumlah sarana diklat yang terakreditasi standar mutu	8	11	12	13	14	1.800	2.090	2.195	2.304	2.419
			o Jumlah kegiatan pelayanan jasa sarana, keahlian, dan sertifikasi	33	38	45	49	55	99.138	104.095	109.550	115.028	120.779
			o Jumlah kerjasama diklat yang diimplementasikan	120	131	145	160	172	10.259	10.771	11.311	11.876	12.470
			o Jumlah kegiatan promosi diklat	17	19	23	25	28	3.678	3.863	4.055	4.258	4.470
			o Jumlah sistem informasi yang diimplementasikan	20	25	28	31	31	5.913	6.209	6.519	6.845	7.188

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM	Terwujudnya peningkatan pembinaan, koordinasi pelayanan administrasi dan dukungan teknis bagi Badan Pendidikan dan Pelatihan secara optimal	- Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1.370	1.439	1.510	1.586	1.665
			- Jumlah jenis diklat sektor ESDM yang diselenggarakan	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-
			- Jumlah peserta yang selesai mengikuti diklat di Badiklat KESDM						-	-	-	-	-
			- Jumlah lulusan pendidikan formal tingkat Diploma I, II, III, dan IV.						-	-	-	-	-
			- Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan	42	32	32	32	32	5.607	5.887	6.182	6.491	6.815
			- Jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan kemampuannya	1.355	1.400	1.450	1.500	1.550	19.065	20.018	21.019	22.070	23.174
			- Jumlah Lembaga Diklat Profesi/LDP yang terakreditasi sebagai penyelenggara Diklat Teknis	11	21	23	23	23	1.294	1.359	1.427	1.498	1.573
			- Prosentase tingkat kinerja organisasi	90	92	92	93	95	1.600	1.680	1.764	1.852	1.945
			- Jumlah publikasi karya ilmiah						-	-	-	-	-
			- Jumlah kegiatan administrasi pengelolaan kepegawaian, umum dan keuangan	15	15	15	15	15	19.025	19.976	20.975	22.024	23.125
			- Jumlah kegiatan penyempurnaan organisasi	3	3	3	3	3	4.931	5.178	5.436	5.708	5.994
			- Jumlah karya ilmiah						-	-	-	-	-
			- Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan						-	-	-	-	-
			- Jumlah dokumen perencanaan	34	34	34	34	34	4.953	5.201	5.461	5.734	6.020
			- Jumlah kegiatan pengadaan pembangunan dan renovasi sarana dan prasarana	4	4	4	4	4	20.000	21.000	22.050	23.153	24.310
			- Jumlah sarana diklat yang terakreditasi standar mutu						-	-	-	-	-
			- Jumlah kegiatan pelayanan jasa sarana, keahlian, dan sertifikasi						-	-	-	-	-
			- Jumlah kerjasama diklat yang diimplementasikan	6	6	6	6	6	4.952	5.200	5.460	5.733	6.019
			- Jumlah kegiatan promosi diklat	3	3	3	3	3	2.180	2.289	2.403	2.524	2.650
			- Jumlah sistem informasi yang diimplementasikan	3	5	6	6	6	2.842	2.984	3.133	3.290	3.454
2.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi	Terwujudnya sumberdaya manusia sub sektor minyak dan gas bumi yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	- Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun	139	146	143	144	146	24.825	26.067	27.370	28.738	30.175
			- Jumlah jenis diklat sub sektor Migas yang diselenggarakan			8	10	15	-	-	-	-	-
			- Jumlah peserta yang selesai mengikuti diklat di Pusdiklat Migas	2.780	2.920	3.020	3.080	3.220	-	-	-	-	-
			- Jumlah lulusan pendidikan formal tingkat Diploma I, II, III, dan IV.						-	-	-	-	-
			- Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan	260	262	262	262	262	1.658	1.741	1.828	1.919	2.015
			- Jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan kemampuannya	103	119	119	109	109	1.278	1.342	1.409	1.479	1.553
			- Jumlah Lembaga Diklat Profesi/LDP yang terakreditasi sebagai penyelenggara Diklat Teknis						-	-	-	-	-

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			• Prosentase tingkat kinerja organisasi	90	92	92	93	95	75	79	83	87	91
			• Jumlah publikasi karya ilmiah	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-
			• Jumlah kegiatan administrasi pengelolaan kepegawaian, umum dan keuangan	30	31	31	31	31	60.097	63.102	66.257	69.570	73.048
			• Jumlah kegiatan penyempurnaan organisasi						-	-	-	-	-
			• Jumlah karya ilmiah	34	34	34	34	34	-	-	-	-	-
			• Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan	1	20	1	25	1	298	313	329	345	362
			• Jumlah dokumen perencanaan	2	2	2	2	2	175	184	193	203	213
			• Jumlah kegiatan pengadaan pembangunan dan renovasi sarana dan prasarana	18	55	41	18	18	147.720	155.106	162.861	171.004	179.555
			• Jumlah sarana diklat yang terakreditasi standar mutu	8	8	8	8	8	1.800	1.890	1.985	2.084	2.188
			• Jumlah kegiatan pelayanan jasa sarana, keahlian, dan sertifikasi	27	28	30	31	33	98.738	103.675	108.859	114.302	120.017
			• Jumlah kerjasama diklat yang diimplementasikan	75	80	85	90	95	-	-	-	-	-
			• Jumlah kegiatan promosi diklat	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
			• Jumlah sistem informasi yang diimplementasikan	2	4	5	6	6	151	158	166	175	183
			• Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun	36	38	40	43	46	7.600	7.980	8.379	8.799	9.241
3.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan	Terwujudnya sumberdaya manusia sub sektor ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	• Jumlah jenis diklat sub sektor Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan yang diselenggarakan	16	19	22	25	28	-	-	-	-	-
			• Jumlah peserta yang selesai mengikuti diklat di Pusdiklat KEBT	720	760	800	860	920	-	-	-	-	-
			• Jumlah lulusan pendidikan formal tingkat Diploma I, II, III, dan IV.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			• Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan	12	12	14	14	15	2.511	2.636	2.768	2.906	3.052
			• Jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan kemampuannya	50	50	50	50	50	2.934	3.081	3.235	3.396	3.566
			• Jumlah Lembaga Diklat Profesi/LDP yang terakreditasi sebagai penyelenggara Diklat Teknis	3	3	4	4	15	130	136	143	151	158
			• Prosentase tingkat kinerja organisasi	100	100	100	100	100	416	437	459	481	505
			• Jumlah publikasi karya ilmiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			• Jumlah kegiatan administrasi pengelolaan kepegawaian, umum dan keuangan	9	9	9	9	9	11.830	12.422	13.043	13.695	14.380
			• Jumlah kegiatan penyempurnaan organisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			• Jumlah karya ilmiah	10	10	12	12	15	162	170	179	188	197
			• Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan	3	3	3	3	3	741	778	817	858	900
			• Jumlah dokumen perencanaan	3	2	2	2	3	434	455	478	502	527

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kegiatan pengadaan pembangunan dan renovasi sarana dan prasarana Jumlah sarana diklat yang terakreditasi standar mutu Jumlah kegiatan pelayanan jasa sarana, keahlian, dan sertifikasi Jumlah kerjasama diklat yang diimplementasikan Jumlah kegiatan promosi diklat Jumlah sistem informasi yang diimplementasikan 	3	3	3	3	3	36.200	38.010	39.910	41.906	44.000
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3	3	3	3	3	1.586	1.665	1.749	1.836	1.928
				4	4	6	6	8	293	309	323	339	356
				1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	136	143	150	158	166
4.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Geologi	Terwujudnya sumberdaya manusia bidang kegeologian yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun Jumlah jenis diklat bidang Geologi yang diselenggarakan Jumlah peserta yang selesai mengikuti diklat di Pusdiklat Geologi Jumlah lulusan pendidikan formal tingkat Diploma I, II, III, dan IV. Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan Jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan kemampuannya Jumlah Lembaga Diklat Profesi/LDP yang terakreditasi sebagai penyelenggara Diklat Teknis Prosentase tingkat kinerja organisasi Jumlah publikasi karya ilmiah Jumlah kegiatan administrasi pengelolaan kepegawaian, umum dan keuangan Jumlah kegiatan penyempurnaan organisasi Jumlah karya ilmiah Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan Jumlah dokumen perencanaan Jumlah kegiatan pengadaan pembangunan dan renovasi sarana dan prasarana Jumlah sarana diklat yang terakreditasi standar mutu Jumlah kegiatan pelayanan jasa sarana, keahlian, dan sertifikasi Jumlah kerjasama diklat yang diimplementasikan Jumlah kegiatan promosi diklat Jumlah sistem informasi yang diimplementasikan 	40	49	60	70	78	27.000	28.350	29.768	31.256	32.819
				6	6	6	6	6	-	-	-	-	-
				800	980	1200	1440	1600	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
				110	130	133	134	134	6.800	7.140	7.497	7.872	8.265
				60	67	70	75	75	3.600	3.780	3.969	4.167	4.376
									-	-	-	-	-
				90	92	92	93	95	500	525	551	579	608
				2	2	2	2	2	350	368	386	405	425
				22	22	24	24	25	10.950	11.498	12.072	12.676	13.310
									-	-	-	-	-
				20	20	20	30	30	1.300	1.365	1.433	1.505	1.580
				40	40	40	40	40	1.800	1.890	1.985	2.084	2.188
				3	3	3	3	3	1.000	1.050	1.103	1.158	1.216
				3	3	3	3	3	22.000	23.100	24.255	25.468	26.741
				0	1	1	1	1	-	-	-	-	-
				6	8	12	14	17	400	420	441	463	486
				5	5	7	10	10	1.700	1.785	1.874	1.968	2.066
				2	2	2	2	2	500	525	551	579	608
				4	4	4	5	5	800	840	882	926	972

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral, Batubara, dan Panas Bumi	Terwujudnya sumberdava manusia sub sektor mineral, batubara, dan panas bumi yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	• Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun	119	119	119	119	119	28.005	29.405	30.876	32.419	34.040
			• Jumlah jenis diklat sub sektor Teknologi Mineral Batubara dan Panasbumi yang diselenggarakan	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-
			• Jumlah peserta yang selesai mengikuti diklat di Pusdiklat TMB	2.785	2.885	2.985	3.085	3.185	-	-	-	-	-
			• Jumlah lulusan pendidikan formal tingkat Diploma I, II, III, dan IV.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			• Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan	19	19	19	19	19	4.994	5.244	5.506	5.781	6.070
			• Jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan kemampuannya	70	75	80	85	95	1.610	1.691	1.775	1.864	1.957
			• Jumlah Lembaga Diklat Profesi/LDP yang terakreditasi sebagai penyelenggara Diklat Teknis	1	1	1	1	1	100	105	110	116	122
			• Prosentase tingkat kinerja organisasi	100	100	100	100	100	458	481	505	530	557
			• Jumlah publikasi karya ilmiah	1	1	1	1	1	162	170	179	188	197
			• Jumlah kegiatan administrasi pengelolaan kepegawaian, umum dan keuangan	21	21	21	21	21	14.796	15.536	16.313	17.128	17.985
			• Jumlah kegiatan penyempurnaan organisasi	2	2	2	2	2	224	235	247	259	272
			• Jumlah karya ilmiah	3	3	3	3	3	125	131	138	145	152
			• Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan	5	5	5	5	5	546	573	602	632	664
			• Jumlah dokumen perencanaan	2	2	2	2	2	232	244	256	269	282
			• Jumlah kegiatan pengadaan pembangunan dan renovasi sarana dan prasarana	9	9	9	9	9	38.481	40.405	42.425	44.547	46.774
			• Jumlah sarana diklat yang terakreditasi standar mutu	0	1	1	1	1	-	-	-	-	-
			• Jumlah kegiatan pelayanan jasa sarana, keahlian, dan sertifikasi	0	2	2	2	2	-	-	-	-	-
			• Jumlah kerjasama diklat yang diimplementasikan	10	12	14	16	18	973	1.022	1.073	1.126	1.183
			• Jumlah kegiatan promosi diklat	1	2	2	2	2	296	311	326	343	360
			• Jumlah sistem informasi yang diimplementasikan	7	7	7	7	7	1.434	1.506	1.581	1.660	1.743
6.	Kegiatan Pendidikan Tinggi Energi dan Mineral	Terwujudnya peningkatan kegiatan pelaksanaan pendidikan formal Diploma I, II, III, IV dan pengembangan pendidikan tinggi energi dan sumber daya mineral	• Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun						-	-	-	-	-
			• Jumlah jenis diklat sektor ESDM yang diselenggarakan						-	-	-	-	-
			• Jumlah peserta yang selesai mengikuti diklat di Badiklat KESDM						-	-	-	-	-
			• Jumlah lulusan pendidikan formal tingkat Diploma I, II, III, dan IV.	241	277	319	367	422	19.259	20.221	21.232	22.294	23.409
			• Jumlah NSPK yang ditetapkan dan diberlakukan	5	6	7	8	9	731	768	806	846	889

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan kemampuannya	54	62	71	82	94	582	611	642	674	707
			- Jumlah Lembaga Diklat Profesi/LDP yang terakreditasi sebagai penyelenggara Diklat Teknis						-	-	-	-	-
			- Prosentase tingkat kinerja organisasi	90	92	92	93	95	65	68	72	75	79
			- Jumlah publikasi karya ilmiah	3	3	4	5	5	69	72	76	80	84
			- Jumlah kegiatan administrasi pengelolaan kepegawaian, umum dan keuangan	11	13	15	17	19	15.702	16.487	17.311	18.177	19.086
			- Jumlah kegiatan penyempurnaan organisasi						-	-	-	-	-
			- Jumlah karya ilmiah	20	23	26	30	35	606	636	668	702	737
			- Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan						-	-	-	-	-
			- Jumlah dokumen perencanaan						-	-	-	-	-
			- Jumlah kegiatan pengadaan pembangunan dan renovasi sarana dan prasarana	16	18	21	24	28	23.034	24.186	25.395	26.665	27.998
			- Jumlah sarana diklat yang terakreditasi standar mutu						-	-	-	-	-
			- Jumlah kegiatan pelayanan jasa sarana, keahlian, dan sertifikasi						-	-	-	-	-
			- Jumlah kerjasama pendidikan yang diimplementasikan	15	17	20	23	26	196	205	216	226	238
			- Jumlah kegiatan promosi diklat	3	3	4	5	5	180	189	198	208	219
			- Jumlah sistem informasi yang diimplementasikan	1	1	1	2	2	184	193	203	213	224
7.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah	Terwujudnya peningkatan kegiatan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang tambang bawah tanah	- Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun	12	14	16	18	20	5.814	6.105	6.410	6.730	7.067
			- Jumlah jenis diklat sektor ESDM yang diselenggarakan	2	4	6	8	10	-	-	-	-	-
			- Jumlah peserta yang selesai mengikuti diklat di Badiklat KESDM	-	60	60	60	60	-	-	-	-	-
			- Jumlah lulusan pendidikan formal tingkat Diploma I, II, III, dan IV.						-	-	-	-	-
			- Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan	13	15	17	19	22	2.617	2.748	2.885	3.030	3.181
			- Jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan kemampuannya	36	36	40	40	40	3.698	3.883	4.077	4.281	4.495
			- Jumlah Lembaga Diklat Profesi/LDP yang terakreditasi sebagai penyelenggara Diklat Teknis	1	2	3	4	5	164	172	181	190	199
			- Prosentase tingkat kinerja organisasi	90	92	92	93	95	154	162	170	178	187
			- Jumlah publikasi karya ilmiah		1	2	3	4		200	210	221	432
			- Jumlah kegiatan administrasi pengelolaan kepegawaian, umum dan keuangan	16	18	20	20	20	4.730	4.967	5.215	5.476	5.749
			- Jumlah kegiatan penyempurnaan organisasi						-	-	-	-	-
			- Jumlah karya ilmiah	-	1	2	3	4	-	-	-	-	-

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan Jumlah dokumen perencanaan Jumlah kegiatan pengadaan pembangunan dan renovasi sarana dan prasarana Jumlah sarana diklat yang terakreditasi standar mutu Jumlah kegiatan pelayanan jasa sarana, keahlian, dan sertifikasi Jumlah kerjasama diklat yang diimplementasikan Jumlah kegiatan promosi diklat Jumlah sistem informasi yang diimplementasikan 	2	2	2	2	2	878	922	968	1.016	1.067
				4	3	3	3	4	1.056	1.109	1.164	1.222	1.284
				6	4	4	4	4	53.247	50.585	48.055	45.653	43.370
				-	1	2	3	4		200	210	221	232
				-	-	1	2	3	-	-	250	263	276
				6	8	10	12	14	852	895	939	986	1.036
				3	4	5	6	7	229	240	252	265	278
				2	3	4	4	4	366	384	404	424	445
X	PROGRAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA	Tersedianya dan terdistribusinya BBM di seluruh wilayah NKRI.	o Jumlah propinsi yang tidak mengalami kelangkaan	28 Propinsi	29 Propinsi	30 Propinsi	31 Propinsi	32 Propinsi	133.000	134.330	134.693	135.560	135.816
		Tersedianya cadangan BBM Nasional.	o Waktu ketahanan stock Cadangan BBM Nasional (Hari)	23 Hari	24 Hari	24 Hari	24 Hari	24 Hari	12.000	12.120	12.191	12.313	12.436
		Terciptanya kelancaran pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan Pengatur	o Jumlah laporan pertanggungjawaban administratif	9 Laporan	10 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	9 Laporan	93.770	94.038	94.278	95.221	95.293
		Terciptanya Penegakan hukum, pembuatan regulasi, tersosialisasinya kebijakan di bidang hilir	o Jumlah regulasi yang dibuat	3 Regulasi	3 Regulasi	3 Regulasi	3 Regulasi	3 Regulasi	2.900	2.929	2.858	2.887	2.916
		Terciptanya harga Gas Bumi yang wajar untuk Rumah Tangga (RT) dan Pelanggan Kecil (PK).	o Jumlah wilayah untuk penetapan harga Gas Bumi untuk RT dan PK.	11 wilayah	12 wilayah	13 wilayah	14 wilayah	15 wilayah	4.400	4.444	4.458	4.503	4.548
		Terbukanya peluang pengusaha transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) Gas Bumi	o Jumlah hak khusus untuk ruas transmisi dan WJD yang diberikan	2 ruas transmisi dan 4 WJD	3 ruas transmisi dan 5 WJD	4 ruas transmisi dan 6 WJD	5 ruas transmisi dan 7 WJD	6 ruas transmisi dan 8 WJD	5.100	5.151	5.203	5.255	5.307
		Terciptanya tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang wajar dan efisien untuk pengguna (Shipper)	o Jumlah penetapan tariff pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang wajar dan efisien untuk pengguna (Shipper)	2 ruas transmisi	3 ruas transmisi	4 ruas transmisi	5 ruas transmisi	6 ruas transmisi	8.300	8.383	8.417	8.501	8.536

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Terciptanya mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan di bidang usaha penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa	o Jumlah keluhan Badan Usaha di bidang usaha BBM dan Gas Bumi melalui pipa	0 Badan Usaha	0 Badan Usaha	0 Badan Usaha	0 Badan Usaha	0 Badan Usaha	6.700	6.767	6.835	6.903	6.972
1.	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya BPH Migas	a. Meningkatnya kelancaran pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan Pengatur	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah laporan pertanggungjawaban administratif Jumlah Regulasi yang disusun Jumlah sarana dan prasarana yang memenuhi standar Jumlah penarikan iuran dari Badan Usaha 	9 Laporan	10 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	9 Laporan	61.000	61.110	61.281	61.854	61.972
				2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
				1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	23.370	23.404	23.438	23.672	23.709
				433 Milyar	436 Milyar	439 Milyar	441 Milyar	444 Milyar	9.400	9.484	9.579	9.675	9.621
2.	Kegiatan Pengaturan, penetapan dan pelaksanaan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM	Pengaturan penyediaan dan pendistribusian BBM	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Nomor Registrasi Usaha (NRU) dari BPH Migas Jumlah pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM 	60 Badan usaha	62 Badan usaha	64 Badan usaha	66 Badan usaha	68 Badan usaha	12.000	12.120	12.241	12.364	12.487
				1 Badan Usaha Pengangkutan	1 Badan Usaha Pengangkutan	2 Badan Usaha Pengangkutan	3 Badan Usaha Pengangkutan	4 Badan Usaha Pengangkutan	14.000	14.140	14.281	14.424	14.468
				1 Badan Usaha Penyimpanan	1 Badan Usaha Penyimpanan	2 Badan Usaha Penyimpanan	3 Badan Usaha Penyimpanan	4 Badan Usaha Penyimpanan					
		Penetapan Cadangan BBM	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Penetapan Wilayah Distribusi Niaga (WDN) jenis BBM tertentu Jumlah pengawasan infrastruktur penyediaan BBM Nasional 	4 Badan usaha	14 Badan usaha	15 Badan usaha	16 Badan usaha	17 Badan usaha	12.000	12.120	12.241	12.364	12.387
									10.000	10.100	10.201	10.303	10.406
			a) Depot	115	116	117	118	119					
			b) DPPU	53	53	54	54	55					
			c) T.Transit dan Instalasi	13	14	15	16	16					
			d) SPBU.PSPD dan APMS	4473	4483	4493	4503	4513					
		Pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah MoU BPH Migas dengan Pemda 	10 MoU	12 MoU	14 MoU	16 MoU	18 MoU	97.000	97.970	97.920	98.419	98.503
3.	Kegiatan Pengaturan, penetapan dan pengawasan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa	Pengaturan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah peraturan Pengaturan Akses (Access Arrangement) pada Ruas Transmisi dan/ atau Wilayah Jaringan Distribusi Milik Badan Usaha Jumlah Lelang Ruas Transmisi Dan Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) Gas Bumi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus Jumlah Kajian Keekonomian Pembentukan Kota Gas 	3 Jumlah peraturan	4 Jumlah peraturan	5 Jumlah peraturan	6 Jumlah peraturan	7 Jumlah peraturan	3.380	3.414	3.448	3.482	3.517
				2 Ruas 4 WJD	3 Ruas 5 WJD	4 Ruas 6 WJD	5 Ruas 7 WJD	6 Ruas 8 WJD	3.800	3.838	3.876	3.915	3.954
				9 Kota/Kabupaten	10 Kota/Kabupaten	11 Kota/Kabupaten	12 Kota/Kabupaten	13 Kota/Kabupaten	3.300	3.333	3.366	3.400	3.434

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Penetapan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa	- Jumlah penetapan tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang wajar dan efisien untuk pengguna pipa (Shipper) ruas transmisi	2 ruas transmisi	3 ruas transmisi	4 ruas transmisi	5 ruas transmisi	6 ruas transmisi	2.500	2.525	2.550	2.576	2.602
			- Jumlah wilayah untuk penetapan harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan pelanggan kecil	11 Wilayah	12 Wilayah	13 Wilayah	14 Wilayah	15 Wilayah	2.400	2.424	2.408	2.432	2.457
			- Jumlah Pemberian HK Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi	2 Ruas Transmisi 4 WJD	3 Ruas Transmisi 5 WJD	4 Ruas Transmisi 6 WJD	5 Ruas Transmisi 7 WJD	6 Ruas Transmisi 8 WJD	2.400	2.424	2.408	2.432	2.457
		Pengawasan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi untuk RT dan PK	- Jumlah Pelanggaran Penerapan Harga Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil	0 Pelanggaran terhadap Penerapan Harga Gas Bumi untuk RT dan PK	0 Pelanggaran terhadap Penerapan Harga Gas Bumi untuk RT dan PK	0 Pelanggaran terhadap Penerapan Harga Gas Bumi untuk RT dan PK	0 Pelanggaran terhadap Penerapan Harga Gas Bumi untuk RT dan PK	0 Pelanggaran terhadap Penerapan Harga Gas Bumi untuk RT dan PK	2.000	2.020	2.040	2.061	2.081
			- Jumlah Pelanggaran Akun Pengaturan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	0 Pelanggaran Akun Pengaturan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	0 Pelanggaran Akun Pengaturan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	0 Pelanggaran Akun Pengaturan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	0 Pelanggaran Akun Pengaturan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	0 Pelanggaran Akun Pengaturan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	1.300	1.313	1.326	1.339	1.353
			- Jumlah Pelanggaran Penerapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	0 Pelanggaran Penerapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	0 Pelanggaran Penerapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	0 Pelanggaran Penerapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	0 Pelanggaran Penerapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	0 Pelanggaran Penerapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	1.500	1.515	1.530	1.545	1.561
			- Jumlah Pelaksanaan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi dan Jaringan Distribusi Gas Bumi melalui pipa	2 Badan Usaha	3 Badan Usaha	4 Badan Usaha	5 Badan Usaha	6 Badan Usaha	1.920	1.939	1.959	1.978	1.948
XI	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEWAN ENERGI NASIONAL	1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Umum Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Energi Nasional dan fasilitasi kegiatan kelompok	a. Prosentase kelancaran kegiatan Pengelolaan dan penyelenggaraan bidang Personil, Pendanaan, Peralatan dan Dokumen (P3D)	100%	100%	100%	100%	100%	31.366,96	34.541,53	37.995,68	41.795,25	45.974,87
			b. Prosentase kelancaran kegiatan Fasilitasi perumusan Kebijakan Energi Nasional dan penetapan Rencana Umum Energi Nasional, serta penyelenggaraan persidangan	100%	100%	100%	100%	100%	14.837,83	16.282,78	17.911,05	19.702,15	21.672,37
			c. Prosentase kelancaran kegiatan Fasilitasi penetapan langkah-langkah penanggulangan krisis dan darurat energi, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan energi lintas sektor.	100%	100%	100%	100%	100%	4.944,00	5.439,69	5.983,27	6.581,60	7.239,76

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Pengelolaan dan penyelenggaraan bidang Personil, Pendanaan, Peralatan dan Dokumen (P3D)	Meningkatnya pengelolaan dan penyelenggaraan mengenai rencana kerja, anggaran, keuangan dan perbendaharaan, kepegawaian, pengelolaan perkantoran, perlengkapan, penatausahaan serta rumah tangga, secara efisien dan efektif.	1 Prosentasi Kelancaran Pembayaran gaji / honor/ tunjangan pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	16086,7	16.086,70	17.695,37	19.464,91	21.411,40
			2 Prosentasi kelancaran perbendaharaan dan administrasi <u>pengeolaan keuangan.</u>	100%	100%	100%	100%	100%	500,62	850	935	1.028,50	1.131,35
			3 Prosentasi kelancaran penyusunan program dan rencana kerja.	100%	100%	100%	100%	100%	703,649	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.381,00
			4 Prosentasi Kelancaran penyelenggaraan operasional perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	1.147,65	1.491,95	1.881,14	2.069,25	2.276,18
			5 Prosentasi Kelancaran operasional perkantoran dan pimpinan	100%	100%	100%	100%	100%	2.346,83	3.050,89	3.365,98	3.691,58	4.060,73
			6 Prosentasi kelancaran kegiatan informasi dan dokumentasi	100%	100%	100%	100%	100%	777,44	1.010,67	1.111,74	1.222,91	1.345,20
			7 Prosentasi Kelancaran perawatan sarana dan prasarana kantor	100%	100%	100%	100%	100%	420,99	2.977,42	3.275,16	3.602,68	3.962,95
			8 Jumlah Pengadaan tanah dan bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			9 Jumlah Pengadaan Mobil	1 pkt	-	-	-	-	3.300	-	-	-	-
			10 Prosentasi pengembangan dan perawatan jaringan sistem informasi.	100%	100%	100%	100%	100%	463,2	509,52	560,47	616,52	678,27
			11 Jumlah pengadaan SIM Energi Nasional	-	-	-	-	-	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.640,00	2.904,00
			12 Prosentase kelancaran kegiatan pengembangan dan Pembinaan Pegawai, Organisasi, Ketatausahaan di Setien DEN	100%	100%	100%	100%	100%	1.701,08	2.211,41	2432,55	2.675,81	2.943,31
			13 Jumlah rapat koordinasi / kerja / pimpinan	12 Pkt	12 Pkt	12 Pkt	12 Pkt	12 Pkt	316,8	700	770	847	931,7
			14 Prosentasi kelancaran penyelesaian masalah yang berkaitan dengan hukum	100%	100%	100%	100%	100%	-	300	330	363	399,3
			15 Prosentase kelancaran sosialisasi hasil kegiatan DEN	100%	100%	100%	100%	100%	1.147,39	1.300,00	1.430,00	1.573,00	1.730,30
			16 Prosentase Kegiatan evaluasi dan laporan kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	454,6	652,97	718,27	790,09	869,1
2.	Kegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Energi Nasional dan penetapan Rencana Umum Energi Nasional, serta Penyelenggaraan persidangan	1. Tersedianya bahan perancangan kebijakan energi:	1 Jumlah koordinasi dengan stakeholders dalam penyusunan bahan <u>persidangan kebijakan energi</u>	1 LK	1 LK	1 LK	1 LK	1 LK	1.000,00	1.062,13	1.168,34	1.285,18	1.413,70
			2 Jumlah kajian untuk perancangan kebijakan energi;	2 LK	2 LK	2 LK	2 LK	2 LK	2.506,23	2.756,85	3.032,54	3.325,79	3.669,37
			3 Jumlah bahan untuk perancangan <u>kebijakan energi</u>	3 LK	3 LK	3 LK	3 LK	3 LK	2.842,66	3.126,94	3.439,63	3.783,59	4.161,95
			4 Jumlah persidangan anggota Dewan Energi Nasional yang dilaksanakan	1 LK	1 LK	1 LK	1 LK	1 LK	1.045,95	1.150,54	1.265,60	1.392,16	1.531,37
		2. Tersedianya bahan perencanaan energi;	1. Jumlah koordinasi dengan stakeholders dalam penyusunan bahan persidangan perencanaan energi	2 LK	1 LK	1 LK	1 LK	1 LK	-	300	330	363	399,3

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2. Jumlah kajian untuk perencanaan energi nasional dan daerah;	-	1 LK	1 LK	1 LK	1 LK	-	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
			3. Jumlah bahan penyusunan RUEN	1 LK	1 LK	1 LK	1 LK	1 LK	965,709	1.062,28	1.168,51	1.285,00	1.413,89
			4. Jumlah bahan untuk penelaahan neraca energi;	1 LK	1 LK	1 LK	1 LK	1 LK	890,03	979,03	1.076,93	1.184,62	1.303,09
			5. Jumlah bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan penyiapan bahan persidangan perencanaan energi.	-	1 LK	1 LK	1 LK	1 LK	-	200	220	242	266,2
			3. Terlaksananya tugas urusan hubungan masyarakat, keprotokolan dan persidangan Dewan Energi Nasional	1. Jumlah koordinasi kegiatan hubungan masyarakat dan persidangan	2 LK	2 LK	2 LK	2 LK	2.041,10	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50
			2. Jumlah pelaksanaan keprotokolan dan fasilitas sidang	2 LK	2 LK	2 LK	2 LK	2 LK	3.546,15	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
			3. Jumlah pelaksanaan hubungan masyarakat dan kelembagaan	2 LK	2 LK	2 LK	2 LK	2 LK	-	600	660	726	798,6
			4. Jumlah dokumentasi dan bahan persidangan	1 LK	1 LK	1 LK	1 LK	1 LK	-	545	599,5	659,45	725,4
			5. Jumlah notulen dalam persidangan	1 LK	1 LK	1 LK	1 LK	1 LK	-	500	550	605	665,5
			6. Jumlah hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan hubungan masyarakat, keprotokolan dan persidangan.	1 LK	1 LK	1 LK	1 LK	1 LK	-	500	550	605	665,5
		3. Kegiatan Fasilitasi Penetapan Langkah-Langkah Penanggulangan Krisis dan Darurat Energi, serta Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi Lintas Sektor	1 Meningkatkan data dan informasi dalam rangka meng-identifikasi daerah rawan krisis.	1 Jumlah data dan informasi untuk identifikasi daerah krisis.	6 prov.	6 prov.	7 prov.	7 prov.	992,8	1.092,08	1.201,29	1.321,42	1.453,56
				2 Jumlah data dan informasi dalam penyusunan kriteria pedoman penanggulangan krisis dan darurat energi.	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	972,8	1.070,08	1.177,09	1.294,80	1.424,28
				3 Jumlah data dan informasi dalam penyusunan skenario penanggulangan krisis dan darurat energi.	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	992,8	1.092,80	1.201,29	1.321,42	1.453,56
			2 Meningkatkan pengawasan pelaksanaan kebijakan energi	4 Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan KEN.	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	-	200	220	242	266,2
				5. Jumlah laporan pengawasan implementasi EBT	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	992,8	293,37	322,12	354,55	390
				6. Jumlah data dan informasi teknis dalam mendukung pengawasan pelaksanaan kebijakan penyediaan dan pemanfaatan energi	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	992,8	1.092,08	1.201,29	1.321,42	1.453,56
			3 Meningkatkan koordinasi dalam rangka penyusunan perumusan pedoman	7. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	-	200	220	242	266,2
				8. Laporan hasil evaluasi Kegiatan fasilitasi penanggulangan krisis dan darurat energi.	--	1 pkt	1 pkt	1 pkt		200	220	242	266,2
			penanggulangan krisis energi dan darurat energi.	9. Jumlah rapat dalam rangka penyusunan pedoman dan \ rapat koordinasi evaluasi dalam rangka fasilitasi penanggulangan krisis dan darurat energi.		1 pkt	1 pkt	1 pkt	-	200	220	242	266,2